



08 Februari 2024

Yth. - Kepala Bappelitbangda Provinsi NTT
- Kepala Badan Keuangan Daerah Setda
Provinsi NTT

SURAT PENGANTAR

Nomor : 300/56/Satpol PP 1.1

JENIS SURAT	JUMLAH	KETERANGAN
2	3	4
Laporan Bulan Januari Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024	1 (Satu) Buku	Dikirim untuk ditindak lanjuti

Demikian Laporan ini atas kerjasamanya disampaikan terimakasih.

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,



H. CORNELIS WADU, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19650514 199703 1 006

Paraf Hirarki :	
Plh. Sekretaris	h
Kepala Sub Bagisn Program Data dan Evaluasi	g



LAPORAN BULAN JANUARI



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024

Jalan Polisi Militer Nomor 1, Telpon/Fax (0380) 828090

Email : satpolpp_prov.ntt@yahoo.com

Website : www.satpol-pp.nttprov.go.id

KUPANG



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur patut dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena hanya atas penyertaan dan kasih-Nya maka Laporan Bulan Januari 2024 Tahun Anggaran 2024 Satuan Polisi Pamong Praja ini dapat diselesaikan dengan baik.

Tugas, fungsi dan wewenang Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah menjadi sangat penting yang mana terlaksananya berbagai kegiatan pengamanan dan penegakkan prodak hukum. Keadaan yang nyaman, aman dan tenteram diciptakan guna mendukung kinerja Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Untuk itu Laporan Bulan Januari Tahun Anggaran Tahun 2024 ini merupakan bahan, data dan informasi yang disusun secara baik, transparan dan dapat di pertanggungjawabkan kepada publik ataupun kepada pemangku kepentingan yang membutuhkan informasi terkait penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Kupang, 08 Februari 2024

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



Ir. CORNELIS WADU, M.Si

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19650514 1997031 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Maksud dan Tujuan	2
D. Sumber Daya Manusia (SDM)	3
E. Sarana Prasarana	7
BAB II RENCANA KERJA TAHUNAN	12
A. Rencana Kerja Tahunan	12
B. Program dan Kegiatan Tahun 2024	16
C. Realisasi Anggaran	18
BAB III HASIL PELAKSANAAN	22
A. Sekretariat	22
B. Bidang Penegakan Perda dan Peraturan Gubernur	25
C. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	29
D. Bidang Perlindungan Masyarakat	31
E. Bidang Sumber Daya Aparatur	32
BAB IV PERMASALAHAN	34
A. Permasalahan	34
B. Tindak Lanjut	34
BAB V PENUTUP	35
- Laporan Keuangan	36
- Lampiran Foto/Dokumentasi	38

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Tugas Satuan Polisi Pamong Praja yakni membantu Kepala Daerah dalam memelihara Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan masyarakat, dan fungsinya sebagai berikut;

- a) Perumusan kebijakan di bidang Satuan Polisi Pamong Praja;
- b) Pelaksanaan kebijakan di bidang Satuan Polisi Pamong Praja;
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Satuan Polisi Pamong Praja;
- d) Pelaksanaan administrasi di bidang Satuan Polisi Pamong Praja;
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas dan fungsi yang telah dijabarkan diatas kemudian diuraikan dalam program dan kegiatan dimana sesuai amanat Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Satuan Polisi Palong Praja melaksanakan urusan Pemerintahan Wajib berkaitan dengan Pelayanan Dasar dalam arti bahwa pelayanan yang diberikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja berkaitan dengan hak masyarakat yang wajib diperoleh sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur berupaya agar mampu menyampaikan pertanggungjawaban atas seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan. Laporan kinerja bulan Januari 2024 ini menggambarkan kinerja yang telah dilaksanakan, sehingga sangat diharapkan dapat bermanfaat bagi semua komponen yang terlibat dalam

proses menciptakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Serta Perlindungan Masyarakat.

B. Dasar hukum

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, perubahan atas 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja.
8. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
9. Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satpol PP Provinsi NTT.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2024 Nomor : DPA/A.1/1.05.0.00.0.00.01.0000/001/2024.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud.

Sebagai bahan pertanggungjawaban terhadap hasil pelaksanaan program dan kegiatan bulan Januari 2024.

2. Tujuan.

Sebagai bahan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

D. Sumber Daya Manusia (SDM) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 136 orang dengan rincian sebagai berikut:

a. Berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah (Orang)
1	2	3
1.	Kepala Satuan	1
2.	Sekretaris	-
3.	Kepala Bidang	4
4.	Kepala Seksi	7
5.	Kepala Sub Bagian	3
6.	Jabatan Fungsional	63
7.	Jabatan Fungsional Umum	29
8.	Diperbantukan	1
9.	Honorer	29
Jumlah		136



b. Berdasarkan Jenis Kelamin

Jabatan Pegawai	Jenis Kelamin	
	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)
1	2	3
Kepala Satuan	1	
Sekretaris	-	
Kepala Bidang	4	
Kepala Sub Bagian	1	2
Kepala Seksi	5	2
Jabatan Fungsional	55	7
Pelaksana	19	7
Tenaga Honorer	18	11
Total Jumlah	107	29
	136 Orang	

c. Jumlah ASN Berdasarkan Pangkat/Golongan.

Rincian Kepangkatan/Golongan					Jumlah
Kepangkatan PNS	A	B	C	D	
Golongan IV	1	3	-	1	5 orang
Golongan III	21	21	9	11	62 orang
Golongan II	-	-	13	28	41 orang
Golongan I	-	-	-	-	- orang
Jumlah	24	23	23	39	108 orang

d. Berdasarkan Jenjang Pendidikan.

No.	Jenjang Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1.	Pasca Sarjana (S2)	4	-	4
2.	Sarjana (S1)	36	13	49
3.	Diploma (D3)	1	-	1
4.	SMA/SMU	49	5	54
Jumlah		91	18	108

e. Berdasarkan Agama.

No.	Data Keagamaan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1.	Islam	4	-	4
2.	Kristen	81	23	104
3.	Katholik	23	5	28
4.	Hindu	-	-	-
5.	Budha	-	-	-
Jumlah		110	28	136

Selain data kepegawaian diatas terdapat juga data hasil pelaksanaan tugas (perjalanan dinas) yang dilakukan selama bulan Januari 2024 dalam rangka mendukung tugas-tugas Satuan Polisi Pamong Praja

Provinsi Nusa Tenggara Timur serta pemberian cuti dan sanksi bagi Aparatur Sipil Negara Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil antara lain :

1. Cuti tahunan berdasarkan Kepangkatan/Golongan.

No.	Data Cuti Tahunan	Jumlah
1	2	3
1.	Golongan IV	-
2.	Golongan III	4
3.	Golongan II	1
Jumlah		5

2. Data Pegawai yang kena sanksi Kepegawaian :

No.	Data Pegawai Yang Kena Sanksi Kepegawaian	Jumlah
1	2	3
1.	Golongan IV	-
2.	Golongan III	-
3.	Golongan II	-
4.	Banpol	-
5.	Cleaning Service	-
Jumlah		-

Selain melaksanakan tugas Satuan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur juga juga melakukan penjagaan (piket) dalam rangka menjaga aset penting milik pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur adapun aset tersebut antara lain :

1. Pos Kantor Gubernur/Sasando.
2. Pos Rumah Jabatan Gubernur.
3. Rumah Jabatan Wakil Wakil Daerah.
4. Rumah Jabatan Sekretaris Daerah.
5. Posko Praja (Kantor Satpol PP).

Penjagaan pada tempat/lokasi jaga dibagi dalam 3 (tiga) sift, dimana masing-masing sift dibagi waktu selama 1 x 24 jam, mulai jam 08:00 pagi hingga jam 08:00 pagi berikutnya. Jadwal pelaksanaan piket diatur sesuai dengan surat keputusan Kepala satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur 2024 (terlampir).

E Sarana dan Prasarana

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam melaksanakan tugas yang diemban didukung dengan prasarana penunjang operasional kegiatan baik dikantor maupun dilapangan. Sarana Prasarana tersebut dicatat sebagai aset karena proses pengadaannya bersumber dari Dana Alokasi Umum yang dituangkan dalam dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur dari Tahun Anggaran 2003 sampai dengan tahun 2023 sebagai berikut :

Sarana Prasarana Pendukung

No	Jenis Nama Barang	Merk/Type/Bahan	Vol	Satuan	Keadaan Barang	Tahun Pengadaan
1.	Mobil Pic Up (DH 8059 AW	Besi/Toyota Pic Up	1	Unit	B	2003
2	Meja Biro 4 Laci	Arinda/Olympic	1	Buah	B	2008
3	Meja Biro 4 Laci	Arinda/Olympic	1	Buah	B	2008
4	Lap Top/Toshiba	Metal	1	Buah	B	2008
5	Air Condition	Besi /National/ 1Pk	2	Buah	B	2008
6	Air Condition	Besi/Akira	1	Buah	B	2008
7	Mobil Truck (DH 8047 AW)	Besi/Isuzu	1	Unit	B	2009
8	Mobil Minibus (DH 196 AW)	Besi/Toyota Rush	1	Unit	B	2009
9	Lemari 2 Pintu	Kayu Jati	6	Buah	B	2009
10	Lap Top Azer	Metal	1	Buah	B	2009
11	Printer HP/Laser Jet	Metal	1	Buah	B	2009
12	Wireless	Tens	1	Buah	B	2009
13	Megaphone Toa	Besi	1	Buah	B	2009

14	Facsimile	Panasonic	1	Buah	B	2009
15	Televisi	Digitec	1	Buah	B	2009
16	Kain Horrden	Kain	1	Buah	B	2009
17	Lambang Garuda		2	Buah	B	2009
18	Tiang Bendera	Besi	1	Buah	B	2009
19	Papan Nama SKPD	Besi	1	Buah	B	2009
20	Sepeda Motor (DH 2843 AW)	Besi/Honda/ GL 200 R	1	Unit	B	2010
21	Sepeda Motor (DH 2844 AW)	Besi/Honda/ GL 200 R	1	Unit	B	2010
22	Sepeda Motor (DH 2845 AW)	Besi/Honda/ GL 200 R	1	Unit	B	2010
23	Trasmister UHF	Motorola GR500	1			2010
24	Meja Kerja	Kayu	10	Buah	B	2011
25	Kursi Kerja	Kayu	10	Buah	B	2011
26	Lemari 2 Pintu	Kayu Jati	5	Buah	B	2011
27	Komputer PC Simbada	Metal	2	Buah	B	2011
28	Lap Top Toshiba/L745	Metal	2	Buah	B	2011
29	Printer Canon	Metal	5	Buah	B	2011
30	Handy Talkie	Motorola GP2000	5	Buah	B	2011
31	Handy Cam	Sony	1	Buah	B	2011
32	Alat Kejut Listrik	Metal	13	Buah	B	2011
33	Sound System	Rhoad	1	Buah	B	2011
34	Komputer PC Simbada	Metal	2	Buah	B	2012
35	Televisi	Multimax	1	Buah	B	2012
36	Televisi	Sharp	1	Buah	B	2012
37	Scaner	Metal	1	Buah	B	2012
38	Kasur Busa	Bigland	8	Buah	B	2012
39	Layar Proyektor		1	Buah	B	2012
40	Meja Pimpinan 4 Laci	Kayu	1	Buah	B	2013

41	MejaKerja	Kayu	6	Buah	B	2013
42	Lemari 2 Pintu	Kayu Jati	2	Buah	B	2013
43	Komputer PC Simbada	Metal	2	Buah	B	2013
44	Lap Top ToshibaL840	Metal	4	Buah	B	2013
45	Kamera Digital	Canon	1	Buah	B	2013
46	LayarProyektor		1	Buah	B	2013
47	Mobil Double Cabin (DH 8249 AW)	Besi/Toyota Hilux	1	Unit	B	2014
48	Sepeda Motor (DH 3953)	Besi/Kawasaki KLX 15	1	Unit	B	2014
49	Sepeda Motor (DH 3954)	Besi/ Kawasaki KLX 15	1	Unit	B	2014
50	Sepeda	Paragon	6	Buah	B	2014
51	Kursi Sofa	Busa	1	Buah	B	2014
52	Lemari 2 Pintu	Kayu Jati	2	Buah	B	2014
53	Kulkas	Besi/ Polytron	1	Buah	B	2014
54	UPS/Matsunaga	Metal	10	Buah	B	2014
55	Lap Top Lenovo B490	Metal	1	Buah	B	2014
56	Printer Canon MX 397	Metal	1	Buah	B	2014
57	Air Condition/	Besi Polytron	5	Buah	B	2014
58	Wirellesgenggam	Toa-ZR1015	4	Buah	B	2014
59	Televisi	Polytron	5	Buah	B	2014
60	Handy Talkie	Motorola A 12	40	Buah	B	2014
61	Antena, Rig, Repeater	Motorola CDR500	1	Buah	B	2014
62	Mesin Absen Elektronik	Secure	1	Buah	B	2014
63	Mesin Absen Elektronik	Secure	1	Buah	B	2014
64	Mesin Ketik	Brother	1	Buah	B	2014
65	Handy Cam	Sony	1	Buah	B	2014
66	MejaRapat	Kayu Jati	5	Buah	B	2015

67	Meja Biro 4 Laci	Kayu	1	Buah	B	2015
68	Meja 1/2 Biro, 2 Laci	Kayu	15	Buah	B	2015
69	KursiRapat	Busa//Master Chair	20	Buah	B	2015
70	KursiKerja	Kayu	21	Buah	B	2015
71	Lemari 2 Pintu	Kayu Jati	1	Buah	B	2015
72	Tempat Tidur Lipat	Metal	7	Buah	B	2015
73	Lap Top Toshiba C55	Metal	5	Buah	B	2015
74	Lap Top Asus X453MA	Metal	1	Buah	B	2015
75	Printer Canon	Metal	5	Buah	B	2015
76	Tirai/Gorden	Kain	2	Buah	B	2015
77	Mic & Tiang Mic	Shure & NVK	1	Buah	B	2015
78	Kamera Digital	Canon	1	Buah	B	2015
79	Senter	S.W.A.T XML-T6	7	Buah	B	2015
80	Lemari Arsip	Katyu	1	Buah	B	2016
81	Komputer PC	LG	1	Buah	B	2016
82	Printer	Canon MP280	1	Buah	B	2016
83	Air Condition	Polytron	4	Buah	B	2016
84	Dispenser		6	Buah	B	2016
85	Taplak Meja dan Vas Bunga	Kain	1	Buah	B	2017
86	Mesin Potong Rumput	Besi	1	Buah	B	2017
87	Linggis kuku kambing	Besi	5	Buah	B	2017
88	Meja Rapat	Kayu	3	Buah	B	2017
89	Meja 1/2 Biro	Kayu	6	Buah	B	2017
90	Kursi Rapat	Besi	50	Buah	B	2017
91	Lemari 3 Pintu	Kayu	2	Buah	B	2017
92	Dispenser standing	Besi	2	Buah	B	2017
93	Kamera Digital	Besi	1	Buah	B	2017

94	Papan Nama SKPD	Besi	1	Buah	B	2017
95	Komputer (hp AIQ)	Hp	6	Unit	B	2020
96	Printer	(Epson L3110)	6	Unit	B	2020
97	Lemari	Kayu	5	Unit	B	2020
98	Meja Kerja	Kayu	7	Unit	B	2020
99	Meja Rapat	Kayu	2	Unit	B	2020
100	Kursi Kerja	Kayu	7	Unit	B	2020
101	Wirlaes		1	Unit	B	2020
102	Papan Sekretariat PPNS		1	Unit	B	2020
103	Papan Struktur Organisasi 1		1	Unit	B	2020
104	Papan Struktur Organisasi 1		1	Unit	B	2020
105	Papan Visi Misi		1	Unit	B	2020
106	Papan Informasi		1	Unit	B	2020
107	Mesin Potong Rumput		1	Unit	B	2020
108	Alat Pengukur suhu (Termogram)		2	Buah	B	2021 (BTT)
109	Mobil Truck (DH 8279 WA)	Besi/Hino	1	Unit	B	2021
110	Mobil Hilux Double Cabin (DH 19)	Besi/Toyota Hilux	1	Unit	B	2021

BAB II RENCANA KERJA TAHUNAN

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai urusannya dalam bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat memiliki langkah-langkah strategis dalam upaya mendukung program Kepala Daerah, Hal ini dijabarkan dalam rencana Program Kegiatan sebagai berikut :

A. Rencana Kinerja Tahunan.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar dalam Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.

Rencana Kerja Tahunan (RKT) disusun berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur yang Termuat dalam Rencana Strategis (Renstra) tahun 2024-2026 sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026 :

Indikator Kinerja Utama (KU) Tahun 2024
Satuan Polisi pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI	TARGET	FORMULAINDIKATOR
			2023	2024	
1	2	3	4	6	7
1	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1. Presentase meningkatnya pencapaian SPM Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	44,76%	100%	Jumlah kegiatan yang diselesaikan -----x 100 Target
		2. Presentase meningkatnya Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (jumlah Perda dan Perkada yang ditegakan)	3	3	Jumlah Penyelesaian Perda dan Perkada yang ditegakan -----x100 Jumlah Perda dan Perkada
		3. Presentase Pencegahan Daerah Rawan Kebakaran setiap Tahun	-	100 %	Data Potensi Daerah Rawan Kebakaran -----x100 Jumlah Wilayah

Dari tabel Rencana Kinerja Tahunan (RKT) diatas dapat diambil langkah strategis antara lain :

1. Membangun dan mengembangkan sinergitas dengan Instansi/ Unit/ Lembaga Hukum/ Masyarakat/ Stekholder terkait lainnya dalam melakukan pengendalian dalam rangka menciptakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
2. Membangun komunikasi yang intens atau secara berkala dalam melakukan diteksi dini dan cegah dini terhadap segala bentuk kegiatan yang berdampak pada adanya pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Dengan rumusan kebijakan yang telah ditetapkan antara lain :

1. Meningkatkan koordinasi antar Instansi/Unit Kerja/Lembaga Hukum yang tersebar dalam wilayah Nusa Tenggara Timur.
 2. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia.
 3. Pemenuhan sarana prasarana yang berstandar dalam mendukung pelaksanaan kegiatan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- Rencana Kerja

Tabel Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikator (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.2	Urusan Pemerintah an Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat		Prov/kab/Kota		12.863.647.600	APBD Prov. NTT			12.863.647.600
05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkatoran yang Berkualitas	Kota Kupang	100 %	12.863.647.600	APBD Prov. NTT		100 %	12.863.647.600
1.01	Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Tersedianya laporan capaian kinerja PD	Kota Kupang	49 dokumen	38.000.000	APBD Prov. NTT		49 dokumen	38.000.000
1.02	Administrasi keuangan pemerintah daerah	Terbayarnya gaji dan tunjangan	Kota Kupang	4 laporan	11.032.449.000	APBD Prov. NTT		4 laporan	11.032.449.000
1.06	Administrasi umum pemerintah daerah	Tersedianya kebutuhan operasional kantor	Kota Kupang	1 piket	80.000.000	APBD Prov. NTT		1 piket	80.000.000
1.07	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang	Kota Kupang	4 laporan	-			4 laporan	-
1.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Tersedianya kebutuhan jasa operasional kantor	Kota Kupang	4 laporan	968.025.600	APBD Prov. NTT		4 laporan	968.025.600
1.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Terpeliharanya barang milik daerah yang menjadi aset	Kota Kupang	4 laporan	113.600.000	APBD Prov. NTT		4 laporan	113.600.000
05.02	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Presentase meningkatnya pencapaian SPM trantibum	Kota Kupang	100 %	624.600.000	APBD Prov. NTT		Kota Kupang	624.600.000
1.01	Penanganan gangguan ketenteraman ddan ketertiban umum lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi	Terselenggaranya kegiatan penertiban, pengamanan, pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patrol turjawali dalam rangka trantibum	Kabupaten/kota	12 laporan	524.600.000	APBD Prov. NTT	Mengkoordinir layanan SPM	12 laporan	524.600.000
1.02	Penegakan peraturan daerah provinsi dan peraturan gubernur	Presentase meningkatnya pencapaian SPM trantibum (jumlah perda dan perkara yang ditegakan)	Kota Kupang	12 laporan	90.000.000	APBD Prov. NTT	Mengkoordinir layanan SPM	12 laporan	90.000.000
1.03	Pembinaan penyidik pegawai negeri sipil	Kegiatan pengembangan kapasitas PPNS	Kota Kupang	2 laporan	10.000.000	APBD Prov. NTT	Mengkoordinir layanan SPM	2 laporan	10.000.000

05.04	Program Pencegahan Penanggulangan Peyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Presentase pencegahan daerah berpotensi rawan kebakaran	Kota Kupang	100 %	7.000.000			100 %	7.000.000
1.01	Peyelenggaran pemetaan rawan bencana kebakaran	Peta daerah rawan kebakaran	Kota Kupang	4 laporan	7.000.000	APBD Prov. NTT	Mengkoordinir layanan SPM	4 laporan	7.000.000

Dalam implementasi rencana kerja, seluruh program dan kegiatan diarahkan untuk mewujudkan penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dengan mengoptimalkan seluruh bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam bentuk penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sehingga dapat menciptakan kondisi yang aman dan tentram.

B. Program Dan Kegiatan Tahun 2024.

Program dan Kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur seluruh pendanaanya bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan anggaran belanja dan Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024 antara lain :

1. Belanja Daerah/Belanja Operasi.

1. Belanja Daerah/Operasi Rp. 12.863.674.600.- kegiatan ini terdiri dari

1.1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :

1.1.1 Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

1.1.1.1 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

1.1.2 Administrasi Keuangan Pemerintah Daerah.

1.1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

1.1.3 Administrasi Umum Perangkat Daerah Daerah.

1.1.3.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

1.1.3.2 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.

1.1.3.3 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.

1.1.3.4 Penyediaan Bahan Material.

1.1.3.5 Fasilitas Kunjungan tamu.

1.1.3.6 Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.1.3.7 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

- 1.1.4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - 1.1.4.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
 - 1.1.4.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik.
 - 1.1.4.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.1.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - 1.1.5.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
 - 1.1.5.2 Pemeliharaan Aset Tetap lainnya.
 - 1.1.5.3 Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya.

1.2. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- 1.2.1 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi :
 - 1.2.1.1 Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan.
 - 1.2.1.2 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
 - 1.2.1.3 Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi.
 - 1.2.1.4 Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
 - 1.2.1.5 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
 - 1.2.1.6 Pencegahan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini, Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan,

dan Pengawalan.

1.2.1.7 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja Melalui Pelatihan Teknis Termasuk dalam Pelaksanaan tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia.

1.2.1.8 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa.

1.2.2 Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur.

1.2.2.1 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.

1.2.2.2 Pengawasan atas kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.

1.2.2.3 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.

1.2.3 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi.

1.2.3.1 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS

1.3. Program Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran :

1.3.1 Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran.

1.3.1.1 Penyusunan dan Pemutahiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran.

1.3.1.2 Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran

C. Realisasi Anggaran

Dalam periode tahun 2024 tersedia pagu anggaran sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran sebesar Rp. 12.863.674.600.- (dua belas miliar delapan ratus enam puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus rupiah) berikut kondisi atau keadaan kas sampai dengan tanggal 31 Januari 2024 yang telah dipertanggungjawabkan secara

fungsional oleh bendahara Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur pada badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DANKETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	12.863.674.600	1.067.244.029	8.30
01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	12.232.074.600	1.067.244.029	8.30
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Relaisasi Kinerja SKPD	38.000.000	5.976.000	15.73
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.032.449.000	1.028.912.770	9.33
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.032.449.000	1.028.912.770	9.33
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	80.000.000	5.468.800	6.84
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	-	-
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.000.000	1.858.300	7.43
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.000.000	-	-
	- Penyediaan Bahan/Material	20.000.000	2.110.500	10.55
	- Fasilitas Kunjungan Tamu	5.000.000	1.500.000	30.00
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.000.000	-	-
	- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	18.000.000	-	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	986.025.600	12.079.000	1.25
	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.400.000	100.000	7.14
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.000.000	-	-
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	956.625.600	11.979.000	1.25
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	113.600.000	10.957.459	9.65
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	70.000.000	10.957.459	15.65
	- Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	13.600.000	-	-
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.000.000	-	-

02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	624.600.000	3.850.000	0.62
	Penanganan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Provinsi	524.600.000	3.850.000	0.73
	- Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	2.500.000	-	-
	- Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	1.500.000	-	-
	- Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	150.000.000	3.850.000	2.57
	- Penyediaan Layanan Dasar Dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	75.000.000	-	-
	- Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5.000.000	-	-
	- Pencegahan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan masyarakat Melalui deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	165.600.000	-	-
	- Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja Melalui Pelatihan Teknis Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	75.000.000	-	-
	- Penindakan atas Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	50.000.000	-	-
	Penegakan Peraturan daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	90.000.00	-	-
	- Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	5.000.000	-	-
	- Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	70.000.000	-	-
	- Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	15.000.000	-	-

	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	10.000.000	-	-
	- Pengembangan Kapasitas dan Karir PPNS	10.000.000	-	-
03	PROGRAM PENCEGAHAN PENANGGULANGAN PENYELEMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	7.000.000	-	-
	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	7.000.000	-	-
	- Penyusunan dan Pemuktahiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	5.000.000	-	-
	- Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	2.000.000	-	-
	Jumlah Realisasi Januari	1.067.244.029	1.067.244.029	8.30

Kondisi atau keadaan kas per 31 Januari 2024

Pada tabel diatas dapat disampaikan bahwa capaian progres fisik dan keuangan pada Bulan Januari 2024 sebesar Rp. 1.067.244.029.- (satu miliar enam puluh tujuh juta dua ratus empat puluh empat ribu dua puluh sembilan rupiah) atau 8.30 % dari Total pagu sebesar Rp. 12.863.674.600.- (dua belas miliar delapan ratus enam puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus rupiah).

BAB III

HASIL PELAKSANAAN

Dalam Periode sampai dengan bulan Januari 2024 dimana rutin dilaksanakan dengan hasil capaian pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut :

Bidang Kesekretariatan.

1. Sub Bagian Program Data dan Evaluasi.

Capaian pelaksanaan tugas antara lain adalah :

1. Laporan Bulanan Bulan Januari.
2. Menghadiri Upacara Dalam Rangka Hari Kesadaran di Halaman depan Kantor Gubernur NTT.
3. Mengikuti kegiatan Pengimputan Rancangan Akhir Renja Tahun 2025 dalam SIPD-RI secara Zoom Meeting.
4. Mengikuti Rapat Finalisasi dan Validasi Data SPM Triwulan IV (Hotel Aston Kupang).
5. Pengisian Dokumem Penilaian Kinerja PPTP Tahun 2023 (Aplikasi SI-KINERJA).
6. Mengikuti Rapat Percepatan Pelaporan dan Evaluasi SPM Triwulan IV Tahun 2023 (Lt.2 Gedung Sasando).
7. Mengikuti Rapat Konsultasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Program SKALA di NTT Tahun 2024.
8. Mengikuti Kegiatan Konsultasi Publik Ranwal RPJPD 2025-2045 yang diselenggarakan oleh Bappelitbangda secara Live Striming.
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Sub Bagian Keuangan.

1. Mengajukan SPP Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), Tambah Uang (TU) dan Gaji PNS (LS).
2. Menyusun SPJ Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), Tambah Uang (TU) dan Gaji PNS (LS).
3. Membuat laporan SPJ Fungsional dan laporan Pertanggungjawaban atas belanja SKPD.
4. Membuat Laporan Keuangan SKPD.
5. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh atasan.

3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.

- Kepegawaian

No.	Uraian Program / Kegiatan	Jumlah
1	Membuat laporan piket bulan Januari 2024	1 berkas
2	rekapan kenaikan pangkat	1 berkas
3	Scan bahan administrasi usulan kenaikan pangkat	8 ASN
4	Membuat usulan surat cuti pada aplikasi Sip Cuti	4 ASN
5	Scan berkas Satya Lencana Tahun 2024	20 ASN
6	Rekap tangan daftar hadir swerta dokumemntasi tahun 2019-1022	3 berkas
7	Mengikuti rapat pengelolaan pegawai honor/tidak tetap	1 keg
8	Menyelesaikan surat tugas	4 surat
9	Menyelesaikan surat2 koordinasi	7 surat
10	Membuat nota dinas	5 nodis
11	Menyelesaikan SK pelaksana	1 SK
12	Melakukan pembinaan kepada ASN yang indisipliner	1 dok
13	Menyelesaikan administrasi bagi ASN yang indisipliner	1 dok
14	Menyiapkan dokumen pemeriksaan kinerja oleh tim inspektorat	1 dok
15	Menyelesaikan data umum inspektorat	1 dok
16	Menyelesaikan laporan SKM	1 lap
17	Menerima siswa PKL SMKP Online dan mahasiswa magang IPDN	7 orang
18	Meyelesaikan tanggapan hal temuan inspektorat	1 dok
19	Melakukan pengontrolan terhadap peralatan kantor	3 kali
20	Meyelesaikan perjanjian kerja perubahan tahun 2023	1 dok
21	Mengurus berkas usulan Satya Lencana X dan XX	1 dok
22	Membuat pak konfersi pejabat fungsional	25 berkas
23	Memeriksa pak integrasi	22 berkas
24	Membuat dafrat riwayat hidup penerima satya lencana	35 berkas
25	Memeriksa dokumen usulan kenaikan pangkat periode februari 2024	23 orang
26	Mengupload dalam system kenaikan pangkat	23 orang
27	Menyelesaikan kelengkapan berkas usulan pangkat	22 orang
28	Mengumpulkan berkas kenaikan pangkat bulan april 2024	8 orang

29	Memeriksa berkas kelengkapan kenaikan pangkat periode 2024	8 orang
----	--	---------

- Umum

No.	U r a i a n	Jumlah
1.	Jumlah Surat Masuk bulan Januari 2024	47 surat
2.	Jumlah Surat Keluar bulan Januari 2024	67 surat
3.	Jumlah undangan yang masuk bulan Januari 2024	15 surat

- Perlengkapan

Uraian Program/Kegiatan	Jumlah/ Keterangan
Mengatur Cleaning Service untuk membersihkan ruang kantor	Setiap Hari

**A. Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
Bulan Januari 2024.
Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**

KEGIATAN PENANGANAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA
DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI

No	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa	Ket
			Rp	%		
1	Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum lintas daerah Kabupaten/Kota dan I (satu) daerah Provinsi	175.000.000.-		-	175.000.000.-	-

1. Sub Kegiatan : Sosialisasi Penegakan Perda dan Pergub

No	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa	Ket
			Rp	%		
1	Belanja Nakanan dan Minuman Rapat Sosialisasi Penegakan Perda dan Pergub	5.000.000.-	-	-	5.000.000.-	-
	Jumlah				5.000.000.-	-

2. Sub Kegiatan : Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Perda dan Pergub “Operasi DBHCHT (Rokok Ilegal)

No	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa	Ket
			Rp	%		
1	Belanja Nakanan dan Minuman Rapat Sosialisasi Penegakan Perda dan Pergub	5.000.000.-	-	-	5.000.000.-	-
	Jumlah				5.000.000.-	-

3. Sub Kegiatan : Penyediaan Layanan Dasar Dalam Rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada

No	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa	Ket
			Rp	%		
1	Belanja Bahan Pakai Habis	31.572.00.-	-	-	31.572.00.-	-
2	Belanja Jasa Kantor	15.300.000.-	-	-	15.300.000.-	
3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	28.128.000.-	-	-	28.128.000.-	
	Jumlah				75.000.000.-	-

4. Sub Kegiatan : Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur sesuai SOP

No	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa	Ket
			Rp	%		
1	Belanja Bahan untuk kantor kegiatan ATK	40.000.-	-	-	40.000.-	-
2	Belanja Perjalanan Jasa Kantor	14.590.000.-	-	-	14.590.000.-	
	Jumlah				15.000.000.-	-

5. Sub Kegiatan : Pengembangan Kapasitas dan Karir PPNS

No	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa	Ket
			Rp	%		
1	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak	400.000.-	-	-	31.572.00.-	-
2	Belanja makan minum peserta rapat	3.600.000.-	-	-	15.300.000.-	
3	Belanja perjalanan dlam kota (transportasi peserta rapat teknis PPNS)	6.000.000.-	-	-	28.128.000	
	Jumlah				75.000.000.-	-

KEGIATAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DAN PERATURAN GUBERNUR
MELALUI KEGIATAN PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENINDAKAN

No	Tanggal	Kegiatan	Tempat	Jumlah yang Dibuna/Diawasi (orang)	Jumlah yang Ditindak (orang)	Ket
1	29 Januari 2024	Melakukan pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan perda dan perkara serta melakukan pembinaan kepada anggota turjawali di 5 pos piket turjawali	Posko Praja, Pos Rj Gubernur, Pos Rj Wagub, Pos Rj Sekda, Pos Sasando	15 orang		-
2	31 Januari 2024	Melakukan pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan perda dan perkara serta melakukan pembinaan kepada anggota turjawali di 5 pos piket turjawali	Posko Praja, Pos Rj Gubernur, Pos Rj Wagub, Pos Rj Sekda, Pos Sasando	15 orang		
3	29 Januari 2024	Melakukan pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Perda dan Pergub serta memberikan pembinaan kepada pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di jalan Polisi Militer Kupang Memberikan surat pernyataan relokasi sementara kepada 19 orang PKL	Jalan Polisi Militer	19 orang		

PENINDAKAN ATAS GANGGUAN TRANTIBUM BERDASARKAN PERDA/PERKADA MELALUI PENERTIBAN DAN PENANGANAN AKSI UNJUK RASA DAN KERUSUKAN MASSA

No	Tanggal	Kegiatan	Tempat	Jumlah yang Dibuna/Diawasi (orang)	Jumlah yang Ditindak (orang)	Ket
1						

KEGIATAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DAN PERATURAN GUBERNUR PENGADUAN MASYARAKAT

No	Tanggal	No Surat/Tgl. Surat Masuk/Hal	Isi laporan Pengaduan	Tindak Lanjut Jumlah yang Ditindak (orang)	Ket
1	12 Januari 2024	BU.300.1/01/BU 1.3/2024 09 Januari 2024 Penertiban Pedagang Kali Lima	Menertibkan dengan membangun koordinasi bersama satpol PP Kota Kupang untuk mengosongkan area di samping kanan pagar Kantor Gubernur NTT, mengembalikan fungsi trotoar sebagai area pejalan kaki sesuai Perdda Kota Kupang Nomor 28 Tahun 2022	1. Disposisi yaitu siapkan anggota untuk proses penertiban 2. Menindak lanjuti pengaduan masyarakat melalui penanganan atas pelanggaran perda ddan pergub pada tanggal 15 Januari 2024, yaitu melakukan tidakan presentif dan persuasive dengan melakukan personal dan memberikan himbuan kepada PKL agar dapat mengosongkan area samping kanan kantor Gubernur NTT dan bersedia direlokasi untuk berjualan di jalan Polisi Militer (depan Kantor Bappelitbangda Prov. NTT)	
				Tanggal 16 Januari 2024 membantu proses relokasi salah seorang pedagang kaki lima atas nama Her Soru untuk berjualan di Jalan Polisi Militer (depan Kantor Bappelitbangda Prov. NTT)	
				Tanggal 24 Januari 2024 memerikan surat pernyataan kepada para PKL sebanyak 3 orang untuk segera mengosongkan area samping kanan kantor Gubernur NTT, 2 orang PKL atas nama Jay dan Yustina Tamonob bersedia untuk menandatangani surat pernyataan sedangkan 1 orang PKL atas nama Yakobus Viktor Bata tidak bersedia menandatangani surat pernyataan tetapi bersedia untuk dipindhkan	
2	12 Januari 2024	Perindag 012/07/sek/24 04 Jabuari 2024 Permintaan Pengosongan Rumah	Surat pengaduan masyarakat terkait pemberitahuan sebanyak dua kali untuk segera melunasi tunggakan sewa rumah sebesar Rp. 3.600.000.- namun tidk pernah mengindahkan pemeberitahuan tersebut, sehingga sdr. Abel Klaping untuk segera mengosongkan rumah dinas tersebut paling lambat 15 Januari 2024 karena rumah tersebut akan segera ditempati oleh ASN aktif, namun jika sampai batas waktu yang ditentukan saudara belum mengosongkan rumah tersebut maka Pemprov. NTT akan melakukan upaya penertiban sesuai dengan aturan yang berlaku	1. Disposisi : Tindak lanjut dan Koordinasi dengan Disperindah Provinsi NTT. 2. Melakukan koordinasi penanganan atas pelanggaran Perda/Pergub bersama dengan Sekretaris Disperindag Prov. NTT dalam hal inni Ibu Verolience E. Fonay, ST, MM pad hari senin, tanggal 22 Januari 2024 3. Hasil koordinasi : ssampai dengan tanggal 15 januari 2024, rumah belum dikosongkan dan masih ada tunggakan biaya sewa rumah dinas sebesar Rp. 3.600.000.- Disperindak akan bersurat ke Badan Pendapatan dan Aset Provinsi NTT untuk proses selanjutnya	

DATA PELANGGAR PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN GUBERNUR

No	No Surat/Tgl. Surat Masuk/Hal	Pelanggar Perda/Pergub	Perda/Pergub yang dilanggara	Tindak Lanjut	Ket
1	BU.300.1/01/BU 1.3/2024 09 Januari 2024 Penertiban Pedagang Kali Lima	PKL atas nama Her Soru, yakobus Viktor Bata, Jay dan Yusmina Tamonob yang berjualan di trotoar jalan pada samping kanan Kantor Gubernur NTT	- Perda Prov. NTT No. 02 Tahun 2019 yaitu “tertib Jalan Provinsi dan angkutan jalan Paal 15 tentang menggunakan bahu jalan tidak sesuai dengan fungsinya (berjualan di bahu jalan) Tertib tempat usaha dan usaha tertentu paragraph 7 pasal 40 tentang 1) setiap orang dilarang berdagang berusaha di bagian jalan/trotoar halte, jembatan penyebrangan, jalur hijau,taman dan tempat umum lainnya kecuali tempat tertentu yang di tetapkan pejabat yang berwenang. - Perda Kota Kupang no. 28 Tahun 2022 yaitu fungsi trotoar sebagai pejalan kaki	- Melakukan pembinaan melalui tindkan presentif dan persuasive yaitu melakukan pendekatan personal dan melakukan himbauan agar masyarakat dapat menaati Perda dan Pergub demi mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat - Membentu PKL agar dapa mengosongkan area disamping kanan pagar kantor Gubernur NTT dan mengembalikan fungsi trotoar sebagai area pejalan kaki	
2	01/207/sek/2024 04 Januari 2024 Permintaan Pengosongan Rumah Dinas	Abial Klaping	- Perda NTT No. 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah - Pergub NTT No. 0211A tentang perubahan ketiga atas retrebusi izin trayek, retrebusi jasa umum dan retrebusi jasa usaha	Melakukan koordinasi atas pelanggaran Perda/Pergub dengan Disperindag Prov. NTT	

B. Ketenteraman dan KetertibanUmum.

Bulan Januari 2024

No	Jenis Pengamanan	Jumlah Pengamanan		Masalah	Pemecahan Masalah	Instansi Terkait	Keterangan
		Lokasi Kegiatan	Bulan				
1	2	3	4	6	7	8	9
01.	Melakukan pengamanan deteksi dini cegah dini gangguan trantibum dalam rangka kegiatan pemeriksaan kesehatan jiwa/rohani bagi para pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) jumlah : 1000 orang	Rumah sakut jiwa Naimata Kota Kupang	4 x kegiatan 3-6 Januari 2024	Adanya pegawai/peserta P3K yang tidak tertib (antrian mengurus administrasi)	Berhasil mengatur dan mengamankan kegiatan dengan baik	RSJ Naimata	11 orang al. Kasat, Kabid Tibum, Kasi Ops, HK dan anggota Pol PP
02.	Mengikuti kegiatan apel gelar pasukan dalam rangka siaga bencana Tahun 2024	Polda NTT	1 x kegiatan 4 Januari 2024	-	-	Polda dan Istensi terkait	25 orang al. Kasat, Kabid, Kasi dan anggota
03.	Melakukan pengamanan deteksi dini cegah dini gangguan trantibum dalam rangka pemeriksaan kesehatan jiwa/rohani bagi para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Jumlah 515 orang	Rumah sakut jiwa Naimata Kota Kupang	3 x kegiatan 8-10 Januari 2024	Adanya pegawai/peserta P3K yang tidak tertib (antrian mengurus administrasi)	Berhasil mengatur dan mengamankan kegiatan dengan baik	RSJ Naimata	11 orang al. Kasat, Kabid Tibum, Kasi Ops, HK dan anggota Pol PP
04.	Melakukan pengamanan dalam rangka rapat paropurna	Kantor DPRD Prov. NTT	8 x kegiatan 11 Januari 2024	-	-	Instansi terkait	Kabid dan Kaasi Ops dan Kasi HK
05.	Melakukan himbauan dan tindakan persuasive bagi pedagang kaki lima yang berjualan di samping kantor gubernur NTT	Jalan Lalamentik dan Polisi Militer	1 x kegiatan 15-16 Januari 2024	-	-	-	15 orang al. Kasat, Kabid Gakda, Tibum, Kasi Ops, HK, P2, P3 dan anggota Pol PP
06.	Melakukan pengamanan dan mengikuti apel kesadaran	Depan Kantor Gubernur NTT	1 x kegiatan 17 Januari 2024	-	-	OPD Lingkup Pemprov. NTT	10 orang al. Kasat, Kabid, Kasi dan anggota
07	Melakukan pengamanan dalam rangka kegiatan jumpa PERS	Rumah Jabatan Gubernur dan Komimfo	1 x kegiatan 22 Januari 2024	-	-	Komimfo	13 orang al. Kasat, Kabid, Kasi dan anggota

08	Melakukan himbauan dan tindakan persuasive bagi pedagang kaki lima yang berjualan disamping Kantor Gubernur	Jalan Lalamentik dan Polisi Militer	2 x kegiatan 24-25 Januari 2024	gangguan trantibum berupa kebersihan dan kemacetan lalu lintas	-	-	15 orang al. Kasat, Kabid, gakda, Tibum, Kasi Ops, HK, P2, P3 dan anggota Pol PP
09	Mengikuti pembinaan Rohani secara virtual dari 4 tokoh agama	Aula Sat Pol PP (secara Virtual)	1 x kegiatan 26 Januari 2024	-	-	BKD Prov. NTT	Seluruh ASN Sat Pol PP Prov. NTT
10	Melakukan tindakan non yustisi dan mencegah gangguan trantibum bagi ASN pada jam dinas	Dinas Peternakan Prov. NTT	1 x kegiatan 26 Januari 2024	-	-	Dinas Peternakan Prov. NTT	15 orang al. KASAT, Kabid, Kasi dan anggota
11	Mengikuti rapat bersama terkait aset milik Pemprov. NTT	Ruang Rapat BPAD Prov. NTT lantai I Gedung Sasando	1 x kegiatan 31 Januari 2024	Adanya masyarakat yang mengklaim aset Pemprov NTT	-	BPAD Prov. NTT	Kabid,dan Kasi Ops dan HK
12	Melakukan penjagaan dan pengamanan aset milik pemerintah Provinsi NTT	Kantor Gubernur sasando, Rujab Gubernur, Rujab Wagub, Rujab Sekda, dan Kantor satpol PP	1 x kegiatan tanggal 31 x 24 Jam	-	-	5 Pos Picket	Jumlah personil. 62 anggota al. 15 danru, 30 anggota piket, 4 anggota patwal dan 13 anggota pengawas/pengontrol

C. Bidang Perlindungan Masyarakat.

- Program : Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- Kegiatan : Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1(satu) Daerah Provinsi
- Sub.Kegiatan : Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Program : Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
- Kegiatan : Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran
- Sub Kegiatan : Penyediaan dan Pemutahiran Infromasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan kebakaran
- Bimtek Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kab/Kota

Kode Rekening	URAIAN	PAGU ANGGARAN RP.	REALISASI KEUANGAN (Rp.)	SISA DANA (Rp.)	Realisasi %	MASALAH	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	7.000.000	-	-	-	-	-
1.05.02.1.01.04	Penyusunan dan Pemuktahiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kabakaran	5.000.000	-	-	-	-	-
	Penyediaan Infirmasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	2.000.000	-	-	-	-	-
	Total Dana Bulan Januari	7.000.000	-	-	-	-	-

D. Bidang Sumber Daya Aparatur.

Seksi Pelatihan Dasar dan Teknis Fungsional & Seksi Kesemaptaan

Program : Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan : Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Sub.Kegiatan : Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Prajadan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuasa Hak Asasi Manusia

No	Nama Kegiatan & Nama Personil Yang Bertugas	Pagu Anggaran Rp.	Realisasi Keuangan Rp	Realisasi Fisik %	Masalah	Solusi	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam Pelaksanaan tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	75.000.000	0	0	0	0	-
	Total Pengeluaran Januari 2024	75.000.000	0	0	0	0	-

Dalam tahun 2024 sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMJD) 2024-2026, program pencegahan, penanggulangan, Penyelamatan kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran merupakan Program Urusan. Berikut data personil pemadam kebakaran pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur :

Data Pemadam Kebakaran Di Provinsi NTT

No.	Nama kabupaten/Kota	JumlahPersonil	Keterangan
1.	Kota Kupang	2.410	Dalam struktur Organisasi Sat. PolPP Kota Kupang tidak terakomodir Bidang Pemadam Kebakaran karena telah ada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Kupang
2.	Kabupaten Kupang	2.152	
3.	Kabupaten TTS	2.758	
4.	Kabupaten TTU	1.548	
5.	Kabupaten Belu	1.550	
6.	Kabupaten Malaka	1.340	
7.	Kabupaten Alor	894	
8.	Kabupaten Rote Ndao	630	
9.	Kabupaten Sabu Raijua	276	
10.	Kabupaten Lembata	1.569	
11.	Kabupaten Flores Timur	1.070	
12.	Kabupaten Sikka	1.010	
13.	Kabupaten Ende	1.966	
14.	Kabupaten Ngada	1.018	
15.	Kabupaten Nagekeo	1.386	
16.	Kabupaten Manggarai	1.940	
17.	Kabupaten Manggarai Timur	1.186	
18.	Kabupaten Manggarai Barat	1.616	
19.	Kabupaten Sumba Timur	516	
20.	Kabupaten Sumba Tengah	810	
21.	Kabupaten Sumba Barat	1.816	
22.	Kabupaten Sumba Barat Daya	864	
TOTAL		31.325	

BAB IV

PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT

A. Permasalahan

Kondisi capaian tahun 2023 merupakan catatan bagi pelaksanaan kegiatan ditahun 2024 yang mana lemahnya koordinasi lintas fungsi dan lintas sektor terbatasnya sumber daya dan kondisi fiskal keuangan daerah menjadi factor penghambat

B. Tindak Lanjut.

Dari permasalahan yang sudah diuraikan diatas sangat diharapkan adanya perubahan ditahun 2024 sehingga target dapat capaian dapat berjalan sesuai ekspetasi dalam setiap pelaporan kinerja bulanan

BAB V

PENUTUP

Laporan kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban hasil pelaksanaan program dan kegiatan bulan Januari 2024, semoga apa yang telah disampaikan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur kedepan dalam rangka menciptakan ketenteraman dan ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat.

Akhir kata diucapkan terimakasih kepada semua pihak dalam lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sudah membantu dalam penyusunan laporan ini. Saran dan pendapat masih sangat dibutuhkan bagi kesempurnaan dari laporan ini.

Demikian laporan bulan Januari Tahun 2024 disajikan atas perhatian diucapkan terima kasih.

Kupang, 08 Februari 2024
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Ir. CORNELIS WADU, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19650514 199703 1 006

LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN APBD PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BULAN JANUARI 2024

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	SUM BER DANA	LOKASI KEGIATAN	SASAR AN	KONDISI s/d BULAN SEBELUMNYA					REALISASI BULAN INI	KONDISI s/d BULAN INI					SISA ANGGARAN (Rp)	KET
						TARGET		REALISASI				TARGET		REALISASI				
						(%) FISIK	(%) KEU	Rp	(%) KEU	(%) FISIK		(%) FISIK	(%) KEU	Rp	(%) FISIK	(%) KEU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20
5.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	12.863.674.600				-	-	-	-	-	1.067.244.029			1.067.244.029	8,30	8,30	11.796.430.571	
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	12.232.074.600					-	-	-	-	1.063.394.029		-	1.063.394.029	8,69	8,69	11.168.680.571	
	PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	38.000.000						-			5.976.000	-	-	5.976.000	15,73	15,73	32.024.000	
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	38.000.000	DAU	Kota Kupang	SKPD	-	-	-	-	-	5.976.000	-	-	5.976.000	15,73	15,73	32.024.000	
	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	11.032.449.000						-			1.028.912.770		-	1.028.912.770	9,33	9,33	10.003.536.230	
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.032.449.000	DAU	Kota Kupang	SKPD	-	-	-	-	-	1.028.912.770		-	1.028.912.770	9,33	9,33	10.003.536.230	
	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	80.000.000	DAU		SKPD	-	-	-	-	-	5.468.800		-	5.468.800	6,84	6,84	74.531.200	
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	DAU	Kota Kupang	SKPD	-	-	-	-	-	-		-		-	-	5.000.000	
	- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.000.000	DAU	Kota Kupang	SKPD	-	-	-	-	-	1.858.300		-	1.858.300	7,43	7,43	23.141.700	
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.000.000	DAU	Kota Kupang	SKPD	-	-	-	-	-	-				-	-	2.000.000	
	- Penyediaan Bahan Material	20.000.000	DAU	Kota Kupang	SKPD	-	-	-	-	-	2.110.500		-	2.110.500	10,55	10,55	17.889.500	
	- Fasilitas Kunjungan Tamu	5.000.000	DAU	Kota Kupang	SKPD	-	-	-	-	-	1.500.000		-	1.500.000	30,00	30,00	3.500.000	
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.000.000	DAU	Kota Kupang	SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	5.000.000	
	- Dukungan Pelaksanaan Sistim Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	18.000.000	DAU	Kota Kupang	SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	18.000.000	
	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	968.025.600	DAU		SKPD	-	-	-	-	-	12.079.000		-	12.079.000	1,25	1,25	955.946.600	
	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.400.000	DAU	Kota Kupang	SKPD	-	-	-	-	-	100.000		-	100.000	7,14	7,14	1.300.000	
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.000.000	DAU	Kota Kupang		-	-	-	-	-	-				-	-	10.000.000	
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	956.625.600	DAU	Kota Kupang	SKPD	-	-	-	-	-	11.979.000		-	11.979.000	1,25	1,25	944.646.600	

[illegible]

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	SUM BER DANA	LOKASI KEGIATAN	SASARAN	KONDISI s/d BULAN SEBELUMNYA						REALISASI BULAN INI	KONDISI s/d BULAN INI				SISA ANGGARAN (Rp)	KET		
						TARGET		REALISASI		TARGET			REALISASI		TARGET				REALISASI	
						(%) FISIK	(%) KEU	Rp	(%) KEU	(%) FISIK	(%) FISIK		(%) KEU	Rp	(%) FISIK	(%) KEU			Rp	(%) FISIK
	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	15.000.000	DAU	Kab/Kota													15.000.000			
	PEMBINAAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) PROVINSI	10.000.000															10.000.000			
	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	10.000.000															10.000.000			
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN NON KEBAKARAN	7.000.000	DAU														7.000.000			
	PENYELENGGARAAN PEMETAAN RAWAN BENCANA KEBAKARAN	7.000.000	DAU														7.000.000			
	Penyusunan dan Pemuktahiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	5.000.000	DAU	Kab/Kota													5.000.000			
	Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	2.000.000	DAU	Kota Kupang													2.000.000			
	JUMLAH BELANJA	12.863.674.600										1.067.244.029				1.067.244.029	8,30	11.796.430.571		

INTAH Kupang, 09 Februari 2024

Kupang, 09 Februari 2024

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Nusa Tenggara Timur,





K. CORINELIS WADU, M.Si
PENIBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650514 199703 1 006

LAMPIRAN : DOKUMENTASI LAPORAN BULAN JANUARI 2024



Foto kegiatan Apel Kesiapan dalam Rangka Siaga Penanggulangan Bencana Alam Tahun 2024 di Polda NTT



Foto Anev Kegiatan Tahun 2023 dan Sosialisasi Program Kerja Tahun 2024
Satgas Saber Pungli Provinsi NTT



Foto kegiatan Jumpa Pers dan Media Gethering Penjabat Gubernur NTT
dengan Media Massa tentang Penanganan Stunting, Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem,
Inflasi serta Pemilu 2024 di NTT



Foto kegiatan Rapat di Ruang Kasat Pol PP Provinsi NTT



Foto kegiatan Pembinaan Rohani secara Virtual



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jln. Polisi Militer No. -Telp. (0380)-828090

Email : satpolpp_prov.ntt@yahoo.com

Website : www.satpol-pp.nttprov.go.id

K U P A N G

08 Maret 2024

Yth. - Kepala Bappelitbangda Provinsi NTT
- Kepala Badan Keuangan Daerah Setda
Provinsi NTT

SURAT PENGANTAR

Nomor : 300/180/Satpol PP 1.1

JENIS SURAT	JUMLAH	KETERANGAN
2	3	4
Laporan Bulan Februari Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024	1 (Satu) Buku	Dikirim untuk ditindak lanjuti

Demikian Laporan ini atas kerjasamanya disampaikan terimakasih.

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,


H. CORNELIS WADU, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19650514 199703 1 006

Paraf Hirarki :	
Plh. Sekretaris	
Kepala Sub Bagisn Program Data dan Evaluasi	

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur patut dipanjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena hanya atas penyertaan dan kasih-Nya maka Laporan Bulan Februari 2024 Tahun Anggaran 2024 Satuan Polisi Pamong Praja ini dapat diselesaikan dengan baik.

Tugas, fungsi dan wewenang Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah menjadi sangat penting yang mana terlaksananya berbagai kegiatan pengamanan dan penegakkan prodak hukum. Keadaan yang nyaman, aman dan tenteram diciptakan guna mendukung kinerja Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Untuk itu Laporan Bulan Februari Tahun Anggaran Tahun 2024 ini merupakan bahan, data dan informasi yang disusun secara baik, transparan dan dapat di pertanggungjawabkan kepada publik ataupun kepada pemangku kepentingan yang membutuhkan informasi terkait penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Kupang, 08 Meret 2024

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



Ir. CORNELIS WADU, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19650514 1997031 006



LAPORAN BULAN FEBRUARI



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024

Jalan Polisi Militer Nomor 1, Telpon/Fax (0380) 828090

Email : satpolpp_prov.ntt@yahoo.com

Website : www.satpol-pp.nttprov.go.id

KUPANG



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Maksud dan Tujuan	2
D. Sumber Daya Manusia (SDM)	3
E. Sarana Prasarana	7
BAB II RENCANA KERJA TAHUNAN	12
A. Rencana Kerja Tahunan	12
B. Program dan Kegiatan Tahun 2024	16
C. Realisasi Anggaran	18
BAB III HASIL PELAKSANAAN	22
A. Sekretariat	22
B. Bidang Penegakan Perda dan Peraturan Gubernur	25
C. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	28
D. Bidang Perlindungan Masyarakat	39
E. Bidang Sumber Daya Aparatur	30
BAB IV PERMASALAHAN	32
A. Permasalahan	32
B. Tindak Lanjut	33
BAB V PENUTUP	33
- SK Turjawali	34
- Laporan Keuangan	35
- Lampiran Foto/Dokumentasi	38

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Tugas Satuan Polisi Pamong Praja yakni membantu Kepala Daerah dalam memelihara Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan masyarakat, dan fungsinya sebagai berikut;

- a) Perumusan kebijakan di bidang Satuan Polisi Pamong Praja;
- b) Pelaksanaan kebijakan di bidang Satuan Polisi Pamong Praja;
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Satuan Polisi Pamong Praja;
- d) Pelaksanaan administrasi di bidang Satuan Polisi Pamong Praja;
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas dan fungsi yang telah dijabarkan diatas kemudian diuraikan dalam program dan kegiatan dimana sesuai amanat Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Satuan Polisi Palong Praja melaksanakan urusan Pemerintahan Wajib berkaitan dengan Pelayanan Dasar dalam arti bahwa pelayanan yang diberikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja berkaitan dengan hak masyarakat yang wajib diperoleh sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur berupaya agar mampu menyampaikan pertanggungjawaban atas seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan. Laporan kinerja bulan Februari 2024 ini menggambarkan kinerja yang telah dilaksanakan, sehingga sangat diharapkan dapat bermanfaat bagi semua komponen yang terlibat dalam

proses menciptakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Serta Perlindungan Masyarakat.

B. Dasar hukum

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja.
8. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
9. Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satpol PP Provinsi NTT.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2024 Nomor : DPA/A.1/1.05.0.00.0.00.01.0000/001/2024.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud.

Sebagai bahan pertanggungjawaban terhadap hasil pelaksanaan program dan kegiatan bulan Februari 2024.

2. Tujuan.

Sebagai bahan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

D. Sumber Daya Manusia (SDM) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 136 orang dengan rincian sebagai berikut:

a. Berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah (Orang)
1	2	3
1.	Kepala Satuan	1
2.	Sekretaris	-
3.	Kepala Bidang	4
4.	Kepala Seksi	7
5.	Kepala Sub Bagian	3
6.	Jabatan Fungsional	63
7.	Jabatan Fungsional Umum	29
8.	Diperbantukan	1
9.	Honoror	29
Jumlah		136



b. Berdasarkan Jenis Kelamin

Jabatan Pegawai	Jenis Kelamin	
	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)
1	2	3
Kepala Satuan	1	
Sekretaris	-	
Kepala Bidang	4	
Kepala Sub Bagian	1	2
Kepala Seksi	5	2
Jabatan Fungsional	55	7
Pelaksana	19	7
Tenaga Honorer	18	11
Total Jumlah	107	29
	136 Orang	

c. Jumlah ASN Berdasarkan Pangkat/Golongan.

Rincian Kepangkatan/Golongan					Jumlah
Kepangkatan PNS	A	B	C	D	
Golongan IV	1	3	-	1	5 orang
Golongan III	16	19	12	8	43 orang
Golongan II	-	2	4	39	45 orang
Golongan I	-	-	-	-	- orang
Jumlah	17	24	16	48	105 orang

d. Berdasarkan Jenjang Pendidikan.

No.	Jenjang Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1.	Pasca Sarjana (S2)	4	-	4
2.	Sarjana (S1)	36	13	49
3.	Diploma (D3)	1	-	1
4.	SMA/SMU	49	5	54
Jumlah		91	18	105

e. Berdasarkan Agama.

No.	Data Keagamaan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1.	Islam	4	-	4
2.	Kristen	80	23	103
3.	Katholik	22	5	27
4.	Hindu	-	-	-
5.	Budha	-	-	-
Jumlah		106	28	136

Selain data kepegawaian diatas terdapat juga data hasil pelaksanaan tugas (perjalanan dinas) yang dilakukan selama bulan Februari 2024 dalam rangka mendukung tugas-tugas Satuan Polisi Pamong Praja

Provinsi Nusa Tenggara Timur serta pemberian cuti dan sanksi bagi Aparatur Sipil Negara Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil antara lain :

1. Cuti tahunan berdasarkan Kepangkatan/Golongan.

No.	Data Cuti Tahunan	Jumlah
1	2	3
1.	Golongan IV	-
2.	Golongan III	2
3.	Golongan II	1
Jumlah		3

2. Data Pegawai yang kena sanksi Kepegawaian :

No.	Data Pegawai Yang Kena Sanksi Kepegawaian	Jumlah
1	2	3
1.	Golongan IV	-
2.	Golongan III	-
3.	Golongan II	-
4.	Banpol	-
5.	Cleaning Service	-
Jumlah		-

Selain melaksanakan tugas Satuan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur juga juga melakukan penjagaan (piket) dalam rangka menjaga aset penting milik pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur adapun aset tersebut antara lain :

1. Pos Kantor Gubernur/Sasando.
2. Pos Rumah Jabatan Gubernur.
3. Rumah Jabatan Wakil Wakil Daerah.
4. Rumah Jabatan Sekretaris Daerah.
5. Posko Praja (Kantor Satpol PP).

Penjagaan pada tempat/lokasi jaga dibagi dalam 3 (tiga) sift, dimana masing-masing sift dibagi waktu selama 1 x 24 jam, mulai jam 08:00 pagi hingga jam 08:00 pagi berikutnya. Jadwal pelaksanaan piket diatur sesuai dengan surat keputusan Kepala satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur 2024 (terlampir).

E Sarana dan Prasarana

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam melaksanakan tugas yang diemban didukung dengan prasarana penunjang operasional kegiatan baik dikantor maupun dilapangan. Sarana Prasarana tersebut dicatat sebagai aset karena proses pengadaannya bersumber dari Dana Alokasi Umum yang dituangkan dalam dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur dari Tahun Anggaran 2003 sampai dengan tahun 2023 sebagai berikut :

Sarana Prasarana Pendukung

No	Jenis Nama Barang	Merk/Type/Bahan	Vol	Satuan	Keadaan Barang	Tahun Pengadaan
1.	Mobil Pic Up (DH 8059 AW	Besi/Toyota Pic Up	1	Unit	B	2003
2	Meja Biro 4 Laci	Arinda/Olympic	1	Buah	B	2008
3	Meja Biro 4 Laci	Arinda/Olympic	1	Buah	B	2008
4	Lap Top/Toshiba	Metal	1	Buah	B	2008
5	Air Condition	Besi /National/ 1Pk	2	Buah	B	2008
6	Air Condition	Besi/Akira	1	Buah	B	2008
7	Mobil Truck (DH 8047 AW)	Besi/Isuzu	1	Unit	B	2009
8	Mobil Minibus (DH 196 AW)	Besi/Toyota Rush	1	Unit	B	2009
9	Lemari 2 Pintu	Kayu Jati	6	Buah	B	2009
10	Lap Top Azer	Metal	1	Buah	B	2009
11	Printer HP/Laser Jet	Metal	1	Buah	B	2009
12	Wireless	Tens	1	Buah	B	2009
13	Megaphone Toa	Besi	1	Buah	B	2009

14	Facsimile	Panasonic	1	Buah	B	2009
15	Televisi	Digitec	1	Buah	B	2009
16	Kain Horrden	Kain	1	Buah	B	2009
17	Lambang Garuda		2	Buah	B	2009
18	Tiang Bendera	Besi	1	Buah	B	2009
19	Papan Nama SKPD	Besi	1	Buah	B	2009
20	Sepeda Motor (DH 2843 AW)	Besi/Honda/ GL 200 R	1	Unit	B	2010
21	Sepeda Motor (DH 2844 AW)	Besi/Honda/ GL 200 R	1	Unit	B	2010
22	Sepeda Motor (DH 2845 AW)	Besi/Honda/ GL 200 R	1	Unit	B	2010
23	Trasmister UHF	Motorola GR500	1			2010
24	Meja Kerja	Kayu	10	Buah	B	2011
25	Kursi Kerja	Kayu	10	Buah	B	2011
26	Lemari 2 Pintu	Kayu Jati	5	Buah	B	2011
27	Komputer PC Simbada	Metal	2	Buah	B	2011
28	Lap Top Toshiba/L745	Metal	2	Buah	B	2011
29	Printer Canon	Metal	5	Buah	B	2011
30	Handy Talkie	Motorola GP2000	5	Buah	B	2011
31	Handy Cam	Sony	1	Buah	B	2011
32	Alat Kejut Listrik	Metal	13	Buah	B	2011
33	Sound System	Rhoad	1	Buah	B	2011
34	Komputer PC Simbada	Metal	2	Buah	B	2012
35	Televisi	Multimax	1	Buah	B	2012
36	Televisi	Sharp	1	Buah	B	2012
37	Scaner	Metal	1	Buah	B	2012
38	Kasur Busa	Bigland	8	Buah	B	2012
39	Layar Proyektor		1	Buah	B	2012
40	Meja Pimpinan 4 Laci	Kayu	1	Buah	B	2013

41	MejaKerja	Kayu	6	Buah	B	2013
42	Lemari 2 Pintu	Kayu Jati	2	Buah	B	2013
43	Komputer PC Simbada	Metal	2	Buah	B	2013
44	Lap Top ToshibaL840	Metal	4	Buah	B	2013
45	Kamera Digital	Canon	1	Buah	B	2013
46	LayarProyektor		1	Buah	B	2013
47	Mobil Double Cabin (DH 8249 AW)	Besi/Toyota Hilux	1	Unit	B	2014
48	Sepeda Motor (DH 3953)	Besi/Kawasaki KLX 15	1	Unit	B	2014
49	Sepeda Motor (DH 3954)	Besi/ Kawasaki KLX 15	1	Unit	B	2014
50	Sepeda	Paragon	6	Buah	B	2014
51	Kursi Sofa	Busa	1	Buah	B	2014
52	Lemari 2 Pintu	Kayu Jati	2	Buah	B	2014
53	Kulkas	Besi/ Polytron	1	Buah	B	2014
54	UPS/Matsunaga	Metal	10	Buah	B	2014
55	Lap Top Lenovo B490	Metal	1	Buah	B	2014
56	Printer Canon MX 397	Metal	1	Buah	B	2014
57	Air Condition/	Besi Polytron	5	Buah	B	2014
58	Wirellesgenggam	Toa-ZR1015	4	Buah	B	2014
59	Televisi	Polytron	5	Buah	B	2014
60	Handy Talkie	Motorola A 12	40	Buah	B	2014
61	Antena, Rig, Repeater	Motorola CDR500	1	Buah	B	2014
62	Mesin Absen Elektronik	Secure	1	Buah	B	2014
63	Mesin Absen Elektronik	Secure	1	Buah	B	2014
64	Mesin Ketik	Brother	1	Buah	B	2014
65	Handy Cam	Sony	1	Buah	B	2014
66	MejaRapat	Kayu Jati	5	Buah	B	2015

67	Meja Biro 4 Laci	Kayu	1	Buah	B	2015
68	Meja 1/2 Biro, 2 Laci	Kayu	15	Buah	B	2015
69	KursiRapat	Busa//Master Chair	20	Buah	B	2015
70	KursiKerja	Kayu	21	Buah	B	2015
71	Lemari 2 Pintu	Kayu Jati	1	Buah	B	2015
72	Tempat Tidur Lipat	Metal	7	Buah	B	2015
73	Lap Top Toshiba C55	Metal	5	Buah	B	2015
74	Lap Top Asus X453MA	Metal	1	Buah	B	2015
75	Printer Canon	Metal	5	Buah	B	2015
76	Tirai/Gorden	Kain	2	Buah	B	2015
77	Mic & Tiang Mic	Shure & NVK	1	Buah	B	2015
78	Kamera Digital	Canon	1	Buah	B	2015
79	Senter	S.W.A.T XML-T6	7	Buah	B	2015
80	Lemari Arsip	Katyu	1	Buah	B	2016
81	Komputer PC	LG	1	Buah	B	2016
82	Printer	Canon MP280	1	Buah	B	2016
83	Air Condition	Polytron	4	Buah	B	2016
84	Dispenser		6	Buah	B	2016
85	Taplak Meja dan Vas Bunga	Kain	1	Buah	B	2017
86	Mesin Potong Rumput	Besi	1	Buah	B	2017
87	Linggis kuku kambing	Besi	5	Buah	B	2017
88	Meja Rapat	Kayu	3	Buah	B	2017
89	Meja 1/2 Biro	Kayu	6	Buah	B	2017
90	Kursi Rapat	Besi	50	Buah	B	2017
91	Lemari 3 Pintu	Kayu	2	Buah	B	2017
92	Dispenser standing	Besi	2	Buah	B	2017
93	Kamera Digital	Besi	1	Buah	B	2017

94	Papan Nama SKPD	Besi	1	Buah	B	2017
95	Komputer (hp AIQ)	Hp	6	Unit	B	2020
96	Printer	(Epson L3110)	6	Unit	B	2020
97	Lemari	Kayu	5	Unit	B	2020
98	Meja Kerja	Kayu	7	Unit	B	2020
99	Meja Rapat	Kayu	2	Unit	B	2020
100	Kursi Kerja	Kayu	7	Unit	B	2020
101	Wirlaes		1	Unit	B	2020
102	Papan Sekretariat PPNS		1	Unit	B	2020
103	Papan Struktur Organisasi 1		1	Unit	B	2020
104	Papan Struktur Organisasi 1		1	Unit	B	2020
105	Papan Visi Misi		1	Unit	B	2020
106	Papan Informasi		1	Unit	B	2020
107	Mesin Potong Rumput		1	Unit	B	2020
108	Alat Pengukur suhu (Termogram)		2	Buah	B	2021 (BTT)
109	Mobil Truck (DH 8279 WA)	Besi/Hino	1	Unit	B	2021
110	Mobil Hilux Double Cabin (DH 19)	Besi/Toyota Hilux	1	Unit	B	2021

BAB II

RENCANA KERJA TAHUNAN

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai urusannya dalam bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat memiliki langkah-langkah strategis dalam upaya mendukung program Kepala Daerah, Hal ini dijabarkan dalam rencana Program Kegiatan sebagai berikut :

A. Rencana Kinerja Tahunan.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar dalam Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.

Rencana Kerja Tahunan (RKT) disusun berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur yang Termuat dalam Rencana Strategis (Renstra) tahun 2024-2026 sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026 :

Indikator Kinerja Utama (KU) Tahun 2024
Satuan Polisi pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI	TARGET	FORMULAINDIKATOR
			2023	2024	
1	2	3	4	6	7
1	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1. Presentase meningkatnya pencapaian SPM Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	44,76%	100%	Jumlah kegiatan yang diselesaikan -----x 100 Target
		2. Presentase meningkatnya Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (jumlah Perda dan Perkada yang ditegakan)	3	3	Jumlah Penyelesaian Perda dan Perkada yang ditegakan -----x100 Jumlah Perda dan Perkada
		3. Presentase Pencegahan Daerah Rawan Kebakaran setiap Tahun	-	100 %	Data Potensi Daerah Rawan Kebakaran -----x100 Jumlah Wilayah

Dari tabel Rencana Kinerja Tahunan (RKT) diatas dapat diambil langkah strategis antara lain :

1. Membangun dan mengembangkan sinergitas dengan Instansi/ Unit/ Lembaga Hukum/ Masyarakat/ Stekholder terkait lainnya dalam melakukan pengendalian dalam rangka menciptakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
2. Membangun komunikasi yang intens atau secara berkala dalam melakukan diteksi dini dan cegah dini terhadap segala bentuk kegiatan yang berdampak pada adanya pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Dengan rumusan kebijakan yang telah ditetapkan antara lain :

1. Meningkatkan koordinasi antar Instansi/Unit Kerja/Lembaga Hukum yang tersebar dalam wilayah Nusa Tenggara Timur.
 2. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia.
 3. Pemenuhan sarana prasarana yang berstandar dalam mendukung pelaksanaan kegiatan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- Rencana Kerja

Tabel Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikator (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.2	Urusan Pemerintah an Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat		Prov/kab/Kota		12.863.647.600	APBD Prov. NTT			12.863.647.600
05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkatoran yang Berkualitas	Kota Kupang	100 %	12.863.647.600	APBD Prov. NTT		100 %	12.863.647.600
1.01	Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Tersedianya laporan capaian kinerja PD	Kota Kupang	49 dokumen	38.000.000	APBD Prov. NTT		49 dokumen	38.000.000
1.02	Administrasi keuangan pemerintah daerah	Terbayarnya gaji dan tunjangan	Kota Kupang	4 laporan	11.032.449.000	APBD Prov. NTT		4 laporan	11.032.449.000
1.06	Administrasi umum pemerintah daerah	Tersedianya kebutuhan operasional kantor	Kota Kupang	1 piket	80.000.000	APBD Prov. NTT		1 piket	80.000.000
1.07	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang	Kota Kupang	4 laporan	-			4 laporan	-
1.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Tersedianya kebutuhan jasa operasional kantor	Kota Kupang	4 laporan	968.025.600	APBD Prov. NTT		4 laporan	968.025.600
1.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Terpeliharanya barang milik daerah yang menjadi aset	Kota Kupang	4 laporan	113.600.000	APBD Prov. NTT		4 laporan	113.600.000
05.02	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Presentase meningkatnya pencapaian SPM trantibum	Kota Kupang	100 %	624.600.000	APBD Prov. NTT		Kota Kupang	624.600.000
1.01	Penanganan gangguan ketenteraman ddan ketertiban umum lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi	Terselenggaranya kegiatan penertiban, pengamanan, pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patrol turjawali dalam rangka trantibum	Kabupaten/kota	12 laporan	524.600.000	APBD Prov. NTT	Mengkoordinir layanan SPM	12 laporan	524.600.000
1.02	Penegakan peraturan daerah provinsi dan peraturan gubernur	Presentase meningkatnya pencapaian SPM trantibum (jumlah perda dan perkara yang ditegakan)	Kota Kupang	12 laporan	90.000.000	APBD Prov. NTT	Mengkoordinir layanan SPM	12 laporan	90.000.000
1.03	Pembinaan penyidik pegawai negeri sipil	Kegiatan pengembangan kapasitas PPNS	Kota Kupang	2 laporan	10.000.000	APBD Prov. NTT	Mengkoordinir layanan SPM	2 laporan	10.000.000

05.04	Program Pencegahan Penanggulangan Peyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Presentase pencegahan daerah berpotensi rawan kebakaran	Kota Kupang	100 %	7.000.000			100 %	7.000.000
1.01	Peyelenggaran pemetaan rawan bencana kebakaran	Peta daerah rawan kebakaran	Kota Kupang	4 laporan	7.000.000	APBD Prov. NTT	Mengkoordinir layanan SPM	4 laporan	7.000.000

Dalam implementasi rencana kerja, seluruh program dan kegiatan diarahkan untuk mewujudkan penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dengan mengoptimalkan seluruh bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam bentuk penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sehingga dapat menciptakan kondisi yang aman dan tentram.

B. Program Dan Kegiatan Tahun 2024.

Program dan Kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur seluruh pendanaanya bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan anggaran belanja dan Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024 antara lain :

1. Belanja Daerah/Belanja Operasi.

1. Belanja Daerah/Operasi Rp. 12.863.674.600.- kegiatan ini terdiri dari

1.1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :

1.1.1 Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

1.1.1.1 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

1.1.2 Administrasi Keuangan Pemerintah Daerah.

1.1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

1.1.3 Administrasi Umum Perangkat Daerah Daerah.

1.1.3.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

1.1.3.2 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.

1.1.3.3 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.

1.1.3.4 Penyediaan Bahan Material.

1.1.3.5 Fasilitas Kunjungan tamu.

1.1.3.6 Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.1.3.7 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

- 1.1.4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - 1.1.4.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
 - 1.1.4.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik.
 - 1.1.4.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.1.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - 1.1.5.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
 - 1.1.5.2 Pemeliharaan Aset Tetap lainnya.
 - 1.1.5.3 Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya.

1.2. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- 1.2.1 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi :
 - 1.2.1.1 Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan.
 - 1.2.1.2 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
 - 1.2.1.3 Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi.
 - 1.2.1.4 Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
 - 1.2.1.5 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
 - 1.2.1.6 Pencegahan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini, Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan,

dan Pengawalan.

1.2.1.7 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja Melalui Pelatihan Teknis Termasuk dalam Pelaksanaan tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia.

1.2.1.8 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa.

1.2.2 Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur.

1.2.2.1 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.

1.2.2.2 Pengawasan atas kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.

1.2.2.3 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.

1.2.3 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi.

1.2.3.1 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS

1.3. Program Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran :

1.3.1 Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran.

1.3.1.1 Penyusunan dan Pemutahiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran.

1.3.1.2 Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran

C. Realisasi Anggaran

Dalam periode tahun 2024 tersedia pagu anggaran sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran sebesar Rp. 12.863.674.600.- (dua belas miliar delapan ratus enam puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus rupiah) berikut kondisi atau keadaan kas sampai dengan tanggal 29 Februari 2024 yang telah dipertanggungjawabkan secara

fungsional oleh bendahara Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur pada badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DANKETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	12.863.674.600	1.997.789.645	9.33
01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	12.232.074.600	1.180.889.645	9.65
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Relaisasi Kinerja SKPD	38.000.000	5.967.000	15.73
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.032.449.000	1.035.673.250	9.39
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.032.449.000	1.035.673.250	9.39
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	80.000.000	16.414.117	20.52
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	280.000	5.60-
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.000.000	8.633.300	34.53
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.000.000	-	-
	- Penyediaan Bahan/Material	20.000.000	4.830.317	24.15
	- Fasilitas Kunjungan Tamu	5.000.000	2.670.500	53.41
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.000.000	-	-
	- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	18.000.000	-	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	986.025.600	87.990.091	9.09
	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.400.000	100.000	7.14
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.000.000	-	-
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	956.625.600	87.890.091	9.19
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	113.600.000	34.836.187	30.67
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	70.000.000	32.037.867	45.77
	- Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	13.600.000	1.850.000	16.60
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.000.000	948.500	3.16

02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	624.600.000	18.900.000	3.03
	Penanganan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Provinsi	524.600.000	18.900.000	3.60
	- Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	2.500.000	-	-
	- Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	1.500.000	-	-
	- Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	150.000.000	3.850.000	2.57
	- Penyediaan Layanan Dasar Dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	75.000.000	-	-
	- Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5.000.000	-	-
	- Pencegahan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan masyarakat Melalui deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	165.600.000	13.300.000	8.03
	- Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja Melalui Pelatihan Teknis Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	75.000.000	-	-
	- Penindakan atas Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	50.000.000	1.750.000	3.50
	Penegakan Peraturan daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	90.000.00	-	-
	- Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	5.000.000	-	-
	- Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	70.000.000	-	-
	- Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	15.000.000	-	-

	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	10.000.000	-	-
	- Pengembangan Kapasitas dan Karir PPNS	10.000.000	-	-
03	PROGRAM PENCEGAHAN PENANGGULANGAN PENYELEMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	7.000.000	-	-
	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	7.000.000	-	-
	- Penyusunan dan Pemuktahiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	5.000.000	-	-
	- Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	2.000.000	-	-
	Jumlah Realisasi Januari	12.863.674.600	1.199.789.654	9.33

Kondisi atau keadaan kas per 31 Maret 2024

Pada tabel diatas dapat disampaikan bahwa capaian progres fisik dan keuangan pada Bulan Februari 2024 sebesar Rp. 1.199.789.654.- (satu miliar seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh ribu enam ratus empat rupiah) atau 9.33 % dari Total pagu sebesar Rp. 12.863.674.600.- (dua belas miliar delapan ratus enam puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus rupiah).

BAB III

HASIL PELAKSANAAN

Dalam Periode sampai dengan bulan Februari 2024 dimana rutin dilaksanakan dengan hasil capaian pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut :

Bidang Kesekretariatan.

1. Sub Bagian Program Data dan Evaluasi.

Capaian pelaksanaan tugas antara lain adalah :

1. Laporan Bulanan Bulan Februari.
2. Laporan Emonef Bulan Februari.
3. Mengikuti Desk Perangkat Daerah dan Permintaan Pengisian Indikator.
4. Mengikuti Sosialisasi Pedoman Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Mental.
5. Mengikuti Pelaksanaan Data Pencapaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Sub Bagian Keuangan.

1. Mengajukan SPP Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), Tambah Uang (TU) dan Gaji PNS (LS).
2. Menyusun SPJ Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), Tambah Uang (TU) dan Gaji PNS (LS).
3. Membuat laporan SPJ Fungsional dan laporan Pertanggungjawaban atas belanja SKPD.
4. Membuat Laporan Keuangan SKPD.
5. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh atasan.

3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.

- Kepegawaian

No.	Uraian Program / Kegiatan	Jumlah
1	Membuat rekapan piket bulan Februari Tahun 2024	1 berkas
2	Membuat rekapan kenaikan pangkat	1 berkas
3	Scan bahan administrasi usulan kenaikan pangkat ASN	8 ASN
4	Membuat usulan surat cuti pada aplikasi sip cut	4 ASN
5	Membuat usulan surat usulan Satya Lencana Tahun 2024	20 ASN
6	Menyelesaikan rekapitulasi data kendaraan ASN untuk tertip pajak	1 dok
7	Memproses SK kenaikan berkala	15 ASN
8	Memproses rekapan honor untuk pengajuan gaji honor	1 dok
9	Merekap daftar ASN yang terlambat	1 dok
10	Menyelesaikan administrasi untuk kenaikan pangkat (surat pak dan integrasi)	2 surat
11	Menyelesaikan surat untuk HUT Pol PP	3 surat
12	Membuat surat koordinasi tindak lanjut dan kepegawaian lainnya	7 naskah
13	Penyelesaian SK pengelola keuangan, SK TIM Angkat, SK pengelola kepegawaian	3 dok
14	Mengikuti rapat percepatan tindak lanjut LHP dan rapat evaluasi	2 keg
15	Menyelesaikan rekapan kehadiran ASN Tahun 2023	1 dok
16	Menyelesaikan rekapan absen bulan Januari Tahun anggaran 2024	1 dok
17	Mendampingi KASAT menerima tamu dan dinas/Instansi terkait/kabupaten/Kota	4 keg
18	Membagi jatah beras ASN bulan Februari 2024	109 ASN
19	Membuat SK berkala bulan Pebruari	9 orang

- Umum

No.	U r a i a n	Jumlah
1.	Jumlah Surat Masuk bulan Februari 2024	31 surat
2.	Jumlah Surat Keluar bulan Februari 2024	37 surat
3.	Jumlah undangan yang masuk bulan Februari 2024	5 surat

- Perlengkapan

Uraian Program/Kegiatan	Jumlah/ Keterangan
Mengatur Cleaning Service untuk membersihkan ruang kantor	Setiap Hari

**A. Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
Bulan Februari 2024.**

KEGIATAN PENANGANAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA
DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI

No	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa	Ket
			Rp	%		
1	Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum lintas daerah Kabupaten/Kota dan I (satu) daerah Provinsi	175.000.000.-		-	175.000.000.-	-

1. Sub Kegiatan : Sosialisasi Penegakan Perda dan Pergub

No	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa	Ket
			Rp	%		
1	Belanja Nakanan dan Minuman Rapat Sosialisasi Penegakan Perda dan Pergub	5.000.000.-	-	-	5.000.000.-	-
	Jumlah				5.000.000.-	-

2. Sub Kegiatan : Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Perda dan Pergub “Operasi DBHCHT (Rokok Ilegal)”

No	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa	Ket
			Rp	%		
1	Belanja Nakanan dan Minuman Rapat Sosialisasi Penegakan Perda dan Pergub	5.000.000.-	-	-	5.000.000.-	-
	Jumlah				5.000.000.-	-

3. Sub Kegiatan : Penyediaan Layanan Dasar Dalam Rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada

No	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa	Ket
			Rp	%		
1	Belanja Bahan Pakai Habis	31.572.00.-	-	-	31.572.00.-	-
2	Belanja Jasa Kantor	15.300.000.-	-	-	15.300.000.-	
3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	28.128.000.-	-	-	28.128.000.-	
	Jumlah				75.000.000.-	-

4. Sub Kegiatan : Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur sesuai SOP

No	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa	Ket
			Rp	%		
1	Belanja Bahan untuk kantor kegiatan ATK	40.000.-	-	-	40.000.-	-
2	Belanja Perjalanan Jasa Kantor	14.590.000.-	-	-	14.590.000.-	
	Jumlah				15.000.000.-	-

5. Sub Kegiatan : Pengembangan Kapasitas dan Karir PPNS

No	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa	Ket
			Rp	%		
1	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak	400.000.-	-	-	31.572.00.-	-
2	Belanja makan minum peserta rapat	3.600.000.-	-	-	15.300.000.-	
3	Belanja perjalanan dlam kota (transportasi peserta rapat teknis PPNS)	6.000.000.-	-	-	28.128.000	
	Jumlah				75.000.000.-	-

KEGIATAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DAN PERATURAN GUBERNUR
MELALUI KEGIATAN PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENINDAKAN

No	Tanggal	Kegiatan	Tempat	Jumlah yang Dibuna/Diawasi (orang)	Jumlah yang Ditindak (orang)	Ket
1	27 Februari 2024	Melakukan pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan perda dan perkara serta melakukan pembinaan kepada anggota turjawali di 5 pos piket turjawali	Posko Praja, Pos Rj Gubernur, Pos Rj Wagub, Pos Rj Sekda, Pos Sasando	15	0	-
2	28 Februari 2024	Melakukan pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan perda dan perkara serta melakukan pembinaan kepada anggota turjawali di 5 pos piket turjawali	Posko Praja, Pos Rj Gubernur, Pos Rj Wagub, Pos Rj Sekda, Pos Sasando	15	0	
3	29 Februari 2024	Melakukan pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan perda dan perkara serta melakukan pembinaan kepada anggota turjawali di 5 pos piket turjawali	Posko Praja, Pos Rj Gubernur, Pos Rj Wagub, Pos Rj Sekda, Pos Sasando	15	0	
4	21 Februari 2024	Melakukan penanganan atas pelanggaran Perda/Perkada (membongkar dan memindahkan lapak PKL	Dari samping kanan kanotor Gubernur ke jalan Polisi Militer	2	0	
5	27 Februari 2024	Melakukan pengisian quisioner survey kepuasan masyarakat (SKM) dsan pengisian form perkiraan rekapitulasi jumlah warga Negara yang berada dalam radius 0-50 meter di lokasi penegakan Perda/Perkada	Jln. W.J. Lamentik (tempat parker UPTD PUPR Cipta Karya)	2	0	

PENINDAKAN ATAS GANGGUAN TRANTIBUM BERDASARKAN PERDA/PERKADA MELALUI PENERTIBAN DAN PENANGANAN AKSI UNJUK
RASA DAN KERUSUKAN MASSA

No	Tanggal	Kegiatan	Tempat	Jumlah yang Dibuna/Diawasi (orang)	Jumlah yang Ditindak (orang)	Ket
1						

KEGIATAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DAN PERATURAN GUBERNUR
PENGADUAN MASYARAKAT

No	Tanggal	No Surat/Tgl. Surat Masuk/Hal	Isi laporan Pengaduan	Tindak Lanjut Jumlah yang Ditindak (orang)	Ket
1	12 Februari 2024	BU.000/2.3.2/56/DP4D/24 27 Februari 2024 Surat teguran penghuni rumah dinas milik Pemprov. NTT atas nama John Patrick Saekoko	saudara John Patrick Saekoko agar segera melaksanakan kewajiban (melunasi tunggakan sewa) sebesar Rp. 7.700.000.- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah), apabila tidak memenuhi kewajiban maka saudara di minta segera mengosongkan Rumah dinas milik Pemprov. NTT yang selama ini ditempati dan tudak menghapus kewajiban tunggakan saudara (tunggakan sewa) selaku penghuni rumah dinas	Koordinasi tindak lanjut	

DATA PELANGGAR PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN GUBERNUR

No	No Surat/Tgl. Surat Masuk/Hal	Pelanggar Perda/Pergub	Perda/Pergub yang dilanggara	Tindak Lanjut	Ket
1	BU.000/2.3.2/56/BP4D/2024 27 Februari 2024 Sura teguran penghuni rumah dinas milik Pemprov. NTT atas nama John Patrick Saekoko	John Patrick Saekoko	Perda NTT No. 12 Tahun 2012 tentang pengelolaan barang milik daerah, pasal 1 ayat 25 disebutkan bahwa sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai	Koordinasi	

B. Ketenteraman dan KetertibanUmum.

Bulan Februari 2024

No	Jenis Pengamanan	Jumlah Pengamanan		Masalah	Pemecahan Masalah	Instansi Terkait	Keterangan
		Lokasi Kegiatan	Bulan				
1	2	3	4	6	7	8	9
01.	Melakukan patrol pemantauan (operasi mantap brata turangga) dalam rangka pengamanan pemilu bersama Polda NTT	Kota Kupang	3 x kegiatan 11-13 Februari 2024	-	-	-	11 orang al. Kasat, Kabid Tibum, Kasi Ops, HK dan anggota Pol PP
02.	Melakukan pengamanan dan pengawasan Penjabat Gubernur NTT dlam rangka patrol pemantauan Trantibum pencoblosan pemilu Tahun 2023	Kota Kupang	1 x kegiatan 44 Februari 2024	-	-	-	8 orang al. Kasat, Kabid, Kasi dan anggota
03.	Melakukan pengamanan kegiatan gladi kantor dan gladi bersih dalam rangka pelantikan penjabat Bupati Rote Ndao, TTS dan Manggarai Timur	Aula El Tari	1 x kegiatan 15 Januari 2024	-	-	Biro Pem dan BKD Prov. NTT	15 orang al. Kasat, Kabid Tibum, Kasi Ops, HK dan anggota Pol PP
04.	Melakukan pengamanan kegiatan pelantikan Penjabar Bupati Rote Ndao, TTS, dan Manggarai (jumlah peserta dan Tamu/Keluarga :150 orang)	Aula El Tari	1 x kegiatan 16 Januari 2024	-	-	Biro Pem dan BKD Prov. NTT	15 orang al. Kasat, Kabid Tibum, Kasi Ops, HK dan anggota Pol PP
05.	Melakukan pengamanan dan mengikuti apel kesadaran ASN lingkup Pemprov. NTT	Depan Kantor Gubernur NTT	1 x kegiatan 19 Februari 2024	-	-	OPD Lingkup Pemprov. NTT	15 orang al. Kasat, Kabid Tibum, Kasi Ops, HK dan anggota Pol PP
06.	Mengikuti kegiatan sosialisasi penyempurnaan aplikasi si-kinerja melalui BKD Prov. NTT	Aula Satpol PP (secara Virtual)	1 x kegiatan 20 Februari 2024	-	-	BKD Prov. NTT	10 orang al. Kasat, Kabid, Kasi dan anggota
07	Mengikuti pembinaan rohani secara virtual dari 4 tokoh agama	Aula Satpol PP (secara Virtual)	1 x kegiatan 23 Februari 2024	-	-	BKD Prov. NTT	13 orang al. Kasat, Kabid, Kasi dan anggota
08	Melakukan penjagaan dan pengamanan aset milik pemerintah Provinsi NTT	Kantor Gubernur sasando, Rujab Gubernur, Rujab Wagub, Rujab Sekda, dan Kantor satpol PP	1 x kegiatan tanggal 31 x 24 Jam	-	-	5 Pos Piket	Julmala personil. 62 anggota al. 15 danru, 30 anggota piket, 4 anggota patwal dan 13 anggota pengawas/pengontrol

C. Bidang Perlindungan Masyarakat.

- Program : Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- Kegiatan : Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1(satu) Daerah Provinsi
- Sub.Kegiatan : Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Program : Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
- Kegiatan : Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran
- Sub Kegiatan : Penyediaan dan Pemutahiran Infromasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan kebakaran
- Bimtek Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kab/Kota

Kode Rekening	URAIAN	PAGU ANGGARAN RP.	REALISASI KEUANGAN (Rp.)	SISA DANA (Rp.)	Realisasi %	MASALAH	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	7.000.000	-	-	-	-	-
1.05.02.1.01.04	Penyusunan dan Pemuktahiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kabakaran	5.000.000	-	-	-	-	-
	Penyediaan Infirmasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	2.000.000	-	-	-	-	-
	Total Dana Bulan Februari	7.000.000	-	-	-	-	-

D. Bidang Sumber Daya Aparatur.

Seksi Pelatihan Dasar dan Teknis Fungsional & Seksi Kesemaptaan

Program : Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan : Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Sub.Kegiatan : Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Prajadan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuasa Hak Asasi Manusia

No	Nama Kegiatan & Nama Personil Yang Bertugas	Pagu Anggaran Rp.	Realisasi Keuangan Rp	Realisasi Fisik %	Masalah	Solusi	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam Pelaksanaan tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	75.000.000	0	0	0	0	-
	Total Pengeluaran Februari 2024	75.000.000	0	0	0	0	-

Dalam tahun 2024 sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMJD) 2024-2026, program pencegahan, penanggulangan, Penyelamatan kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran merupakan Program Urusan. Berikut data personil pemadam kebakaran pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur :

Data Pemadam Kebakaran Di Provinsi NTT

No.	Nama kabupaten/Kota	JumlahPersonil	Keterangan
1.	Kota Kupang	2.410	Dalam struktur Organisasi Sat. PolPP Kota Kupang tidak terakomodir Bidang Pemadam Kebakaran karena telah ada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Kupang
2.	Kabupaten Kupang	2.152	
3.	Kabupaten TTS	2.758	
4.	Kabupaten TTU	1.548	
5.	Kabupaten Belu	1.550	
6.	Kabupaten Malaka	1.340	
7.	Kabupaten Alor	894	
8.	Kabupaten Rote Ndao	630	
9.	Kabupaten Sabu Raijua	276	
10.	Kabupaten Lembata	1.569	
11.	Kabupaten Flores Timur	1.070	
12.	Kabupaten Sikka	1.010	
13.	Kabupaten Ende	1.966	
14.	Kabupaten Ngada	1.018	
15.	Kabupaten Nagekeo	1.386	
16.	Kabupaten Manggarai	1.940	
17.	Kabupaten Manggarai Timur	1.186	
18.	Kabupaten Manggarai Barat	1.616	
19.	Kabupaten Sumba Timur	516	
20.	Kabupaten Sumba Tengah	810	
21.	Kabupaten Sumba Barat	1.816	
22.	Kabupaten Sumba Barat Daya	864	
TOTAL		31.325	

BAB IV

PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT

A. Permasalahan

Kondisi capaian tahun 2023 merupakan catatan bagi pelaksanaan kegiatan ditahun 2024 yang mana lemahnya koordinasi lintas fungsi dan lintas sektor terbatasnya sumber daya dan kondisi fiskal keuangan daerah menjadi factor penghambat

B. Tindak Lanjut.

Dari permasalahan yang sudah diuraikan diatas sangat diharapkan adanya perubahan ditahun 2024 sehingga target dapat capaian dapat berjalan sesuai ekspetasi dalam setiap pelaporan kinerja bulanan

BAB V PENUTUP

Laporan kinerja ini susun sebagai bentuk pertanggungjawaban hasil pelaksanaan program dan kegiatan bulan Februari 2024, semoga apa yang telah disampaikan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur kedepan dalam rangka menciptakan ketenteraman dan ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat.

Akhir kata diucapkan terimakasih kepada semua pihak dalam lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sudah membantu dalam penyusunan laporan ini. Saran dan pendapat masih sangat dibutuhkan bagi kesempurnaan dari laporan ini.

Demikian laporan bulan Februari Tahun 2024 disajikan atas perhatian diucapkan terima kasih.

Kupang, 08 Meret 2024

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Nusa Tenggara Timur, /



Ir. CORNELIS WADU, M.Si

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19650514 199703 1 006

1. SK: 300/203.4/Sat Pol.PP 2.1/2023 Tentang Penetapan Tim Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan dan Patroli (Turjawali) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024 tanggal, 28 Desember 2023;
2. Surat Tugas: 800.1.11.1/203.5/Sat. Pol. PP 2.1/2023 Tanggal, 28 Desember 2023.

1.	SASANDO (KANTOR GUBERNUR)	I	PACE PELLO, SE	YESKIAL TISSEL
				PETRUS RIHI
				ANTON NDONA
				DOMINGGUS TUKE
		II	MIKHAEL TENIS, SH	YOKTAN NENOHA
				EMU ST. RIWU
				DANIEL TAMONOB
				AYUB KOROH
		III	THERA PALDJO	MELKISEDEK BENU
				THOBIAS TANGGUL
				TIMATIUS LIEM
				YOHANIS WUNGUBELEN
2	POSKO PRAJA (KANTOR POL.PP)	I	LAURENSIUS JA	JEFRINTON TAMONOB
				ARNOLUS E.A. MALI
		II	MIGEL PAH	JEFRI KOTA PA S.PI
				MARIANUS SERAN BERE
		III	PAULUS PATTIPELOHY, SH	YUNIDAR LAISKODAT
				RIDO PINGAK
3	BERINGIN (RUJAB WAGUB NTT)	I	MARTHINUS WILAHUKI, SH	DANIEL PEME
		II	ANDERIAS HAKI	CRRISTOFEL HIRE WAKE
		III	SIMON KAUSE	THOMOS MALAILO
4	KOMODO (RUJAB SEKDA)	I	EDUARDUS AMKEUN, SH	HERMANUS OBA
		II	PRANSIUSKUS BETTY	VALENTINUS SESFAOT
		III	THOMAS SELAN, SH	GERFAS TAPOIN
5	ELTARI (RUJAB GUB NTT)	I	MARTHINUS LIMONE, SH	MARSEL HANOR
				ANDERIAS KETTY
		II	OCTOVIANUS KALE, SH	YOEL BENU
				RONAL SOLSEPA
		III	DAVID BELI NGONGO, SH	BENEDIKTUS KOLIN
				JEFRI LUIN

LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN APBD PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BULAN FEBRUARI 2024

KOD	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	SUM BER DANA	LOKASI KEGIATAN	SASARAN	KONDISI s/d BULAN SEBELUMNYA						KONDISI s/d BULAN INI						SISA ANGGARAN (Rp)	KET
						TARGET			REALISASI			TARGET			REALISASI				
						(% FISIK	(% KEU	Rp	(% FISIK	(% KEU	Rp	(% FISIK	(% KEU	Rp	(% FISIK	(% KEU	Rp		
01	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETRAMPILAN DAN KETERTIBAN JUMUD SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	12.863.674.600						1.067.244.029	18	18	132.545.616				1.199.789.645	9,33	9,33	11.663.884.955	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	12.232.074.600						1.063.394.029	18	18	117.495.616				1.180.889.645	9,65	9,65	11.051.184.955	
	PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	38.000.000						5.976.000							5.976.000	15,73	15,73	32.024.000	
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	38.000.000	DAU	Kota Kupang	SKPD			5.976.000	15,73	15,73					5.976.000	15,73	15,73	32.024.000	
	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	11.032.449.000						1.028.912.770			6.760.480				1.035.673.250	9,39	9,39	9.996.775.750	
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.032.449.000	DAU	Kota Kupang	SKPD			1.028.912.770	9,33	9,33	6.760.480				1.035.673.250	9,39	9,39	9.996.775.750	
	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	80.000.000	DAU		SKPD			5.468.800	6,84	6,84	10.945.317				16.414.117	20,52	20,52	63.585.883	
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	DAU	Kota Kupang	SKPD						280.000				280.000	5,60	5,60	4.720.000	
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.000.000	DAU	Kota Kupang	SKPD			1.858.300	7,43	7,43	6.775.000					8.633.300	34,53	16.366.700	
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.000.000	DAU	Kota Kupang	SKPD													2.000.000	
	- Penyediaan Bahan Material	20.000.000	DAU	Kota Kupang	SKPD			2.110.500	10,55	10,55	2.719.817				4.830.317	24,15	24,15	15.169.683	
	- Fasilitas Kunjungan Tamu	5.000.000	DAU	Kota Kupang	SKPD			1.500.000	30,00	30,00	1.170.500				2.570.500	53,41	53,41	2.329.500	
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.000.000	DAU	Kota Kupang	SKPD													5.000.000	
	- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	18.000.000	DAU	Kota Kupang	SKPD													18.000.000	

PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	SUM BER DANA	LOKASI KEGIATAN	SASAR AN	KONDISI s/d BULAN SEBELUMNYA					REALISASI BULAN INI	KONDISI s/d BULAN INI					SISA ANGGARAN (Rp)	KET
					TARGET		REALISASI				TARGET		REALISASI				
					(%) FISIK	(%) KEU	Rp	(%) KEU	(%) FISIK		(%) FISIK	(%) KEU	Rp	(%) FISIK	(%) KEU		
PROGRAM DAN KEGIATAN																	
PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	968.025.600	DAU		SKPD	-	-	-	12.079.000	1,25	75.911.091	-	-	-	87.990.091	9,09	880.035.509	
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.400.000	DAU	Kota Kupang	SKPD	-	-	-	100.000	7,14	-	-	-	-	100.000	7,14	1.300.000	
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.000.000	DAU	Kota Kupang		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000	
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	956.625.600	DAU	Kota Kupang	SKPD	-	-	-	11.979.000	1,25	75.911.091	-	-	-	87.890.091	9,19	868.735.509	
PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	113.600.000	DAU		SKPD	-	-	-	10.957.459	9,65	23.878.728	-	-	-	34.836.187	30,67	78.763.813	
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	70.000.000	DAU	Kota Kupang	SKPD	-	-	-	10.957.459	15,65	21.080.228	-	-	-	32.037.687	45,77	37.962.313	
- Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	13.600.000	DAU	Kota Kupang	SKPD	-	-	-	-	-	1.850.000	-	-	-	1.850.000	13,60	11.750.000	
- Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.000.000	DAU	Kota Kupang		-	-	-	-	-	948.500	-	-	-	948.500	3,16	29.051.500	
PROGRAM PENINGKATAN KETRANAMAN DAN KETERTIBAN	624.600.000	DAU	Kab./kota		-	-	-	3.850.000	-	15.050.000	-	-	-	18.900.000	3,03	605.700.000	
PENANGANAN GANGGUAN KETRANAMAN DAN KETERTIBAN UMUM LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI	524.600.000	DAU	Kab./kota		-	-	-	3.850.000	-	15.050.000	-	-	-	18.900.000	3,60	505.700.000	
- Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	2.500.000	DAU	Kab./kota		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.500.000	
- Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketertaman Masyarakat	1.500.000	DAU	Kab./kota		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500.000	
- Koordinasi Penyelenggaraan Ketertaman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	150.000.000	DAU	Kab./kota		-	-	-	3.850.000	-	-	-	-	-	3.850.000	2,57	146.150.000	
- Penyedia Layanan Dasar dalam rangka Dampak (Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah)	75.000.000	DAU	Kab./kota		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.000.000	
- Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertaman dan Ketertiban Umum	5.000.000	DAU	Kab./kota		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000.000	

LAMPIRAN : DOKUMENTASI LAPORAN BULAN FEBRUARI 2024



Foto kegiatan Apel Gelar Pasukan Operasi Keselamatan Turangga TA.2024 dan Pencanaan Aksi Keselamatan Jalan



Foto kegiatan Pemantauan Trantibum



Foto kegiatan pembersihan lapak jualan



Foto kegiatan pemantauan Trantibum saat Pemilu bersama Pj. Gubernur NTT



Foto kegiatan Rapat persiapan pelantikan Penjabat Bupati kabupaten Rote Ndao, Timor Tengah Selatan dan Manggarai Timur



Foto kegiatan pengamanan pengambilan janji jabatandan pelantikan Penjabat Bupati kabupaten Rote Ndao, Timor Tengah Selatan dan Manggarai Timur



Foto kegiatan Pembinaan Rohani secara Virtual



Foto kegiatan Rapat Bawaslu di Hotel Kristal



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Jln. Polisi Militer No. -Telp. (0380)-828090-
Email : satpolpp_prov.ntt@yahoo.com
Website : www.satpol-pp.nttprov.go.id
K U P A N G

05 April 2024

Yth. - Kepala Bappelitbangda Provinsi NTT
- Kepala Badan Keuangan Daerah Setda
Provinsi NTT

SURAT PENGANTAR

Nomor : 300/262/Satpol PP 1.1

JENIS SURAT	JUMLAH	KETERANGAN
2	3	4
Laporan Bulan Maret Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024	1 (Satu) Buku	Dikirim untuk ditindak lanjuti

Demikian Laporan ini atas kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Plt. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,



Ir. YOHANES OKTOVIANUS, MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19661019 199403 1 007

Paraf Hirarki :	
Plh. Sekretaris	
Kepala Sub Bagisn Program Data dan Evaluasi	

LAPORAN BULAN MARET 2024





LAPORAN BULAN MARET



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024

Jalan Polisi Militer Nomor 1, Telpon/Fax (0380) 828090

Email : satpolpp_prov.ntt@yahoo.com

Website : www.satpol-pp.nttprov.go.id

KUPANG



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur patut dipanjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena hanya atas penyertaan dan kasih-Nya maka Laporan Bulan Maret 2024 Tahun Anggaran 2024 Satuan Polisi Pamong Praja ini dapat diselesaikan dengan baik.

Tugas, fungsi dan wewenang Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah menjadi sangat penting yang mana terlaksananya berbagai kegiatan pengamanan dan penegakkan prodak hukum. Keadaan yang nyaman, aman dan tenteram diciptakan guna mendukung kinerja Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Untuk itu Laporan Bulan Maret Tahun Anggaran Tahun 2024 ini merupakan bahan, data dan informasi yang disusun secara baik, transparan dan dapat di pertanggungjawabkan kepada publik ataupun kepada pemangku kepentingan yang membutuhkan informasi terkait penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Kupang, 05 April 2024

Pt. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



Ir. YOHANES OKTOVIANUS, M.Si

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19661019 199403 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Maksud dan Tujuan	2
D. Sumber Daya Manusia (SDM)	3
E. Sarana Prasarana	7
BAB II RENCANA KERJA TAHUNAN	12
A. Rencana Kerja Tahunan	12
B. Program dan Kegiatan Tahun 2024	16
C. Realisasi Anggaran	18
BAB III HASIL PELAKSANAAN	22
A. Sekretariat	22
B. Bidang Penegakan Perda dan Peraturan Gubernur	25
C. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	28
D. Bidang Perlindungan Masyarakat	39
E. Bidang Sumber Daya Aparatur	30
BAB IV PERMASALAHAN	32
A. Permasalahan	32
B. Tindak Lanjut	33
BAB V PENUTUP	33
- Laporan Keuangan	34
- Lampiran Toto/Dokumentasi	36

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Tugas Satuan Polisi Pamong Praja yakni membantu Kepala Daerah dalam memelihara Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan masyarakat, dan fungsinya sebagai berikut;

- a) Perumusan kebijakan di bidang Satuan Polisi Pamong Praja;
- b) Pelaksanaan kebijakan di bidang Satuan Polisi Pamong Praja;
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Satuan Polisi Pamong Praja;
- d) Pelaksanaan administrasi di bidang Satuan Polisi Pamong Praja;
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas dan fungsi yang telah dijabarkan diatas kemudian diuraikan dalam program dan kegiatan dimana sesuai amanat Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan urusan Pemerintahan Wajib berkaitan dengan Pelayanan Dasar dalam arti bahwa pelayanan yang diberikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja berkaitan dengan hak masyarakat yang wajib diperoleh sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur berupaya agar mampu menyampaikan pertanggungjawaban atas seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan. Laporan kinerja bulan Maret 2024 ini menggambarkan kinerja yang telah dilaksanakan, sehingga sangat diharapkan dapat bermanfaat bagi semua komponen yang terlibat dalam

proses menciptakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Serta Perlindungan Masyarakat.

B. Dasar hukum

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja.
8. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
9. Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satpol PP Provinsi NTT.
10. Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (P-DPA-SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2024 Nomor : DPA/A.1/1.05.0.00.0.00.01.0000/001/2024.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud.

Sebagai bahan pertanggungjawaban terhadap hasil pelaksanaan program dan kegiatan bulan Maret 2024.

2. Tujuan.

Sebagai bahan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

D. Sumber Daya Manusia (SDM) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 134 orang dengan rincian sebagai berikut:

a. Berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah (Orang)
1	2	3
1.	Kepala Satuan	1
2.	Sekretaris	-
3.	Kepala Bidang	4
4.	Kepala Seksi	7
5.	Kepala Sub Bagian	3
6.	Jabatan Fungsional	61
7.	Jabatan Fungsional Umum	28
8.	Diperbantukan	1
9.	Honorer	29
Jumlah		134



b. Berdasarkan Jenis Kelamin

Jabatan Pegawai	Jenis Kelamin	
	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)
1	2	3
Kepala Satuan	1	
Sekretaris	-	
Kepala Bidang	4	
Kepala Sub Bagian	1	2
Kepala Seksi	5	2
Jabatan Fungsional	54	7
Pelaksana	18	7
Tenaga Honorer	18	11
Total Jumlah	107	29
	134 Orang	

c. Jumlah ASN Berdasarkan Pangkat/Golongan.

Rincian Kepangkatan/Golongan					Jumlah
Kepangkatan PNS	A	B	C	D	
Golongan IV	1	3	-	1	5 orang
Golongan III	16	19	12	8	43 orang
Golongan II	-	2	4	39	45 orang
Golongan I	-	-	-	-	- orang
Jumlah	17	24	16	48	105 orang

d. Berdasarkan Jenjang Pendidikan.

No.	Jenjang Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1.	Pasca Sarjana (S2)	4	-	4
2.	Sarjana (S1)	35	13	48
3.	Diploma (D3)	1	-	1
4.	SMA/SMU	48	5	52
Jumlah		87	18	105

e. Berdasarkan Agama.

No.	Data Keagamaan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1.	Islam	4	-	4
2.	Kristen	80	23	103
3.	Katholik	22	5	27
4.	Hindu	-	-	-
5.	Budha	-	-	-
Jumlah		106	28	134

Selain data kepegawaian diatas terdapat juga data hasil pelaksanaan tugas (perjalanan dinas) yang dilakukan selama bulan Maret 2024 dalam rangka mendukung tugas-tugas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi

Nusa Tenggara Timur serta pemberian cuti dan sanksi bagi Aparatur Sipil Negara Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil antara lain :

1. Cuti tahunan berdasarkan Kepangkatan/Golongan.

No.	Data Cuti Tahunan	Jumlah
1	2	3
1.	Golongan IV	-
2.	Golongan III	4
3.	Golongan II	-
Jumlah		4

2. Data Pegawai yang kena sanksi Kepegawaian :

No.	Data Pegawai Yang Kena Sanksi Kepegawaian	Jumlah
1	2	3
1.	Golongan IV	-
2.	Golongan III	-
3.	Golongan II	-
4.	Banpol	-
5.	Cleaning Service	-
Jumlah		-

Selain melaksanakan tugas Satuan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur juga juga melakukan penjagaan (piket) dalam rangka menjaga aset penting milik pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur adapun aset tersebut antara lain :

1. Pos Kantor Gubernur/Sasando.
2. Pos Rumah Jabatan Gubernur.
3. Rumah Jabatan Wakil Wakil Daerah.
4. Rumah Jabatan Sekretaris Daerah.
5. Posko Praja (Kantor Satpol PP).

Penjagaan pada tempat/lokasi jaga dibagi dalam 3 (tiga) sift, dimana masing-masing sift dibagi waktu selama 1 x 24 jam, mulai jam 08:00 pagi hingga jam 08:00 pagi berikutnya. Jadwal pelaksanaan piket diatur sesuai dengan surat keputusan Kepala satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur 2024 (terlampir).

E Sarana dan Prasarana

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam melaksanakan tugas yang diemban didukung dengan prasarana penunjang operasional kegiatan baik dikantor maupun dilapangan. Sarana Prasarana tersebut dicatat sebagai aset karena proses pengadaannya bersumber dari Dana Alokasi Umum yang dituangkan dalam dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur dari Tahun Anggaran 2003 sampai dengan tahun 2023 sebagai berikut :

Sarana Prasarana Pendukung

No	Jenis Nama Barang	Merk/Type/Bahan	Vol	Satuan	Keadaan Barang	Tahun Pengadaan
1.	Mobil Pic Up (DH 8059 AW)	Besi/Toyota Pic Up	1	Unit	B	2003
2	Meja Biro 4 Laci	Arinda/Olympic	1	Buah	B	2008
3	Meja Biro 4 Laci	Arinda/Olympic	1	Buah	B	2008
4	Lap Top/Toshiba	Metal	1	Buah	B	2008
5	Air Condition	Besi /National/ 1Pk	2	Buah	B	2008
6	Air Condition	Besi/Akira	1	Buah	B	2008
7	Mobil Truck (DH 8047 AW)	Besi/Isuzu	1	Unit	B	2009
8	Mobil Minibus (DH 196 AW)	Besi/Toyota Rush	1	Unit	B	2009
9	Lemari 2 Pintu	Kayu Jati	6	Buah	B	2009
10	Lap Top Azer	Metal	1	Buah	B	2009
11	Printer HP/Laser Jet	Metal	1	Buah	B	2009
12	Wireless	Tens	1	Buah	B	2009
13	Megaphone Toa	Besi	1	Buah	B	2009
14	Facsimile	Panasonic	1	Buah	B	2009

15	Televisi	Digitec	1	Buah	B	2009
16	Kain Horrden	Kain	1	Buah	B	2009
17	Lambang Garuda		2	Buah	B	2009
18	Tiang Bendera	Besi	1	Buah	B	2009
19	Papan Nama SKPD	Besi	1	Buah	B	2009
20	Sepeda Motor (DH 2843 AW)	Besi/Honda/ GL 200 R	1	Unit	B	2010
21	Sepeda Motor (DH 2844 AW)	Besi/Honda/ GL 200 R	1	Unit	B	2010
22	Sepeda Motor (DH 2845 AW)	Besi/Honda/ GL 200 R	1	Unit	B	2010
23	Trasmister UHF	Motorola GR500	1			2010
24	Meja Kerja	Kayu	10	Buah	B	2011
25	Kursi Kerja	Kayu	10	Buah	B	2011
26	Lemari 2 Pintu	Kayu Jati	5	Buah	B	2011
27	Komputer PC Simbada	Metal	2	Buah	B	2011
28	Lap Top Toshiba/L745	Metal	2	Buah	B	2011
29	Printer Canon	Metal	5	Buah	B	2011
30	Handy Talkie	Motorola GP2000	5	Buah	B	2011
31	Handy Cam	Sony	1	Buah	B	2011
32	Alat Kejut Listrik	Metal	13	Buah	B	2011
33	Sound System	Rhoad	1	Buah	B	2011
34	Komputer PC Simbada	Metal	2	Buah	B	2012
35	Televisi	Multimax	1	Buah	B	2012
36	Televisi	Sharp	1	Buah	B	2012
37	Scaner	Metal	1	Buah	B	2012
38	Kasur Busa	Bigland	8	Buah	B	2012
39	Layar Proyektor		1	Buah	B	2012
40	Meja Pimpinan 4 Laci	Kayu	1	Buah	B	2013
41	Meja Kerja	Kayu	6	Buah	B	2013

42	Lemari 2 Pintu	Kayu Jati	2	Buah	B	2013
43	Komputer PC Simbada	Metal	2	Buah	B	2013
44	Lap Top Toshiba L840	Metal	4	Buah	B	2013
45	Kamera Digital	Canon	1	Buah	B	2013
46	Layar Proyektor		1	Buah	B	2013
47	Mobil Double Cabin (DH 8249 AW)	Besi/Toyota Hilux	1	Unit	B	2014
48	Sepeda Motor (DH 3953)	Besi/Kawasaki KLX 15	1	Unit	B	2014
49	Sepeda Motor (DH 3954)	Besi/ Kawasaki KLX 15	1	Unit	B	2014
50	Sepeda	Paragon	6	Buah	B	2014
51	Kursi Sofa	Busa	1	Buah	B	2014
52	Lemari 2 Pintu	Kayu Jati	2	Buah	B	2014
53	Kulkas	Besi/ Polytron	1	Buah	B	2014
54	UPS/Matsunaga	Metal	10	Buah	B	2014
55	Lap Top Lenovo B490	Metal	1	Buah	B	2014
56	Printer Canon MX 397	Metal	1	Buah	B	2014
57	Air Condition/	Besi Polytron	5	Buah	B	2014
58	Wireless genggam	Toa-ZR1015	4	Buah	B	2014
59	Televisi	Polytron	5	Buah	B	2014
60	Handy Talkie	Motorola A 12	40	Buah	B	2014
61	Antena, Rig, Repeater	Motorola CDR500	1	Buah	B	2014
62	Mesin Absen Elektronik	Secure	1	Buah	B	2014
63	Mesin Absen Elektronik	Secure	1	Buah	B	2014
64	Mesin Ketik	Brother	1	Buah	B	2014
65	Handy Cam	Sony	1	Buah	B	2014
66	Meja Rapat	Kayu Jati	5	Buah	B	2015
67	Meja Biro 4 Laci	Kayu	1	Buah	B	2015

68	Meja 1/2 Biro, 2 Laci	Kayu	15	Buah	B	2015
69	KursiRapat	Busa//Master Chair	20	Buah	B	2015
70	KursiKerja	Kayu	21	Buah	B	2015
71	Lemari 2 Pintu	Kayu Jati	1	Buah	B	2015
72	Tempat Tidur Lipat	Metal	7	Buah	B	2015
73	Lap Top Toshiba C55	Metal	5	Buah	B	2015
74	Lap Top Asus X453MA	Metal	1	Buah	B	2015
75	Printer Canon	Metal	5	Buah	B	2015
76	Tirai/Gorden	Kain	2	Buah	B	2015
77	Mic & Tiang Mic	Shure & NVK	1	Buah	B	2015
78	Kamera Digital	Canon	1	Buah	B	2015
79	Senter	S.W.A.T XML-T6	7	Buah	B	2015
80	Lemari Arsip	Katyu	1	Buah	B	2016
81	Komputer PC	LG	1	Buah	B	2016
82	Printer	Canon MP280	1	Buah	B	2016
83	Air Condition	Polytron	4	Buah	B	2016
84	Dispenser		6	Buah	B	2016
85	Taplak Meja dan Vas Bunga	Kain	1	Buah	B	2017
86	Mesin Potong Rumput	Besi	1	Buah	B	2017
87	Linggis kuku kambing	Besi	5	Buah	B	2017
88	Meja Rapat	Kayu	3	Buah	B	2017
89	Meja 1/2 Biro	Kayu	6	Buah	B	2017
90	Kursi Rapat	Besi	50	Buah	B	2017
91	Lemari 3 Pintu	Kayu	2	Buah	B	2017
92	Dispenser standing	Besi	2	Buah	B	2017
93	Kamera Digital	Besi	1	Buah	B	2017
94	Papan Nama SKPD	Besi	1	Buah	B	2017

95	Komputer (hp AIQ)	Hp	6	Unit	B	2020
96	Printer	(Epson L3110)	6	Unit	B	2020
97	Lemari	Kayu	5	Unit	B	2020
98	Meja Kerja	Kayu	7	Unit	B	2020
99	Meja Rapat	Kayu	2	Unit	B	2020
100	Kursi Kerja	Kayu	7	Unit	B	2020
101	Wirlaes		1	Unit	B	2020
102	Papan Sekretariat PPNS		1	Unit	B	2020
103	Papan Struktur Organisasi 1		1	Unit	B	2020
104	Papan Struktur Organisasi 1		1	Unit	B	2020
105	Papan Visi Misi		1	Unit	B	2020
106	Papan Informasi		1	Unit	B	2020
107	Mesin Potong Rumput		1	Unit	B	2020
108	Alat Pengukur suhu (Termogram)		2	Buah	B	2021 (BTT)
109	Genset	Yamaha/Bensin	2	Unit	B	2021
110	Mobil Truck (DH 8279 WA)	Besi/Hino	1	Unit	B	2021
111	Mobil Hilux Double Cabin (DH 19)	Besi/Toyota Hilux	1	Unit	B	2021

BAB II RENCANA KERJA TAHUNAN

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai urusannya dalam bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat memiliki langkah-langkah strategis dalam upaya mendukung program Kepala Daerah, Hal ini dijabarkan dalam rencana Program Kegiatan sebagai berikut :

A. Rencana Kinerja Tahunan.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar dalam Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.

Rencana Kerja Tahunan (RKT) disusun berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur yang Termuat dalam Rencana Strategis (Renstra) tahun 2024-2026 sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026 :

Indikator Kinerja Utama (KU) Tahun 2024
Satuan Polisi pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI	TARGET	FORMULAINDIKATOR
			2023	2024	
1	2	3	4	6	7
1	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1. Presentase meningkatnya pencapaian SPM Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	44,76%	100%	Jumlah kegiatan yang diselesaikan -----x 100 Target
		2. Presentase meningkatnya Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (jumlah Perda dan Perkada yang ditegakan)	3	3	Jumlah Penyelesaian Perda dan Perkada yang ditegakan -----x100 Jumlah Perda dan Perkada
		3. Presentase Pencegahan Daerah Rawan Kebakaran setiap Tahun	-	100 %	Data Potensi Daerah Rawan Kebakaran -----x100 Jumlah Wilayah

Dari tabel Rencana Kinerja Tahunan (RKT) diatas dapat diambil langkah strategis antara lain :

1. Membangun dan mengembangkan sinergitas dengan Instansi/ Unit/ Lembaga Hukum/ Masyarakat/ Stekholder terkait lainnya dalam melakukan pengendalian dalam rangka menciptakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
2. Membangun komunikasi yang secara berkala dalam melakukan diteksi dini dan cegah dini terhadap segala bentuk kegiatan yang berdampak pada adanya pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Dengan rumusan kebijakan yang telah ditetapkan antara lain :

1. Meningkatkan koordinasi antar Instansi/Unit Kerja/Lembaga Hukum yang tersebar dalam wilayah Nusa Tenggara Timur.
2. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia.
3. Pemenuhan sarana prasarana yang berstandar dalam mendukung pelaksanaan kegiatan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Rencana Kerja

Tabel Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikator (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.2	Urusan Pemerintah an Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat		Prov/kab/Kota		12.863.647.600	APBD Prov. NTT			12.863.647.600
05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkatoran yang Berkualitas	Kota Kupang	100 %	12.863.647.600	APBD Prov. NTT		100 %	12.863.647.600
1.01	Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Tersedianya laporan capaian kinerja PD	Kota Kupang	49 dokumen	38.000.000	APBD Prov. NTT		49 dokumen	38.000.000
1.02	Administrasi keuangan pemerintah daerah	Terbayarnya gaji dan tunjangan	Kota Kupang	4 laporan	11.032.449.000	APBD Prov. NTT		4 laporan	11.032.449.000
1.06	Administrasi umum pemerintah daerah	Tersedianya kebutuhan operasional kantor	Kota Kupang	1 piket	80.000.000	APBD Prov. NTT		1 piket	80.000.000
1.07	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang	Kota Kupang	4 laporan	-			4 laporan	-
1.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Tersedianya kebutuhan jasa operasional kantor	Kota Kupang	4 laporan	968.025.600	APBD Prov. NTT		4 laporan	968.025.600
1.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Terpeliharanya barang milik daerah yang menjadi aset	Kota Kupang	4 laporan	113.600.000	APBD Prov. NTT		4 laporan	113.600.000
05.02	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Presentase meningkatnya pencapaian SPM trantibum	Kota Kupang	100 %	624.600.000	APBD Prov. NTT		Kota Kupang	624.600.000
1.01	Penanganan gangguan ketenteraman ddan ketertiban umum lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi	Terselenggaranya kegiatan penertiban, pengamanan, pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patrol turjawali dalam rangka trantibum	Kabupaten/kota	12 laporan	524.600.000	APBD Prov. NTT	Mengkoordinir layanan SPM	12 laporan	524.600.000
1.02	Penegakan peraturan daerah provinsi dan peraturan gubernur	Presentase meningkatnya pencapaian SPM trantibum (jumlah perda dan perkara yang ditegakan)	Kota Kupang	12 laporan	90.000.000	APBD Prov. NTT	Mengkoordinir layanan SPM	12 laporan	90.000.000
1.03	Pembinaan penyidik pegawai negeri sipil	Kegiatan pengembangan kapasitas PPNS	Kota Kupang	2 laporan	10.000.000	APBD Prov. NTT	Mengkoordinir layanan SPM	2 laporan	10.000.000

05.04	Program Pencegahan Penanggulangan Peyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Presentase pencegahan daerah berpotensi rawan kebakaran	Kota Kupang	100 %	7.000.000			100 %	7.000.000
1.01	Peyelenggaran pemetaan rawan bencana kebakaran	Peta daerah rawan kebakaran	Kota Kupang	4 laporan	7.000.000	APBD Prov. NTT	Mengkoordinir layanan SPM	4 laporan	7.000.000

Dalam implementasi rencana kerja, seluruh program dan kegiatan diarahkan untuk mewujudkan penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dengan mengoptimalkan seluruh bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam bentuk penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sehingga dapat menciptakan kondisi yang aman dan tentram.

B. Program Dan Kegiatan Tahun 2024.

Program dan Kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur seluruh pendanaanya bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan anggaran belanja dan Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun 2024 antara lain :

1. Belanja Daerah/Belanja Operasi.

1. Belanja Daerah/Operasi Rp. 13.036.880.880.- kegiatan ini terdiri dari

1.1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :

1.1.1 Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

1.1.1.1 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

1.1.2 Administrasi Keuangan Pemerintah Daerah.

1.1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

1.1.3 Administrasi Umum Perangkat Daerah Daerah.

1.1.3.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

1.1.3.2 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.

1.1.3.3 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.

1.1.3.4 Penyediaan Bahan Material.

1.1.3.5 Fasilitas Kunjungan tamu.

1.1.3.6 Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.1.3.7 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

- 1.1.4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - 1.1.4.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
 - 1.1.4.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik.
 - 1.1.4.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.1.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - 1.1.5.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
 - 1.1.5.2 Pemeliharaan Aset Tetap lainnya.
 - 1.1.5.3 Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya.

1.2. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- 1.2.1 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi :
 - 1.2.1.1 Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan.
 - 1.2.1.2 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
 - 1.2.1.3 Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi.
 - 1.2.1.4 Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
 - 1.2.1.5 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
 - 1.2.1.6 Pencegahan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini, Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan,

dan Pengawalan.

1.2.1.7 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja Melalui Pelatihan Teknis Termasuk dalam Pelaksanaan tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia.

1.2.1.8 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa.

1.2.2 Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur.

1.2.2.1 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.

1.2.2.2 Pengawasan atas kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.

1.2.2.3 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.

1.2.3 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi.

1.2.3.1 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS

1.3. Program Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran :

1.3.1 Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran.

1.3.1.1 Penyusunan dan Pemutahiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran.

1.3.1.2 Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran

C. Realisasi Anggaran

Dalam periode tahun 2024 tersedia pagu anggaran sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran sebesar Rp. 13.036.880.880.- (tiga belas miliar tiga puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) berikut kondisi atau keadaan kas sampai dengan tanggal 31 Maret 2024 yang telah dipertanggungjawabkan secara fungsional oleh

bendahara Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur pada badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	13.036.880.880	2.471.255.270	18.96
01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	12.237.780.880	2.416.295.270	19.74
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Relaisasi Kinerja SKPD	38.000.000	5.967.000	15.73
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.032.449.000	2.101.798.149	19.05
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.032.449.000	2.101.798.149	19.05
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	80.000.000	22.151.617	27.69
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	280.000	5.60-
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.000.000	11.983.300	47.93
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.000.000	-	-
	- Penyediaan Bahan/Material	20.000.000	4.830.317	24.15
	- Fasilitas Kunjungan Tamu	5.000.000	5.058.000	100.16
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.000.000	-	-
	- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	18.000.000	-	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	968.231.880	233.509.771	24.12
	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.400.000	100.000	7.14
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.000.000	-	-
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	956.831.880	233.409.771	24.39
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	119.100.000	52.858.733	44.38
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	70.000.000	39.692.233	56.70
	- Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	19.100.000	3.925.000	20.55
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.000.000	9.242.500	38.81
02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	792.100.000	54.960.000	6.94

	Penanganan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Provinsi	692.100.000	54.960.000	6.94
	- Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	2.500.000	-	-
	- Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	1.500.000	-	-
	- Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	150.000.000	26.610.000	17.74
	- Penyediaan Layanan Dasar Dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	75.000.000	-	-
	- Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5.000.000	-	-
	- Pencegahan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan masyarakat Melalui deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	333.100.000	26.600.000	7.99
	- Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja Melalui Pelatihan Teknis Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	75.000.000	-	-
	- Penindakan atas Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	50.000.000	1.750.000	3.50
	Penegakan Peraturan daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	90.000.00	-	-
	- Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	5.000.000	-	-
	- Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	70.000.000	-	-
	- Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	15.000.000	-	-

	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	10.000.000	-	-
	- Pengembangan Kapasitas dan Karir PPNS	10.000.000	-	-
03	PROGRAM PENCEGAHAN PENANGGULANGAN PENYELEMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	7.000.000	-	-
	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	7.000.000	-	-
	- Penyusunan dan Pemuktahiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	5.000.000	-	-
	- Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	2.000.000	-	-
	Jumlah Realisasi Januari	13.036.880.880	2.471.295.270	18.96

Kondisi atau keadaan kas per 31 Maret 2024

Pada tabel diatas dapat disampaikan bahwa capaian progres fisik dan keuangan pada Bulan Maret 2024 sebesar Rp. 2.471.295.270.- (dua miliar empat ratus tujuh puluh satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) atau 18.97 % dari Total pagu sebesar Rp. 13.036.880.880.- (tiga belas miliar tiga puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).

BAB III

HASIL PELAKSANAAN

Dalam Periode sampai dengan bulan Maret 2024 dimana rutin dilaksanakan dengan hasil capaian pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut :

Bidang Kesekretariatan.

1. Sub Bagian Program Data dan Evaluasi.

Capaian pelaksanaan tugas antara lain adalah :

1. Laporan Bulanan Bulan Maret 2024.
2. Laporan Triwulan I Tahun 2024.
3. Laporan e-monev Bulan Maret Tahun 2024.
4. Melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Tingkat Provinsi NTT.
5. Melaksanakan surat pengantar permohonan tanda tangan berita acara rekomendasi rapat koordinasi,
6. Mengikuti lokakarya pelatihan pengenalan kerangka kerja dan software LUMENS II (land use planning multiple environmental service).
7. Mengikuti Workshop penyusunan meta data.
8. Melaksanakan pengimputan di SIPD Kemendagri RI.
9. Melaksanakan Pengimputan RAK (Rencana Anggaran Kas)
10. Pengambilan DPPA Perubahan I.
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Sub Bagian Keuangan.

1. Mengajukan SPP Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), Tambah Uang (TU) dan Gaji PNS (LS).
2. Menyusun SPJ Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), Tambah Uang (TU) dan Gaji PNS (LS).
3. Membuat laporan SPJ Fungsional dan laporan Pertanggungjawaban atas belanja SKPD.
4. Membuat Laporan Keuangan SKPD.
5. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh atasan.

3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.

- Kepegawaian

No.	Uraian Program / Kegiatan	Jumlah
1	Membuat rekapan piket bulan maret Tahun 2024	1 berkas
2	Membuat rekapan kenaikan pangkat	1 berkas
3	Scan bahan administrasi usulan kenaikan pangkat ASN	8 ASN
4	Membuat usulan surat cuti pada aplikasi sip cut	4 ASN
5	Menyelesaikan pengisian formulir instrument evaluasi kelembagaan	1 keg
6	Mengikuti kegiatan peringatan Hut Pol PP dan Linmas	1 keg
7	Menyelesaikan surat tugas	4 surat
8	Mengoreksi usulan berkala	4 orang
9	Mengikuti rakortek Satuan Polisi Pamong Praja dengan Kabupaten/Kota	1 keg
10	Mengikuti sosialisasi Pergub III tahun 2023 tentang TPP	1 keg
11	Memproses dokumen perjanjian kerja	1 dok
12	Menghimpung dokumen perjanjian kerja	1 dok
13	Menyelesaikan surat untuk administrasi TPP	2 surat
14	Membuat daftar pembagian beras ASN	105 PNS
15	Membuat model C	2 orang
16	Menyelesaikan SK pengelola keuangan SK, SK TIM angka kredit, SK pengelola kepegawaian	3 dok
17	Penyelesaian rekapan kehadiran piket ASN tahun 2023	1 dok

- Umum

No.	U r a i a n	Jumlah
1.	Jumlah Surat Masuk bulan Maret 2024	30 surat
2.	Jumlah Surat Keluar bulan Maret 2024	39 surat
3.	Jumlah undangan yang masuk bulan Maret 2024	17 surat

- Perlengkapan

Uraian Program/Kegiatan	Jumlah/ Keterangan
Mengatur Cleaning Service untuk membersihkan ruang kantor	Setiap Hari

**A. Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
Bulan Maret 2024.**

KEGIATAN PENANGANAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA
DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI

No	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa	Ket
			Rp	%		
1	Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum lintas daerah Kabupaten/Kota dan 1 (satu) daerah Provinsi	175.000.000.-		-	175.000.000.-	-

1. Sub Kegiatan : Sosialisasi Penegakan Perda dan Pergub

No	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa	Ket
			Rp	%		
1	Belanja Nakanan dan Minuman Rapat Sosialisasi Penegakan Perda dan Pergub	5.000.000.-	-	-	5.000.000.-	-
	Jumlah				5.000.000.-	-

2. Sub Kegiatan : Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Perda dan Pergub “Operasi DBHCHT (Rokok Ilegal)”

No	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa	Ket
			Rp	%		
1	Belanja Nakanan dan Minuman Rapat Sosialisasi Penegakan Perda dan Pergub	5.000.000.-	-	-	5.000.000.-	-
	Jumlah				5.000.000.-	-

3. Sub Kegiatan : Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan perda dan pergub “operasi DBHCHT (rokok ilegal)”

No	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa	Ket
			Rp	%		
1	Belanja Bahan Cetak	1,60.000.-	-	-	1,60.000.-	-
2	Belanja Makan minum rapat	16.960.000.-	-	-	16.960.000.-	
3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (uang harian transport lokal)	51.680.000.-	-	-	51.680.000.-	
	Jumlah				75.000.000.-	-

4. Sub Kegiatan : Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur sesuai SOP

No	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa	Ket
			Rp	%		
1	Belanja Bahan untuk kantor kegiatan ATK	40.000.-	-	-	40.000.-	-
2	Belanja Perjalanan Jasa Kantor	14.960.000.-	-	-	14.560.000.-	
	Jumlah				15.000.000.-	-

5. Sub Kegiatan : Pengembangan Kapasitas dan Karir PPNS

No	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa	Ket
			Rp	%		
1	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak	400.000.-	-	-	400.000.-	-
2	Belanja makan minum peserta rapat	3.600.000.-	-	-	3.600.000.-	
3	Belanja perjalanan dlam kota (transportasi peserta rapat teknis PPNS)	6.000.000.-	-	-	6.000.000.-	

KEGIATAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DAN PERATURAN GUBERNUR
MELALUI KEGIATAN PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENINDAKAN

No	Tanggal	Kegiatan	Tempat	Jumlah yang Dibuna/Diawasi (orang)	Jumlah yang Ditindak (orang)	Ket
1	20 Maret 2024	Melakukan sosialisasi penegakan perda/perkada di lingkungan SMKN 5 kota kupang (sosialisasi tugas, fungsi dan wewenang Satpol PP	Aula SMKN 5 Kota Kupang	65	0	-
2	21 Maret 2024	Melakukan pemantauan aset Milik Pemprov. NTT dengan melakukan koordinasi lintas sektor bersama kejaksaan tinggi NTT, BPAD Prov. NTT, Kel Maulai I terkait pengecekan lokasi bersama tim intel kejaksaan tinggi NTT sesuai HPL nomor 3 tahun 1986 yang berlokasi di Kel. Manulai I, Kec. Alak Kota Kupang kepada. 1. Nofri Yanti Kusuma. 2. Siman Banoet. 3. Sitti Haija. 4. Khadijah Abibakar Surat masuk tanggal 20 maret 2024, nomor : BPAD.A.2.3000.005/482/2024. Perihal : Undangan untuk menghadiri kegiatan pengecekan lokasi bersama tim intel kejaksaan NTT	Kelurahan Manulai I Kecamatan Alak Kota Kupang	35	-	Hasil olah data pemantauan batas tanah milk Pemprov NTT oleh BPN menjadi acuan untuk tindakan selanjutnya. Apabila tanah yang di jual dalam tanah milk pemprov. NTT maka ada tindakan selanjutnya oleh kejaksaan tinggi yaitu aka nada proses pemeriksaan selanjutnya. Apabila tanah yang di jual tidak masuk dalam tanah milik Pemprov. NTT maka kasus ini akan di tutup

3	26 Maret 2024	Melakukan pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan perda dan pergub (patrol pemantaun terhadap ASN dan siswa SMA/SMK/MA di Kota k pang	SMKN 5, SMAN 7, SMAN 3, SMAN 5 dan SMAN 4 Kota Kupang	-	-	0
---	---------------	--	---	---	---	---

KEGIATAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DAN PERATURAN GUBERNUR

PENGADUAN MASYARAKAT

No	Tanggal	No Surat/Tgl. Surat Masuk/Hal	Isi laporan Pengaduan	Tindak Lanjut Jumlah yang Ditindak (orang)	Ket
1					

DATA PELANGGAR PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN GUBERNUR

No	No Surat/Tgl. Surat Masuk/Hal	Pelanggar Perda/Pergub	Perda/Pergub yang dilanggara	Tindak Lanjut	Ket
1					

B. Ketenteraman dan KetertibanUmum.

Bulan Maret 2024

No	Jenis Pengamanan	Jumlah Pengamanan		Masalah	Pemecahan Masalah	Instansi Terkait	Keterangan
		Lokasi Kegiatan	Bulan				
1	2	3	4	6	7	8	9
01.	Melaksanakan apel gelar pasukan Operasi Turangga Tahun 2024 sekaligus penancangan aksi keselamatan jalan Polda NTT	Polda NTT	x kegiatan 01 Maret 2024	-	-	Polda NTT dan unsure terkait	26 orang al. Kasat, Kabid Tibum, Kasi Ops, HK dan anggota Pol PP
02.	Melaksanakan (gerakan aksi bersih negeri) kerja bakti bersama OPD lingkup Pemprov. NTT	Depan Hotel Aston (tempat Pelataran)	1 x kegiatan 04 Maret 2024	-	-	OPD lingkup Pemprov. NTT	10 orang al. Kasat, Kabid, Kasi dan anggota
03.	Mengikuti rapat bersama tim dari kementerian dalam negeri untuk membahas upaya penyelesaian tumpang tindih hak pada tanah bersertifikat di lokasi stasiun Bumi (Getaway) jaringan satelit RI di Kupang	Ruang rapat BPAD Prov. NTT	1 x kegiatan 08 Maret 2024	-	-	BPAD Prov. NTT	Kabid Tibum dan HK
04.	Mengikuti gladi bersih bersama Satpol PP Kota Kupang dalam rangka upacara gelar pasukan HUT Satpol PP ke 74 dan Satlinmas ke 62 tingkat prov. NTT tahun 2024	Kantor walikota Kupang	1 x kegiatan 08 Maret 2024	-	-	Satpol PP Kota Kupang	30 orang al. Kasat, Kabid Tibum, Kasi Ops, HK dan anggota Pol PP
05.	Mengikuti upacara gelar pasukan HUT Satpol PP ke 74 san satlinmas ke 62 Tingkat Prov. NTT tahun 2024	Kantor walikota Kupang	1 x kegiatan 13 Maret 2024	-	-	Satpol PP kab/Kota se NTT	Seluruh anggota Sat Pol PP
06.	Mengikuti rapat koordinasi teknis Satpol PP tingkat Provinsi NTT Tahun 2024	Hotel Pelangi Kota Kupang	1 x kegiatan 14 Maret 2024	-	-	Satpol PP kab/Kota se NTT	Seluruh anggota Sat Pol PP
07.	Melaksanakan kerja bakti/giat bersih dan tanam pohon bersama Pol PP kab/Kota dalam rangka HUT Pol PP dan Satlinmas	Halaman Kantor Walikota Kupang	1 x kegiatan 15 Maret 2024	-	-	Satpol PP kab/Kota se NTT	35 orang al. Kasat, Kabid, Kasi dan anggota
08.	Mengikuti sosialisasi Aplikasi Si-PAS (Sintem Informasi Data Pajak Kendaraan ASN)	Aula Satpol PP (secara Virtual)	1 x kegiatan 20 Maret 2024	-	-	BPAD Pemprov. NTT	Seluruh ASN Sat Pol PP

09.	Melakukan pengamanan dan pemantauan penertiban aset milik Pemprov NTT (sebanyak 3 KK dengan jumlah anggota 20 orang)	Manulai II Kota Kupang	1 x kegiatan 20 Maret 2024	Ada masyarakat yang membangun rumah di atas tanah Pemprov. NTT	Memberi humbauan untuk segera pindah dari likasi tanah tersebut	BPAD Pembprov. NTT	35 orang al. Kasat, Kabid, Kasi dan anggota
10.	Mengikuti pembinaan rohani secara virtual dari 4 tokoh agama	Aula satpol PP (sevara virtual)	1 x kegiatan 20 Maret 2024	-	-	BPAD Pembprov. NTT	Seluruh ASN Satpol PP
11.	Melaksanakan kerja bakti/giat bersih bersama OPD lingkup Pemprov. NTT	Rumah jabatan Gubernur NTT	1 x kegiatan 27 Maret 2024	-	-	Biro Umum Setda Prov. NTT	Seluruh ASN Satpol PP
12.	Melakukan pengamanan dalam rangka rapat paripurna	Kantor DPRD Prov. NTT	1 x kegiatan 27 Maret 2024	-	-	DPRD Prov. NTT	20 orang al. Kasat, Kabid, Kasi dan anggota
13.	Melakukan pengamanan dalam rangka pengukuhan dan pelantikan pejabat tinggi pratama lingkup Pemprov. NTT	Aula Fernandes (kantor gubernur NTT)	1 x kegiatan 27 Maret 2024	-	-	BKD Setda Prov. NTT	35 orang al. Kasat, Kabid, Kasi dan anggota
14.	Melakukan penjagaan dan pengamanan aset milik Pemprov. NTT	Kantor Gubernur sasando, Rujab Gubernur, Rujab Wagub, Rujab Sekda, dan Kantor Satpol PP	1 x kegiatan tanggal 31 x 24 Jam	-	-	5 Pos Piket	Julmala personil. 62 anggota al. 15 danru, 30 anggota piket, 4 anggota patwal dan 13 anggota pengawas/pengontrol

C. Bidang Perlindungan Masyarakat.

- Program : Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- Kegiatan : Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1(satu) Daerah Provinsi
- Sub.Kegiatan : Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Program : Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
- Kegiatan : Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran
- Sub Kegiatan : Penyediaan dan Pemutahiran Infromasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan kebakaran
- Bimtek Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kab/Kota

Kode Rekening	URAIAN	PAGU ANGGARAN RP.	REALISASI KEUANGAN (Rp.)	SISA DANA (Rp.)	Realisasi %	MASALAH	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	7.000.000	-	-	-	-	-
1.05.02.1.01.04	Penyusunan dan Pemuktahiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kabakaran	5.000.000	-	-	-	-	-
	Penyediaan Infirmasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	2.000.000	-	-	-	-	-
	Total Dana Bulan Maret	7.000.000	-	-	-	-	-

D. Bidang Sumber Daya Aparatur.

Seksi Pelatihan Dasar dan Teknis Fungsional & Seksi Kesemampuan

Program : Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan : Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Sub.Kegiatan : Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia

No	Nama Kegiatan & Nama Personil Yang Bertugas	Pagu Anggaran Rp.	Realisasi Keuangan Rp	Realisasi Fisik %	Masalah	Solusi	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam Pelaksanaan tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	75.000.000	0	0	0	0	-
	Total Pengeluaran Maret 2024	75.000.000	0	0	0	0	-

Dalam tahun 2024 sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMJD) 2024-2026, program pencegahan, penanggulangan, Penyelamatan kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran merupakan Program Urusan. Berikut data personil pemadam kebakaran pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur :

Data Pemadam Kebakaran Di Provinsi NTT

No.	Nama kabupaten/Kota	Jumlah Personil	Keterangan
1.	Kota Kupang	2.410	Dalam struktur Organisasi Sat. PolPP Kota Kupang tidak terakomodir Bidang Pemadam Kebakaran karena telah ada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Kupang
2.	Kabupaten Kupang	2.152	
3.	Kabupaten TTS	2.758	
4.	Kabupaten TTU	1.548	
5.	Kabupaten Belu	1.550	
6.	Kabupaten Malaka	1.340	
7.	Kabupaten Alor	894	
8.	Kabupaten Rote Ndao	630	
9.	Kabupaten Sabu Raijua	276	
10.	Kabupaten Lembata	1.569	
11.	Kabupaten Flores Timur	1.070	
12.	Kabupaten Sikka	1.010	
13.	Kabupaten Ende	1.966	
14.	Kabupaten Ngada	1.018	
15.	Kabupaten Nagekeo	1.386	
16.	Kabupaten Manggarai	1.940	
17.	Kabupaten Manggarai Timur	1.186	
18.	Kabupaten Manggarai Barat	1.616	
19.	Kabupaten Sumba Timur	516	
20.	Kabupaten Sumba Tengah	810	
21.	Kabupaten Sumba Barat	1.816	
22.	Kabupaten Sumba Barat Daya	864	
TOTAL		31.325	

BAB IV

PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT

A. Permasalahan

Permasalahan yang ditemui dalam pencapaian target kinerja bulan April antara lain :

1. Kondisi fiskal daerah terganggu.
2. Sumber pendanaan yang hanya bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
3. Sumber daya aparatur yang terbatas dalam mendukung capaian kinerja.

B. Tindak Lanjut.

Sebagai tindak lanjut dari permasalahan diatas, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur terus melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam mendukung capaian kinerja.

BAB V PENUTUP

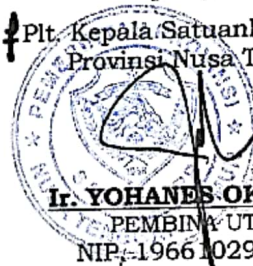
Laporan kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban hasil pelaksanaan program dan kegiatan bulan Maret 2024, semoga apa yang telah disampaikan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur kedepan dalam rangka menciptakan ketenteraman dan ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat.

Akhir kata diucapkan terimakasih kepada semua pihak dalam lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sudah membantu dalam penyusunan laporan ini. Saran dan pendapat masih sangat dibutuhkan bagi kesempurnaan dari laporan ini.

Demikian laporan bulan Maret Tahun 2024 disajikan atas perhatian diucapkan terima kasih.

Kupang, 05 April 2024

Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Nusa Tenggara Timur,


Ir. YOHANES OKTOVIANUS, MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19661029 199403 1 007

LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN APBD PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BULAN MARET 2024

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	SUMBER DANA	LOKASI KEGIATAN	SASARAN	KONDISI s/d BULAN SEBELUMNYA				REALISASI BULAN INI	KONDISI s/d BULAN INI				SISA ANGGARAN (Rp)	KET			
						TARGET		REALISASI			TARGET		REALISASI						
						(%) FISIK	(%) KEU	Rp	(%) KEU		(%) FISIK	(%) KEU	(%) FISIK	(%) KEU	Rp		(%) FISIK	(%) KEU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETRAMPILAN DAN KETERIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	13.036.880.880				-	-	1.199.789.645	59	59	1.271.465.625			18,96	2.471.255.270	18,96	18,96	10.565.625.610	
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	12.237.780.880					-	1.180.889.645	59	59	1.235.405.625			19,74	2.416.295.270	19,74	19,74	9.821.485.610	
	PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	38.000.000						5.976.000			-	-	-	15,73	5.976.000	15,73	15,73	32.024.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	38.000.000	DAU	Kota Kupang	SKPD	-	-	5.976.000	15,73	15,73	-	-	-	15,73	5.976.000	15,73	15,73	32.024.000	
	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	11.032.449.000						1.035.673.250			1.066.124.899			19,05	2.101.798.149	19,05	19,05	8.930.650.851	
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.032.449.000	DAU	Kota Kupang	SKPD	-	-	1.035.673.250	9,39	9,39	1.066.124.899			19,05	2.101.798.149	19,05	19,05	8.930.650.851	
	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	80.000.000	DAU		SKPD	-	-	16.414.117	20,52	20,52	5.737.500			27,69	22.151.617	27,69	27,69	57.848.983	
	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	DAU	Kota Kupang	SKPD	-	-	280.000	5,60	5,60	-	-	-	5,60	280.000	5,60	5,60	4.720.000	
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.000.000	DAU	Kota Kupang	SKPD	-	-	8.633.300	34,53	34,53	3.350.000			47,93	11.983.300	47,93	47,93	13.016.700	
	Penyediaan Bahan Becaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.000.000	DAU	Kota Kupang	SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000	
	- Penyediaan Bahan Material	20.000.000	DAU	Kota Kupang	SKPD	-	-	4.830.317	24,15	24,15	-	-	-	24,15	4.830.317	24,15	24,15	15.169.683	
	- Fasilitas Kunjungan Tamu	5.000.000	DAU	Kota Kupang	SKPD	-	-	2.670.500	53,41	53,41	2.387.500			101,16	5.058.000	101,16	101,16	[58.000]	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.000.000	DAU	Kota Kupang	SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000.000	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	18.000.000	DAU	Kota Kupang	SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.000.000	

PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	968.231.880	DAU		SKPD	-	-	87.990.091	9,09	9,09	145.519.680				233.509.771	24,12	24,12	734.722.109
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.400.000	DAU	Kota Kupang	SKPD	-	-	100.000	7,14	7,14	-				100.000	7,14	7,14	1.300.000
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.000.000	DAU	Kota Kupang		-	-		-	-	-					-	-	10.000.000
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	956.831.880	DAU	Kota Kupang	SKPD	-	-	87.890.091	9,19	9,19	145.519.680				233.409.771	24,39	24,39	723.422.109
PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH																	
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	119.100.000	DAU		SKPD	-	-	34.836.187	29,25	29,25	18.023.546				52.859.733	44,38	44,38	66.240.267
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	70.000.000	DAU	Kota Kupang	SKPD	-	-	32.037.687	45,77	45,77	7.654.546				39.692.233	56,70	56,70	30.307.767
- Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	19.100.000	DAU	Kota Kupang	SKPD	-	-	1.850.000	9,69	9,69	2.075.000				3.925.000	20,55	20,55	15.175.000
- Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.000.000	DAU	Kota Kupang		-	-	948.500			18.294.000				9.242.500	30,81	30,81	20.757.500
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	792.100.000	DAU	Kab/Kota		-	-	18.900.000	-	-	36.060.000				54.960.000	6,94	6,94	737.140.000
PENANGANAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI	692.100.000	DAU	Kab/Kota		-	-	18.900.000	-	-	36.060.000				54.960.000	7,94	7,94	637.140.000
- Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	2.500.000	DAU	Kab/Kota							-				-	-	-	2.500.000
- Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	1.500.000	DAU	Kab/Kota							-				-	-	-	1.500.000
Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	150.000.000	DAU	Kab/Kota				3.850.000			22.760.000				26.610.000	17,74	17,74	123.390.000
Penyedia Layanan Dasar dalam tangkai Dampak - Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	75.000.000	DAU	Kab/Kota							-				-	-	-	75.000.000
Pembinaan dan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5.000.000	DAU	Kab/Kota							-				-	-	-	5.000.000

Pencegahan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	333.100.000	DAU	Kab/Kota							13.300.000						26.600.000	7,99	7,99	306.500.000
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja Melalui Pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bermuansa Hak Asasi Manusia	75.000.000	DAU																	75.000.000
Penindakan atas Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	50.000.000	DAU	Kab/Kota							1.750.000						1.750.000	3,50	3,50	48.250.000
PENEGAKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DAN PERATURAN GUBERNUR	90.000.000	DAU																	90.000.000
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	5.000.000																		5.000.000
Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	70.000.000																		70.000.000
Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	15.000.000	DAU	Kab/Kota																15.000.000
PEMBINAAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) PROVINSI	10.000.000																		10.000.000
Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	10.000.000																		10.000.000

LAMPIRAN : DOKUMENTASI LAPORAN BULAN MARET 2024



Foto kegiatan Pertemuan dengan Komisi Informasi di Ruang Kasat POL PP Prov.NTT



Foto kegiatan Survei Laporan Masyarakat di Manulai



Kegiatan Pelantikan Pejabat Tinggi Pratama



Foto kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Perda/Perkada di SMK Negeri 5 Kupang



Foto kegiatan Upacara HUT ke-74 SATPOL PP dan HUT ke-62 SATLINMAS



Foto kegiatan Rapat Koordinasi Teknis SATPOL PP Tingkat Provinsi



Foto kegiatan Penanaman Pohon di Alun-alun Kota



Foto kegiatan koordinasi Satpol PP Provinsi NTT dengan Satpol PP Kabupaten/Kota di Ruang Kasat Satpol PP Provinsi NTT



Foto kegiatan Rapat Capaian Kinerja Triwulan II Pj. Gubernur NTT di Ruang Rapat Gubernur NTT



Foto kegiatan Kesiapan Operasi Ketupat Turangga 2024 dalam Rangka Pengamanan Hari Raya Idul Fitri di Polda NTT Tahun 2024



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jln. Polisi Militer No. -Telp. (0380)-828090

Email : satpolpp_prov.ntt@Yahoo.com

Website : www.satpol-pp.nttprov.go.id

K U P A N G

08 Mei 2024

Yth. - Kepala Bappelitbangda Provinsi NTT
- Kepala Badan Keuangan Daerah Setda
Provinsi NTT

SURAT PENGANTAR

Nomor : 000.1.5/345/sat pol pp 1.1

JENIS SURAT	JUMLAH	KETERANGAN
2	3	4
Laporan Bulan April Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024	1 (Satu) Buku	Dikirim untuk ditindak lanjuti

Demikian Laporan ini atas kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Plt. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,



IK. YOHANES OKTOVIANUS, MM

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19661029 199403 1 007

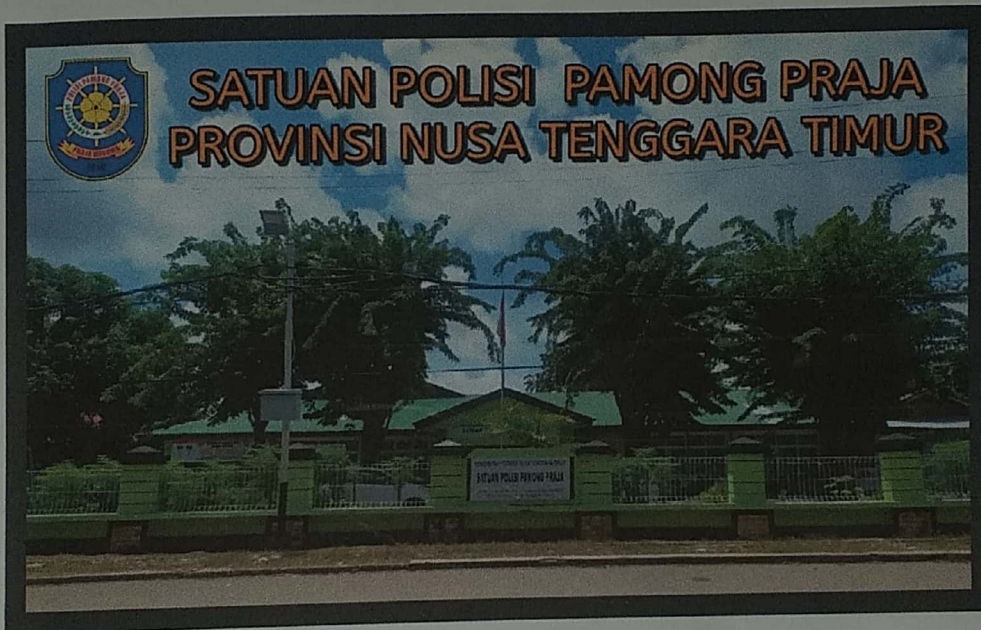
Paraf Hirarki :	
Plh. Sekretaris	t
Kepala Sub Bagisn Program Data dan Evaluasi	p

LAPORAN BULAN APRIL 2024





LAPORAN BULAN APRIL



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024

Jalan Polisi Militer Nomor 1, Telpon/Fax (0380) 828090
Email : satpolpp_prov.ntt@yahoo.com
Website : www.satpol-pp.nttprov.go.id

KUPANG



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur patut dipanjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena hanya atas penyertaan dan kasih-Nya maka Laporan Bulan April 2024 Tahun Anggaran 2024 Satuan Polisi Pamong Praja ini dapat diselesaikan dengan baik.

Tugas, fungsi dan wewenang Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah menjadi sangat penting yang mana terlaksananya berbagai kegiatan pengamanan dan penegakkan prodak hukum. Keadaan yang nyaman, aman dan tenteram diciptakan guna mendukung kinerja Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Untuk itu Laporan Bulan April Tahun Anggaran Tahun 2024 ini merupakan bahan, data dan informasi yang disusun secara baik, transparan dan dapat di pertanggungjawabkan kepada publik ataupun kepada pemangku kepentingan yang membutuhkan informasi terkait penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Kupang, 08 Mei 2024

Plt. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR


Ir. YOHANES OKTOVIANUS, MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19661029-199403 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Maksud dan Tujuan	3
D. Profil Satuan Polisi Pamong Praja	3
BAB II RENCANA KERJA TAHUNAN	12
A. Rencana Kerja Tahunan	12
B. Program dan Kegiatan Tahun 2023	16
C. Realisasi Anggaran	18
BAB III HASIL PELAKSANAAN	22
A. Sekretariat	22
B. Bidang Penegakan Perda dan Peraturan Gubernur	24
C. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	27
D. Bidang Perlindungan Masyarakat	29
E. Bidang Sumber Daya Aparatur	30
BAB IV PERMASALAHAN	32
A. Permasalahan	32
B. Tindak Lanjut	32
BAB V PENUTUP	33
- Laporan Keuangan	34
- Lampiran Foto/Dokumentasi	37

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu Perangkat Daerah yang di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Tugas Satuan Polisi Pamong Praja yakni membantu Kepala Daerah dalam memelihara Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan masyarakat, dan fungsinya sebagai berikut;

- a) Perumusan kebijakan di bidang Satuan Polisi Pamong Praja;
- b) Pelaksanaan kebijakan di bidang Satuan Polisi Pamong Praja;
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Satuan Polisi Pamong Praja;
- d) Pelaksanaan administrasi di bidang Satuan Polisi Pamong Praja;
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas dan fungsi yang telah dijabarkan diatas kemudian diuraikan dalam program dan kegiatan dimana sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 tentang Satuan Polisi pamong Praja melaksanakan urusan Pemerintahan Wajib berkaitan dengan Pelayanan Dasar dalam arti bahwa pelayanan yang diberikan oleh Satuan Polisi pamong Praja berkaitan dengan hak setiap warga masyarakat yang wajib diperoleh sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal.

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur berupaya agar mampu menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan bulan April 2024 laporan kinerja ini menggambarkan kinerja yang telah dilaksanakan, sehingga sangat diharapkan dapat bermanfaat bagi semua komponen yang

terlibat dalam proses menciptakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat.

B. Dasar hukum

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pakian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
10. Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur.
11. Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (P-DPA-SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2024 Nomor : DPPA/A.1/1.05.0.00.0.00.01.0000/001/2024.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud.

Sebagai bahan pertanggungjawaban terhadap hasil pelaksanaan program dan kegiatan bulan April 2024.

2. Tujuan.

Untuk menghasilkan sebuah laporan kinerja bulanan yang menggambarkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT bulan April Tahun Anggaran 2024.

D. Sumber Daya Manusia (SDM) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 131 orang dengan rincian sebagai berikut:

a. Berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah (Orang)
1	2	3
1.	Kepala Satuan	1
2.	Sekretaris	-
3.	Kepala Bidang	3
4.	Kepala Seksi	7
5.	Kepala Sub Bagian	3
6.	Jabatan Fungsional	61
7.	Jabatan Fungsional Umum	27
8.	Diperbantukan	1
9.	Honorar	29
Jumlah		131



b. Berdasarkan Jenis Kelamin

Jabatan Pegawai	Jenis Kelamin	
	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)
1	2	3
Kepala Satuan	1	
Sekretaris	-	
Kepala Bidang	4	
Kepala Sub Bagian	1	2
Kepala Seksi	5	2
Jabatan Fungsional	53	7
Pelaksana	18	7
Tenaga Honorer	18	11
Total Jumlah	105	29
	131 Orang	

c. Jumlah ASN Berdasarkan Pangkat/Golongan.

Rincian Kepangkatan/Golongan					Jumlah
Kepangkatan PNS	A	B	C	D	
Golongan IV	1	2	-	1	4 orang
Golongan III	16	19	12	8	43 orang
Golongan II	-	2	4	38	45 orang
Golongan I	-	-	-	-	- orang
Jumlah	17	24	16	48	103 orang

d. Berdasarkan Jenjang Pendidikan.

No.	Jenjang Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1.	Pasca Sarjana (S2)	4	-	4
2.	Sarjana (S1)	35	13	48
3.	Diploma (D3)	1	-	1
4.	SMA/SMU	47	5	51
Jumlah		87	18	103

e. Berdasarkan Agama.

No.	Data Keagamaan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1.	Islam	4	-	4
2.	Kristen	79	23	102
3.	Katholik	21	5	26
4.	Hindu	-	-	-
5.	Budha	-	-	-
Jumlah		104	28	131

Berikut dapat di sampaikan data pemberian cuti dan tindak disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur selama bulan April 2024 sesuai ketentuan yang

berlaku seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil :

1. Cuti tahunan berdasarkan Kepangkatan/Golongan.

No.	Data Cuti Tahunan	Jumlah
1	2	3
1.	Golongan IV	-
2.	Golongan III	4
3.	Golongan II	-
Jumlah		4

2. Data Pegawai yang kena sanksi Kepegawaian :

No.	Data Pegawai Yang Kena Sanksi Kepegawaian	Jumlah
1	2	3
1.	Golongan IV	-
2.	Golongan III	-
3.	Golongan II	-
4.	Banpol	-
5.	Cleaning Service	-
Jumlah		-

Selain melaksanakan tugas Satuan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur juga juga melakukan penjagaan (piket) dalam rangka menjaga aset penting milik pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur adapun aset tersebut antara lain :

1. Pos Kantor Gubernur/Sasando.
2. Pos Rumah Jabatan Gubernur.
3. Rumah Jabatan Wakil Wakil Daerah.
4. Rumah Jabatan Sekretaris Daerah.
5. Posko Praja (Kantor Satpol PP).

Penjagaan pada tempat/lokasi jaga dibagi dalam 3 (tiga) sift, dimana masing-masing sift dibagi waktu selama 1 x 24 jam, mulai jam 08:00 pagi hingga jam 08:00 pagi berikutnya. Jadwal pelaksanaan piket diatur sesuai dengan surat keputusan Kepala satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa

Tenggara Timur 2024 (terlampir).

E Sarana dan Prasarana

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam melaksanakan tugas yang diemban didukung dengan prasarana penunjang operasional kegiatan baik dikantor maupun dilapangan. Sarana Prasarana tersebut dicatat sebagai aset karena proses pengadaannya bersumber dari Dana Alokasi Umum yang dituangkan dalam dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur dari Tahun Anggaran 2003 sampai dengan tahun 2024 sebagai berikut :

Sarana Prasarana Pendukung

No	Jenis Nama Barang	Merk/Type/Bahan	Vol	Satuan	Keadaan Barang	Tahun Pengadaan
1.	Mobil Pic Up (DH 8059 AW	Besi/Toyota Pic Up	1	Unit	B	2003
2	Meja Biro 4 Laci	Arinda/Olympic	1	Buah	B	2008
3	Meja Biro 4 Laci	Arinda/Olympic	1	Buah	B	2008
4	Lap Top/Toshiba	Metal	1	Buah	B	2008
5	Air Condition	Besi /National/ 1Pk	2	Buah	B	2008
6	Air Condition	Besi/Akira	1	Buah	B	2008
7	Mobil Truck (DH 8047 AW)	Besi/Isuzu	1	Unit	B	2009
8	Mobil Minibus (DH 196 AW)	Besi/Toyota Rush	1	Unit	B	2009
9	Lemari 2 Pintu	Kayu Jati	6	Buah	B	2009
10	Lap Top Azer	Metal	1	Buah	B	2009
11	Printer HP/Laser Jet	Metal	1	Buah	B	2009
12	Wireless	Tens	1	Buah	B	2009
13	Megaphone Toa	Besi	1	Buah	B	2009
14	Facsimile	Panasonic	1	Buah	B	2009
15	Televisi	Digitec	1	Buah	B	2009
16	Kain Horrden	Kain	1	Buah	B	2009
17	Lambang Garuda		2	Buah	B	2009

18	TiangBendera	Besi	1	Buah	B	2009
19	Papan Nama SKPD	Besi	1	Buah	B	2009
20	Sepeda Motor (DH 2843 AW)	Besi/Honda/ GL 200 R	1	Unit	B	2010
21	Sepeda Motor (DH 2844 AW)	Besi/Honda/ GL 200 R	1	Unit	B	2010
22	Sepeda Motor (DH 2845 AW)	Besi/Honda/ GL 200 R	1	Unit	B	2010
23	Trasmister UHF	Motorola GR500	1			2010
24	MejaKerja	Kayu	10	Buah	B	2011
25	KursiKerja	Kayu	10	Buah	B	2011
26	Lemari 2 Pintu	Kayu Jati	5	Buah	B	2011
27	Komputer PC Simbada	Metal	2	Buah	B	2011
28	Lap Top Toshiba/L745	Metal	2	Buah	B	2011
29	Printer Canon	Metal	5	Buah	B	2011
30	Handy Talkie	Motorola GP2000	5	Buah	B	2011
31	Handy Cam	Sony	1	Buah	B	2011
32	Alat Kejut Listrik	Metal	13	Buah	B	2011
33	Sound System	Rhoad	1	Buah	B	2011
34	Komputer PC Simbada	Metal	2	Buah	B	2012
35	Televisi	Multimax	1	Buah	B	2012
36	Televisi	Sharp	1	Buah	B	2012
37	Scaner	Metal	1	Buah	B	2012
38	Kasur Busa	Bigland	8	Buah	B	2012
39	LayarProyektor		1	Buah	B	2012
40	MejaPimpinan 4 Laci	Kayu	1	Buah	B	2013
41	MejaKerja	Kayu	6	Buah	B	2013
42	Lemari 2 Pintu	Kayu Jati	2	Buah	B	2013
43	Komputer PC Simbada	Metal	2	Buah	B	2013

44	Lap Top Toshiba L840	Metal	4	Buah	B	2013
45	Kamera Digital	Canon	1	Buah	B	2013
46	Layar Proyektor		1	Buah	B	2013
47	Mobil Double Cabin (DH 8249 AW)	Besi/Toyota Hilux	1	Unit	B	2014
48	Sepeda Motor (DH 3953)	Besi/Kawasaki KLX 15	1	Unit	B	2014
49	Sepeda Motor (DH 3954)	Besi/ Kawasaki KLX 15	1	Unit	B	2014
50	Sepeda	Paragon	6	Buah	B	2014
51	Kursi Sofa	Busa	1	Buah	B	2014
52	Lemari 2 Pintu	Kayu Jati	2	Buah	B	2014
53	Kulkas	Besi/ Polytron	1	Buah	B	2014
54	UPS/Matsunaga	Metal	10	Buah	B	2014
55	Lap Top Lenovo B490	Metal	1	Buah	B	2014
56	Printer Canon MX 397	Metal	1	Buah	B	2014
57	Air Condition/	Besi Polytron	5	Buah	B	2014
58	Wirelessgenggam	Toa-ZR1015	4	Buah	B	2014
59	Televisi	Polytron	5	Buah	B	2014
60	Handy Talkie	Motorola A 12	40	Buah	B	2014
61	Antena, Rig, Repeater	Motorola CDR500	1	Buah	B	2014
62	Mesin Absen Elektronik	Secure	1	Buah	B	2014
63	Mesin Absen Elektronik	Secure	1	Buah	B	2014
64	Mesin Ketik	Brother	1	Buah	B	2014
65	Handy Cam	Sony	1	Buah	B	2014
66	Meja Rapat	Kayu Jati	5	Buah	B	2015
67	Meja Biro 4 Laci	Kayu	1	Buah	B	2015
68	Meja 1/2 Biro, 2 Laci	Kayu	15	Buah	B	2015
69	Kursi Rapat	Busa//Master Chair	20	Buah	B	2015

70	KursiKerja	Kayu	21	Buah	B	2015
71	Lemari 2 Pintu	Kayu Jati	1	Buah	B	2015
72	Tempat Tidur Lipat	Metal	7	Buah	B	2015
73	Lap Top Toshiba C55	Metal	5	Buah	B	2015
74	Lap Top Asus X453MA	Metal	1	Buah	B	2015
75	Printer Canon	Metal	5	Buah	B	2015
76	Tirai/Gorden	Kain	2	Buah	B	2015
77	Mic & Tiang Mic	Shure & NVK	1	Buah	B	2015
78	Kamera Digital	Canon	1	Buah	B	2015
79	Senter	S.W.A.T XML-T6	7	Buah	B	2015
80	Lemari Arsip	Katyu	1	Buah	B	2016
81	Komputer PC	LG	1	Buah	B	2016
82	Printer	Canon MP280	1	Buah	B	2016
83	Air Condition	Polytron	4	Buah	B	2016
84	Dispenser		6	Buah	B	2016
85	Taplak Meja dan Vas Bunga	Kain	1	Buah	B	2017
86	Mesin Potong Rumput	Besi	1	Buah	B	2017
87	Linggis kuku kambing	Besi	5	Buah	B	2017
88	Meja Rapat	Kayu	3	Buah	B	2017
89	Meja 1/2 Biro	Kayu	6	Buah	B	2017
90	Kursi Rapat	Besi	50	Buah	B	2017
91	Lemari 3 Pintu	Kayu	2	Buah	B	2017
92	Dispenser standing	Besi	2	Buah	B	2017
93	Kamera Digital	Besi	1	Buah	B	2017
94	Papan Nama SKPD	Besi	1	Buah	B	2017
95	Komputer (hp AIQ)	Hp	6	Unit	B	2020
96	Printer	(Epson L3110)	6	Unit	B	2020
97	Lemari	Kayu	5	Unit	B	2020

98	Meja Kerja	Kayu	7	Unit	B	2020
99	Meja Rapat	Kayu	2	Unit	B	2020
100	Kursi Kerja	Kayu	7	Unit	B	2020
101	Wirlaes		1	Unit	B	2020
102	Papan Sekretariat PPNS		1	Unit	B	2020
103	Papan Struktur Organisasi 1		1	Unit	B	2020
104	Papan Struktur Organisasi 1		1	Unit	B	2020
105	Papan Visi Misi		1	Unit	B	2020
106	Papan Informasi		1	Unit	B	2020
107	Mesin Potong Rumput		1	Unit	B	2020
108	Alat Pengukur suhu (Termogram)		2	Buah	B	2021 (BTT)
109	Genset	Yamaha/Bensin	2	Unit	B	2021
110	Mobil Truck (DH 8279 WA)	Besi/Hino	1	Unit	B	2021
111	Mobil Hilux Double Cabin (DH 19)	Besi/Toyota Hilux	1	Unit	B	2021

BAB II

RENCANA KERJA TAHUNAN

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai urusannya dalam bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat memiliki langkah-langkah strategis dalam upaya mendukung program Kepala Daerah, Hal ini dijabarkan dalam rencana Program Kegiatan sebagai berikut :

A. Rencana Kinerja Tahunan.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar dalam Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.

Rencana Kerja Tahunan (RKT) disusun berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur yang Termuat dalam Rencana Strategis (Renstra) tahun 2024-2026 sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026 :

Indikator Kinerja Utama (KU) Tahun 2024
Satuan Polisi pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI	TARGET	FORMULAINDIKATOR
			2023	2024	
1	2	3	4	6	7
1	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1. Presentase meningkatnya pencapaian SPM Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	44,76%	100%	Jumlah kegiatan yang diselesaikan -----x 100 Target
		2. Presentase meningkatnya Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (jumlah Perda dan Perkada yang ditegakan)	3	3	Jumlah Penyelesaian Perda dan Perkada yang ditegakan -----x100 Jumlah Perda dan Perkada
		3. Presentase Pencegahan Daerah Rawan Kebakaran setiap Tahun	-	100 %	Data Potensi Daerah Rawan Kebakaran -----x100 Jumlah Wilayah

Dari tabel Rencana Kinerja Tahunan (RKT) diatas dapat diambil langkah strategis antara lain :

1. Membangun dan mengembangkan sinergitas dengan Instansi/ Unit/ Lembaga Hukum/ Masyarakat/ Stekholder terkait lainnya dalam melakukan pengendalian dalam rangka menciptakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
2. Membangun komunikasi yang secara berkala dalam melakukan diteksi dini dan cegah dini terhadap segala bentuk kegiatan yang berdampak pada adanya pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Dengan rumusan kebijakan yang telah ditetapkan antara lain :

1. Meningkatkan koordinasi antar Instansi/Unit Kerja/Lembaga Hukum yang tersebar dalam wilayah Nusa Tenggara Timur.
 2. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia.
 3. Pemenuhan sarana prasarana yang berstandar dalam mendukung pelaksanaan kegiatan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- Rencana Kerja

Tabel Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikator (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.2	Urusan Pemerintah an Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat		Prov/kab/Kota		12.863.647.600	APBD Prov. NTT			12.863.647.600
05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkatoran yang Berkualitas	Kota Kupang	100 %	12.863.647.600	APBD Prov. NTT		100 %	12.863.647.600
1.01	Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Tersedianya laporan capaian kinerja PD	Kota Kupang	49 dokumen	38.000.000	APBD Prov. NTT		49 dokumen	38.000.000
1.02	Administrasi keuangan pemerintah daerah	Terbayarnya gaji dan tunjangan	Kota Kupang	4 laporan	11.032.449.000	APBD Prov. NTT		4 laporan	11.032.449.000
1.06	Administrasi umum pemerintah daerah	Tersedianya kebutuhan operasional kantor	Kota Kupang	1 piket	80.000.000	APBD Prov. NTT		1 piket	80.000.000
1.07	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang	Kota Kupang	4 laporan	-			4 laporan	-
1.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Tersedianya kebutuhan jasa operasional kantor	Kota Kupang	4 laporan	968.025.600	APBD Prov. NTT		4 laporan	968.025.600
1.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Terpeliharanya barang milik daerah yang menjadi aset	Kota Kupang	4 laporan	113.600.000	APBD Prov. NTT		4 laporan	113.600.000
05.02	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Presentase meningkatnya pencapaian SPM trantibum	Kota Kupang	100 %	624.600.000	APBD Prov. NTT		Kota Kupang	624.600.000
1.01	Penanganan gangguan ketenteraman ddan ketertiban umum lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi	Terselenggaranya kegiatan penertiban, pengamanan, pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patrol turjawali dalam rangka trantibum	Kabupaten/kota	12 laporan	524.600.000	APBD Prov. NTT	Mengkoordinir layanan SPM	12 laporan	524.600.000
1.02	Penegakan peraturan daerah provinsi dan peraturan gubernur	Presentase meningkatnya pencapaian SPM trantibum (jumlah perda dan perkara yang ditegakan)	Kota Kupang	12 laporan	90.000.000	APBD Prov. NTT	Mengkoordinir layanan SPM	12 laporan	90.000.000
1.03	Pembinaan penyidik pegawai negeri sipil	Kegiatan pengembangan kapasitas PPNS	Kota Kupang	2 laporan	10.000.000	APBD Prov. NTT	Mengkoordinir layanan SPM	2 laporan	10.000.000

05.04	Program Pencegahan Penanggulangan Peyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Presentase pencegahan daerah berpotensi rawan kebakaran	Kota Kupang	100 %	7.000.000			100 %	7.000.000
1.01	Peyelenggaran pemetaan rawan bencana kebakaran	Peta daerah rawan kebakaran	Kota Kupang	4 laporan	7.000.000	APBD Prov. NTT	Mengkoordinir layanan SPM	4 laporan	7.000.000

Dalam implementasi rencana kerja, seluruh program dan kegiatan diarahkan untuk mewujudkan penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dengan mengoptimalkan seluruh bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam bentuk penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sehingga dapat menciptakan kondisi yang aman dan tentram.

B. Program Dan Kegiatan Tahun 2024.

Program dan Kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur seluruh pendanaanya bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan anggaran belanja dan Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun 2024 antara lain :

1. Belanja Daerah/Belanja Operasi.

1. Belanja Daerah/Operasi Rp. 13.036.880.880.- kegiatan ini terdiri dari

1.1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :

1.1.1 Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

1.1.1.1 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

1.1.2 Administrasi Keuangan Pemerintah Daerah.

1.1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

1.1.3 Administrasi Umum Perangkat Daerah Daerah.

1.1.3.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

1.1.3.2 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.

1.1.3.3 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.

1.1.3.4 Penyediaan Bahan Material.

1.1.3.5 Fasilitas Kunjungan tamu.

1.1.3.6 Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.1.3.7 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

- 1.1.4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - 1.1.4.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
 - 1.1.4.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik.
 - 1.1.4.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.1.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - 1.1.5.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
 - 1.1.5.2 Pemeliharaan Aset Tetap lainnya.
 - 1.1.5.3 Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya.

1.2. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- 1.2.1 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi :
 - 1.2.1.1 Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan.
 - 1.2.1.2 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
 - 1.2.1.3 Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi.
 - 1.2.1.4 Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
 - 1.2.1.5 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
 - 1.2.1.6 Pencegahan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini, Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan,

dan Pengawalan.

1.2.1.7 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja Melalui Pelatihan Teknis Termasuk dalam Pelaksanaan tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia.

1.2.1.8 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa.

1.2.2 Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur.

1.2.2.1 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.

1.2.2.2 Pengawasan atas kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.

1.2.2.3 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.

1.2.3 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi.

1.2.3.1 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS

1.3. Program Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran :

1.3.1 Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran.

1.3.1.1 Penyusunan dan Pemutahiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran.

1.3.1.2 Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran

C. Realisasi Anggaran

Dalam periode tahun 2024 tersedia pagu anggaran sesuai Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran sebesar Rp. 13.121.680.880.- (tiga belas miliar seratus dua puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) berikut kondisi atau keadaan kas sampai dengan tanggal 30 April 2024 yang telah dipertanggungjawabkan

secara fungsional oleh bendahara Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur pada badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DANKETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	13.121.680.880	3.869.069.609	29.49
01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	12.266.580.880	3.756.249.497	30.62
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Relaisasi Kinerja SKPD	38.000.000	8.516.000	22.41
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.032.449.000	3.345.545.760	30.32
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.032.449.000	3.345.545.760	30.32
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	80.000.000	35.259.113	44.07
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	722.780	14.46
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.000.000	12.941.550	51.77
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.000.000	750.000	37.50
	- Penyediaan Bahan/Material	20.000.000	7.091.307	35.46
	- Fasilitas Kunjungan Tamu	5.000.000	4.998.000	99.96
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.000.000	3.255.476	65.11
	- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	18.000.000	5.500.000	30.56
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	997.031.880	311.228.891	31.22
	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.400.000	510.000	36.43
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.000.000	1.398.000	13.98
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	985.631.880	309.320.891	31.38
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	119.100.000	55.699.733	46.77
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	70.000.000	39.942.233	57.06
	- Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	19.100.000	6.115.000	32.02
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.000.000	9.642.500	32.14

02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	848.100.000	112.820.112	13.30
	Penanganan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Provinsi	748.100.000	96.520.112	12.90
	- Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	2.500.000	-	-
	- Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	1.500.000	-	-
	- Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	150.000.000	31.370.000	20.91
	- Penyediaan Layanan Dasar Dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	75.000.000	-	-
	- Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5.000.000	-	-
	- Pencegahan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan masyarakat Melalui deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	333.100.000	60.350.112	18.12
	- Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja Melalui Pelatihan Teknis Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	131.000.000	-	-
	- Penindakan atas Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	50.000.000	4.800.000	9.60
	Penegakan Peraturan daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	90.000.00	16.300.000	18.11
	- Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	5.000.000	-	-
	- Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	70.000.000	16.300.00	23.29
	- Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	15.000.000	-	-

	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	10.000.000	-	-
	- Pengembangan Kapasitas dan Karir PPNS	10.000.000	-	-
03	PROGRAM PENCEGAHAN PENANGGULANGAN PENYELEMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	7.000.000	-	-
	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	7.000.000	-	-
	- Penyusunan dan Pemuktahiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	5.000.000	-	-
	- Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	2.000.000	-	-
	Jumlah Realisasi sampai dengan April	13.121.680.880	3.869.069.609	29.49

Kondisi atau keadaan kas per 30 April 2024

Pada tabel diatas dapat disampaikan bahwa capaian progres fisik dan keuangan pada Bulan April 2024 sebesar Rp. 3.869.069.609.- (tiga miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta enam puluh sembilan ribu enam ratus sembilan rupiah) atau 29.49 % dari Total pagu sebesar Rp. 13.121.680.880.- (tiga belas miliar seratus dua puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).

BAB III

HASIL PELAKSANAAN

Dalam Periode sampai dengan bulan April 2024 dimana rutin dilaksanakan dengan hasil capaian pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut :

Bidang Kesekretariatan.

1. Sub Bagian Program Data dan Evaluasi.

Capaian pelaksanaan tugas antara lain adalah :

1. Laporan Bulanan Bulan April 2024.
2. Laporan Triwulan I Tahun 2024.
3. Laporan e-monev Bulan Maret Tahun 2024.
4. Laporan SPM Triwulan I tahun 2024.
5. Menghadiri Kegiatan Penilaian kinerja Kepala PD Tahun 2024.
6. Mengikuti Musrembang RKPD Provinsi NTT Tahun 2025 dan Musrembang RPJPD Provinsi NTT Tahun 2024-2045.
7. Menghadiri Rapat Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang bersumber dari APBD.
8. Pengiriman Data Pengelola Akun Akses Data REGSOSEK (Bappelitbangda NT)
9. Melaksanakan Rapat Staf di Aula Satpol PP Prov. NTT
10. Melaksanakan Rapat Pembahasan Anggaran Perubahan III di Badan Keuangan Daerah Setda Provinsi NTT.
11. Melaksanakan Kegiatan Kesamaptaan (PBB)
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Sub Bagian Keuangan.

1. Mengajukan SPP Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), Tambah Uang (TU) dan Gaji PNS (LS).
2. Menyusun SPJ Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), Tambah Uang (TU) dan Gaji PNS (LS).
3. Membuat laporan SPJ Fungsional dan laporan Pertanggungjawaban atas belanja SKPD.
4. Membuat Laporan Keuangan SKPD.
5. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh atasan.

3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.

- Kepegawaian

No.	Uraian Program / Kegiatan	Jumlah
1	Membuat rekapan piket bulan maret Tahun 2024	1 berkas
2	Membuat rekapan kenaikan pangkat	1 berkas
3	Scan bahan administrasi usulan kenaikan pangkat ASN	8 ASN
4	Membuat usulan surat cuti pada aplikasi sip cut	4 ASN
5	Menyelesaikan pengisian formulir instrument evaluasi kelembagaan	1 keg
6	Mengikuti kegiatan peringatan Hut Pol PP dan Linmas	1 keg
7	Menyelesaikan surat tugas	4 surat
8	Mengoreksi usulan berkala	4 orang
9	Mengikuti rakortek Satuan Polisi Pamong Praja dengan Kabupaten/Kota	1 keg
10	Mengikuti sosialisasi Pergub III tahun 2023 tentang TPP	1 keg
11	Memproses dokumen perjanjian kerja	1 dok
12	Menghimpung dokumen perjanjian kerja	1 dok
13	Menyelesaikan surat untuk administrasi TPP	2 surat
14	Membuat daftar pembagian beras ASN	105 PNS
15	Membuat model C	2 orang
16	Menyelesaikan SK pengelola keuangan SK, SK TIM angka kredit, SK pengelola kepegawaian	3 dok
17	Penyelesaian rekapan kehadiran piket ASN tahun 2023	1 dok

- Umum

No.	U r a i a n	Jumlah
1.	Jumlah Surat Masuk bulan April 2024	30 surat
2.	Jumlah Surat Keluar bulan April 2024	39 surat
3.	Jumlah undangan yang masuk bulan April 2024	17 surat

- Perlengkapan

Uraian Program/Kegiatan	Jumlah/ Keterangan
Mengatur Cleaning Service untuk membersihkan ruang kantor	Setiap Hari

**A. Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
Bulan April 2024.**

**KEGIATAN PENANGANAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA
DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI**

No	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa	Ket
			Rp	%		
1	Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum lintas daerah Kabupaten/Kota dan 1 (satu) daerah Provinsi	175.000.000.-		-	175.000.000.-	-

1. Sub Kegiatan : Sosialisasi Penegakan Perda dan Pergub

No	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa	Ket
			Rp	%		
1	Belanja Nakanan dan Minuman Rapat Sosialisasi Penegakan Perda dan Pergub	5.000.000.-	-	-	5.000.000.-	-
	Jumlah				5.000.000.-	-

2. Sub Kegiatan : Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Perda dan Pergub “Operasi DBHCHT (Rokok Ilegal)”

No	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa	Ket
			Rp	%		
1	Belanja Nakanan dan Minuman Rapat Sosialisasi Penegakan Perda dan Pergub	5.000.000.-	-	-	5.000.000.-	-
	Jumlah				5.000.000.-	-

3. Sub Kegiatan : Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan perda ddan pergub “operaso DBHCHT (rokok illegal)”

No	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa	Ket
			Rp	%		
1	Belanja Bahan Cetak	1,60.000.-	-	-	1,60.000.-	-
2	Belanja Makan minum rapat	16.960.000.-	-	-	16.960.000.-	
3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (uang harian transport lokal)	51.680.000.-	-	-	51.680.000.-	
	Jumlah				75.000.000.-	-

4. Sub Kegiatan : Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur sesuai SOP

No	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa	Ket
			Rp	%		
1	Belanja Bahan untuk kantor kegiatan ATK	40.000.-	-	-	40.000.-	-
2	Belanja Perjalanan Jasa Kantor	14.960.000.-	-	-	14.560.000.-	
	Jumlah				15.000.000.-	-

5. Sub Kegiatan : Pengembangan Kapasitas dan Karir PPNS

No	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa	Ket
			Rp	%		
1	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak	400.000.-	-	-	400.000.-	-
2	Belanja makan minum peserta rapat	3.600.000.-	-	-	3.600.000.-	
3	Belanja perjalanan dlam kota (transportasi peserta rapat teknis PPNS)	6.000.000.-	-	-	6.000.000.-	

KEGIATAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DAN PERATURAN GUBERNUR
MELALUI KEGIATAN PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENINDAKAN

No	Tanggal	Kegiatan	Tempat	Jumlah yang Dibuna/Diawasi (orang)	Jumlah yang Ditindak (orang)	Ket
1	19 April 2024	Melakukan penanganan atas pelanggaran perda/perkada melalui pengawasan, pembinaan dan penindakan atas gangguan trantibum melalui penertiban dan penanganan aksi unjuk rasa dan kerusuhan massa di Kantor Sasando dan Kantor DPRD Provinsi NTT oleh Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi Eksekutif Kota Kupang terkait kajian kasus Tenaga Kesehatan (Nakes)	Kantor Sasando dan Kantor DPRD Provinsi. NTT	28	-	-
2						

**KEGIATAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DAN PERATURAN GUBERNUR
PENGADUAN MASYARAKAT**

No	Tanggal	No Surat/Tgl. Surat Masuk/Hal	Isi laporan Pengaduan	Tindak Lanjut Jumlah yang Ditindak (orang)	Ket
1					

DATA PELANGGAR PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN GUBERNUR

No	No Surat/Tgl. Surat Masuk/Hal	Pelanggar Perda/Pergub	Perda/Pergub yang dilanggara	Tindak Lanjut	Ket
1					

B. Ketenteraman dan KetertibanUmum.

Bulan April 2024

No	Jenis Pengamanan	Jumlah Pengamanan		Masalah	Pemecahan Masalah	Instansi Terkait	Keterangan
		Lokasi Kegiatan	Bulan				
1	2	3	4	6	7	8	9
01.	Melaksanakan apel gelar pasukan dalam rangka pengamanan hari Raya Idul Fitri 1445 H Tahun 2024	Polda NTT	x kegiatan 03 April 2024	-	-	Polda NTT dan unsure terkait	34 orang al. Kasat, Kabid SDA, Linmas, Kasi Ops, HK dan anggota Pol PP
02.	Melakukan pengamanan dalam rangka acara buka puasa bersama Pj. Gubernur NTT, Forkompinda, Pimpinan Instansi Vertikal dan Pemimpin perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT	Rumah Jabatan Gubernur NTT	1 x kegiatan 05 April 2024	-	-	OPD lingkup Pemprov. NTT dan Forkompinda Pimpinan Instanasi Vertikal NTT	20 orang al. Kasat, Kabid, Kasi dan anggota
03.	Mengikuti acara serah terima Plt. Kasat Pol PP dan Bapak Ir. Cornelis Wadu, M.Si	Aula Satpol PP Provinsi NTT	1 x kegiatan 05 April 2024	-	-	-	Seluruh anggota Satpol PP
04.	Melakukan patrol bersama Kapolda NTT dalam rangka memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat Kota Kupang pada malam takbiran menyambut Hari Raya Idul Fitri 1445 H Tahun 2024	Kota Kupang	1 x kegiatan 09 April 2024	-	-	Polda NTT dan unsure terkait	5 orang al. Kasat, Kabid SDA, Kasi Ops, HK dan anggota Pol PP
05.	Melaksanakan pengamanan dalam rangkakegiatan Sholat Idul Fitri 1445 H Tahun 2024 bersama Pj. Gubernur NTT	Alun-alun dan Rumah jabatan Gubernur NTT	1 x kegiatan 10 April 2024	-	-	-	27 orang al. Kasat, Kabid SDA, Kasi Ops, HK dan anggota
06.	Mengikuti rapat bersama Plt. Kasat dan semua Pejabat structural dam anggota	Aula Satpol PP	1 x kegiatan 16 April 2024	-	-	-	Seluruh anggota Sat Pol PP
07.	Melaksanakan pengamanan dan mengikuti apel kesadaran ASN lingkup Pemprov. NTT	Halaman Kantor Gubernur NTT	1 x kegiatan 17 April 2024	-	-	-	20 orang al. Kasat, Kabid, Kasi dan anggota
08.	Melaksanakan kerja bakti/giat bersih bersama OPD lingkup Pemprov. NTT (aksi bersama membersihkan kawasan pesisir di lingkungan sekitarnya dari sampah plastic dan sejenisnya	Taman pariwisata Lasianan Kota Kupang	1 x kegiatan 19 April 2024	Ada masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya	Membersihkan rumput dan membakar sampah di sekitar pesisir	Semua OPD lingkup Pemprov. NTT	20 orang al. Kasat, Kabid, Kasi dan anggota

09.	Mengikuti pelatihan Kesamaptaan (PBB)	Halaman Kantor Satpol PP	1 x kegiatan 19 April 2024	-	-	-	Seluruh pejabat structural dan anggota
10.	Melakukan pengamanan aksi ujuk rasa/ demonstrasi LMND (Liga Mahasiswa Nasional Demonstrasi) Eksekutif Kota Kupang (LMND) Ek) terkait kasus tenaga kerja kesehatan (jumlah 30 orang)	Kantor Gubernur dan DPRD Prov. NTT	1 x kegiatan 19 April 2024	-	-	-	Seluruh pejabat structural dan anggota
11.	Mengikuti rapat bersama Pejabat Eselon III dan IV terkait ISO	Aula Satpol PP	1 x kegiatan 19 April 2024	-	-	-	Seluruh Pejabat Struktural
12.	Melakukan apel bersama dalam rangka HUT Kartini	Halaman Kantor Satpol PP	1 x kegiatan 22 April 2024	-	-	-	Seluruh Pejabat Struktural dan anggota satpol PP
13.	Mengikuti pelatihan Kesamaptaan (PBB)	Halaman Kantor Satpol PP	1 x kegiatan 22 April 2024	-	-	-	Seluruh Pejabat Struktural dan anggota satpol PP
14.	Mengikuti pelatihan Kesamaptaan (PBB)	Halaman Kantor Satpol PP	1 x kegiatan 26 April 2024	-	-	-	Seluruh Pejabat Struktural dan anggota satpol PP
15.	Mengikuti pembinaan rohani secara Virtual dari 4 tokoh agama	Aula Satpol PP	1 x kegiatan 26 April 2024	-	-	-	Seluruh ASN Satpol PP
16.	Melakukan penjagaan dan pengamanan aset milik Pemprov. NTT	Kantor Gubernur sasando, Rujab Gubernur, Rujab Wagub, Rujab Sekda, dan Kantor Satpol PP	1 x kegiatan tanggal 30 x 24 Jam	-	-	5 Pos Picket	Jumlah personil. 62 anggota al. 15 danru, 30 anggota piket, 4 anggota patwal dan 13 anggota pengawas/pengontrol

C. Bidang Perlindungan Masyarakat.

- Program : Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- Kegiatan : Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- Sub.Kegiatan : Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Program : Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
- Kegiatan : Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran
- Sub Kegiatan : Penyediaan dan Pemutahiran Infromasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan kebakaran
- Bimtek Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kab/Kota

Kode Rekening	URAIAN	PAGU ANGGARAN RP.	REALISASI KEUANGAN (Rp.)	SISA DANA (Rp.)	Realisasi %	MASALAH	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	7.000.000	-	-	-	-	-
1.05.02.1.01.04	Penyusunan dan Pemuktahiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kabakaran	5.000.000	-	-	-	-	-
	Penyediaan Infirmasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	2.000.000	-	-	-	-	-
	Total Dana Bulan April	7.000.000	-	-	-	-	-

D. Bidang Sumber Daya Aparatur.

Seksi Pelatihan Dasar dan Teknis Fungsional & Seksi Kesemaptaan

Program : Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan : Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Sub.Kegiatan : Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Prajadan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuasa Hak Asasi Manusia

No	Nama Kegiatan & Nama Personil Yang Bertugas	Pagu Anggaran Rp.	Realisasi Keuangan Rp	Realisasi Fisik %	Masalah	Solusi	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam Pelaksanaan tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	75.000.000	0	0	0	0	-
	Total Pengeluaran April 2024	75.000.000	0	0	0	0	-

Berikut data personil pemadam kebakaran pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur :

Data Pemadam Kebakaran Di Provinsi NTT

No.	Nama kabupaten/Kota	JumlahPersonil	Keterangan
1.	Kota Kupang	2.410	Dalam struktur Organisasi Sat. PolPP Kota Kupang tidak terakomodir Bidang Pemadam Kebakaran karena telah ada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Kupang
2.	Kabupaten Kupang	2.152	
3.	Kabupaten TTS	2.758	
4.	Kabupaten TTU	1.548	
5.	Kabupaten Belu	1.550	
6.	Kabupaten Malaka	1.340	
7.	Kabupaten Alor	894	
8.	Kabupaten Rote Ndao	630	
9.	Kabupaten Sabu Raijua	276	
10.	Kabupaten Lembata	1.569	
11.	Kabupaten Flores Timur	1.070	
12.	Kabupaten Sikka	1.010	
13.	Kabupaten Ende	1.966	
14.	Kabupaten Ngada	1.018	
15.	Kabupaten Nagekeo	1.386	
16.	Kabupaten Manggarai	1.940	
17.	Kabupaten Manggarai Timur	1.186	
18.	Kabupaten Manggarai Barat	1.616	
19.	Kabupaten Sumba Timur	516	
20.	Kabupaten Sumba Tengah	810	
21.	Kabupaten Sumba Barat	1.816	
22.	Kabupaten Sumba Barat Daya	864	
TOTAL		31.325	

BAB IV

PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT

A. Permasalahan

Permasalahan yang ditemui dalam pencapaian target kinerja bulan April antara lain :

1. Belum terlaksananya kegiatan bidang sesuai harapan.
2. Sumber pendanaan yang hanya bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
3. Terbatas rendahnya mutu sumber data manusia.

B. Tindak Lanjut.

Dari permasalahan diatas satuan Polisi pamong Praja berupaya membangun komunikasi dengan tim Anggaran Pemerintah Daerah melalui rapat asistensi bagi perubahan anggaran dengan prioritas pencapaian target urusan dan sumber daya manusia.

BAB V PENUTUP

Laporan kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban hasil pelaksanaan program dan kegiatan bulan April 2024, semoga apa yang telah disampaikan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur kedepan dalam rangka menciptakan ketenteraman dan ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat.

Akhir kata diucapkan terimakasih kepada semua pihak dalam lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sudah membantu dalam penyusunan laporan ini. Saran dan pendapat masih sangat dibutuhkan bagi kesempurnaan dari laporan ini.

Demikian laporan bulan April Tahun 2024 disajikan atas perhatian diucapkan terima kasih.

Kupang, 08 Mei 2024

Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Nusa Tenggara Timur,



IR. YOHANES OKTOVIANUS, MM

PEMERINTAH UTAMA MADYA

NIP. 19661029 199403 1 007

**LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN APBD PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BULAN APRIL 2024**

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	SUMBER DANA	LOKASI KEGIATAN	SASARAN	KONDISI s/d BULAN SEBELUMNYA						REALISASI BULAN INI	KONDISI s/d BULAN INI				SISA ANGGARAN (Rp)	KET	
						TARGET		REALISASI		Rp	(% KEU)		(% FISIK)	TARGET		REALISASI			
						(% FISIK)	(% KEU)	(% KEU)	(% FISIK)					Rp	(% FISIK)	(% KEU)			
																			(%) FISIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	13.121.680.880				-	-	2.998.097.276	95	95	854.672.393				3.469.069.609	29,49	29,49	9.264.911.271	
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	12.266.580.880					-	2.943.137.276	95	95	813.112.221				3.756.249.497	30,62	30,62	8.510.331.383	
	PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	38.000.000						5.976.000			2.540.000		-	-	8.516.000	22,41	22,41	29.484.000	
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	38.000.000	DAU	Kota Kupang	SKPD	-	-	5.976.000	15,73	15,73	2.540.000		-	-	8.516.000	22,41	22,41	29.484.000	
	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	11.032.449.000						2.626.700.155			716.845.605			-	3.345.545.760	30,32	30,32	7.686.903.240	
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.032.449.000	DAU	Kota Kupang	SKPD	-	-	2.626.700.155	23,83	23,83	716.845.605		-	-	3.345.545.760	30,32	30,32	7.686.903.240	
	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	80.000.000	DAU		SKPD	-	-	22.091.617	27,61	27,61	13.167.496		-	-	35.259.113	44,07	44,07	44.740.887	
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	DAU	Kota Kupang	SKPD	-	-	280.000	5,60	5,60	442.780		-	-	722.780	14,46	14,46	4.277.220	
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.000.000	DAU	Kota Kupang	SKPD	-	-	11.983.300	47,93	47,93	958.250			-	12.941.550	51,77	51,77	12.058.450	
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.000.000	DAU	Kota Kupang	SKPD	-	-		-	-	750.000			-	750.000	37,50	37,50	1.250.000	
	- Penyediaan Bahan Material	20.000.000	DAU	Kota Kupang	SKPD	-	-	4.830.317	24,15	24,15	2.260.990			-	7.091.307	35,46	35,46	12.908.693	
	- Fasilitas Kunjungan Tamu	5.000.000	DAU	Kota Kupang	SKPD	-	-	4.998.000	99,96	99,96	-		-	-	4.998.000	99,96	99,96	2.000	
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.000.000	DAU	Kota Kupang	SKPD	-	-		-	-	3.255.476			-	3.255.476.000	65,11	65,11	1.744.524	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	18.000.000	DAU	Kota Kupang	SKPD	-	-		-	-	5.500.000			-	5.500.000	30,56	30,56	12.500.000	
	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	997.031.880	DAU		SKPD	-	-	233.509.771	23,42	23,42	77.719.120			-	311.228.891	31,22	31,22	685.802.989	
	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.400.000	DAU	Kota Kupang	SKPD	-	-	100.000	7,14	7,14	410.000			-	510.000	36,43	36,43	890.000	
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.000.000	DAU	Kota Kupang	SKPD	-	-		-	-	1.398.000				1.398.000	13,98	13,98	8.602.000	
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	985.631.880	DAU	Kota Kupang	SKPD	-	-	233.409.771	23,68	23,68	75.911.120			-	309.320.891	31,38	31,38	676.310.989	

PEMERINTAHAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH										44,38	44,38	2.840.000	-	55.699.793	45,77	46,77	63.400.267
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan										56,70	56,70	250.000	-	39.942.233	57,06	57,06	30.057.767
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya										20,55	20,55	2.190.000	-	6.115.000	32,02	32,02	12.985.000
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										-	-	400.000	-	9.642.500	32,14	32,14	20.357.500
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM										-	-	41.560.112	-	112.820.112	13,30	13,30	751.579.888
PENANGANAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI										-	-	41.560.112	-	96.520.112	12,90	12,90	651.579.888
Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan										-	-	-	-	-	-	-	2.500.000
Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat										-	-	-	-	-	-	-	1.500.000
Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi										-	-	4.760.000	-	31.370.000	20,91	20,91	118.630.000
Penyedia Layanan Dasar dalam rangka Dampak										-	-	-	-	-	-	-	75.000.000
Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah										-	-	-	-	-	-	-	5.000.000
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum										-	-	-	-	-	-	-	-
Pencegahan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patrol, Pengamanan, dan Pengawasan										-	-	33.750.112	-	60.350.112	18,12	18,12	272.749.888
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja Melalui Pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia										-	-	-	-	-	-	-	131.000.000
Peningkatan atas Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Basa dan Kerusuhan Massa										-	-	3.050.000	-	4.800.000	9,60	9,60	45.200.000
PENEGAKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DAN PERATURAN GUBERNUR										-	-	-	-	16.300.000	18,11	18,11	90.000.000
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur										-	-	-	-	-	-	-	5.000.000
Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur										-	-	-	-	16.300.000	-	-	70.000.000
Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur										-	-	-	-	-	-	-	15.000.000

LAMPIRAN : DOKUMENTASI LAPORAN BULAN APRIL 2024



Foto kegiatan Apel Gelar Pasukan Operasi Kepolisian Terpusat “Ketupat Turangga 2024” dalam Rangka Pengamanan Idul Fitri 1445 H Tahun 2024



Foto kegiatan Serah Terima Jabatan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT



Foto kegiatan Buka Puasa Bersama Pemerintah Daerah dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi NTT



Foto kegiatan Pengamanan Pengambilan Janji Jabatan dan Pelantikan Penjabat Bupati Kupang dan Penjabat Bupati Ende

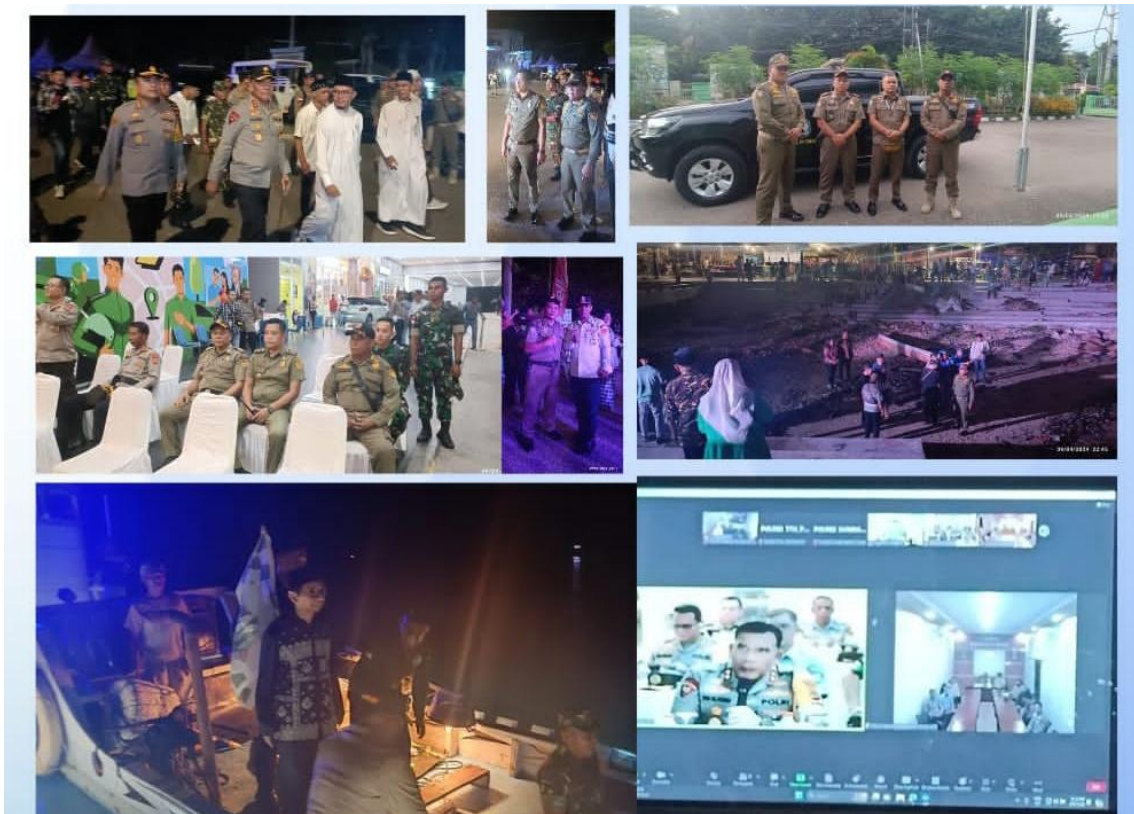


Foto kegiatan Patroli bersama Kapolda NTT Forkopimda dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri tahun 2024



Foto kegiatan Kesamaptaan (PBB) bagi seluruh Anggota Satpol PP Provinsi NTT



Foto kegiatan Pembahasan Perubahan Anggaran di Badan Anggaran Provinsi NTT



Foto kegiatan Kegiatan Pengambilan Data SPM Di Kawasan Industri Bolok Kabupaten Kupang



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jln. Polisi Militer No. 01 Kupang

Telp.Fax (0380) 828090 Laman *WWW.satpol-pp.nttprov.go.id*

Pos-el satpolpp prov ntt@yahoo.com

KEPUTUSAN

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 300/ 203.4 /Sat Pol.PP 2.1/2023

TENTANG

**PENETAPAN TIM PENGATURAN, PENJAGAAN, PENGAWALAN
DAN PATROLI (TURJAWALI) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024**

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur serta Perlindungan Masyarakat, maka perlu adanya Penetapan Tim Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan dan Patroli serta Petugas Lapangan/Pengawas (TURJAWALI) Tahun Anggaran 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu ada Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Petugas Lapangan/Pengawas, Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan dan Patroli (TURJAWALI) Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810)
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2013 tentang Pedoman Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 02 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
6. Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

P E R T A M A

- : Menetapkan Tim Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan dan Patroli (TURJAWALI) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024 dianggap mampu dan cakap untuk menjalani tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III dan IV.

K E D U A

- : Tim Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan dan Patroli (TURJAWALI) sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA keputusan ini mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

a. Penanggung Jawab:

1. Bertanggung jawab atas pelaksanaan seluruh tugas Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan dan Patroli;
2. Memberikan Arahan terkait dengan pelaksanaan tugas;
3. Menerima Laporan dari Pengawas setiap hari;
4. Memberikan laporan kepada Gubernur baik rutin maupun insidentil.

b. Pengawas/Pengontrol :

1. Melakukan Pengawasan atas pelaksanaan tugas;
2. Memberikan laporan kepada Kepala Satuan berdasarkan hasil pengawasan;
3. Memberikan teguran langsung kepada Komandan Regu apabila menemukan anggota yang tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya;
4. Memanggil anggota yang tidak melaksanakan tugas dan diberikan hukuman disiplin sesuai ketentuan;
5. Melakukan pencatatan tentang situasi dan kondisi pelaksanaan tugas dan melaporkan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

c. Pengawalan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

1. Melaksanakan Pengawalan baik dalam Kantor maupun diluar Kantor kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
2. Melaporkan Jadwal kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada Kepala Satuan secara rutin;

3. Melaporkan hasil pengawalan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara harian, mingguan dan bulanan;
4. Dilarang absen dalam melaksanakan pengawalan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan apabila berhalangan agar dilaporkan kepada Kepala Satuan untuk melakukan pergantian sementara.

d. Komandan Regu :

1. Komandan Regu bertanggungjawab mengontrol anggota Regu dan seluruh fasilitas yang disediakan;
2. Setiap pergantian penjagaan Komandan Regu melakukan Apel serah terima penjagaan;
3. Komandan Regu memberikan laporan secara rutin kepada Pengawas tentang situasi saat itu;
4. Komandan Regu membagi habis tugas kepada seluruh anggota dan melakukan Patroli setiap saat;
5. Komandan Regu menegur anggota yang lalai dan tidak melaksanakan tugas secara disiplin tertulis dan disampaikan kepada atasan langsung;
6. Khusus untuk Rumah Jabatan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah baik itu Komandan Regu dan Anggota tidak diijinkan pulang makan.

e. Anggota Regu :

1. Anggota regu melaksanakan tugas yang diberikan oleh Komandan Regu dan dilarang meninggalkan tempat tugas yang ditentukan;
2. Anggota bertanggungjawab kepada Komandan Regu;
3. Apabila anggota tidak melaksanakan tugas yang diberikan oleh Komandan Regu maka dilaporkan kepada Pengawas lalu diteruskan kepada Penanggungjawab secara lisan dan tertulis;
4. Anggota dilarang ijin pulang makan lebih dari satu jam apabila lebih, maka Komandan Regu memberikan teguran secara lisan dan tertulis;
5. Anggota yang kuliah sore diwajibkan memasukan Jadwal Kuliah pada Komandan dan diteruskan kepada Pengawas dan Penanggungjawab;
6. Apabila karena kebutuhan mendesak maka anggota meminta ijin kepada Pengawas/atasan langsung;
7. Komandan Regu berhak memberikan hukuman disiplin ringan kepada anggota yang tidak disiplin melaksanakan tugas yang diberikan;
8. Apabila piket, Anggota wajib melaporkan tugas yang dilaksanakan kepada Komandan Regu sebagai bahan penyusunan laporan Regu;
9. Komandan Regu dan Anggota yang berinisiatif untuk ijin atau apapun tidak diperkenankan apabila yang bersangkutan diijinkan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
10. Setiap anggota piket harus tunduk dan taat atas saran pengawas/pengontrol;
11. Khusus untuk Tim Regu I, II dan III Pos Sasando membagi anggota 2 orang ditempatkan di pos pintu belakang depan Aula El Tari.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan dan Patroli (TURJAWALI) wajib menggunakan sarana komunikasi melalui Washup atau telepon seluler;

- KEEMPAT : Serah terima tugas dilaksanakan setiap jam 08.00 Wita yang didahului pemeriksaan kelengkapan fasilitas yang disediakan di tempat tugas;
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan dan Patroli (TURJAWALI) bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA- SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kupang
Pada Tanggal : 28 Desember 2023


Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Nusa Tenggara Timur,
Ir. Cornelis Wadu, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP.196505141997031006

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Petugas Lapangan yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 300/203.4/Sat Pol.PP 2.1 /2023

TANGGAL : 28 Desember 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN, PENANGGUNG JAWAB,
PETUGAS LAPANGAN/PENGAWAS/PENGONTROL**

NO	JABATAN	Kedudukan Dalam Tim	BESARNYA HONORARIUM/ BULAN
1	2	3	4
1.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Penanggungjawab	350.000,-
2.	Sekretaris	Petugas Lapangan/ Pengawas Sat.Pol.PP	250.000,-
3.	Kepala Bidang Ketentraman & Ketertiban Umum	Petugas Lapangan/ Pengawas Sat.Pol.PP	250.000,-
4.	Kepala Bidang Penegakan Perda & Pergub	Petugas Lapangan/ Pengawas Sat.Pol.PP	250.000,-
5.	Kepala Bidang Linmas	Petugas Lapangan/ Pengawas Sat.Pol.PP	250.000,-
6.	Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur	Petugas Lapangan/ Pengawas Sat.Pol.PP	250.000,-
7.	Kepala Sub Bagian Keuangan	Petugas Lapangan/ Pengawas Sat.Pol.PP	250.000,-
8.	Kepala Seksi Operasi Dan Pengendalian	Petugas Lapangan/ Pengawas Sat.Pol.PP	250.000,-
9.	Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan	Petugas Lapangan/ Pengawas Sat.Pol.PP	250.000,-
10.	Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian	Petugas Lapangan/ Pengawas Sat.Pol.PP	250.000,-
11.	Kepala Seksi Hubungan Kelembagaan	Petugas Lapangan/ Pengawas Sat.Pol.PP	250.000,-
12.	Kepala Seksi Penanggulangan Kebakaran	Petugas Lapangan/ Pengawas Sat.Pol.PP	250.000,-
13.	Kepala Sub. Bagian Program Data dan Evaluasi	Petugas Lapangan/ Pengawas Sat.Pol.PP	250.000,-


Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Nusa Tenggara Timur,
Ir. Cornelis Wadu, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP.196505141997031006

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 300/203.4/Sat Pol.PP 2.1 /2023
TANGGAL : 28 Desember 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGAWALAN KEPALA DAERAH

NO	NAMA/NIP	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM/ BULAN
1	3	4	5
1.	Alfred M. Timo 198104092008011013	Pengawalan Kepala Daerah	300.000,-
2.	Wellem K. Pandie 19790412 200801 1 021	Pengawalan Kepala Daerah	300.000,-
3.	Viktor Nenometa 19690226 200701 1 016	Pengawalan Kepala Daerah	300.000,-
4.	Agustinus Tennis 19720820200901 1 001	Pengawalan Kepala Daerah	300.000,-


Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Nusa Tenggara Timur,
Ir. Cornelis Wadu, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP.196505141997031006

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 300/203.4/Sat Pol.PP 2.1 /2023
TANGGAL : 28 Desember 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMANDAN REGU PETUGAS LAPANGAN/PIKET
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM /BULAN
1	2	3	4	5
1.	Therah Paidjo 19670330 199403 1 008	Penysn Rencana Kerjasama Kelembg.	Komandan Regu	200.000,-
2.	Fransiskus Betty 19751103 199003 1 003	Pengelola Keamanan & Ketertiban	Komandan Regu	200.000,-
3.	Mikael Tennis, SH 19680608 199404 1 004	Analisis Diklat	Komandan Regu	200.000,-
4.	Marthinus Wilahuky, SH 19800325 200901 1 006	Fungsional Pol.PP	Komandan Regu	200.000,-
5.	David Bili Ngongo, SH 197312032007011014	Fungsional Pol.PP	Komandan Regu	200.000,-
6.	Eduardus Amkeun, SH 19690606 200801 1 033	Fungsional Pol.PP	Komandan Regu	200.000,-
7.	Marthinus Linome, SH 198005042009011001	Fungsional Pol.PP	Komandan Regu	200.000,-
8.	Oktovianus Kale, SH 196901052007011033	Fungsional Pol.PP	Komandan Regu	200.000,-
9.	Pace Mikael Pello, SH 197503182008011014	Fungsional Pol.PP	Komandan Regu	200.000,-
10.	Thomas Selan, SH 19671224 200701 1 014	Fungsional Pol.PP	Komandan Regu	200.000,-
11.	Paulus D. Pattipeilohy, SH 198403142006041009	Fungsional Pol.PP	Komandan Regu	200.000,-
12.	Migel Elias Pah 197504022008011005	Fungsional Pol.PP	Komandan Regu	200.000,-
13.	Simon P. Kause 19730915 200701 1 012	Fungsional Pol.PP	Komandan Regu	200.000,-
14.	Laurensius Ja 198111112009011001	Fungsional Pol.PP	Komandan Regu	200.000,-
15.	Andrias Haki 197805142008011020	Fungsional Pol.PP	Komandan Regu	200.000,-


Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Nusa Tenggara Timur,
Ir. Cornelis Wadu, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP.196505141997031006

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 300/203.4/Sat Pol.PP 2.1 /2023
TANGGAL : 28 Desember 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PETUGAS LAPANGAN/PIKET
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM /BULAN
1	2	3	4	5
1.	Gerfasius Tapoin, SH 19790518 200801 1 017	Fungsional Pol.PP	Anggota	200.000,-
2.	Hermanus Oba 19751029 200604 1 011	Fungsional Pol.PP	Anggota	200.000,-
3.	Yeskiel Tisel 19750119 200604 1 012	Fungsional Pol.PP	Anggota	200.000,-
4.	Melkisedek Benu 19790504 200801 1 023	Fungsional Pol.PP	Anggota	200.000,-
5.	Valentinus Sesfaot 19800521 200801 1 017	Fungsional Pol.PP	Anggota	200.000,-
6.	Yoel Benu 19811003 200801 1 020	Fungsional Pol.PP	Anggota	200.000,-
7.	Antonius Ndonga 19762023 200801 1 002	Fungsional Pol.PP	Anggota	200.000,-
8.	Yoktan Nenohai 19770815 200801 1 012	Fungsional Pol.PP	Anggota	200.000,-
9.	Tobias Tanggul 19710829 200701 1 010	Fungsional Pol.PP	Anggota	200.000,-
10.	Daniel Peme 19640731 199603 1 002	Fungsional Pol.PP	Anggota	200.000,-
11.	Benediktus T. Kolin 19800616 200801 1024	Fungsional Pol.PP	Anggota	200.000,-
12.	Marselinus Hanor 19751017200701 1 015	Fungsional Pol.PP	Anggota	200.000,-
13.	Tomas Malailo 19800628 200801 1 009	Fungsional Pol.PP	Anggota	200.000,-
14.	Petrus Rihhi 19700504 200801 1 027	Fungsional Pol.PP	Anggota	200.000,-
15.	Christofel Hire Wake 19800605 200801 1 014	Fungsional Pol.PP	Anggota	200.000,-
16.	Thimatius Liem 19740418 200801 1 010	Fungsional Pol.PP	Anggota	200.000,-
17.	Emu M. St. Riwu 19730906 200901 1 002	Fungsional Pol.PP	Anggota	200.000,-
18.	Daniel Tamonob 19810321 201212 1 004	Fungsional Pol.PP	Anggota	200.000,-
19.	Yohanes E. Wungubelen 19780508 201202 1 003	Petugas Keamanan	Anggota	200.000,-
20.	Ayub Koroh, SH	Anggota Banpol	Anggota	200.000,-
21.	Dominggus Tuke	Anggota Banpol	Anggota	200.000,-
22.	Marianus Seran Bere	Anggota Banpol	Anggota	200.000,-

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM /BULAN
23.	Jefri Kota Pa, S.Pi	Anggota Banpol	Anggota	200.000,-
24.	Jelfri Alfred Luin	Anggota Banpol	Anggota	200.000,-
25.	Ronald Solsepa, SH	Anggota Banpol	Anggota	200.000,-
26.	Andereas Edison Ketti, SE	Anggota Banpol	Anggota	200.000,-
27.	Jefriton E. Tamonob	Anggota Banpol	Anggota	200.000,-
28.	Yunidar H. Laiskodat	Anggota Banpol	Anggota	200.000,-
29.	Rido Trisno Pingak	Anggota Banpol	Anggota	200.000,-
30.	Arnoldus E. A. Mali	Anggota Banpol	Anggota	200.000,-

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Nusa Tenggara Timur,



Ir. Cornelis Wadu, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP.196505141997031006



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jln. Polisi Militer No. 01 Kupang

Telp.Fax (0380) 828090 Laman *WWW.satpol-pp.nttprov.go.id*

Pos-el satpolpp prov ntt@yahoo.com

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor: 800.1.11.1/203.5/Sat.Pol.PP 2.1/2023

I. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Pedoman Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2013 tentang Pedoman Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 02 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 07 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur;
8. Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 300/203.4/Sat.Pol.PP 2.1/2023, Tanggal 28 Desember 2023 tentang Penetapan Tim Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan dan Patroli (TURJAWALI) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.

II. PERTIMBANGAN

Dalam rangka mewujudkan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur khususnya di Kota Kupang, menjaga, mengamankan dan melindungi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan untuk menjaga serta mengamankan Aset Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka perlu dilakukan Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan dan Patroli, yang dilakukan oleh Tim Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan dan Patroli (TURJAWALI).

MENUGASKAN :

Kepada	Nama/Jabatan sebagaimana terlampir
Untuk	Seterimanya Surat Perintah Tugas ini agar segera melaksanakan tugas pengamanan berupa Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan dan Patroli (TURJAWALI) pada Kompleks Perkantoran Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur antara lain Kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur di Jalan El Tari, Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur, Rumah Jabatan Gubernur Nusa Tenggara Timur, Rumah Jabatan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur dan Rumah Jabatan Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tugas penjagaan dilaksanakan selama 1 x 24 jam;
2. Pergantian petugas dilaksanakan setiap hari kerja setelah selesai Absen di kantor jam 07.30 WITA, regu baru tiba pada pos penjagaan dilakukan serah terima yang dibuktikan dengan mencatat hari penjagaan pada buku penjagaan.
3. Sebelum menyerahkan tugas kepada petugas yang baru Komandan Regu yang lama wajib melaporkan situasi keamanan yang terjadi selama 1 x 24 jam kepada komandan regu yang baru disertai seluruh peralatan dalam keadaan baik;
4. Komandan regu (DANRU) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas seluruh anggotanya selama kegiatan penjagaan berlangsung;
5. Pengaturan pada lokasi diatur oleh komandan regu (DANRU) dan laporkan seluruh anggota secara bergilir setiap 2 (dua) jam, hasilnya dicatat pada buku penjagaan/dibuktikan dengan foto kondisi yang dilaporkan pada akhir bulan berjalan/awal berikut sebagai laporan bulanan yang bersangkutan Pengontrolan/Pemantauan oleh petugas penjagaan dilakukan sekitar lokasi secara bergilir oleh Komandan Regu;
6. Khusus regu yang melakukan penjagaan di rumah Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Sekda tidak diijinkan pulang makan di rumah selama proses penjagaan dan apabila ada sesuatu hal yang emergensi, maka wajib disampaikan kepada Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian atau Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan akan diteruskan kepada Kepala Satuan untuk diputuskan;
7. Bagi regu penjagaan, ijin makan diwajibkan hanya selama 1 jam dan dilakukan pengaturan oleh Komandan Regu (DANRU);
8. Pada saat ada pengawasan/pengontrol oleh petugas kepada semua titik penjagaan diwajibkan regu penjagaan menggunakan pakian PDH /Semi PDH, PDL dan Semi PDL;
9. Regu penjagaan dilarang keras untuk mengkonsumsi alkohol/ sejenisnya dan melakukan perjudian/jenis apapun pada pos penjagaan. Apabila ditemukan oleh pengawas/pengontrol, maka akan diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Apabila anggota jaga melakukan kelalaian dalam melaksanakan penjagaan 1 sampai 2 kali, maka wajib dilakukan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta menandatangani surat pernyataan;
11. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Demikian Surat Perintah Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Kupang

Pada Tanggal : 28 Desember 2023.



Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Ir. Cornelis Wadu, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP.196505141997031006

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Lampiran : I

**NAMA PETUGAS
PENANGGUNG JAWAB, PENGAWAS LAPANGAN
BULAN JANUARI SAMPAI DENGAN DESEMBER 2024**

NO	Nama/NIP	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Ir. Cornelis Wadu, M.Si 19650514 199703 1 006	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Penanggungjawab
2.		Sekretaris	Petugas Lapangan/Pengawas Sat.Pol.PP
3.	Yosef Meba, S.Sos, MM 19660318 199803 1 004	Kepala Bidang Ketentraman & Ketertiban Umum	Petugas Lapangan/Pengawas Sat.Pol.PP
4.	Robby A. Ndun, S.Pd, MM 19740227 200112 1 003	Kepala Bidang Penegakan Perda & Pergub	Petugas Lapangan/Pengawas Sat.Pol.PP
5.	Juliadin, S.Pd, M.Si 19741231 200112 1 014	Kepala Bidang Linmas	Petugas Lapangan/Pengawas Sat.Pol.PP
6.	Agus Widodo, S.Sos 19740601 199503 1 003	Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur	Petugas Lapangan/Pengawas Sat.Pol.PP
7.	Susilo Miskan, SE 19810713 201001 1 008	Kepala Seksi Operasi Dan Pengendalian	Petugas Lapangan/Pengawas Sat.Pol.PP
8.	Valentia Liliana Sanam, SE 19710716 200012 2 002	Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan	Petugas Lapangan/Pengawas Sat.Pol.PP
9.	Salome B. Mala Wedo, SE 19690926 200112 2 003	Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian	Petugas Lapangan/Pengawas Sat.Pol.PP
10.	Alberth Sollo, SE 197204112009011006	Kepala Seksi Hubungan Kelembagaan	Petugas Lapangan/Pengawas Sat.Pol.PP
11.	Adrianus Umbu Tena, S.Sos 19701231 200901 1 006	Kepala Seksi Penanggulangan Kebakaran	Petugas Lapangan/Pengawas Sat.Pol.PP
12.	Maria F. N. Panda, SE 19771104 200112 2 002	Kepala Sub. Bagian Program Data dan Evaluasi	Petugas Lapangan/Pengawas Sat.Pol.PP
13.	Rahman Hamapu, SE 19781011 200801 1 017	Kepala Sub bagian Keuangan	Petugas Lapangan/Pengawas Sat.Pol.PP


 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
 Provinsi Nusa Tenggara Timur,
Ir. Cornelis Wadu, M.Si
 Pembina Utama Madya
 196505141997031006

Lampiran : II

**NAMA PETUGAS
PENGAWAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
BULAN JANUARI SAMPAI DENGAN DESEMBER 2024.**

NO	NAMA/NIP	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	3	4	5
1.	Alfred M. Timo 1981040920080111013	Fungsional Pol PP	Pengawasan Kepala Daerah
2.	Wellem K. Pandie 19790412 200801 1 021	Fungsional Pol PP	Pengawasan Kepala Daerah
3.	Viktor Nenometa 19690226 200701 1 016	Fungsional Pol PP	Pengawasan Kepala Daerah
4.	Agustinus Tenis 19720820200901 1 001	Pelatih Satuan Perlindungan Masyarakat	Pengawasan Kepala Daerah


Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Papua Tenggara Timur,
Ir. Cornelis Wadu, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP.196505141997031006

PETUGAS PENGANTARAN, PENJAGAAN DAN PATROLI TA. 2024

Lampiran : III

NO	NAMA	JABATAN	BULAN/TANGGAL												Ket
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
KANTOR GUBERNUR NTT Jl. Raya El Tari (POSKO SASANDO)															
1	Pace M. Pello, SE	Dauru	1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31	3,6,9,12,15,18,21,24,27	1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31	3,6,9,12,15,18,21,24,27,30	3,6,9,12,15,18,21,24,27,30	2,5,8,11,14,17,20,23,26,29	2,5,8,11,14,17,20,23,26,29	1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31	3,6,9,12,15,18,21,24,27,30	3,6,9,12,15,18,21,24,27,30	2,5,8,11,14,17,20,23,26,29	2,5,8,11,14,17,20,23,26,29	REGU I
2	Yeshkal Tisel	Anggota													
3	Petrus Rihli	Anggota													
4	Antonius Ndana	Anggota													
5	Domingus Tuke	Anggota													
1	Mikhael Tantis, SH	Dauru	2,5,8,11,14,17,20,23,26,29	1,4,7,10,13,16,19,22,25,28	2,5,8,11,14,17,20,23,26,29	1,4,7,10,13,16,19,22,25,28	1,4,7,10,13,16,19,22,25,28	3,6,9,12,15,18,21,24,27,30	3,6,9,12,15,18,21,24,27,30	2,5,8,11,14,17,20,23,26,29	1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31	1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31	3,6,9,12,15,18,21,24,27,30	3,6,9,12,15,18,21,24,27,30	REGU II
2	Yoktan P. Nenohai	Anggota													
3	Emu ST Riwa	Anggota													
4	Daniel Tamonob	Anggota													
5	Ayub Koroh, SH	Anggota													
1	Theriah Paidjo	Dauru	3,6,9,12,15,18,21,24,27,30	2,5,8,11,14,17,20,23,26,29	3,6,9,12,15,18,21,24,27,30	2,5,8,11,14,17,20,23,26,29	2,5,8,11,14,17,20,23,26,29	1,4,7,10,13,16,19,22,25,28	1,4,7,10,13,16,19,22,25,28	3,6,9,12,15,18,21,24,27,30	2,5,8,11,14,17,20,23,26,29	2,5,8,11,14,17,20,23,26,29	1,4,7,10,13,16,19,22,25,28	1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31	REGU III
2	Melkisedek Benu	Anggota													
3	Tobias Tanggul	Anggota													
4	Timatius Lien	Anggota													
5	Y.E. Wungubelen	Anggota													
KANTOR SAT. POL. PP (POSKO PRAJA)															
1	Laurensius Ja	Dauru	1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31	3,6,9,12,15,18,21,24,27	1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31	3,6,9,12,15,18,21,24,27,30	3,6,9,12,15,18,21,24,27,30	2,5,8,11,14,17,20,23,26,29	2,5,8,11,14,17,20,23,26,29	1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31	3,6,9,12,15,18,21,24,27,30	3,6,9,12,15,18,21,24,27,30	2,5,8,11,14,17,20,23,26,29	2,5,8,11,14,17,20,23,26,29	REGU I
2	Jefriton Tanonob	Anggota													
3	Anoldius E.A. Mali	Anggota													
1	Migel Elias Pah	Dauru	2,5,8,11,14,17,20,23,26,29	1,4,7,10,13,16,19,22,25,28	2,5,8,11,14,17,20,23,26,29	1,4,7,10,13,16,19,22,25,28	1,4,7,10,13,16,19,22,25,28	3,6,9,12,15,18,21,24,27,30	3,6,9,12,15,18,21,24,27,30	2,5,8,11,14,17,20,23,26,29	1,4,7,10,13,16,19,22,25,28	1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31	3,6,9,12,15,18,21,24,27,30	3,6,9,12,15,18,21,24,27,30	REGU II
2	Jefrian Koa Pa, S.Pj	Anggota													
3	Martianus Serun Bere	Anggota													
1	Paulus D.Patipicohy, SH	Dauru	3,6,9,12,15,18,21,24,27,30	2,5,8,11,14,17,20,23,26,29	3,6,9,12,15,18,21,24,27,30	2,5,8,11,14,17,20,23,26,29	2,5,8,11,14,17,20,23,26,29	1,4,7,10,13,16,19,22,25,28	1,4,7,10,13,16,19,22,25,28	3,6,9,12,15,18,21,24,27,30	2,5,8,11,14,17,20,23,26,29	2,5,8,11,14,17,20,23,26,29	1,4,7,10,13,16,19,22,25,28	1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31	REGU III
2	Yunidar Laiskodot	Anggota													
3	Ridoh Pingak	Anggota													
RUMAH JABATAN WAKIL GUBERNUR NTT (POSKO BERINGIN)															
1	Martien Wila Haky, SH	Dauru	1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31	3,6,9,12,15,18,21,24,27,30	1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31	3,6,9,12,15,18,21,24,27,30	3,6,9,12,15,18,21,24,27,30	2,5,8,11,14,17,20,23,26,29	2,5,8,11,14,17,20,23,26,29	1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31	3,6,9,12,15,18,21,24,27,30	3,6,9,12,15,18,21,24,27,30	2,5,8,11,14,17,20,23,26,29	2,5,8,11,14,17,20,23,26,29	REGU I
2	Daniel Peme	Anggota													
1	Andreas Haki	Dauru	2,5,8,11,14,17,20,23,26,29	1,4,7,10,13,16,19,22,25,28	2,5,8,11,14,17,20,23,26,29	1,4,7,10,13,16,19,22,25,28	1,4,7,10,13,16,19,22,25,28	3,6,9,12,15,18,21,24,27,30	3,6,9,12,15,18,21,24,27,30	2,5,8,11,14,17,20,23,26,29	1,4,7,10,13,16,19,22,25,28	1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31	3,6,9,12,15,18,21,24,27,30	3,6,9,12,15,18,21,24,27,30	REGU II
2	Christofel Hine Wake	Anggota													
1	Simon P. Kause	Dauru	3,6,9,12,15,18,21,24,27,30	2,5,8,11,14,17,20,23,26,29	3,6,9,12,15,18,21,24,27,30	2,5,8,11,14,17,20,23,26,29	2,5,8,11,14,17,20,23,26,29	1,4,7,10,13,16,19,22,25,28	1,4,7,10,13,16,19,22,25,28	3,6,9,12,15,18,21,24,27,30	2,5,8,11,14,17,20,23,26,29	2,5,8,11,14,17,20,23,26,29	1,4,7,10,13,16,19,22,25,28	1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31	REGU III
2	Tomas Malilio	Anggota													
RUMAH JABATAN SEKDA (POSKO KOMODO)															
1	Edwardus Anukun, SH	Dauru	1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31	3,6,9,12,15,18,21,24,27,30	1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31	3,6,9,12,15,18,21,24,27,30	3,6,9,12,15,18,21,24,27,30	2,5,8,11,14,17,20,23,26,29	2,5,8,11,14,17,20,23,26,29	1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31	3,6,9,12,15,18,21,24,27,30	3,6,9,12,15,18,21,24,27,30	2,5,8,11,14,17,20,23,26,29	2,5,8,11,14,17,20,23,26,29	REGU I
2	Hermanus Oba	Anggota													
1	Fransiskus Betty	Dauru	2,5,8,11,14,17,20,23,26,29	1,4,7,10,13,16,19,22,25,28	2,5,8,11,14,17,20,23,26,29	1,4,7,10,13,16,19,22,25,28	1,4,7,10,13,16,19,22,25,28	3,6,9,12,15,18,21,24,27,30	3,6,9,12,15,18,21,24,27,30	2,5,8,11,14,17,20,23,26,29	1,4,7,10,13,16,19,22,25,28	1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31	3,6,9,12,15,18,21,24,27,30	3,6,9,12,15,18,21,24,27,30	REGU II
2	Valentinus Sefnot	Anggota													
1	Thomas Selan, SH	Dauru	3,6,9,12,15,18,21,24,27,30	2,5,8,11,14,17,20,23,26,29	3,6,9,12,15,18,21,24,27,30	2,5,8,11,14,17,20,23,26,29	2,5,8,11,14,17,20,23,26,29	1,4,7,10,13,16,19,22,25,28	1,4,7,10,13,16,19,22,25,28	3,6,9,12,15,18,21,24,27,30	2,5,8,11,14,17,20,23,26,29	2,5,8,11,14,17,20,23,26,29	1,4,7,10,13,16,19,22,25,28	1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31	REGU III
2	Gerfasius Tirolin, SH	Anggota													

[illegible]

Kupang 28 Desember 2023

SAT. P. H. CORNELIS WADU, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19850514 199703 1 006



Lampiran : IV

**URAIAN TUGAS
TIM TURJAWALI (PENGATURAN, PENJAGAAN,
PENGAWALAN DAN PATROLI)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Rincian Tugas Tim Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan dan Patroli (TURJAWALI) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut:

a. Penanggungjawab :

1. Bertanggung jawab atas pelaksanaan seluruh tugas Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan dan Patroli;
2. Memberikan arahan terkait dengan pelaksanaan tugas;
3. Menerima Laporan dari Pengawas setiap hari;
4. Memberikan laporan kepada Pimpinan secara rutin maupun insidentil.

b. Pengawas/pengontrol :

1. Melakukan Pengawasan atas pelaksanaan tugas sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Memberikan laporan kepada Kasat berdasarkan hasil pengawasan;
3. Memberikan teguran langsung kepada Komandan Regu apabila menemukan anggota yang tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya;
4. Memanggil anggota yang tidak melaksanakan tugas dan diberikan hukuman disiplin sesuai ketentuan yang berlaku;
5. Melakukan pencatatan tentang situasi dan kondisi pelaksanaan tugas dan melaporkan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

c. Pengawalan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah :

1. Melaksanakan Pengawalan baik dalam Kantor maupun diluar Kantor kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
2. Melaporkan Jadwal kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada Kasat secara rutin;
3. Melaporkan hasil pengawalan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara harian, mingguan dan bulanan;
4. Dilarang absen dalam melaksanakan pengawalan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan apabila berhalangan agar dilaporkan kepada Kasat untuk melakukan pergantian sementara.

d. Komandan Regu :

1. Komandan Regu bertanggungjawab mengontrol anggota Regu dan seluruh fasilitas yang disediakan;
2. Setiap pergantian penjagaan Komandan Regu melakukan Apel serah terima penjagaan;
3. Komandan Regu memberikan laporan secara rutin kepada Pengawas tentang situasi saat itu;
4. Komandan Regu membagi habis tugas kepada seluruh anggota dan melakukan Patroli setiap saat;
5. Komandan Regu menegur anggota yang lalai dan tidak melaksanakan tugas secara disiplin;

e. Anggota:

1. Anggota regu melaksanakan tugas yang diberikan oleh Komandan Regu dan dilarang meninggalkan tempat tugas yang ditentukan;
2. Anggota bertanggungjawab kepada Komandan Regu;
3. Apabila anggota tidak melaksanakan tugas yang diberikan oleh Komandan Regu maka dilaporkan kepada Pengawas lalu diteruskan kepada Penanggungjawab;
4. Anggota dilarang izin pulang makan lebih dari satu jam apabila lebih maka Komandan Regu memberikan teguran;
5. Anggota yang sedang mengambil kuliah sore diwajibkan memasukan Jadwal Kuliah kepada Komandan regu dan diteruskan kepada Pengawas dan Penanggungjawab;
6. Apabila karena kebutuhan mendesak maka anggota meminta izin kepada Pengawas;
7. Komandan Regu berhak memberikan hukuman disiplin ringan kepada anggota yang tidak disiplin melaksanakan tugas yang diberikan;
8. Anggota wajib melaporkan hasil atas tugas yang dilaksanakan kepada Komandan Regu sebagai bahan penyusunan laporan Regu;



Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Dr. Cornelis Wadu, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP.196505141997031006



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Jln. Polisi Militer No. -Telp. (0380)-828090
Email : satpolpp_prov.ntt@yahoo.com
Website : www.satpol-pp.nttprov.go.id
K U P A N G

11 Juni 2024

Yth. - Kepala Bappelitbangda Provinsi NTT
- Kepala Badan Keuangan Daerah Setda
Provinsi NTT

SURAT PENGANTAR

Nomor : 000.1.5/434/sat pol pp 1.1

JENIS SURAT	JUMLAH	KETERANGAN
2	3	4
Laporan Bulan Mei Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024	1 (Satu) Buku	Dikirim untuk ditindak lanjuti

Demikian Laporan ini atas kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Plt. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,



IP. YOHANES OKTOVIANUS, MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19661029 199403 1 007

Paraf Hirarki :	
Plh. Sekretaris	1
Kepala Sub Bagisn Program Data dan Evaluasi	2

LAPORAN BULAN MEI 2024





LAPORAN BULAN MEI



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024

Jalan Polisi Militer Nomor 1, Telpon/Fax (0380) 828090

Email : satpolpp_prov.ntt@yahoo.com

Website : www.satpol-pp.nttprov.go.id

KUPANG



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur patut dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena hanya atas penyertaan dan kasih-Nya maka Laporan Bulan Mei 2024 Tahun Anggaran 2024 Satuan Polisi Pamong Praja ini dapat diselesaikan dengan baik.

Tugas, fungsi dan wewenang Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah menjadi sangat penting yang mana terlaksananya berbagai kegiatan pengamanan dan penegakkan prodak hukum. Keadaan yang nyaman, aman dan tenteram diciptakan guna mendukung kinerja Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Untuk itu Laporan Bulan Mei Tahun Anggaran Tahun 2024 ini merupakan bahan, data dan informasi yang disusun secara baik, transparan dan dapat di pertanggungjawabkan kepada publik ataupun kepada pemangku kepentingan yang membutuhkan informasi terkait penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Kupang, 11 Juni 2024

Plt. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



IR. YOHANES OKTOVIANUS, MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19661029 199403 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Maksud dan Tujuan	3
D. SDM Satuan Polisi Pamong Praja	3
BAB II RENCANA KERJA TAHUNAN	12
A. Rencana Kerja Tahunan	12
B. Program dan Kegiatan Tahun 2024	16
C. Realisasi Anggaran	18
BAB III HASIL PELAKSANAAN	22
A. Sekretariat	22
B. Bidang Penegakan Perda dan Peraturan Gubernur	25
C. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	28
D. Bidang Perlindungan Masyarakat	30
E. Bidang Sumber Daya Aparatur	31
BAB IV PERMASALAHAN	33
A. Permasalahan	33
B. Tindak Lanjut	33
BAB V PENUTUP	34
- Laporan Keuangan	35
- Lampiran Foto/Dokumentasi	37

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu Perangkat Daerah yang di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Tugas Satuan Polisi Pamong Praja yakni membantu Kepala Daerah dalam memelihara Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan masyarakat, dan fungsinya sebagai berikut;

- a) Perumusan kebijakan di bidang Satuan Polisi Pamong Praja;
- b) Pelaksanaan kebijakan di bidang Satuan Polisi Pamong Praja;
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Satuan Polisi Pamong Praja;
- d) Pelaksanaan administrasi di bidang Satuan Polisi Pamong Praja;
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas dan fungsi yang telah dijabarkan diatas kemudian diuraikan dalam program dan kegiatan dimana sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 tentang Satuan Polisi pamong Praja melaksanakan urusan Pemerintahan Wajib berkaitan dengan Pelayanan Dasar dalam arti bahwa pelayanan yang diberikan oleh Satuan Polisi pamong Praja berkaitan dengan hak setiap warga masyarakat yang wajib diperoleh sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal.

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur berupaya agar mampu menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan bulan Mei 2024 laporan kinerja ini menggambarkan kinerja yang telah dilaksanakan, sehingga sangat diharapkan dapat bermanfaat bagi semua komponen yang terlibat dalam proses menciptakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat.

B. Dasar hukum

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian Cuti bagi Pegawai Negeri Sipil.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pakian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Satuan Polisi Pamong Praja;
11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
12. Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur.
13. Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah P-DPA-SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2024 Nomor : DPPA/A.1/1.05.0.00.0.00.01.0000/001/2024.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud.

Sebagai bahan pertanggungjawaban terhadap hasil pelaksanaan program dan kegiatan bulan Mei 2024.

2. Tujuan.

Untuk menghasilkan sebuah laporan kinerja bulanan yang menggambarkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT bulan Mei Tahun Anggaran 2024.

D. Sumber Daya Manusia (SDM) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 131 orang dengan rincian sebagai berikut:

a. Berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah (Orang)
1	2	3
1.	Kepala Satuan	1
2.	Sekretaris	-
3.	Kepala Bidang	3
4.	Kepala Seksi	7
5.	Kepala Sub Bagian	3
6.	Jabatan Fungsional	61
7.	Jabatan Fungsional Umum	26
8.	Diperbantukan	1
9.	Honorer	29
Jumlah		131



b. Berdasarkan Jenis Kelamin

Jabatan Pegawai	Jenis Kelamin	
	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)
1	2	3
Kepala Satuan	1	
Sekretaris	-	
Kepala Bidang	3	
Kepala Sub Bagian	1	2
Kepala Seksi	5	2
Jabatan Fungsional	52	7
Pelaksana	18	7
Tenaga Honorer	18	11
Total Jumlah	105	29
	131 Orang	

c. Jumlah ASN Berdasarkan Pangkat/Golongan.

Rincian Kepangkatan/Golongan					Jumlah
Kepangkatan PNS	A	B	C	D	
Golongan IV	1	2	-	1	4 orang
Golongan III	20	21	10	11	62 orang
Golongan II	-	-	13	23	36 orang
Golongan I	-	-	-	-	- orang
Jumlah	21	23	22	35	102 orang

d. Berdasarkan Jenjang Pendidikan.

No.	Jenjang Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1.	Pasca Sarjana (S2)	4	-	4
2.	Sarjana (S1)	37	13	50
3.	Diploma (D3)	1	-	1
4.	SMA/SMU	42	5	47
Jumlah		84	18	102

e. Berdasarkan Agama.

No.	Data Keagamaan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1.	Islam	4	-	4
2.	Kristen	78	23	101
3.	Katholik	21	5	26
4.	Hindu	-	-	-
5.	Budha	-	-	-
Jumlah		103	28	131

Berikut dapat di sampaikan data pemberian cuti dan tindak disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur selama bulan Mei 2024 sesuai ketentuan yang berlaku

1. Cuti tahunan berdasarkan Kepangkatan/Golongan.

No.	Data Cuti Tahunan	Jumlah
1	2	3
1.	Golongan IV	-
2.	Golongan III	1
3.	Golongan II	-
Jumlah		1

2. Data Pegawai yang kena sanksi Kepegawaian :

No.	Data Pegawai Yang Kena Sanksi Kepegawaian	Jumlah
1	2	3
1.	Golongan IV	-
2.	Golongan III	-
3.	Golongan II	-
4.	Banpol	-
5.	Cleaning Service	-
Jumlah		-

Selain melaksanakan tugas Satuan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur juga juga melakukan penjagaan (piket) dalam rangka menjaga aset penting milik pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur adapun aset tersebut antara lain :

1. Pos Kantor Gubernur/Sasando.
2. Pos Rumah Jabatan Gubernur.
3. Rumah Jabatan Wakil Wakil Daerah.
4. Rumah Jabatan Sekretaris Daerah.
5. Posko Praja (Kantor Satpol PP).

Penjagaan pada tempat/lokasi jaga dibagi dalam 3 (tiga) sift, dimana masing-masing sift dibagi waktu selama 1 x 24 jam, mulai jam 08:00 pagi hingga jam 08:00 pagi berikutnya. Jadwal pelaksanaan piket diatur sesuai dengan surat keputusan Kepala satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur 2024 (terlampir).

E Sarana dan Prasarana

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam melaksanakan tugas yang diemban didukung dengan prasarana penunjang operasional kegiatan baik di kantor maupun di lapangan. Sarana Prasarana tersebut dicatat sebagai aset karena proses pengadaannya bersumber dari Dana Alokasi Umum yang dituangkan dalam dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur dari Tahun Anggaran 2003 sampai dengan tahun 2024 sebagai berikut :

Sarana Prasarana Pendukung

No	Jenis Nama Barang	Merk/Type/Bahan	Vol	Satuan	Keadaan Barang	Tahun Pengadaan
1.	Mobil Pic Up (DH 8059 AW	Besi/Toyota Pic Up	1	Unit	B	2003
2	Meja Biro 4 Laci	Arinda/Olympic	1	Buah	B	2008
3	Meja Biro 4 Laci	Arinda/Olympic	1	Buah	B	2008
4	Lap Top/Toshiba	Metal	1	Buah	B	2008
5	Air Condition	Besi /National/ 1Pk	2	Buah	B	2008
6	Air Condition	Besi/Akira	1	Buah	B	2008
7	Mobil Truck (DH 8047 AW)	Besi/Isuzu	1	Unit	B	2009
8	Mobil Minibus (DH 196 AW)	Besi/Toyota Rush	1	Unit	B	2009
9	Lemari 2 Pintu	Kayu Jati	6	Buah	B	2009
10	Lap Top Azer	Metal	1	Buah	B	2009
11	Printer HP/Laser Jet	Metal	1	Buah	B	2009
12	Wireless	Tens	1	Buah	B	2009
13	Megaphone Toa	Besi	1	Buah	B	2009
14	Facsimile	Panasonic	1	Buah	B	2009
15	Televisi	Digitec	1	Buah	B	2009
16	Kain Horrden	Kain	1	Buah	B	2009
17	Lambang Garuda		2	Buah	B	2009
18	Tiang Bendera	Besi	1	Buah	B	2009
19	Papan Nama SKPD	Besi	1	Buah	B	2009

20	Sepeda Motor (DH 2843 AW)	Besi/Honda/ GL 200 R	1	Unit	B	2010
21	Sepeda Motor (DH 2844 AW)	Besi/Honda/ GL 200 R	1	Unit	B	2010
22	Sepeda Motor (DH 2845 AW)	Besi/Honda/ GL 200 R	1	Unit	B	2010
23	Trasmister UHF	Motorola GR500	1			2010
24	MejaKerja	Kayu	10	Buah	B	2011
25	KursiKerja	Kayu	10	Buah	B	2011
26	Lemari 2 Pintu	Kayu Jati	5	Buah	B	2011
27	Komputer PC Simbada	Metal	2	Buah	B	2011
28	Lap Top Toshiba/L745	Metal	2	Buah	B	2011
29	Printer Canon	Metal	5	Buah	B	2011
30	Handy Talkie	Motorola GP2000	5	Buah	B	2011
31	Handy Cam	Sony	1	Buah	B	2011
32	Alat Kejut Listrik	Metal	13	Buah	B	2011
33	Sound System	Rhoad	1	Buah	B	2011
34	Komputer PC Simbada	Metal	2	Buah	B	2012
35	Televisi	Multimax	1	Buah	B	2012
36	Televisi	Sharp	1	Buah	B	2012
37	Scaner	Metal	1	Buah	B	2012
38	Kasur Busa	Bigland	8	Buah	B	2012
39	LayarProyektor		1	Buah	B	2012
40	MejaPimpinan 4 Laci	Kayu	1	Buah	B	2013
41	MejaKerja	Kayu	6	Buah	B	2013
42	Lemari 2 Pintu	Kayu Jati	2	Buah	B	2013
43	Komputer PC Simbada	Metal	2	Buah	B	2013
44	Lap Top ToshibaL840	Metal	4	Buah	B	2013
45	Kamera Digital	Canon	1	Buah	B	2013
46	LayarProyektor		1	Buah	B	2013

47	Mobil Double Cabin (DH 8249 AW)	Besi/Toyota Hilux	1	Unit	B	2014
48	Sepeda Motor (DH 3953)	Besi/Kawasaki KLX 15	1	Unit	B	2014
49	Sepeda Motor (DH 3954)	Besi/ Kawasaki KLX 15	1	Unit	B	2014
50	Sepeda	Paragon	6	Buah	B	2014
51	Kursi Sofa	Busa	1	Buah	B	2014
52	Lemari 2 Pintu	Kayu Jati	2	Buah	B	2014
53	Kulkas	Besi/ Polytron	1	Buah	B	2014
54	UPS/Matsunaga	Metal	10	Buah	B	2014
55	Lap Top Lenovo B490	Metal	1	Buah	B	2014
56	Printer Canon MX 397	Metal	1	Buah	B	2014
57	Air Condition/	Besi Polytron	5	Buah	B	2014
58	Wirelesgenggam	Toa-ZR1015	4	Buah	B	2014
59	Televisi	Polytron	5	Buah	B	2014
60	Handy Talkie	Motorola A 12	40	Buah	B	2014
61	Antena, Rig, Repeater	Motorola CDR500	1	Buah	B	2014
62	Mesin Absen Elektronik	Secure	1	Buah	B	2014
63	Mesin Absen Elektronik	Secure	1	Buah	B	2014
64	Mesin Ketik	Brother	1	Buah	B	2014
65	Handy Cam	Sony	1	Buah	B	2014
66	MejaRapat	Kayu Jati	5	Buah	B	2015
67	Meja Biro 4 Laci	Kayu	1	Buah	B	2015
68	Meja 1/2 Biro, 2 Laci	Kayu	15	Buah	B	2015
69	KursiRapat	Busa//Master Chair	20	Buah	B	2015
70	KursiKerja	Kayu	21	Buah	B	2015
71	Lemari 2 Pintu	Kayu Jati	1	Buah	B	2015
72	Tempat Tidur Lipat	Metal	7	Buah	B	2015

73	Lap Top Toshiba C55	Metal	5	Buah	B	2015
74	Lap Top Asus X453MA	Metal	1	Buah	B	2015
75	Printer Canon	Metal	5	Buah	B	2015
76	Tirai/Gorden	Kain	2	Buah	B	2015
77	Mic & Tiang Mic	Shure & NVK	1	Buah	B	2015
78	Kamera Digital	Canon	1	Buah	B	2015
79	Senter	S.W.A.T XML-T6	7	Buah	B	2015
80	Lemari Arsip	Katyu	1	Buah	B	2016
81	Komputer PC	LG	1	Buah	B	2016
82	Printer	Canon MP280	1	Buah	B	2016
83	Air Condition	Polytron	4	Buah	B	2016
84	Dispenser		6	Buah	B	2016
85	Taplak Meja dan Vas Bunga	Kain	1	Buah	B	2017
86	Mesin Potong Rumput	Besi	1	Buah	B	2017
87	Linggis kuku kambing	Besi	5	Buah	B	2017
88	Meja Rapat	Kayu	3	Buah	B	2017
89	Meja 1/2 Biro	Kayu	6	Buah	B	2017
90	Kursi Rapat	Besi	50	Buah	B	2017
91	Lemari 3 Pintu	Kayu	2	Buah	B	2017
92	Dispenser standing	Besi	2	Buah	B	2017
93	Kamera Digital	Besi	1	Buah	B	2017
94	Papan Nama SKPD	Besi	1	Buah	B	2017
95	Komputer (hp AIQ)	Hp	6	Unit	B	2020
96	Printer	(Epson L3110)	6	Unit	B	2020
97	Lemari	Kayu	5	Unit	B	2020
98	Meja Kerja	Kayu	7	Unit	B	2020
99	Meja Rapat	Kayu	2	Unit	B	2020
100	Kursi Kerja	Kayu	7	Unit	B	2020

101	Wirlaes		1	Unit	B	2020
102	Papan Sekretariat PPNS		1	Unit	B	2020
103	Papan Struktur Organisasi 1		1	Unit	B	2020
104	Papan Struktur Organisasi 1		1	Unit	B	2020
105	Papan Visi Misi		1	Unit	B	2020
106	Papan Informasi		1	Unit	B	2020
107	Mesin Potong Rumput		1	Unit	B	2020
108	Alat Pengukur suhu (Termogram)		2	Buah	B	2021 (BTT)
109	Genset	Yamaha/Bensin	2	Unit	B	2021
110	Mobil Truck (DH 8279 WA)	Besi/Hino	1	Unit	B	2021
111	Mobil Hilux Double Cabin (DH 19)	Besi/Toyota Hilux	1	Unit	B	2021

BAB II

RENCANA KERJA TAHUNAN

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai urusannya dalam bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat memiliki langkah-langkah strategis dalam upaya mendukung program Kepala Daerah, Hal ini dijabarkan dalam rencana Program Kegiatan sebagai berikut :

A. Rencana Kinerja Tahunan.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar dalam Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.

Rencana Kerja Tahunan (RKT) disusun berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur yang Termuat dalam Rencana Strategis (Renstra) tahun 2024-2026 sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026 :

Indikator Kinerja Utama (KU) Tahun 2024
Satuan Polisi pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI	TARGET	FORMULAINDIKATOR
			2023	2024	
1	2	3	4	6	7
1	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1. Presentase meningkatnya pencapaian SPM Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	44,76%	100%	Jumlah kegiatan yang diselesaikan -----x 100 Target
		2. Presentase meningkatnya Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (jumlah Perda dan Perkada yang ditegakan)	3	3	Jumlah Penyelesaian Perda dan Perkada yang ditegakan -----x100 Jumlah Perda dan Perkada
		3. Presentase Pencegahan Daerah Rawan Kebakaran setiap Tahun	-	100 %	Data Potensi Daerah Rawan Kebakaran -----x100 Jumlah Wilayah

Dari tabel Rencana Kinerja Tahunan (RKT) diatas dapat diambil langkah strategis antara lain :

1. Membangun dan mengembangkan sinergitas dengan Instansi/ Unit/ Lembaga Hukum/ Masyarakat/ Stekholder terkait lainnya dalam melakukan pengendalian dalam rangka menciptakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
2. Membangun komunikasi yang secara berkala dalam melakukan diteksi dini dan cegah dini terhadap segala bentuk kegiatan yang berdampak pada adanya pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Dengan rumusan kebijakan yang telah ditetapkan antara lain :

1. Meningkatkan koordinasi antar Instansi/Unit Kerja/Lembaga Hukum yang tersebar dalam wilayah Nusa Tenggara Timur.
 2. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia.
 3. Pemenuhan sarana prasarana yang berstandar dalam mendukung pelaksanaan kegiatan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- Rencana Kerja

Tabel Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikator (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.2	Urusan Pemerintah an Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat		Prov/kab/Kota		12.863.647.600	APBD Prov. NTT			12.863.647.600
05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkatoran yang Berkualitas	Kota Kupang	100 %	12.863.647.600	APBD Prov. NTT		100 %	12.863.647.600
1.01	Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Tersedianya laporan capaian kinerja PD	Kota Kupang	49 dokumen	38.000.000	APBD Prov. NTT		49 dokumen	38.000.000
1.02	Administrasi keuangan pemerintah daerah	Terbayarnya gaji dan tunjangan	Kota Kupang	4 laporan	11.032.449.000	APBD Prov. NTT		4 laporan	11.032.449.000
1.06	Administrasi umum pemerintah daerah	Tersedianya kebutuhan operasional kantor	Kota Kupang	1 piket	80.000.000	APBD Prov. NTT		1 piket	80.000.000
1.07	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang	Kota Kupang	4 laporan	-			4 laporan	-
1.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Tersedianya kebutuhan jasa operasional kantor	Kota Kupang	4 laporan	968.025.600	APBD Prov. NTT		4 laporan	968.025.600
1.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Terpeliharanya barang milik daerah yang menjadi aset	Kota Kupang	4 laporan	113.600.000	APBD Prov. NTT		4 laporan	113.600.000
05.02	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Presentase meningkatnya pencapaian SPM trantibum	Kota Kupang	100 %	624.600.000	APBD Prov. NTT		Kota Kupang	624.600.000
1.01	Penanganan gangguan ketenteraman ddan ketertiban umum lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi	Terselenggaranya kegiatan penertiban, pengamanan, pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patrol turjawali dalam rangka trantibum	Kabupaten/kota	12 laporan	524.600.000	APBD Prov. NTT	Mengkoordinir layanan SPM	12 laporan	524.600.000
1.02	Penegakan peraturan daerah provinsi dan peraturan gubernur	Presentase meningkatnya pencapaian SPM trantibum (jumlah perda dan perkara yang ditegakan)	Kota Kupang	12 laporan	90.000.000	APBD Prov. NTT	Mengkoordinir layanan SPM	12 laporan	90.000.000
1.03	Pembinaan penyidik pegawai negeri sipil	Kegiatan pengembangan kapasitas PPNS	Kota Kupang	2 laporan	10.000.000	APBD Prov. NTT	Mengkoordinir layanan SPM	2 laporan	10.000.000

05.04	Program Pencegahan Penanggulangan Peyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Presentase pencegahan daerah berpotensi rawan kebakaran	Kota Kupang	100 %	7.000.000			100 %	7.000.000
1.01	Peyelenggaran pemetaan rawan bencana kebakaran	Peta daerah rawan kebakaran	Kota Kupang	4 laporan	7.000.000	APBD Prov. NTT	Mengkoordinir layanan SPM	4 laporan	7.000.000

Dalam implementasi rencana kerja, seluruh program dan kegiatan diarahkan untuk mewujudkan penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dengan mengoptimalkan seluruh bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam bentuk penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sehingga dapat menciptakan kondisi yang aman dan tentram.

B. Program Dan Kegiatan Tahun 2024.

Program dan Kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur seluruh pendanaanya bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan anggaran belanja dan Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun 2024 antara lain :

1. Belanja Daerah/Belanja Operasi.

1. Belanja Daerah/Operasi Rp. 13.036.880.880.- kegiatan ini terdiri dari

1.1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :

1.1.1 Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

1.1.1.1 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

1.1.2 Administrasi Keuangan Pemerintah Daerah.

1.1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

1.1.3 Administrasi Umum Perangkat Daerah Daerah.

1.1.3.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

1.1.3.2 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.

1.1.3.3 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.

1.1.3.4 Penyediaan Bahan Material.

1.1.3.5 Fasilitas Kunjungan tamu.

1.1.3.6 Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.1.3.7 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

- 1.1.4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - 1.1.4.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
 - 1.1.4.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik.
 - 1.1.4.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.1.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - 1.1.5.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
 - 1.1.5.2 Pemeliharaan Aset Tetap lainnya.
 - 1.1.5.3 Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya.

1.2. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- 1.2.1 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi :
 - 1.2.1.1 Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan.
 - 1.2.1.2 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
 - 1.2.1.3 Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi.
 - 1.2.1.4 Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
 - 1.2.1.5 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
 - 1.2.1.6 Pencegahan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini, Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan,

dan Pengawalan.

1.2.1.7 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja Melalui Pelatihan Teknis Termasuk dalam Pelaksanaan tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia.

1.2.1.8 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa.

1.2.2 Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur.

1.2.2.1 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.

1.2.2.2 Pengawasan atas kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.

1.2.2.3 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.

1.2.3 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi.

1.2.3.1 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS

1.3. Program Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran :

1.3.1 Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran.

1.3.1.1 Penyusunan dan Pemutahiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran.

1.3.1.2 Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran

C. Realisasi Anggaran

Dalam periode tahun 2024 tersedia pagu anggaran sesuai Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran sebesar Rp. 13.121.680.880.- (tiga belas miliar seratus dua puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) berikut kondisi atau keadaan kas sampai dengan tanggal 31 Mei 2024 yang telah dipertanggungjawabkan

secara fungsional oleh bendahara Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur pada badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DANKETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	13.121.680.880	4.672.768.067	35.61
01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	12.266.580.880	4.503.061.799	36.71
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Relaisasi Kinerja SKPD	38.000.000	8.516.000	22.41
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.032.449.000	3.992.957.449	36.19
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.032.449.000	3.992.957.449	36.19
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	80.000.000	39.385.213	49.23
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	722.780	14.46
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggunaan	25.000.000	14.134.150	96.46
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.000.000	1.250.000	62.50
	- Penyediaan Bahan/Material	20.000.000	8.623.807	43.12
	- Fasilitas Kunjungan Tamu	5.000.000	4.998.000	99.96
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.000.000	4.176.476	83.53
	- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	18.000.000	5.500.000	30.56
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	997.031.880	399.010.171	40.02
	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.400.000	810.000	57.87
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.000.000	2.164.800	21.85
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	985.631.880	396.035.371	40.18
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	119.100.000	63.192.926	53.06
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	70.000.000	47.038.426	67.20
	- Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	19.100.000	6.450.000	33.77
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.000.000	9.704.500	32.35

02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	848.100.000	169.706.308	20.01
	Penanganan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Provinsi	748.100.000	148.406.308	19.84
	- Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	2.500.000	-	-
	- Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	1.500.000	-	-
	- Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	150.000.000	31.370.000	20.91
	- Penyediaan Layanan Dasar Dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	75.000.000	-	-
	- Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5.000.000	-	-
	- Pencegahan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan masyarakat Melalui deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	333.100.000	89.972.308	27.01
	- Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja Melalui Pelatihan Teknis Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	131.000.000	-	-
	- Penindakan atas Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	50.000.000	27.064.000	54.13
	Penegakan Peraturan daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	90.000.00	16.300.000	18.11
	- Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	5.000.000	-	-
	- Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	70.000.000	16.300.00	23.29
	- Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	15.000.000	-	-

	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	10.000.000	5.000.000	50.00
	- Pengembangan Kapasitas dan Karir PPNS	10.000.000	5.000.000	50.00
03	PROGRAM PENCEGAHAN PENANGGULANGAN PENYELEMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	7.000.000	-	-
	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	7.000.000	-	-
	- Penyusunan dan Pemuktahiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	5.000.000	-	-
	- Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	2.000.000	-	-
	Jumlah Realisasi sampai dengan Mei	13.121.680.880	4.672.768.067	35.61

Kondisi atau keadaan kas per 31 Mei 2024

Pada tabel diatas dapat disampaikan bahwa capaian progres fisik dan keuangan pada Bulan Mei 2024 sebesar Rp. 4.672.768.067.- (empat miliar enam ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu enam puluh tujuh rupiah) atau 35.61 % dari Total pagu sebesar Rp. 13.121.680.880.- (tiga belas miliar seratus dua puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).

BAB III

HASIL PELAKSANAAN

Dalam Periode sampai dengan bulan Mei 2024 dimana rutin dilaksanakan dengan hasil capaian pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut :

Bidang Kesekretariatan.

1. Sub Bagian Program Data dan Evaluasi.

Capaian pelaksanaan tugas antara lain adalah :

1. Laporan Bulanan Bulan Mei 2024.
2. Laporan e-monev Bulan Mei Tahun 2024.
3. Workshop Konsolidasi Pelaporan SPM Propinsi dan Kabupaten/Kota Triwulan II Tahun 2024.
4. Melaksanakan Kegiatan Kesamaptaan (PBB)
5. Melaksanakan kegiatan dalam rangka Cukai Tembakto di Kecamatan Alak (Kelurahan Nunhila, Nunbaun Dela dan Nunbaun Sabu) Kota Kupang.
6. Melaksanakan kegiatan Data SPM di Kawasan Industri Bolok Kabupaten Kupang.
7. Melaksanakan Lokakarya Orientasi Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029.
8. Melaksankana Penyampaian Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) dan Anggaran (RKA) Tahun 2025 ke bidasng dan Sekretariat.
9. Melaksanakan Kegiatan Upacara Kesadaran Lingkup Pemerintah Provissi Nusa Tenggara Timur.
10. Melaksanakan Rapat Paripurna Capaian Hasil Pembahasan Pansus terhadap LKPJ Gubernur NTT Tahun 2023, Pembahasan dan Penetapan Keputusan DPRD serta Penyerahan Rekomendasi DPRD.
11. Melaksqanakan Upacara Bersama dalam Rangka Hari Kebangkitan Nasional.
12. Melaksanakan kegiatan Workshop Konsolidasi Pelaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi dan Kapupaten/Kota Triwulan II Tahun 2024.
13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Sub Bagian Keuangan.

1. Mengajukan SPP Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), Tambah Uang (TU) dan Gaji PNS (LS).
2. Menyusun SPJ Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), Tambah Uang (TU) dan Gaji PNS (LS).
3. Membuat laporan SPJ Fungsional dan laporan Pertanggungjawaban atas belanja SKPD.
4. Membuat Laporan Keuangan SKPD.
5. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh atasan.

3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.

• Kepegawaian

No.	Uraian Program / Kegiatan	Jumlah
1	Membuat rekapan piket bulan Mei Tahun 2024	1 berkas
2	Membuat rekapan kenaikan pangkat	1 berkas
3	Scan bahan administrasi usulan kenaikan pangkat ASN	8 ASN
4	Membuat usulan surat cuti pada aplikasi sip cut	3 ASN
5	Menyelesaikan surat tugas	3 surat
6	Menyelesaikan surat surat Plh	1 surat
7	Memberikan penilaian SKP bulan Mei 2024	8 ASN
8	Melaksanakan kegitan pelatihan kesamaptaan	4 kali
9	Melaksanakan kegitan pengamanan	4 kali
10	Mengikuti rapat koordinasi dengan instansi terkait	3 kali
11	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait	2 kali
12	Mengikuti rapat internal bersama PLt. Kasat	4 kali
13	Menyelesaikan administrasi laporan bulan April di Sub Bid Kepegawaian dan Umum	1 lap
14	Membuat daftar pembagian beras ASN	105 PNS
15	Menyelesaikan tindak lanjut LHP	1 berkas
16	Menyelesaikan rekapan kehadiran piket ASN Tahun 2024	1 dok
17	Memeriksa berkas kenarikan pangkat fungsional	11 ASN
18	Memeriksa berkas BTL pada link YANG TELAH tersedia	11 ASN

- Umum

No.	U r a i a n	Jumlah
1.	Jumlah Surat Masuk bulan Mei 2024	47 surat
2.	Jumlah Surat Keluar bulan Mei 2024	50 surat
3.	Jumlah undangan yang masuk bulan Mei 2024	12 surat

- Perlengkapan

Uraian Program/Kegiatan	Jumlah/ Keterangan
Mengatur Cleaning Service untuk membersihkan ruang kantor	Setiap Hari

**A. Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
Bulan Mei 2024.**

**KEGIATAN PENANGANAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA
DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI**

No	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa	Ket
			Rp	%		
1	Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum lintas daerah Kabupaten/Kota dan 1 (satu) daerah Provinsi	175.000.000.-	21.300.000	12	153.700.000.-	-

1. Sub Kegiatan : Sosialisasi Penegakan Perda dan Pergub

No	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa	Ket
			Rp	%		
1	Belanja Nakanan dan Minuman Rapat Sosialisasi Penegakan Perda dan Pergub	5.000.000.-	-	-	5.000.000.-	-
	Jumlah				5.000.000.-	-

2. Sub Kegiatan : Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Perda dan Pergub “Operasi DBHCHT (Rokok Ilegal)”

No	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa	Ket
			Rp	%		
1	Belanja Nakanan dan Minuman Rapat Sosialisasi Penegakan Perda dan Pergub	5.000.000.-	-	-	5.000.000.-	-
	Jumlah				5.000.000.-	-

3. Sub Kegiatan : Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan perda ddan pergub “operaso DBHCHT (rokok illegal)”

No	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa	Ket
			Rp	%		
1	Belanja Bahan Cetak	1,360.000.-	360.000	25	1,020.000.-	-
2	Belanja Makan minum rapat	16.960.000.-	3.040.000	18	13.920.000.-	
3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (uang harian transport lokal)	51.680.000.-	2.920.000	25	38.760.000.-	
	Jumlah				53.700.000.-	-

4. Sub Kegiatan : Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur sesuai SOP

No	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa	Ket
			Rp	%		
1	Belanja Bahan untuk kantor kegiatan ATK	40.000.-	-	-	40.000.-	-
2	Belanja Perjalanan Jasa Kantor	14.960.000.-	-	-	14.560.000.-	
	Jumlah				15.000.000.-	-

5. Sub Kegiatan : Pengembangan Kapasitas dan Karir PPNS

No	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa	Ket
			Rp	%		
1	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak	400.000.-	-	-	400.000.-	-
2	Belanja makan minum peserta rapat	3.600.000.-	-	-	3.600.000.-	
3	Belanja perjalanan dlam kota (transportasi peserta rapat teknis PPNS)	6.000.000.-	-	-	6.000.000.-	

**KEGIATAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DAN PERATURAN GUBERNUR
MELALUI KEGIATAN PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENINDAKAN**

No	Tanggal	Kegiatan	Tempat	Jumlah yang Dibun/Diawasi (orang)	Jumlah yang Ditindak (orang)	Ket
1	12 Mei 2024	Melakukan operasi DBHCHT (Rokok Ilegal) di Kota Kupang	Kecamatan Alak Kelurahan Nunbaun Sabu, Nunhila, dan Namosain	40 orang pemilik kos	-	-
2	27 Mei 2024	Rakor PPNS Lingkup Peerintah Provinsi NTT	Aula BM3 Kolam Renang Pantai Nunsui (Batunota) Oesapa Kota Kupang	30 orang		

**KEGIATAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DAN PERATURAN GUBERNUR
PENGADUAN MASYARAKAT**

No	Tanggal	No Surat/Tgl. Surat Masuk/Hal	Isi laporan Pengaduan	Tindak Lanjut Jumlah yang Ditindak (orang)	Ket
1	13 Mei 2024	800/1/454/Perindag/1.2 07 Mei 2024	Memperhatikan Surat Nomor : 1. Perindag		

DATA PELANGGAR PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN GUBERNUR

No	No Surat/Tgl. Surat Masuk/Hal	Pelanggar Perda/Pergub	Perda/Pergub yang dilanggara	Tindak Lanjut	Ket
1					

B. Ketenteraman dan KetertibanUmum.

Bulan Mei 2024

No	Jenis Pengamanan	Jumlah Pengamanan		Masalah	Pemecahan Masalah	Instansi Terkait	Keterangan
		Lokasi Kegiatan	Bulan				
1	2	3	4	6	7	8	9
01.	Melaksanakan apel gelar pasukan dalam rangka pengamanan hari Raya Idul Fitri 1445 H Tahun 2024	Polda NTT	x kegiatan 03 April 2024	-	-	Polda NTT dan unsure terkait	34 orang al. Kasat, Kabid SDA, Linmas, Kasi Ops, HK dan anggota Pol PP
02.	Melakukan pengamanan dalam rangka acara buka puasa bersama Pj. Gubernur NTT, Forkompinda, Pimpinan Instansi Vertikal dan Pemimpin perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT	Rumah Jabatan Gubernur NTT	1 x kegiatan 05 April 2024	-	-	OPD lingkup Pemprov. NTT dan Forkompinda Pimpinan Instanasi Vertikal NTT	20 orang al. Kasat, Kabid, Kasi dan anggota
03.	Mengikuti acara serah terima Plt. Kasat Pol PP dan Bapak Ir. Cornelis Wadu, M.Si	Aula Satpol PP Provinsi NTT	1 x kegiatan 05 April 2024	-	-	-	Seluruh anggota Satpol PP
04.	Melakukan patrol bersama Kapolda NTT dalam rangka memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat Kota Kupang pada malam takbiran menyambut Hari Raya Idul Fitri 1445 H Tahun 2024	Kota Kupang	1 x kegiatan 09 April 2024	-	-	Polda NTT dan unsure terkait	5 orang al. Kasat, Kabid SDA, Kasi Ops, HK dan anggota Pol PP
05.	Melaksanakan pengamanan dalam rangkakegiatan Sholat Idul Fitri 1445 H Tahun 2024 bersama Pj. Gubernur NTT	Alun-alun dan Rumah jabatan Gubernur NTT	1 x kegiatan 10 April 2024	-	-	-	27 orang al. Kasat, Kabid SDA, Kasi Ops, HK dan anggota
06.	Mengikuti rapat bersama Plt. Kasat dan semua Pejabat structural dam anggota	Aula Satpol PP	1 x kegiatan 16 April 2024	-	-	-	Seluruh anggota Sat Pol PP
07.	Melaksanakan pengamanan dan mengikuti apel kesadaran ASN lingkup Pemprov. NTT	Halaman Kantor Gubernur NTT	1 x kegiatan 17 April 2024	-	-	-	20 orang al. Kasat, Kabid, Kasi dan anggota
08.	Melaksanakan kerja bakti/giat bersih bersama OPD lingkup Pemprov. NTT (aksi bersama membersihkan kawasan pesisir di lingkungan sekitarnya dari sampah plastic dan sejenisnya	Taman pariwisata Lasianan Kota Kupang	1 x kegiatan 19 April 2024	Ada masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya	Membersihkan rumput dan membakar sampah di sekitar pesisir	Semua OPD lingkup Pemprov. NTT	20 orang al. Kasat, Kabid, Kasi dan anggota

09.	Mengikuti pelatihan Kesamaptaan (PBB)	Halaman Kantor Satpol PP	1 x kegiatan 19 April 2024	-	-	-	Seluruh pejabat structural dan anggota
10.	Melakukan pengamanan aksi ujuk rasa/ demonstrasi LMND (Liga Mahasiswa Nasional Demonstrasi) Eksekutif Kota Kupang (LMND) Ek) terkait kasus tenaga kerja kesehatan (jumlah 30 orang)	Kantor Gubernur dan DPRD Prov. NTT	1 x kegiatan 19 April 2024	-	-	-	Seluruh pejabat structural dan anggota
11.	Mengikuti rapat bersama Pejabat Eselon III dan IV terkait ISO	Aula Satpol PP	1 x kegiatan 19 April 2024	-	-	-	Seluruh Pejabat Struktural
12.	Melakukan apel bersama dalam rangka HUT Kartini	Halaman Kantor Satpol PP	1 x kegiatan 22 April 2024	-	-	-	Seluruh Pejabat Struktural dan anggota satpol PP
13.	Mengikuti pelatihan Kesamaptaan (PBB)	Halaman Kantor Satpol PP	1 x kegiatan 22 April 2024	-	-	-	Seluruh Pejabat Struktural dan anggota satpol PP
14.	Mengikuti pelatihan Kesamaptaan (PBB)	Halaman Kantor Satpol PP	1 x kegiatan 26 April 2024	-	-	-	Seluruh Pejabat Struktural dan anggota satpol PP
15.	Mengikuti pembinaan rohani secara Virtual dari 4 tokoh agama	Aula Satpol PP	1 x kegiatan 26 April 2024	-	-	-	Seluruh ASN Satpol PP
16.	Melakukan penjagaan dan pengamanan aset milik Pemprov. NTT	Kantor Gubernur sasando, Rujab Gubernur, Rujab Wagub, Rujab Sekda, dan Kantor Satpol PP	1 x kegiatan tanggal 30 x 24 Jam	-	-	5 Pos Piket	Jumlah personil. 62 anggota al. 15 danru, 30 anggota piket, 4 anggota patwal dan 13 anggota pengawas/pengontrol

C. Bidang Perlindungan Masyarakat.

- Program : Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- Kegiatan : Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- Sub.Kegiatan : Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Program : Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
- Kegiatan : Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran
- Sub Kegiatan : Penyediaan dan Pemutahiran Infromasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan kebakaran
- Bimtek Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kab/Kota

Kode Rekening	URAIAN	PAGU ANGGARAN RP.	REALISASI KEUANGAN (Rp.)	SISA DANA (Rp.)	Realisasi %	MASALAH	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	7.000.000	-	-	-	-	-
1.05.02.1.01.04	Penyusunan dan Pemuktahiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kabakaran	5.000.000	-	-	-	-	-
	Penyediaan Infirmasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	2.000.000	-	-	-	-	-
	Total Dana Bulan Mei	7.000.000	-	-	-	-	-

D. Bidang Sumber Daya Aparatur.

Seksi Pelatihan Dasar dan Teknis Fungsional & Seksi Kesemaptaan

Program : Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan : Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Sub.Kegiatan : Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Prajadan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuasa Hak Asasi Manusia

No	Nama Kegiatan & Nama Personil Yang Bertugas	Pagu Anggaran Rp.	Realisasi Keuangan Rp	Realisasi Fisik %	Masalah	Solusi	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam Pelaksanaan tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	75.000.000	0	0	0	0	-
	Total Pengeluaran Mei 2024	75.000.000	0	0	0	0	-

Berikut data personil pemadam kebakaran pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur :

Data Pemadam Kebakaran Di Provinsi NTT

No.	Nama kabupaten/Kota	JumlahPersonil	Keterangan
1.	Kota Kupang	2.410	Dalam struktur Organisasi Sat. PolPP Kota Kupang tidak terakomodir Bidang Pemadam Kebakaran karena telah ada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Kupang
2.	Kabupaten Kupang	2.152	
3.	Kabupaten TTS	2.758	
4.	Kabupaten TTU	1.548	
5.	Kabupaten Belu	1.550	
6.	Kabupaten Malaka	1.340	
7.	Kabupaten Alor	894	
8.	Kabupaten Rote Ndao	630	
9.	Kabupaten Sabu Raijua	276	
10.	Kabupaten Lembata	1.569	
11.	Kabupaten Flores Timur	1.070	
12.	Kabupaten Sikka	1.010	
13.	Kabupaten Ende	1.966	
14.	Kabupaten Ngada	1.018	
15.	Kabupaten Nagekeo	1.386	
16.	Kabupaten Manggarai	1.940	
17.	Kabupaten Manggarai Timur	1.186	
18.	Kabupaten Manggarai Barat	1.616	
19.	Kabupaten Sumba Timur	516	
20.	Kabupaten Sumba Tengah	810	
21.	Kabupaten Sumba Barat	1.816	
22.	Kabupaten Sumba Barat Daya	864	
TOTAL		31.325	

BAB IV

PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT

A. Permasalahan

Permasalahan yang ditemui dalam pencapaian target kinerja bulan Mei antara lain :

1. Pelaksanaan capaian kinerja yang terlambat.
2. Ganti Uang (GU) yang terlambat.

B. Tindak Lanjut.

Melakukan konsultasi dan rapat bersama pimpinan serta melakukan pendekatan dengan Badan Keuangan Daerah terkait pencairan anggaran untuk membiayai kegiatan.

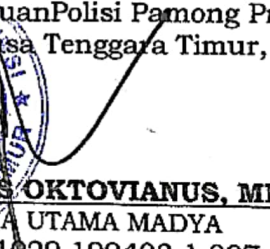
BAB V PENUTUP

Laporan kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban hasil pelaksanaan program dan kegiatan bulan Mei 2024, semoga apa yang telah disampaikan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur kedepan dalam rangka menciptakan ketenteraman dan ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat.

Akhir kata diucapkan terimakasih kepada semua pihak dalam lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sudah membantu dalam penyusunan laporan ini. Saran dan pendapat masih sangat dibutuhkan bagi kesempurnaan dari laporan ini.

Demikian laporan bulan Mei Tahun 2024 disajikan atas perhatian diucapkan terima kasih.

Kupang, 11 Juni 2024

Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Nusa Tenggara Timur, 

K. YOHANES OKTOVIANUS, MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19661029 199403 1 007

LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN APBD PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BULAN MEI 2024

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	SUMBER DANA	LOKASI KEGIATAN	SASARAN	KONDISI 3/4 BULAN SEBELUMNYA						KONDISI 3/4 BULAN INI						SISA ANGGARAN (Rp)	KET
						TARGET			REALISASI			TARGET			REALISASI				
						(%) FISIK	(%) KEU	Rp	(%) FISIK	(%) KEU	Rp	(%) FISIK	(%) KEU	Rp	(%) FISIK	(%) KEU	Rp		
						7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18			
1	2	3	4	5	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	20
5.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	13.121.680.880						3.869.069.609	135	135	798.698.458			4.672.768.067	35,61	35,61	8.465.212.813		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	12.266.580.880						3.756.249.497	122	122	746.812.262			4.503.061.759	36,71	36,71	7.763.519.121		
	PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	38.000.000						8.516.000											
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	38.000.000	DAU	Kota Kupang	SKPD	-	-	8.516.000	22,41	22,41		-	-	8.516.000	22,41	22,41	29.484.000		
	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	11.032.449.000						3.345.545.760			647.411.689			3.992.957.449	36,19	36,19	7.039.491.551		
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.032.449.000	DAU	Kota Kupang	SKPD	-	-	3.345.545.760	30,32	30,32	647.411.689			3.992.957.449	36,19	36,19	7.039.491.551		
	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	80.000.000	DAU		SKPD	-	-	35.259.113	44,07	44,07	4.126.100			39.385.213	49,23	49,23	40.614.787		
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	DAU	Kota Kupang	SKPD	-	-	722.780	14,46	14,46				722.780	14,46	14,46	4.277.220		
	- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.000.000	DAU	Kota Kupang	SKPD	-	-	12.941.550	51,77	51,77	1.172.600			14.114.150	56,46	56,46	10.885.850		
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.000.000	DAU	Kota Kupang	SKPD	-	-	750.000	37,50	37,50	500.000			1.250.000	62,50	62,50	750.000		
	- Penyediaan Bahan Material	20.000.000	DAU	Kota Kupang	SKPD	-	-	7.091.307	35,46	35,46	1.532.500			8.623.807	43,12	43,12	11.376.193		
	- Fasilitas Kunjungan Tamu	5.000.000	DAU	Kota Kupang	SKPD	-	-	4.998.000	99,96	99,96				4.998.000	99,96	99,96	2.000		
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.000.000	DAU	Kota Kupang	SKPD	-	-	3.255.476.000	65,11	65,11	921.000			4.176.476.000	83,53	83,53	823.524		
	- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	18.000.000	DAU	Kota Kupang	SKPD	-	-	5.500.000	30,56	30,56				5.500.000	30,56	30,56	12.500.000		
	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	997.031.380	DAU		SKPD	-	-	311.228.891	31,22	31,22	87.781.280			399.010.171	40,02	40,02	598.021.709		
	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.400.000	DAU	Kota Kupang	SKPD	-	-	510.000	36,43	36,43	300.000			810.000	57,86	57,86	590.000		
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.000.000	DAU	Kota Kupang	SKPD	-	-	1.398.000	13,98	13,98	766.800			2.164.800	21,65	21,65	7.835.200		
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	985.631.880	DAU	Kota Kupang	SKPD	-	-	309.320.891	31,38	31,38	86.714.480			396.035.371	40,18	40,18	589.596.509		

PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	119.100.000	DAU		SKPD	-	-	55.699.733	46,77	46,77	7.493.193	-	63.197.926	53,06	53,06	55.907.074
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	70.000.000	DAU	Kota Kupang	SKPD	-	-	39.947.233	57,06	57,06	7.096.193	-	47.038.426	67,20	67,20	22.961.574
- Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	19.100.000	DAU	Kota Kupang	SKPD	-	-	6.115.000	32,02	32,02	335.000	-	6.450.000	33,77	33,77	12.650.000
- Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.000.000	DAU	Kota Kupang		-	-	9.642.500	32,14	32,14	62.000	-	9.704.500	32,35	32,35	20.295.500
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	848.100.000	DAU	Kab/Kota		-	-	112.820.112	13,30	13,30	51.886.196	-	169.706.308	20,01	20,01	694.693.692
PENANGANAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI	748.100.000	DAU	Kab/Kota		-	-	96.520.112	12,90	12,90	51.886.196	-	148.406.308	19,84	19,84	599.693.692
- Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	2.500.000	DAU	Kab/Kota		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.500.000
- Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	1.500.000	DAU	Kab/Kota		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500.000
- Koordinasi Penyelenggaraan Ketertiban, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	150.000.000	DAU	Kab/Kota		-	-	31.370.000	20,91	20,91	-	-	31.370.000	20,91	20,91	118.630.000
- Penyedia Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	75.000.000	DAU	Kab/Kota		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.000.000
- Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertiban dan Ketertiban Umum	5.000.000	DAU	Kab/Kota		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000.000
- Pencegahan Gangguan Ketertiban, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan	333.100.000	DAU	Kab/Kota		-	-	60.350.112	18,12	18,12	29.622.196	-	89.972.308	27,01	27,01	243.127.692
- Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja Melalui Pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	131.000.000	DAU			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	131.000.000
- Penindakan atas Gangguan Ketertiban, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Pemberitaan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	50.000.000	DAU	Kab/Kota		-	-	4.800.000	9,60	9,60	22.264.000	-	27.064.000	54,13	54,13	22.936.000
PENEGAKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DAN PERATURAN GUBERNUR	90.000.000	DAU			-	-	16.300.000	18,11	18,11	-	-	16.300.000	18,11	18,11	90.000.000
- Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	5.000.000				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000.000
- Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	70.000.000				-	-	16.300.000	23,29	23,29	-	-	16.300.000	23,29	23,29	70.000.000
- Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	15.000.000	DAU	Kab/Kota		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000.000
PEMBINAAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) PROVINSI	10.000.000				-	-	-	-	-	-	-	5.000.000	50,00	50,00	5.000.000
- Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	10.000.000				-	-	-	-	-	-	-	5.000.000	50,00	50,00	5.000.000

[illegible]

Kupang, 10 Juni 2024

Pdt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Pirani N. Tenggar Timur,

WATJAHNES KOTONIANUS, MM
KORAMBINGA ZEMIA MADYA
NIP. 196608171994031 007



Mr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Program Studi Pendidikan Matematika

...IL YOHANES BKTOW/ANUS. MM

123. PEMBINA TAMBAH MADYA

MP, 1956-02-199403 1 007

LAMPIRAN : DOKUMENTASI LAPORAN BULAN MEI 2024



Foto kegiatan Pengamanan Orasi Demo Lanjutan di Depan Kantor DPRD Provinsi NTT



Foto kegiatan Kesemaptan SATPOL PP Provinsi NTT



Foto kegiatan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan dan Pelantikan Penjabat Bupati Flores Timur dan Penjabat Bupati Lembata oleh Penjabat Gubernur Provinsi NTT serta Pelantikan Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Lembata



Foto kegiatan Rakor PPNS Lingkup Pemprov NTT



Foto kegiatan Operasi Bersama Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Rokok Ilegal)



Foto kegiatan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2024



Foto kegiatan Duta Besar Vatikan untuk Indonesia, Para Uskup se-Indonesia dan Timor Leste



Foto kegiatan Lokakarya Orientasi Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Provinsi NTT



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Jln. Polisi Militer No. -Telp. (0380)-828090**
Email : satpolpp_prov.ntt@Yahoo.com
Website : www.satpol-pp.nttprov.go.id
K U P A N G

11 Juli 2024

Yth. - Kepala Bappelitbangda Provinsi NTT
- Kepala Badan Keuangan Daerah Setda
Provinsi NTT

SURAT PENGANTAR

Nomor : 000.1.5/520/sat pol pp 1.1

JENIS SURAT	JUMLAH	KETERANGAN
2	3	4
Laporan Bulan Juni Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024	1 (Satu) Buku	Dikirim untuk ditindak lanjuti

Demikian Laporan ini atas kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Plh. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI-NUSA TENGGARA TIMUR,



Lt. YOHANES OKTOVIANUS, MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19661029 199403 1 007

Paraf Hirarki :	
Plh. Sekretaris	h
Kepala Subbag Program Data dan Evaluasi	g
Fungsional Ahli Muda	f



LAPORAN BULAN JUNI



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024

Jalan Polisi Militer Nomor 1, Telp/Fax (0380) 828090

Email : satpolpp_prov.ntt@yahoo.com

Website : www.satpol-pp.nttprov.go.id

KUPANG



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur patut dipanjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena hanya atas penyertaan dan kasih-Nya maka Laporan Bulan Juni 2024 - Tahun Anggaran 2024 Satuan Polisi Pamong Praja ini dapat diselesaikan dengan baik.

Tugas, fungsi dan wewenang Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah menjadi sangat penting yang mana terlaksananya berbagai kegiatan pengamanan dan penegakkan prodak hukum. Keadaan yang nyaman, aman dan tenteram diciptakan guna mendukung kinerja Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Untuk itu Laporan Bulan Juni Tahun Anggaran Tahun 2024 ini merupakan bahan, data dan informasi yang disusun secara baik, transparan dan dapat di pertanggungjawabkan kepada publik ataupun kepada pemangku kepentingan yang membutuhkan informasi terkait penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Kupang, 11 Juli 2024

Plh. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



Ir. YOHANES OKTOVIANUS, MM

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19661029 199403 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Maksud dan Tujuan	3
D. SDM Satuan Polisi Pamong Praja	3
BAB II RENCANA KERJA TAHUNAN	12
A. Rencana Kerja Tahunan	12
B. Program dan Kegiatan Tahun 2024	16
C. Realisasi Anggaran	18
BAB III HASIL PELAKSANAAN	22
A. Sekretariat	22
B. Bidang Penegakan Perda dan Peraturan Gubernur	24
C. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	26
D. Bidang Perlindungan Masyarakat	30
E. Bidang Sumber Daya Aparatur	28
BAB IV PERMASALAHAN	31
A. Permasalahan	31
B. Tindak Lanjut	31
BAB V PENUTUP	32
- Laporan Keuangan	33
- Lampiran Foto/Dokumentasi	36

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu Perangkat Daerah yang di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Tugas Satuan Polisi Pamong Praja yakni membantu Kepala Daerah dalam memelihara Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan masyarakat, dan fungsinya sebagai berikut;

- a) Perumusan kebijakan di bidang Satuan Polisi Pamong Praja;
- b) Pelaksanaan kebijakan di bidang Satuan Polisi Pamong Praja;
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Satuan Polisi Pamong Praja;
- d) Pelaksanaan administrasi di bidang Satuan Polisi Pamong Praja;
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas dan fungsi yang telah dijabarkan diatas kemudian diuraikan dalam program dan kegiatan dimana sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 tentang Satuan Polisi pamong Praja melaksanakan urusan Pemerintahan Wajib berkaitan dengan Pelayanan Dasar dalam arti bahwa pelayanan yang diberikan oleh Satuan Polisi pamong Praja berkaitan dengan hak setiap warga masyarakat yang wajib diperoleh sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal.

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur berupaya agar mampu menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan bulan Juni 2024 laporan kinerja ini menggambarkan kinerja yang telah dilaksanakan, sehingga sangat diharapkan dapat bermanfaat bagi semua komponen yang terlibat dalam proses menciptakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat.

B. Dasar hukum

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian Cuti bagi Pegawai Negeri Sipil.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pakian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Satuan Polisi Pamong Praja;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Satuan Polisi Pamong Praja;
12. Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur.
13. Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah P-DPA-SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2024 Nomor : DPPA/A.1/1.05.0.00.0.00.01.0000/001/2024.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud.

Sebagai bahan pertanggungjawaban terhadap hasil pelaksanaan program dan kegiatan bulan Juni 2024.

2. Tujuan.

Untuk menghasilkan sebuah laporan kinerja bulanan yang menggambarkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT bulan Juni Tahun Anggaran 2024.

D. Sumber Daya Manusia (SDM) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 130 orang dengan rincian sebagai berikut:

a. Berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah (Orang)
1	2	3
1.	Kepala Satuan	1
2.	Sekretaris	-
3.	Kepala Bidang	3
4.	Kepala Seksi	7
5.	Kepala Sub Bagian	3
6.	Jabatan Fungsional	63
7.	Jabatan Fungsional Umum	23
8.	Honorar	29
Jumlah		130



b. Berdasarkan Jenis Kelamin

Jabatan Pegawai	Jenis Kelamin	
	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)
1	2	3
Kepala Satuan	1	
Sekretaris	-	
Kepala Bidang	3	
Kepala Seksi	5	2
Kepala Sub Bagian	1	2
Jabatan Fungsional	57	6
Pelaksana	17	7
Tenaga Honorer	18	11
Total Jumlah	102	28
	130 Orang	

c. Jumlah ASN Berdasarkan Pangkat/Golongan.

Rincian Kepangkatan/Golongan					Jumlah
Kepangkatan PNS	A	B	C	D	
Golongan IV	1	2	-	1	4 orang
Golongan III	12	23	11	13	59 orang
Golongan II	-	-	10	28	38 orang
Golongan I	-	-	-	-	- orang
Jumlah	13	25	21	42	101 orang

d. Berdasarkan Jenjang Pendidikan.

No.	Jenjang Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1.	Pasca Sarjana (S2)	4	-	4
2.	Sarjana (S1)	37	13	50
3.	Diploma (D3)	1	-	-
4.	SMA/SMU	42	5	47
Jumlah		83	18	101

e. Berdasarkan Agama.

No.	Data Keagamaan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1.	Islam	4	-	4
2.	Kristen	77	23	100
3.	Katholik	21	5	26
4.	Hindu	-	-	-
5.	Budha	-	-	-
Jumlah		102	28	130

Berikut dapat di sampaikan data pemberian cuti dan tindak disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur selama bulan Juni 2024 sesuai ketentuan yang berlaku

1. Cuti tahunan berdasarkan Kepangkatan/Golongan.

No.	Data Cuti Tahunan	Jumlah
1	2	3
1.	Golongan IV	1
2.	Golongan III	6
3.	Golongan II	1
Jumlah		8

2. Data Pegawai yang kena sanksi Kepegawaian :

No.	Data Pegawai Yang Kena Sanksi Kepegawaian	Jumlah
1	2	3
1.	Golongan IV	-
2.	Golongan III	7
3.	Golongan II	2
4.	Banpol	-
5.	Cleaning Service	-
Jumlah		9

Selain melaksanakan tugas Satuan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur juga juga melakukan penjagaan (piket) dalam rangka menjaga aset penting milik pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur adapun aset tersebut antara lain :

1. Pos Kantor Gubernur/Sasando.
2. Pos Rumah Jabatan Gubernur.
3. Rumah Jabatan Wakil Wakil Daerah.
4. Rumah Jabatan Sekretaris Daerah.
5. Posko Praja (Kantor Satpol PP).

Penjagaan pada tempat/lokasi jaga dibagi dalam 3 (tiga) sift, dimana masing-masing sift dibagi waktu selama 1 x 24 jam, mulai jam 08:00 pagi hingga jam 08:00 pagi berikutnya. Jadwal pelaksanaan piket diatur sesuai dengan surat keputusan Kepala satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur 2024 (terlampir).

E Sarana dan Prasarana

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam melaksanakan tugas yang diemban didukung dengan prasarana penunjang operasional kegiatan baik di kantor maupun di lapangan. Sarana Prasarana tersebut dicatat sebagai aset karena proses pengadaannya bersumber dari Dana Alokasi Umum yang dituangkan dalam dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur dari Tahun Anggaran 2003 sampai dengan tahun 2024 sebagai berikut :

Sarana Prasarana Pendukung

No	Jenis Nama Barang	Merk/Type/Bahan	Vol	Satuan	Keadaan Barang	Tahun Pengadaan
1.	Mobil Pic Up (DH 8059 AW)	Besi/Toyota Pic Up	1	Unit	B	2003
2	Meja Biro 4 Laci	Arinda/Olympic	1	Buah	B	2008
3	Meja Biro 4 Laci	Arinda/Olympic	1	Buah	B	2008
4	Lap Top/Toshiba	Metal	1	Buah	B	2008
5	Air Condition	Besi /National/ 1Pk	2	Buah	B	2008
6	Air Condition	Besi/Akira	1	Buah	B	2008
7	Mobil Truck (DH 8047 AW)	Besi/Isuzu	1	Unit	B	2009
8	Mobil Minibus (DH 196 AW)	Besi/Toyota Rush	1	Unit	B	2009
9	Lemari 2 Pintu	Kayu Jati	6	Buah	B	2009
10	Lap Top Azer	Metal	1	Buah	B	2009
11	Printer HP/Laser Jet	Metal	1	Buah	B	2009
12	Wireless	Tens	1	Buah	B	2009
13	Megaphone Toa	Besi	1	Buah	B	2009
14	Facsimile	Panasonic	1	Buah	B	2009
15	Televisi	Digitec	1	Buah	B	2009
16	Kain Horrden	Kain	1	Buah	B	2009
17	Lambang Garuda		2	Buah	B	2009
18	Tiang Bendera	Besi	1	Buah	B	2009

19	Papan Nama SKPD	Besi	1	Buah	B	2009
20	Sepeda Motor (DH 2843 AW)	Besi/Honda/ GL 200 R	1	Unit	B	2010
21	Sepeda Motor (DH 2844 AW)	Besi/Honda/ GL 200 R	1	Unit	B	2010
22	Sepeda Motor (DH 2845 AW)	Besi/Honda/ GL 200 R	1	Unit	B	2010
23	Trasmister UHF	Motorola GR500	1			2010
24	MejaKerja	Kayu	10	Buah	B	2011
25	KursiKerja	Kayu	10	Buah	B	2011
26	Lemari 2 Pintu	Kayu Jati	5	Buah	B	2011
27	Komputer PC Simbada	Metal	2	Buah	B	2011
28	Lap Top Toshiba/L745	Metal	2	Buah	B	2011
29	Printer Canon	Metal	5	Buah	B	2011
30	Handy Talkie	Motorola GP2000	5	Buah	B	2011
31	Handy Cam	Sony	1	Buah	B	2011
32	Alat Kejut Listrik	Metal	13	Buah	B	2011
33	Sound System	Rhoad	1	Buah	B	2011
34	Komputer PC Simbada	Metal	2	Buah	B	2012
35	Televisi	Multimax	1	Buah	B	2012
36	Televisi	Sharp	1	Buah	B	2012
37	Scaner	Metal	1	Buah	B	2012
38	Kasur Busa	Bigland	8	Buah	B	2012
39	LayarProyektor		1	Buah	B	2012
40	MejaPimpinan 4 Laci	Kayu	1	Buah	B	2013
41	MejaKerja	Kayu	6	Buah	B	2013
42	Lemari 2 Pintu	Kayu Jati	2	Buah	B	2013
43	Komputer PC Simbada	Metal	2	Buah	B	2013
44	Lap Top ToshibaL840	Metal	4	Buah	B	2013

45	Kamera Digital	Canon	1	Buah	B	2013
46	LayarProyektor		1	Buah	B	2013
47	Mobil Double Cabin (DH 8249 AW)	Besi/Toyota Hilux	1	Unit	B	2014
48	Sepeda Motor (DH 3953)	Besi/Kawasaki KLX 15	1	Unit	B	2014
49	Sepeda Motor (DH 3954)	Besi/ Kawasaki KLX 15	1	Unit	B	2014
50	Sepeda	Paragon	6	Buah	B	2014
51	Kursi Sofa	Busa	1	Buah	B	2014
52	Lemari 2 Pintu	Kayu Jati	2	Buah	B	2014
53	Kulkas	Besi/ Polytron	1	Buah	B	2014
54	UPS/Matsunaga	Metal	10	Buah	B	2014
55	Lap Top Lenovo B490	Metal	1	Buah	B	2014
56	Printer Canon MX 397	Metal	1	Buah	B	2014
57	Air Condition/	Besi Polytron	5	Buah	B	2014
58	Wirelesgenggam	Toa-ZR1015	4	Buah	B	2014
59	Televisi	Polytron	5	Buah	B	2014
60	Handy Talkie	Motorola A 12	40	Buah	B	2014
61	Antena, Rig, Repeater	Motorola CDR500	1	Buah	B	2014
62	Mesin Absen Elektronik	Secure	1	Buah	B	2014
63	Mesin Absen Elektronik	Secure	1	Buah	B	2014
64	Mesin Ketik	Brother	1	Buah	B	2014
65	Handy Cam	Sony	1	Buah	B	2014
66	MejaRapat	Kayu Jati	5	Buah	B	2015
67	Meja Biro 4 Laci	Kayu	1	Buah	B	2015
68	Meja 1/2 Biro, 2 Laci	Kayu	15	Buah	B	2015
69	KursiRapat	Busa//Master Chair	20	Buah	B	2015
70	KursiKerja	Kayu	21	Buah	B	2015

71	Lemari 2 Pintu	Kayu Jati	1	Buah	B	2015
72	Tempat Tidur Lipat	Metal	7	Buah	B	2015
73	Lap Top Toshiba C55	Metal	5	Buah	B	2015
74	Lap Top Asus X453MA	Metal	1	Buah	B	2015
75	Printer Canon	Metal	5	Buah	B	2015
76	Tirai/Gorden	Kain	2	Buah	B	2015
77	Mic & Tiang Mic	Shure & NVK	1	Buah	B	2015
78	Kamera Digital	Canon	1	Buah	B	2015
79	Senter	S.W.A.T XML-T6	7	Buah	B	2015
80	Lemari Arsip	Katyu	1	Buah	B	2016
81	Komputer PC	LG	1	Buah	B	2016
82	Printer	Canon MP280	1	Buah	B	2016
83	Air Condition	Polytron	4	Buah	B	2016
84	Dispenser		6	Buah	B	2016
85	Taplak Meja dan Vas Bunga	Kain	1	Buah	B	2017
86	Mesin Potong Rumput	Besi	1	Buah	B	2017
87	Linggis kuku kambing	Besi	5	Buah	B	2017
88	Meja Rapat	Kayu	3	Buah	B	2017
89	Meja 1/2 Biro	Kayu	6	Buah	B	2017
90	Kursi Rapat	Besi	50	Buah	B	2017
91	Lemari 3 Pintu	Kayu	2	Buah	B	2017
92	Dispenser standing	Besi	2	Buah	B	2017
93	Kamera Digital	Besi	1	Buah	B	2017
94	Papan Nama SKPD	Besi	1	Buah	B	2017
95	Komputer (hp AIQ)	Hp	6	Unit	B	2020
96	Printer	(Epson L3110)	6	Unit	B	2020
97	Lemari	Kayu	5	Unit	B	2020
98	Meja Kerja	Kayu	7	Unit	B	2020

99	Meja Rapat	Kayu	2	Unit	B	2020
100	Kursi Kerja	Kayu	7	Unit	B	2020
101	Wirlaes		1	Unit	B	2020
102	Papan Sekretariat PPNS		1	Unit	B	2020
103	Papan Struktur Organisasi 1		1	Unit	B	2020
104	Papan Struktur Organisasi 1		1	Unit	B	2020
105	Papan Visi Misi		1	Unit	B	2020
106	Papan Informasi		1	Unit	B	2020
107	Mesin Potong Rumput		1	Unit	B	2020
108	Alat Pengukur suhu (Termogram)		2	Buah	B	2021 (BTT)
109	Genset	Yamaha/Bensin	2	Unit	B	2021
110	Mobil Truck (DH 8279 WA)	Besi/Hino	1	Unit	B	2021
111	Mobil Hilux Double Cabin (DH 19)	Besi/Toyota Hilux	1	Unit	B	2021

BAB II

RENCANA KERJA TAHUNAN

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai urusannya dalam bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat memiliki langkah-langkah strategis dalam upaya mendukung program Kepala Daerah, Hal ini dijabarkan dalam rencana Program Kegiatan sebagai berikut :

A. Rencana Kinerja Tahunan.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar dalam Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.

Rencana Kerja Tahunan (RKT) disusun berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur yang Termuat dalam Rencana Strategis (Renstra) tahun 2024-2026 sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026 :

Indikator Kinerja Utama (KU) Tahun 2024
Satuan Polisi pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI	TARGET	FORMULAINDIKATOR
			2023	2024	
1	2	3	4	6	7
1	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1. Presentase meningkatnya pencapaian SPM Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	44,76%	100%	Jumlah kegiatan yang diselesaikan -----x 100 Target
		2. Presentase meningkatnya Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (jumlah Perda dan Perkada yang ditegakan)	3	3	Jumlah Penyelesaian Perda dan Perkada yang ditegakan -----x100 Jumlah Perda dan Perkada
		3. Presentase Pencegahan Daerah Rawan Kebakaran setiap Tahun	-	100 %	Data Potensi Daerah Rawan Kebakaran -----x100 Jumlah Wilayah

Dari tabel Rencana Kinerja Tahunan (RKT) diatas dapat diambil langkah strategis antara lain :

1. Membangun dan mengembangkan sinergitas dengan Instansi/ Unit/ Lembaga Hukum/ Masyarakat/ Stekholder terkait lainnya dalam melakukan pengendalian dalam rangka menciptakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
2. Membangun komunikasi yang secara berkala dalam melakukan diteksi dini dan cegah dini terhadap segala bentuk kegiatan yang berdampak pada adanya pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Dengan rumusan kebijakan yang telah ditetapkan antara lain :

1. Meningkatkan koordinasi antar Instansi/Unit Kerja/Lembaga Hukum yang tersebar dalam wilayah Nusa Tenggara Timur.
 2. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia.
 3. Pemenuhan sarana prasarana yang berstandar dalam mendukung pelaksanaan kegiatan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- Rencana Kerja

Tabel Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikator (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.2	Urusan Pemerintah an Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat		Prov/kab/Kota		12.863.647.600	APBD Prov. NTT			12.863.647.600
05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkatoran yang Berkualitas	Kota Kupang	100 %	12.863.647.600	APBD Prov. NTT		100 %	12.863.647.600
1.01	Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Tersedianya laporan capaian kinerja PD	Kota Kupang	49 dokumen	38.000.000	APBD Prov. NTT		49 dokumen	38.000.000
1.02	Administrasi keuangan pemerintah daerah	Terbayarnya gaji dan tunjangan	Kota Kupang	4 laporan	11.032.449.000	APBD Prov. NTT		4 laporan	11.032.449.000
1.06	Administrasi umum pemerintah daerah	Tersedianya kebutuhan operasional kantor	Kota Kupang	1 piket	80.000.000	APBD Prov. NTT		1 piket	80.000.000
1.07	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang	Kota Kupang	4 laporan	-			4 laporan	-
1.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Tersedianya kebutuhan jasa operasional kantor	Kota Kupang	4 laporan	968.025.600	APBD Prov. NTT		4 laporan	968.025.600
1.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Terpeliharanya barang milik daerah yang menjadi aset	Kota Kupang	4 laporan	113.600.000	APBD Prov. NTT		4 laporan	113.600.000
05.02	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Presentase meningkatnya pencapaian SPM trantibum	Kota Kupang	100 %	624.600.000	APBD Prov. NTT		Kota Kupang	624.600.000
1.01	Penanganan gangguan ketenteraman ddan ketertiban umum lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi	Terselenggaranya kegiatan penertiban, pengamanan, pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patrol turjawali dalam rangka trantibum	Kabupaten/kota	12 laporan	524.600.000	APBD Prov. NTT	Mengkoordinir layanan SPM	12 laporan	524.600.000
1.02	Penegakan peraturan daerah provinsi dan peraturan gubernur	Presentase meningkatnya pencapaian SPM trantibum (jumlah perda dan perkara yang ditegakan)	Kota Kupang	12 laporan	90.000.000	APBD Prov. NTT	Mengkoordinir layanan SPM	12 laporan	90.000.000
1.03	Pembinaan penyidik pegawai negeri sipil	Kegiatan pengembangan kapasitas PPNS	Kota Kupang	2 laporan	10.000.000	APBD Prov. NTT	Mengkoordinir layanan SPM	2 laporan	10.000.000

05.04	Program Pencegahan Penanggulangan Peyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Presentase pencegahan daerah berpotensi rawan kebakaran	Kota Kupang	100 %	7.000.000			100 %	7.000.000
1.01	Peyelenggaran pemetaan rawan bencana kebakaran	Peta daerah rawan kebakaran	Kota Kupang	4 laporan	7.000.000	APBD Prov. NTT	Mengkoordinir layanan SPM	4 laporan	7.000.000

Dalam implementasi rencana kerja, seluruh program dan kegiatan diarahkan untuk mewujudkan penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dengan mengoptimalkan seluruh bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam bentuk penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sehingga dapat menciptakan kondisi yang aman dan tentram.

B. Program Dan Kegiatan Tahun 2024.

Program dan Kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur seluruh pendanaanya bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan anggaran belanja dan Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun 2024 antara lain :

1. Belanja Daerah/Belanja Operasi.

1. Belanja Daerah/Operasi Rp. 13.121.680.880.- kegiatan ini terdiri dari

1.1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :

1.1.1 Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

1.1.1.1 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

1.1.2 Administrasi Keuangan Pemerintah Daerah.

1.1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

1.1.3 Administrasi Umum Perangkat Daerah Daerah.

1.1.3.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

1.1.3.2 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.

1.1.3.3 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.

1.1.3.4 Penyediaan Bahan Material.

1.1.3.5 Fasilitas Kunjungan tamu.

1.1.3.6 Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.1.3.7 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

- 1.1.4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - 1.1.4.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
 - 1.1.4.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik.
 - 1.1.4.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.1.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - 1.1.5.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
 - 1.1.5.2 Pemeliharaan Aset Tetap lainnya.
 - 1.1.5.3 Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya.

1.2. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- 1.2.1 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi :
 - 1.2.1.1 Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan.
 - 1.2.1.2 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
 - 1.2.1.3 Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi.
 - 1.2.1.4 Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
 - 1.2.1.5 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
 - 1.2.1.6 Pencegahan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini, Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan,

dan Pengawalan.

1.2.1.7 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja Melalui Pelatihan Teknis Termasuk dalam Pelaksanaan tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia.

1.2.1.8 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa.

1.2.2 Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur.

1.2.2.1 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.

1.2.2.2 Pengawasan atas kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.

1.2.2.3 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.

1.2.3 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi.

1.2.3.1 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS

1.3. Program Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran :

1.3.1 Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran.

1.3.1.1 Penyusunan dan Pemutahiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran.

1.3.1.2 Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran

C. Realisasi Anggaran

Dalam periode tahun 2024 tersedia pagu anggaran sesuai Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran sebesar Rp. 13.121.680.880.- (tiga belas miliar seratus dua puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) berikut kondisi atau keadaan kas sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 yang telah dipertanggungjawabkan

secara fungsional oleh bendahara Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur pada badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DANKETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	13.121.680.880	5.331.679.697	40.63
01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	12.266.580.880	5.078.440.516	41.40
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Relaisasi Kinerja SKPD	38.000.000	8.516.000	22.41
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.032.449.000	4.488.375.976	40.68
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.032.449.000	4.488.375.976	40.68
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	80.000.000	39.860.963	49.83
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	750.280	15.01
	- Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	25.000.000	14.562.400	58.25
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.000.000	1.250.000	62.50
	- Penyediaan Bahan/Material	20.000.000	8.623.807	43.12
	- Fasilitas Kunjungan Tamu	5.000.000	4.998.000	99.96
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.000.000	4.176.476	83.53
	- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	18.000.000	5.500.000	30.56
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	997.031.880	476.859.651	47.83
	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.400.000	810.000	57.86
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.000.000	2.164.800	21.65
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	985.631.880	473.884.851	48.08
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	119.100.000	64.827.926	54.43
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	70.000.000	48.328.426	69.04
	- Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	19.100.000	6.730.000	35.24
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.000.000	9.769.500	32.57

02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	848.100.000	253.239.181	29.86
	Penanganan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Provinsi	748.100.000	231.939.181	31.00
	- Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	2.500.000	-	-
	- Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	1.500.000	-	-
	- Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	150.000.000	31.370.000	20.91
	- Penyediaan Layanan Dasar Dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	75.000.000	-	-
	- Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5.000.000	-	-
	- Pencegahan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan masyarakat Melalui deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	333.100.000	120.105.381	36.06
	- Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja Melalui Pelatihan Teknis Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	131.000.000	53.399.800	33.12
	- Penindakan atas Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	50.000.000	27.064.000	54.13
	Penegakan Peraturan daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	90.000.00	16.300.000	18.11
	- Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	5.000.000	-	-
	- Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	70.000.000	16.300.00	23.29
	- Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	15.000.000	-	-

	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	10.000.000	5.000.000	50.00
	- Pengembangan Kapasitas dan Karir PPNS	10.000.000	5.000.000	50.00
03	PROGRAM PENCEGAHAN PENANGGULANGAN PENYELEMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	7.000.000	-	-
	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	7.000.000	-	-
	- Penyusunan dan Pemuktahiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	5.000.000	-	-
	- Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	2.000.000	-	-
	Jumlah Realisasi sampai dengan Mei	13.121.680.880	5.331.679.697	40.63

Kondisi atau keadaan kas per 30 Juni 2024

Pada tabel diatas dapat disampaikan bahwa capaian progres fisik dan keuangan pada Bulan Juni 2024 sebesar Rp. 5.331.679.697.- (lima miliar tiga ratus tiga puluh satu juta enam ratus tujuh puluh sembilan riby enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah) atau 40.63 % dari Total pagu sebesar Rp. 13.121.680.880.- (tiga belas miliar seratus dua puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).

BAB III

HASIL PELAKSANAAN

Dalam Periode sampai dengan bulan Juni 2024 dimana rutin dilaksanakan dengan hasil capaian pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut :

A. Bidang Kesekretariatan.

1. Sub Bagian Program Data dan Evaluasi.

Capaian pelaksanaan tugas antara lain adalah :

1. Laporan Bulanan Bulan Juni 2024.
2. Laporan e-monev Bulan Juni Tahun 2024.
3. Mengikuti Workshop Konsultasi Publik Rancangan Kebijakan Rencana Aksi (Renaksi) Satu Data Provisni NTT
4. Menghadiri Undangan Desiminasi Keterbukaan Informasi Publik bagi Badan Publik Lingkup Pemerintah Provisni NTT
5. Menghadiri rapat Tindak lanjut AKIP
6. Mengikuti Pegelaran Budaya Bhayangkara dalam Rangka Hari Bhayangkara ke-78 tahun 2024
7. Melaksanakan Pengimputan Akhir Rencana Kerja (RENJA) tahun 2025 pada SIPD-RI.
8. Meghadiri undangan FGD Pemetaan Masalah Prioritas RDB Provinsi NTT bersama Pemerintah.
9. Melaksanakan Penyampaian dan Pembahasan skema Rancangan APBD Ta. 2025 pada KUA PPAS TA 2025.
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Sub Bagian Keuangan.

1. Mengajukan SPP Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), Tambah Uang (TU) dan Gaji PNS (LS).
2. Menyusun SPJ Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), Tambah Uang (TU) dan Gaji PNS (LS).
3. Membuat laporan SPJ Fungsional dan laporan Pertanggungjawaban atas belanja SKPD.
4. Membuat Laporan Keuangan SKPD.
5. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh atasan.

3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.

- Kepegawaian

No.	Uraian Program / Kegiatan	Jumlah
1	Membuat rekapan piket bulan Mei Tahun 2024	1 berkas
2	Membuat rekapan kenaikan pangkat	1 berkas
3	Scan bahan administrasi usulan kenaikan pangkat ASN	8 ASN
4	Membuat usulan surat cuti pada aplikasi sip cut	3 ASN
5	Menyelesaikan surat tugas	3 surat
6	Menyelesaikan surat surat Plh	1 surat
7	Memberikan penilaian SKP bulan Mei 2024	8 ASN
8	Melaksanakan kegitan pelatihan kesamaptaan	4 kali
9	Melaksanakan kegitan pengamanan	4 kali
10	Mengikuti rapat koordinasi dengan instansi terkait	3 kali
11	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait	2 kali
12	Mengikuti rapat internal bersama PLt. Kasat	4 kali
13	Menyelesaikan administrasi laporan bulan April di Sub Bid Kepegawaian dan Umum	1 lap
14	Membuat daftar pembagian beras ASN	105 PNS
15	Menyelesaikan tindak lanjut LHP	1 berkas
16	Menyelesaikan rekapan kehadiran piket ASN Tahun 2024	1 dok
17	Memeriksa berkas kenarikan pangkat fungsional	11 ASN
18	Memeriksa berkas BTL pada link YANG TELAH tersedia	11 ASN

- Umum

No.	U r a i a n	Jumlah
1.	Jumlah Surat Masuk bulan Juni 2024	47 surat
2.	Jumlah Surat Keluar bulan Juni 2024	50 surat
3.	Jumlah undangan yang masuk bulan Juni 2024	12 surat

- Perlengkapan

Uraian Program/Kegiatan	Jumlah/ Keterangan
Mengatur Cleaning Service untuk membersihkan ruang kantor	Setiap Hari

B. Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.

Program Kegiatan

Dalam Tahun Anggaran 2024 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur melaksanakan Program kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dengan Kegiatan untuk Bidang Penegakan Peraturan Daerah Peraturan Gubernur yakni Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dilaksanakan lagi melalui Sub kegiatan Penyediaan Layanan Dasar Dalam Rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada, Penanganan atas Pelanggaran Perda dan Pergub, Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Perda dan Pergub, Operasi DBHCHT (Rokok Ilegal), Sosialisasi Penegakan Perda dan Pergub dengan total anggaran yang dialokasikan pada kegiatan tersebut sebesar **RP. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).**

Dan Pelaksanaan Program Peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum Kegiatan Bidang Penegakan Peraturan Daerah Peraturan Gubernur dilakukan juga melalui Kegiatan Non Anggaran yakni Penangan gangguan ketentraman dan ketertiban umum lintas daerah Kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, yang kemudian pelaksanaan kegiatan tersebut melalui Sub kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa.

Penyerapan anggaran pada DPPA Tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja khususnya Bidang Penegakan Peraturan Daerah Peraturan Gubernur Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 175.000.000,- dan realisasi anggaran pada Bulan Juni sebesar Rp 0,-. (data terlampir).

Selain kegiatan rutin Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur sesuai DPA pada Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2024, di Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur juga melakukan kegiatan penegakan 3 (tiga) produk hukum yakni 3 (tiga) Peraturan Daerah sesuai target penegakan produk hukum oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024 yakni :

1. Perda Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
2. Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Hasil Kegiatan

Hasil kegiatan Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dalam rangka mendukung Program Penyelenggaraan Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat untuk bulan Juni 2024 yakni tersedianya data kegiatan (terlampir) sebagai berikut:

1. Terlaksananya Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur tanpa anggaran;
2. Tersedianya Data Kegiatan Penegakan Perda/Perkada;
3. Tersedianya data Pengaduan Masyarakat Bulan Juni Tahun 2024;
4. Tersedianya data Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Bulan Juni Tahun 2024;
5. Tersedianya data Penindakan Atas Gangguan Trantibum Berdasarkan Perda/Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Aksi Unjuk Rasa Dan Kerusuhan Massa.

Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi

Pelaksanaan Tugas pokok dan fungsi pada bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur (Seksie Penyelidikan dan penyidikan dan Seksie Pembinaan, pengawasan dan penyuluhan) yang telah dilaksanakan adalah :

- ✓ Operasi Penegakan Perda dan Pergub bersama Instansi Terkait
- ✓ Pembinaan dan Pengawasan Penegakan Perda
- ✓ Mempersiapkan segala administrasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
- ✓ Pembuatan TOR dan RKA bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Tahun Anggaran 2024
- ✓ Membuat SOP (Standar Operasional Prosedur Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur).

Penutup.

Demikian laporan kegiatan Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur pada Satuan Polisi Pamong Praja Prov. NTT selama bulan Juni dibuat sebagai bahan evaluasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.

**Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
Bulan Juni 2024.**

KEGIATAN PENANGANAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA
DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI

No	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa	Ket
			Rp	%		
1	Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum lintas daerah Kabupaten/Kota dan I (satu) daerah Provinsi	175.000.000.-	21.300.000	12	153.700.000.-	-

1. Sub Kegiatan : Sosialisasi Penegakan Perda dan Pergub

No	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa	Ket
			Rp	%		
1	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sosialisasi Penegakan Perda dan Pergub	5.000.000.-	-	-	5.000.000.-	-
	Jumlah				5.000.000.-	-

2. Sub Kegiatan : Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan perda dan pergub “operasi DBHCHT (rokok ilegal)”

No	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa	Ket
			Rp	%		
1	Belanja Bahan Cetak	1,360.000.-	360.000	25	1,020.000.-	-
2	Belanja Makan minum rapat	16.960.000.-	3.040.000	18	13.920.000.-	
3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (uang harian transport lokal)	51.680.000.-	2.920.000	25	38.760.000.-	
	Jumlah				53.700.000.-	-

3. Sub Kegiatan : Penyediaan Layanan Dasar Dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada

No	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa	Ket
			Rp	%		
1	Belanja Operasi	75.000.000.-	-	-	75.000.000.-	-
2	Belanja pakai habis	15.300.000.-	-	-	15.300.000.-	
3	Belanja Jasa Kantor	28.128.000.-	-	-	28.128.000.-	
	Jumlah				15.000.000.-	-

4. Sub Kegiatan : Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur sesuai SOP

No	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa	Ket
			Rp	%		
1	Belanja Operasi	15.000.000.-	-	-	15.000.000.-	-
2	Belanja/alat bahan untuk kantor kegiatan ATK	40.000.-	-	-	40.000.-	
3	Belanja perjalanan dlam kota 22 orang x 4 kali	14.96.000.-	-	-	14.96.000.-	

5. Sub Kegiatan : Pengembangan Kapasitas dan Karir PPNS

No	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa	Ket
			Rp	%		
1	Belanja Operasi	10.000.000.-	-	-	10.000.000.-	-
2	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor bahan cetak	400.000.-	-	-	400.000.-	
3	Belanja makan minum peserta rapat	3.400.000.-	-	-	3.400.000.-	
3	Belanja perjalanan dinas dalam kota (transportasi peserta rapat teknis PPNS)	6.000.000.-	-	-	6.000.000.-	

C. Ketenteraman dan KetertibanUmum.

Bulan Juni 2024

No	Jenis Pengamanan	Jumlah Pengamanan		Masalah	Pemecahan Masalah	Instansi Terkait	Keterangan
		Lokasi Kegiatan	Bulan				
1	2	3	4	6	7	8	9
01.	Melaksanakan pengamanan dan mengikuti upacara memperingati hari Lahirnya Pancasila Tahun 2024 Tingkat Provinsi NTT	Alun-Alun Rumah Jabatan Gubernur NTT	x kegiatan 01 Juni 2024	-	-	TNI, Polri dan Unsur Terkait	50 orang al. Plh Kasat, Kabid SDA, Kasi Ops, HK dan anggota Pol PP
02.	Mengikuti rapat bersama PLH Kabid Trantib, Kasi Ops, Kasi HK dan Anggota	Rung Trantib	1 x kegiatan 01 Juni 2024	-	-	-	15 orang al. Kabid, Kasi anggota
03.	Melakukan pengamanan dalam rangka Rapat Paripurna	Kantor DPRD Prov. NTT	1 x kegiatan 05 Juni 2024	-	-	DPRD Prov. NTT	15 orang al. Plt Kasat, kabid SDA, Kasi OPS, Kasi HK dan Anggota Pol PP
04.	Melakuka pengamanan aset milik Pemprov NTT (Pemasangan Papan Namam/ P;ang)	Dessa Mata Aer Kab. Kupang	1 x kegiatan 07 Juni 2024	-	-	UPT Pertanian Priv. NTT	55 orang al. Plt Kasat, kabid SDA, Kasi OPS, Kasi HK dan Anggota Pol PP
05.	Melakukan pengamanan aksi ujuk rasa/demonstrasi dari wartawan terkait penilakan UU Pers (Jumlah pendemo : 10 orang	DPRD Prov. NTT	1 x kegiatan 07 Juni 2024	-	-	DPRD Prov. NTT	15 orang al. Plt. Kasat, Kabid, Kasi Ops, HK dan anggota
06.	Mengikuti kegiatan Bimtek Peningkatan Kapasitas SDM Satpol PP Prov. NTT tahun 2024	Hotel Silvia Kupang	1 x kegiatan 11 Juni 2024	-	-	TNI dan Polri	Seluruh Pejabat Struktural dan anggota Sat Pol PP
07.	Mengikuti kegiatan kesamaptaan	Depan Kantor DPRD Prov. NTT	1 x kegiatan 12 Juni 2024	-	-	TNI dan Polri	Pejabat srrektural dan anggota Satpol PP
08.	Melakukan kegiatan karya bakti dharmapertiwi NTT daerah “J” dalam rangka hari lingkungan hidup sedunia di wilayah Korem 161/Wiraksakti Tahun 2024	Pantai Pasir Panjang Kota Kupang	1 x kegiatan 12 Juni 2024	-	-	KOREM 161 Kupang	12 orang al. Kasat, Kabid, Kasi dan anggota
09.	Mengikuti kegiatan kesamaptaan	Halaman depan Kantor DPRD Prov NTT	1 x kegiatan 13 Juni 2024	-	-	TNI dan Polri	Seluruh pejabat structural dan anggota

10.	Mengikuti kegiatan kesamaptaan	Halaman depan Kantor DPRD Prov NTT	1 x kegiatan 14 Juni 2024	-	-	TNI dan Polri	Seluruh pejabat structural dan anggota
11.	Melakukan pengamanan dalam rangka kegiatan sholat idul adha 1445 H Tahun 2024 M	Alun-alun Rumah jabatan Gubernur NTT	1 x kegiatan 16-17 Juni 2024	-	-	-	10 orang al. Kasat, Kabid, Kasi dan anggota
12.	Melakukan pengamanan dalam rangka rapat paripurna	DPRD Prov. NTT	1 x kegiatan 19 Juni 2024	-	-	DPRD Prov. NTT	25 orang al. Kasat, Kabid, Kasi dan anggota
13.	Melakukan pengamanan dan mengikuti apel kesadaran ASN lingkup Pemprov. BTT	Halaman Depan Kantor Gubernur NTT	1 x kegiatan 19 Juni 2024	-	-	BKD Prov. NTT	Seluruh ASN Satpol PP
14.	Melakukan kerja bakti bersama/giat bersih	Halaman Kantor Satpol PP	1 x kegiatan 21 Juni 2024	-	-	-	Seluruh Pejabat Struktural dan anggota satpol PP
15.	Melakukan pengamanan dalam rangka rapat paripurna	DPRD Prov. NTT	1 x kegiatan 26 Juni 2024	-	-	DPRD Prov. NTT	20 orang al. Plt. Kasat, Kabid SDA, Kasi Ops, HK dan anggota
16.	Olahraga bersama	Halaman depan kantor Satpol PP	1 x kegiatan 28 Juni 2024	-	-	-	Seluruh Pejabat Struktural dan anggota satpol PP
17.	Mengikuti pembinaan rohani secara virtual dari 4 Tokoh Agama	Aula Satpol PP (sevara virtual)	1 x kegiatan 29 Juni 2024	-	-	BKD Prov. NTT	Seluruh ASN Satpol PP Prov. NTT
18.	Melakukan penjagaan dan pengamanan aset milik Pemprov. NTT	Kantor Gubernur sasando, Rujab Gubernur, Rujab Wagub, Rujab Sekda, dan Kantor Satpol PP	1 x kegiatan tanggal 30 x 24 Jam	-	-	5 Pos Piket	Jumlah personil. 62 anggota al. 15 danru, 30 anggota piket, 4 anggota patwal dan 13 anggota pengawas/pengontrol

D. Bidang Sumber Daya Aparatur (SDA)

Dalam Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran SKPD (DPPA) Satpol PP Tahun Anggaran 2024 urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sub kegiatan khusus bidang SDA dengan alokasi dana untuk belanja Rp. 131.000.000.- Kegiatan Kapasitas SDM Satpol PP dan Satlinmas termaksud dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

No	Uraian Program/Kegiatan	Pagu Anggaran Rp.	Realisasi Keuangan Rp	Realisasi Fisik %	Sisa
1	2	3	4	5	6
1	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas SDM dan Pelatihan Kesamaptaan	56.000.000	53.399.800 (95.35 %)	100	2.600.200
2	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	75.000.000	-	-	-
	Total Pengeluaran s/d Juni 2024	131.000.000	53.399.800	40.76	77.600.200

E. Bidang Perlindungan Masyarakat.

Program : Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Kegiatan : Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
Sub.Kegiatan : Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
Program : Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
Kegiatan : Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran
Sub Kegiatan : Penyediaan dan Pemutahiran Infromasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan kebakaran
Bimtek Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kab/Kota

Kode Rekening	URAIAN	PAGU ANGGARAN RP.	REALISASI KEUANGAN (Rp.)	SISA DANA (Rp.)	Realisasi %	MASALAH	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	7.000.000	-	7.000.000	-	-	-
1.05.02.1.01.04	Penyusunan dan Pemuktahiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kabakaran	5.000.000	-	5.000.000	-	-	-
	Penyediaan Infirmasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	2.000.000	-	2.000.000	-	-	-
	Total Dana Bulan Mei	7.000.000	-	7.000.000	-	-	-

Berikut data personil pemadam kebakaran dan Linmas pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur :

Data Pemadam Kebakaran Di Provinsi NTT

No.	Nama kabupaten/Kota	JumlahPersonil	Keterangan
1.	Kota Kupang	2.410	Dalam struktur Organisasi Sat. PolPP Kota Kupang tidak terakomodir Bidang Pemadam Kebakaran karena telah ada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Kupang
2.	Kabupaten Kupang	2.152	
3.	Kabupaten TTS	2.758	
4.	Kabupaten TTU	1.548	
5.	Kabupaten Belu	1.550	
6.	Kabupaten Malaka	1.340	
7.	Kabupaten Alor	894	
8.	Kabupaten Rote Ndao	630	
9.	Kabupaten Sabu Raijua	276	
10.	Kabupaten Lembata	1.569	
11.	Kabupaten Flores Timur	1.070	
12.	Kabupaten Sikka	1.010	
13.	Kabupaten Ende	1.966	
14.	Kabupaten Ngada	1.018	
15.	Kabupaten Nagekeo	1.386	
16.	Kabupaten Manggarai	1.940	
17.	Kabupaten Manggarai Timur	1.186	
18.	Kabupaten Manggarai Barat	1.616	
19.	Kabupaten Sumba Timur	516	
20.	Kabupaten Sumba Tengah	810	
21.	Kabupaten Sumba Barat	1.816	
22.	Kabupaten Sumba Barat Daya	864	
TOTAL		31.325	

Data Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Provinsi NTT

No.	Nama kabupaten/Kota	Jumlah			Jumlah	Ket
		Kec	Kel	Desa		
1.	Kota Kupang	6	51	-	51	
2.	Kabupaten Kupang	24	160	171	2.890	
3.	Kabupaten TTS	32	12	266	6.950	
4.	Kabupaten TTU	24	147	33	1.764	
5.	Kabupaten Belu	12	12	69	1.399	
6.	Kabupaten Malaka	12	127	127	1.337	
7.	Kabupaten Alor	18	175	-	1.283	
8.	Kabupaten Rote Ndao	11	7	113	1.725	
9.	Kabupaten Sabu Raijua	5	5	62	2.083	
10.	Kabupaten Lembata	9	7	125	1.872	
11.	Kabupaten Flores Timur	19	-	251	1.569	
12.	Kabupaten Sikka	21	13	151	2.537	
13.	Kabupaten Ende	21	23	255	1.073	
14.	Kabupaten Nagekeo	7	16	97	684	
15.	Kabupaten Ngada	12	206	206	1.236	
16.	Kabupaten Manggarai	11	26	162	5.678	
17.	Kabupaten Manggarai Timur	9	17	159	4.680	
18.	Kabupaten Manggarai Barat	12	5	169	1.386	
19.	Kabupaten Sumba Barat	12	11	131	2.445	
20.	Kabupaten Sumba Barat Daya	5	11	74	1.480	
21.	Kabupaten Sumba Tengah	6	6	65	1.300	
22.	Kabupaten Sumba Timur	22	17	180	2.056	
TOTAL		310	1.081	2.866	47.478	

BAB IV

PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT

A. Permasalahan

Permasalahan yang ditemui dalam pencapaian target kinerja bulan Juni antara lain :

1. Pelaksanaan capaian kinerja yang terlambat.
2. Ganti Uang (GU) yang terlambat.

B. Tindak Lanjut.

Melakukan konsultasi dan rapat bersama pimpinan serta melakukan pendekatan dengan Badan Keuangan Daerah terkait pencairan anggaran untuk membiayai kegiatan.

BAB V PENUTUP

Laporan kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban hasil pelaksanaan program dan kegiatan bulan Juni 2024, semoga apa yang telah disampaikan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur kedepan dalam rangka menciptakan ketenteraman dan ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat.

Akhir kata diucapkan terimakasih kepada semua pihak dalam lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sudah membantu dalam penyusunan laporan ini. Saran dan pendapat masih sangat dibutuhkan bagi kesempurnaan dari laporan ini.

Demikian laporan bulan Juni Tahun 2024 disajikan atas perhatian diucapkan terima kasih.

Kupang, 11 Juli 2024

Plh. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Nusa Tenggara Timur,



LT. YOHANES OKTOVIANUS, MM

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19661029 199403 1 007

LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN APBD PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BULAN JUNI 2024

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	SUMBER DANA	LOKASI KEGIATAN	SASARAN	KONDISI s/d BULAN SEBELUMNYA					REALISASI BULAN INI	KONDISI s/d BULAN INI					SSA ANGGARAN (Rp)	KET	
						TARGET		REALISASI				TARGET		REALISASI					
						(%) FISIK	(%) KEU	Rp	(%) KEU	(%) FISIK		(%) FISIK	(%) KEU	Rp	(%) FISIK	(%) KEU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN	13.121.680.880				-	-	4.672.768.067	162	162	658.911.630				5.331.679.697	40,63	40,63	7.806.301.183	
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	12.266.580.880					-	4.503.061.759	142	142	575.378.757		-		5.078.440.516	41,40	41,40	7.188.140.364	
	PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	38.000.000						8.516.000			-	-	-		8.516.000	22,41	22,41	29.484.000	
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	38.000.000	DAU	Kota Kupang	SKPD	-	-	8.516.000	22,41	22,41	-	-	-		8.516.000	22,41	22,41	29.484.000	
	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	11.032.449.000						3.992.957.449			495.418.527		-		4.488.375.976	40,68	40,68	6.544.073.024	
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.032.449.000	DAU	Kota Kupang	SKPD	-	-	3.992.957.449	36,19	36,19	495.418.527		-		4.488.375.976	40,68	40,68	6.544.073.024	
	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	80.000.000	DAU		SKPD	-	-	39.385.213	49,23	49,23	475.750		-		39.860.963	49,83	49,83	40.139.037	
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	DAU	Kota Kupang	SKPD	-	-	722.780	14,46	14,46	27.500				750.280	15,01	15,01	4.248.720	
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.000.000	DAU	Kota Kupang	SKPD	-	-	14.114.150	56,46	56,46	448.250				14.562.400	58,25	58,25	20.437.600	
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.000.000	DAU	Kota Kupang	SKPD	-	-	1.250.000	62,50	62,50	-				1.250.000	62,50	62,50	750.000	
	- Penyediaan Bahan Material	20.000.000	DAU	Kota Kupang	SKPD	-	-	8.623.807	43,12	43,12	-				8.623.807	43,12	43,12	11.376.193	
	- Fasilitas Kunjungan Tamu	5.000.000	DAU	Kota Kupang	SKPD	-	-	4.998.000	99,96	99,96	-				4.998.000	99,96	99,96	2.000	
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.000.000	DAU	Kota Kupang	SKPD	-	-	4.176.476,00	83,53	83,53	-				4.176.476,00	83,53	83,53	823.524	
	- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	18.000.000	DAU	Kota Kupang	SKPD	-	-	5.500.000	30,56	30,56	-				5.500.000	30,56	30,56	12.500.000	
	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	997.031.880	DAU		SKPD	-	-	399.010.171	40,02	40,02	77.849.480		-		476.859.631	47,83	47,83	528.172.249	
	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.400.000	DAU	Kota Kupang	SKPD	-	-	810.000	57,86	57,86	-				810.000	57,86	57,86	590.000	
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.000.000	DAU	Kota Kupang		-	-	2.164.800	21,65	21,65	-				2.164.800	21,65	21,65	7.835.200	
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	985.631.880	DAU	Kota Kupang	SKPD	-	-	396.035.371	40,18	40,18	77.849.480		-		473.884.831	48,08	48,08	511.747.408	
	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	119.100.000	DAU		SKPD	-	-	63.192.926	53,06	53,06	1.635.000		-		64.827.526	54,43	54,43	54.272.474	
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	70.000.000	DAU	Kota Kupang	SKPD	-	-	47.038.426	67,20	67,20	1.290.000				48.328.426	69,04	69,04	21.671.574	
	- Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	19.100.000	DAU	Kota Kupang	SKPD	-	-	6.450.000	33,77	33,77	280.000				6.730.000	35,24	35,24	12.370.000	
	- Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.000.000	DAU	Kota Kupang		-	-	9.704.500	32,35	32,35	65.000				9.769.500	32,57	32,57	20.230.500	

PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	848.100.000	DAU	Kab/Kota	-	-	-	169.706.308	20,01	20,01	83.532.873	-	-	259.239.181	29,86	29,86	611.260.829
PENANGANAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI	748.100.000	DAU	Kab/Kota	-	-	-	148.406.308	19,84	19,84	83.532.873	-	-	231.939.181	31,00	31,00	516.160.829
- Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	2.500.000	DAU	Kab/Kota					-	-	-	-	-	-	-	-	2.500.000
- Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	1.500.000	DAU	Kab/Kota					-	-	-	-	-	-	-	-	1.500.000
- Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	150.000.000	DAU	Kab/Kota				31.370.000	20,91	20,91	-	-	-	31.370.000	20,91	20,91	118.630.000
- Penyedia Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	75.000.000	DAU	Kab/Kota					-	-	-	-	-	-	-	-	75.000.000
- Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5.000.000	DAU	Kab/Kota					-	-	-	-	-	-	-	-	5.000.000
- Pencegahan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	333.100.000	DAU	Kab/Kota				89.972.308	27,01	27,01	30.133.073	-	-	120.105.381	36,06	36,06	212.994.629
- Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja Melalui Pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	131.000.000	DAU						-	-	53.399.800	-	-	53.399.800	-	-	131.000.000
- Penindakan atas Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	50.000.000	DAU	Kab/Kota				27.064.000	54,13	54,13	-	-	-	27.064.000	54,13	54,13	22.936.000
PENEGAKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DAN PERATURAN GUBERNUR	90.000.000	DAU					16.300.000	18,11	18,11	-	-	-	16.300.000	18,11	18,11	73.700.000
- Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	5.000.000												-	-	-	5.000.000
- Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	70.000.000						16.300.000	23,29	23,29	-	-	-	16.300.000	23,29	23,29	53.700.000
- Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	15.000.000	DAU	Kab/Kota					-	-	-	-	-	-	-	-	15.000.000
PEMBINAAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) PROVINSI	10.000.000						5.000.000	50,00	50,00	-	-	-	5.000.000	50,00	50,00	5.000.000
- Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	10.000.000						5.000.000	50,00	50,00	-	-	-	5.000.000	50,00	50,00	5.000.000

PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN NON KEBAKARAN	7.000.000	DAU					-	-	-	-			-	-	-	7.000.000
PENYELENGGARAAN PEMETAAN RAWAN BENCANA KEBAKARAN	7.000.000	DAU					-	-	-	-			-	-	-	7.000.000
Penyusunan dan Pemuktahiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	5.000.000	DAU	Kab/Kota					-	-	-				-	-	5.000.000
Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	2.000.000	DAU	Kota Kupang					-	-	-				-	-	2.000.000
JUMLAH BELANJA	13.121.680.880					-	4.672.768.067	35,61	35,61	658.911.630			5.331.679.697	40,63	40,63	7.790.001.183

Kupang, 03 Juli 2024
 Dit. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
 Provinsi Nusa Tenggara Timur,
Ir. YOHANES OKTOVIANUS, MM
 PEMBINA UTAMA MADYA
 NIP. 19661029 193403 1 007



LAMPIRAN : DOKUMENTASI LAPORAN BULAN JUNI 2024



Foto kegiatan Pengamanan dan Peserta Upacara Memperingati Hari Lahir Pancasila



Foto kegiatan Rapat Bersama Pejabat di Ruang Kasat Satpol PP Provinsi NTT



Foto kegiatan Bimtek Peningkatan Kapasitas SDM Satpol PP Provinsi NTT



Foto kegiatan Kesamaptan Satpol PP Provinsi NTT



Foto kegiatan Pengamanan Hari Raya Idul Fitri



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Jln. Polisi Militer No. -Telp. (0380)-828090**
Email : satpolpp_prov.ntt@yahoo.com
Website : www.satpol-pp.nttprov.go.id
K U P A N G

14 Agustus 2024

Yth. - Kepala Bappelitbangda Provinsi NTT
- Kepala Badan Keuangan Daerah Setda
Provinsi NTT

SURAT PENGANTAR

Nomor : 000.1.5/638/sat pol pp 1.1

JENIS SURAT	JUMLAH	KETERANGAN
2	3	4
Laporan Bulan Juli Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024	1 (Satu) Buku	Dikirim untuk ditindak lanjuti

Demikian Laporan ini atas kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Pt. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,



Ir. YOHANES OKTOVIANUS, MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19661029 199403 1 007

Paraf Hirarki :	
Plh. Sekretaris	
Kepala Subbag Program Data dan Evaluasi	
Fungsional Ahli Muda	

LAPORAN BULAN JULI 2024





LAPORAN BULAN JULI



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024

Jalan Polisi Militer Nomor 1, Telpon/Fax (0380) 828090
Email : satpolpp_prov.ntt@yahoo.com
Website : www.satpol-pp.nttprov.go.id

KUPANG



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur patut dipanjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena hanya atas penyertaan dan kasih-Nya maka Laporan Bulan Juli 2024 Tahun Anggaran 2024 Satuan Polisi Pamong Praja ini dapat diselesaikan dengan baik.

Tugas, fungsi dan wewenang Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah menjadi sangat penting yang mana terlaksananya berbagai kegiatan pengamanan dan penegakkan prodak hukum. Keadaan yang nyaman, aman dan tenteram diciptakan guna mendukung kinerja Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Untuk itu Laporan Bulan Juli Tahun Anggaran Tahun 2024 ini merupakan bahan, data dan informasi yang disusun secara baik, transparan dan dapat di pertanggungjawabkan kepada publik ataupun kepada pemangku kepentingan yang membutuhkan informasi terkait penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Kupang, 14 Agustus 2024

Pt. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



Ir. YOHANES OKTOVIANUS, MM

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19661029 199403 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Maksud dan Tujuan	3
D. SDM Satuan Polisi Pamong Praja	3
BAB II RENCANA KERJA TAHUNAN	12
A. Rencana Kerja Tahunan	12
B. Program dan Kegiatan Tahun 2024	16
C. Realisasi Anggaran	18
BAB III HASIL PELAKSANAAN	22
A. Sekretariat	22
B. Bidang Penegakan Perda dan Peraturan Gubernur	25
C. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	27
D. Bidang Sumber Daya Aparatur	29
E. Bidang Perlindungan Masyarakat	30
BAB IV PERMASALAHAN	33
A. Permasalahan	33
B. Tindak Lanjut	33
BAB V PENUTUP	34
- Laporan Keuangan	35
- Lampiran Foto/Dokumentasi	38

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu Perangkat Daerah yang di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Tugas Satuan Polisi Pamong Praja yakni membantu Kepala Daerah dalam memelihara Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan masyarakat, dan fungsinya sebagai berikut;

- a) Perumusan kebijakan di bidang Satuan Polisi Pamong Praja;
- b) Pelaksanaan kebijakan di bidang Satuan Polisi Pamong Praja;
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Satuan Polisi Pamong Praja;
- d) Pelaksanaan administrasi di bidang Satuan Polisi Pamong Praja;
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas dan fungsi yang telah dijabarkan diatas kemudian diuraikan dalam program dan kegiatan dimana sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 tentang Satuan Polisi pamong Praja melaksanakan urusan Pemerintahan Wajib berkaitan dengan Pelayanan Dasar dalam arti bahwa pelayanan yang diberikan oleh Satuan Polisi pamong Praja berkaitan dengan hak setiap warga masyarakat yang wajib diperoleh sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal.

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur berupaya agar mampu menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan bulan Juli 2024 laporan kinerja ini menggambarkan kinerja yang telah dilaksanakan, sehingga sangat diharapkan dapat bermanfaat bagi semua komponen yang terlibat dalam proses menciptakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat.

B. Dasar hukum

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian Cuti bagi Pegawai Negeri Sipil.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pakian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Satuan Polisi Pamong Praja;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Satuan Polisi Pamong Praja;
12. Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur.
13. Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah P-DPA-SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2024 Nomor : DPPA/A.1/1.05.0.00.0.00.01.0000/001/2024.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud.

Sebagai bahan pertanggungjawaban terhadap hasil pelaksanaan program dan kegiatan bulan Juli 2024.

2. Tujuan.

Untuk menghasilkan sebuah laporan kinerja bulanan yang menggambarkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT bulan Juni Tahun Anggaran 2024.

D. Sumber Daya Manusia (SDM) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 139 orang dengan rincian sebagai berikut:

a. Berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah (Orang)
1	2	3
1.	Kepala Satuan	1
2.	Sekretaris	-
3.	Kepala Bidang	3
4.	Kepala Seksi	7
5.	Kepala Sub Bagian	3
6.	Jabatan Fungsional	63
7.	Jabatan Fungsional Umum	23
8.	Honorer	29
Jumlah		129

STRUKTUR ORGANISASI

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

(PERGUB NTT : 07 TAHUN 2022)

KEPALA SATUAN

Ir. Yohanes Oktavianus, MM
Penjabat Utama Satpol PP
Np. 19640829 196403 1 007

SEKRETARIS

Kasubag Program Data Dan Evaluasi

Maria F. N. Panda, SE
Penata Tingkat I (III/04)
Np. 19771104 200112 1 002

Kasubag Keuangan

Rahman Hamapu, SE
Penata Tingkat I (III/04)
Np. 19780811 200001 1 007

Kasubag Kepegawain Dan Umum

Salome B. Mala Wedo, SE
Penata Tingkat I (III/04)
Np. 19400520 200112 1 003

Kabid Ketentraman Dan Keterlibatan Umum

Rohyia A. Ndam, SPd, MM
Penkhus Tingkat I (IV/04)
Np. 19740227 200012 1 003

Kabid Sumber Daya Aparatur

Arzen Widelio, S.Sos
Penkhus (IV/04)
Np. 19740801 199503 1 003

Kabid Perlindungan Masyarakat

Julinia, S.Pd, M.Si
Penkhus Tingkat I (IV/04)
Np. 19741231 200112 1 004

Ka. Seksi Operasi Dan Pengendalian

Susilo Miskan, SE
Penata Tingkat I (III/04)
Np. 19640112 200101 1 000

Ka. Seksi Pembinaan, Pengawasan Dan Penyeluluhan

Valentia L. Sanam, SE
Penata (III/04)
Np. 19730716 200012 2 002

Ka. Seksi Palatihan Dasar Dan Teknik Fungsional

Ka. Seksi Hubungan Keltmbagaan

Ka. Seksi Penyelidikan Dan Penyidikan

Alexander S. Mada, S.P
Penata Tingkat I (III/04)
Np. 19730812 200708 1 010

Ka. Seksi Kesamaptan

Febriantini Wila Huki, SH
Penata (III/04)
Np. 19800812 200101 2 001

Ka. Seksi Bina Potensi Kewaspadaan Dan Mobilitas

Ahmad Bago, S.Sos
Penata Tingkat I (III/04)
Np. 19730812 200112 1 004

Ka. Seksi Penanggulangan Kebakaran

Adrianus Umbo Tena, S.Sos
Penata Tingkat I (III/04)
Np. 19780212 200101 1 006

KELOMPOK JABATAN FUNSIONAL

KELOMPOK JABATAN FUNSIONAL

KELOMPOK JABATAN FUNSIONAL

UPTD

b. Berdasarkan Jenis Kelamin

Jabatan Pegawai	Jenis Kelamin	
	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)
1	2	3
Kepala Satuan	1	
Sekretaris	-	
Kepala Bidang	3	
Kepala Seksi	5	2
Kepala Sub Bagain	1	2
Jabatan Fungsional	57	6
Pelaksana	16	7
Tenaga Honorer	18	11
Total Jumlah	101	28
	129 Orang	

c. Jumlah ASN Berdasarkan Pangkat/Golongan.

Rincian Kepangkatan/Golongan					Jumlah
Kepangkatan PNS	A	B	C	D	
Golongan IV	1	2	-	1	4 orang
Golongan III	13	22	11	13	58 orang
Golongan II	-	-	10	28	38 orang
Golongan I	-	-	-	-	- orang
Jumlah	14	24	21	42	101 orang

d. Berdasarkan Jenjang Pendidikan.

No.	Jenjang Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1.	Pasca Sarjana (S2)	4	-	4
2.	Sarjana (S1)	37	13	49
3.	Diploma (D3)	1	-	-
4.	SMA/SMU	42	5	47
Jumlah		83	18	101

e. Berdasarkan Agama.

No.	Data Keagamaan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1.	Islam	4	-	4
2.	Kristen	76	23	99
3.	Katholik	21	5	26
4.	Hindu	-	-	-
5.	Budha	-	-	-
Jumlah		101	28	129

Berikut dapat di sampaikan data pemberian cuti dan tindak disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur selama bulan Juli 2024 sesuai ketentuan yang berlaku

1. Cuti tahunan berdasarkan Kepangkatan/Golongan.

No.	Data Cuti Tahunan	Jumlah
1	2	3
1.	Golongan IV	-
2.	Golongan III	6
3.	Golongan II	1
Jumlah		7

2. Data Pegawai yang kena sanksi Kepegawaian :

No.	Data Pegawai Yang Kena Sanksi Kepegawaian	Jumlah
1	2	3
1.	Golongan IV	-
2.	Golongan III	8
3.	Golongan II	2
4.	Banpol	-
5.	Cleaning Service	-
Jumlah		10

Selain melaksanakan tugas Satuan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur juga juga melakukan penjagaan (piket) dalam rangka menjaga aset penting milik pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur adapun aset tersebut antara lain :

1. Pos Kantor Gubernur/Sasando.
2. Pos Rumah Jabatan Gubernur.
3. Rumah Jabatan Wakil Wakil Daerah.
4. Rumah Jabatan Sekretaris Daerah.
5. Posko Praja (Kantor Satpol PP).

Penjagaan pada tempat/lokasi jaga dibagi dalam 3 (tiga) sift, dimana masing-masing sift dibagi waktu selama 1 x 24 jam, mulai jam 08:00 pagi hingga jam 08:00 pagi berikutnya. Jadwal pelaksanaan piket diatur sesuai dengan surat keputusan Kepala satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur 2024 (terlampir).

E Sarana dan Prasarana

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam melaksanakan tugas yang diemban didukung dengan prasarana penunjang operasional kegiatan baik di kantor maupun di lapangan. Sarana Prasarana tersebut dicatat sebagai aset karena proses pengadaannya bersumber dari Dana Alokasi Umum yang dituangkan dalam dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur dari Tahun Anggaran 2003 sampai dengan tahun 2024 sebagai berikut :

Sarana Prasarana Pendukung

No	Jenis Nama Barang	Merk/Type/Bahan	Vol	Satuan	Keadaan Barang	Tahun Pengadaan
1.	Mobil Pic Up (DH 8059 AW)	Besi/Toyota Pic Up	1	Unit	B	2003
2	Meja Biro 4 Laci	Arinda/Olympic	1	Buah	B	2008
3	Meja Biro 4 Laci	Arinda/Olympic	1	Buah	B	2008
4	Lap Top/Toshiba	Metal	1	Buah	B	2008
5	Air Condition	Besi /National/ 1Pk	2	Buah	B	2008
6	Air Condition	Besi/Akira	1	Buah	B	2008
7	Mobil Truck (DH 8047 AW)	Besi/Isuzu	1	Unit	B	2009
8	Mobil Minibus (DH 196 AW)	Besi/Toyota Rush	1	Unit	B	2009
9	Lemari 2 Pintu	Kayu Jati	6	Buah	B	2009
10	Lap Top Azer	Metal	1	Buah	B	2009
11	Printer HP/Laser Jet	Metal	1	Buah	B	2009
12	Wireless	Tens	1	Buah	B	2009
13	Megaphone Toa	Besi	1	Buah	B	2009
14	Facsimile	Panasonic	1	Buah	B	2009
15	Televisi	Digitec	1	Buah	B	2009
16	Kain Horrden	Kain	1	Buah	B	2009
17	Lambang Garuda		2	Buah	B	2009
18	Tiang Bendera	Besi	1	Buah	B	2009

19	Papan Nama SKPD	Besi	1	Buah	B	2009
20	Sepeda Motor (DH 2843 AW)	Besi/Honda/ GL 200 R	1	Unit	B	2010
21	Sepeda Motor (DH 2844 AW)	Besi/Honda/ GL 200 R	1	Unit	B	2010
22	Sepeda Motor (DH 2845 AW)	Besi/Honda/ GL 200 R	1	Unit	B	2010
23	Trasmister UHF	Motorola GR500	1			2010
24	MejaKerja	Kayu	10	Buah	B	2011
25	KursiKerja	Kayu	10	Buah	B	2011
26	Lemari 2 Pintu	Kayu Jati	5	Buah	B	2011
27	Komputer PC Simbada	Metal	2	Buah	B	2011
28	Lap Top Toshiba/L745	Metal	2	Buah	B	2011
29	Printer Canon	Metal	5	Buah	B	2011
30	Handy Talkie	Motorola GP2000	5	Buah	B	2011
31	Handy Cam	Sony	1	Buah	B	2011
32	Alat Kejut Listrik	Metal	13	Buah	B	2011
33	Sound System	Rhoad	1	Buah	B	2011
34	Komputer PC Simbada	Metal	2	Buah	B	2012
35	Televisi	Multimax	1	Buah	B	2012
36	Televisi	Sharp	1	Buah	B	2012
37	Scaner	Metal	1	Buah	B	2012
38	Kasur Busa	Bigland	8	Buah	B	2012
39	LayarProyektor		1	Buah	B	2012
40	MejaPimpinan 4 Laci	Kayu	1	Buah	B	2013
41	MejaKerja	Kayu	6	Buah	B	2013
42	Lemari 2 Pintu	Kayu Jati	2	Buah	B	2013
43	Komputer PC Simbada	Metal	2	Buah	B	2013
44	Lap Top ToshibaL840	Metal	4	Buah	B	2013

45	Kamera Digital	Canon	1	Buah	B	2013
46	LayarProyektor		1	Buah	B	2013
47	Mobil Double Cabin (DH 8249 AW)	Besi/Toyota Hilux	1	Unit	B	2014
48	Sepeda Motor (DH 3953)	Besi/Kawasaki KLX 15	1	Unit	B	2014
49	Sepeda Motor (DH 3954)	Besi/ Kawasaki KLX 15	1	Unit	B	2014
50	Sepeda	Paragon	6	Buah	B	2014
51	Kursi Sofa	Busa	1	Buah	B	2014
52	Lemari 2 Pintu	Kayu Jati	2	Buah	B	2014
53	Kulkas	Besi/ Polytron	1	Buah	B	2014
54	UPS/Matsunaga	Metal	10	Buah	B	2014
55	Lap Top Lenovo B490	Metal	1	Buah	B	2014
56	Printer Canon MX 397	Metal	1	Buah	B	2014
57	Air Condition/	Besi Polytron	5	Buah	B	2014
58	Wirelesgenggam	Toa-ZR1015	4	Buah	B	2014
59	Televisi	Polytron	5	Buah	B	2014
60	Handy Talkie	Motorola A 12	40	Buah	B	2014
61	Antena, Rig, Repeater	Motorola CDR500	1	Buah	B	2014
62	Mesin Absen Elektronik	Secure	1	Buah	B	2014
63	Mesin Absen Elektronik	Secure	1	Buah	B	2014
64	Mesin Ketik	Brother	1	Buah	B	2014
65	Handy Cam	Sony	1	Buah	B	2014
66	MejaRapat	Kayu Jati	5	Buah	B	2015
67	Meja Biro 4 Laci	Kayu	1	Buah	B	2015
68	Meja 1/2 Biro, 2 Laci	Kayu	15	Buah	B	2015
69	KursiRapat	Busa/ /Master Chair	20	Buah	B	2015
70	KursiKerja	Kayu	21	Buah	B	2015

71	Lemari 2 Pintu	Kayu Jati	1	Buah	B	2015
72	Tempat Tidur Lipat	Metal	7	Buah	B	2015
73	Lap Top Toshiba C55	Metal	5	Buah	B	2015
74	Lap Top Asus X453MA	Metal	1	Buah	B	2015
75	Printer Canon	Metal	5	Buah	B	2015
76	Tirai/Gorden	Kain	2	Buah	B	2015
77	Mic & Tiang Mic	Shure & NVK	1	Buah	B	2015
78	Kamera Digital	Canon	1	Buah	B	2015
79	Senter	S.W.A.T XML-T6	7	Buah	B	2015
80	Lemari Arsip	Katyu	1	Buah	B	2016
81	Komputer PC	LG	1	Buah	B	2016
82	Printer	Canon MP280	1	Buah	B	2016
83	Air Condition	Polytron	4	Buah	B	2016
84	Dispenser		6	Buah	B	2016
85	Taplak Meja dan Vas Bunga	Kain	1	Buah	B	2017
86	Mesin Potong Rumput	Besi	1	Buah	B	2017
87	Linggis kuku kambing	Besi	5	Buah	B	2017
88	Meja Rapat	Kayu	3	Buah	B	2017
89	Meja 1/2 Biro	Kayu	6	Buah	B	2017
90	Kursi Rapat	Besi	50	Buah	B	2017
91	Lemari 3 Pintu	Kayu	2	Buah	B	2017
92	Dispenser standing	Besi	2	Buah	B	2017
93	Kamera Digital	Besi	1	Buah	B	2017
94	Papan Nama SKPD	Besi	1	Buah	B	2017
95	Komputer (hp AIQ)	Hp	6	Unit	B	2020
96	Printer	(Epson L3110)	6	Unit	B	2020
97	Lemari	Kayu	5	Unit	B	2020
98	Meja Kerja	Kayu	7	Unit	B	2020

99	Meja Rapat	Kayu	2	Unit	B	2020
100	Kursi Kerja	Kayu	7	Unit	B	2020
101	Wirlaes		1	Unit	B	2020
102	Papan Sekretariat PPNS		1	Unit	B	2020
103	Papan Struktur Organisasi 1		1	Unit	B	2020
104	Papan Struktur Organisasi 1		1	Unit	B	2020
105	Papan Visi Misi		1	Unit	B	2020
106	Papan Informasi		1	Unit	B	2020
107	Mesin Potong Rumput		1	Unit	B	2020
108	Alat Pengukur suhu (Termogram)		2	Buah	B	2021 (BTT)
109	Genset	Yamaha/Bensin	2	Unit	B	2021
110	Mobil Truck (DH 8279 WA)	Besi/Hino	1	Unit	B	2021
111	Mobil Hilux Double Cabin (DH 19)	Besi/Toyota Hilux	1	Unit	B	2021

BAB II

RENCANA KERJA TAHUNAN

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai urusannya dalam bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat memiliki langkah-langkah strategis dalam upaya mendukung program Kepala Daerah, Hal ini dijabarkan dalam rencana Program Kegiatan sebagai berikut :

A. Rencana Kinerja Tahunan.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar dalam Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.

Rencana Kerja Tahunan (RKT) disusun berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur yang Termuat dalam Rencana Strategis (Renstra) tahun 2024-2026 sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026 :

Indikator Kinerja Utama (KU) Tahun 2024
Satuan Polisi pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI	TARGET	FORMULAINDIKATOR
			2023	2024	
1	2	3	4	6	7
1	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1. Presentase meningkatnya pencapaian SPM Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	44,76%	100%	Jumlah kegiatan yang diselesaikan -----x 100 Target
		2. Presentase meningkatnya Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (jumlah Perda dan Perkada yang ditegakan)	3	3	Jumlah Penyelesaian Perda dan Perkada yang ditegakan -----x100 Jumlah Perda dan Perkada
		3. Presentase Pencegahan Daerah Rawan Kebakaran setiap Tahun	-	100 %	Data Potensi Daerah Rawan Kebakaran -----x100 Jumlah Wilayah

Dari tabel Rencana Kinerja Tahunan (RKT) diatas dapat diambil langkah strategis antara lain :

1. Membangun dan mengembangkan sinergitas dengan Instansi/ Unit/ Lembaga Hukum/ Masyarakat/ Stekholder terkait lainnya dalam melakukan pengendalian dalam rangka menciptakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
2. Membangun komunikasi yang secara berkala dalam melakukan diteksi dini dan cegah dini terhadap segala bentuk kegiatan yang berdampak pada adanya pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Dengan rumusan kebijakan yang telah ditetapkan antara lain :

1. Meningkatkan koordinasi antar Instansi/Unit Kerja/Lembaga Hukum yang tersebar dalam wilayah Nusa Tenggara Timur.
 2. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia.
 3. Pemenuhan sarana prasarana yang berstandar dalam mendukung pelaksanaan kegiatan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- Rencana Kerja

Tabel Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikator (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.2	Urusan Pemerintah an Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat		Prov/kab/Kota		12.863.647.600	APBD Prov. NTT			12.863.647.600
05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkatoran yang Berkualitas	Kota Kupang	100 %	12.863.647.600	APBD Prov. NTT		100 %	12.863.647.600
1.01	Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Tersedianya laporan capaian kinerja PD	Kota Kupang	49 dokumen	38.000.000	APBD Prov. NTT		49 dokumen	38.000.000
1.02	Administrasi keuangan pemerintah daerah	Terbayarnya gaji dan tunjangan	Kota Kupang	4 laporan	11.032.449.000	APBD Prov. NTT		4 laporan	11.032.449.000
1.06	Administrasi umum pemerintah daerah	Tersedianya kebutuhan operasional kantor	Kota Kupang	1 piket	80.000.000	APBD Prov. NTT		1 piket	80.000.000
1.07	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang	Kota Kupang	4 laporan	-			4 laporan	-
1.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Tersedianya kebutuhan jasa operasional kantor	Kota Kupang	4 laporan	968.025.600	APBD Prov. NTT		4 laporan	968.025.600
1.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Terpeliharanya barang milik daerah yang menjadi aset	Kota Kupang	4 laporan	113.600.000	APBD Prov. NTT		4 laporan	113.600.000
05.02	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Presentase meningkatnya pencapaian SPM trantibum	Kota Kupang	100 %	624.600.000	APBD Prov. NTT		Kota Kupang	624.600.000
1.01	Penanganan gangguan ketenteraman ddan ketertiban umum lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi	Terselenggaranya kegiatan penertiban, pengamanan, pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patrol turjawali dalam rangka trantibum	Kabupaten/kota	12 laporan	524.600.000	APBD Prov. NTT	Mengkoordinir layanan SPM	12 laporan	524.600.000
1.02	Penegakan peraturan daerah provinsi dan peraturan gubernur	Presentase meningkatnya pencapaian SPM trantibum (jumlah perda dan perkara yang ditegakan)	Kota Kupang	12 laporan	90.000.000	APBD Prov. NTT	Mengkoordinir layanan SPM	12 laporan	90.000.000
1.03	Pembinaan penyidik pegawai negeri sipil	Kegiatan pengembangan kapasitas PPNS	Kota Kupang	2 laporan	10.000.000	APBD Prov. NTT	Mengkoordinir layanan SPM	2 laporan	10.000.000

05.04	Program Pencegahan Penanggulangan Peyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Presentase pencegahan daerah berpotensi rawan kebakaran	Kota Kupang	100 %	7.000.000			100 %	7.000.000
1.01	Peyelenggaran pemetaan rawan bencana kebakaran	Peta daerah rawan kebakaran	Kota Kupang	4 laporan	7.000.000	APBD Prov. NTT	Mengkoordinir layanan SPM	4 laporan	7.000.000

Dalam implementasi rencana kerja, seluruh program dan kegiatan diarahkan untuk mewujudkan penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dengan mengoptimalkan seluruh bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam bentuk penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sehingga dapat menciptakan kondisi yang aman dan tentram.

B. Program Dan Kegiatan Tahun 2024.

Program dan Kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur seluruh pendanaanya bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan anggaran belanja dan Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun 2024 antara lain :

1. Belanja Daerah/Belanja Operasi.

1. Belanja Daerah/Operasi Rp. 13.121.680.880.- kegiatan ini terdiri dari

1.1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :

1.1.1 Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

1.1.1.1 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

1.1.2 Administrasi Keuangan Pemerintah Daerah.

1.1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

1.1.3 Administrasi Umum Perangkat Daerah Daerah.

1.1.3.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

1.1.3.2 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.

1.1.3.3 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.

1.1.3.4 Penyediaan Bahan Material.

1.1.3.5 Fasilitas Kunjungan tamu.

1.1.3.6 Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.1.3.7 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

- 1.1.4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - 1.1.4.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
 - 1.1.4.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik.
 - 1.1.4.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.1.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - 1.1.5.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
 - 1.1.5.2 Pemeliharaan Aset Tetap lainnya.
 - 1.1.5.3 Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya.

1.2. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- 1.2.1 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi :
 - 1.2.1.1 Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan.
 - 1.2.1.2 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
 - 1.2.1.3 Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi.
 - 1.2.1.4 Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
 - 1.2.1.5 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
 - 1.2.1.6 Pencegahan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini, Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan,

dan Pengawalan.

1.2.1.7 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja Melalui Pelatihan Teknis Termasuk dalam Pelaksanaan tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia.

1.2.1.8 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa.

1.2.2 Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur.

1.2.2.1 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.

1.2.2.2 Pengawasan atas kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.

1.2.2.3 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.

1.2.3 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi.

1.2.3.1 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS

1.3. Program Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran :

1.3.1 Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran.

1.3.1.1 Penyusunan dan Pemutahiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran.

1.3.1.2 Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran

C. Realisasi Anggaran

Dalam periode tahun 2024 tersedia pagu anggaran sesuai Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran sebesar Rp. 13.121.680.880.- (tiga belas miliar seratus dua puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) berikut kondisi atau keadaan kas sampai dengan tanggal 31 Juli 2024 yang telah dipertanggungjawabkan

secara fungsional oleh bendahara Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur pada badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DANKETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	13.121.680.880	6.814.762.509	51.94
01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	12.266.580.880	6.504.753.328	53.03
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Relaisasi Kinerja SKPD	38.000.000	14.818.000	38.99
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.032.449.000	5.809.879.705	52.66
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.032.449.000	5.809.879.705	52.66
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	80.000.000	48.209.863	60.62
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	1.159.280	23.19
	- Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	25.000.000	15.404.400	61.61
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.000.000	1.750.000	87.50
	- Penyediaan Bahan/Material	20.000.000	10.567.007	52.43
	- Fasilitas Kunjungan Tamu	5.000.000	4.998.000	99.96
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.000.000	4.531.176	90.62
	- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	18.000.000	9.900.000	55.00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	997.031.880	556.192.651	55.78
	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.400.000	1.400.000	100
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.000.000	3.058.200	30.58
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	985.631.880	551.743.451	55.98
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	119.100.000	75.653.109	63.52
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	70.000.000	58.383.609	83.41
	- Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	19.100.000	7.030.000	36.81
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.000.000	10.239.500	24.13

02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	848.100.000	310.009.181	36.55
	Penanganan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Provinsi	748.100.000	268.669.181	35.91
	- Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	2.500.000	-	-
	- Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	1.500.000	-	-
	- Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	150.000.000	36.810.000	24.54
	- Penyediaan Layanan Dasar Dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	75.000.000	-	-
	- Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5.000.000	-	-
	- Pencegahan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan masyarakat Melalui deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	333.100.000	151.395.381	45.45
	- Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja Melalui Pelatihan Teknis Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	131.000.000	53.399.800	40.76
	- Penindakan atas Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	50.000.000	27.064.000	54.13
	Penegakan Peraturan daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	90.000.00	36.340.000	40.38
	- Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	5.000.000	-	-
	- Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	70.000.000	32.600.000	46.57
	- Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	15.000.000	3.740.000	24.93

	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	10.000.000	5.000.000	50.00
	- Pengembangan Kapasitas dan Karir PPNS	10.000.000	5.000.000	50.00
03	PROGRAM PENCEGAHAN PENANGGULANGAN PENYELEMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	7.000.000	-	-
	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	7.000.000	-	-
	- Penyusunan dan Pemuktahiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	5.000.000	-	-
	- Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	2.000.000	-	-
	Jumlah Realisasi sampai dengan Mei	13.121.680.880	6.814.762.509	51.94

Kondisi atau keadaan kas per 30 Juni 2024

Pada tabel diatas dapat disampaikan bahwa capaian progres fisik dan keuangan pada Bulan Juli 2024 sebesar Rp. 6.814.762.509.- (enam miliar delapan ratus empat belas juta tujuh ratus enam puluh dua ribu lima ratus sembilan rupiah) atau 51.94 % dari Total pagu sebesar Rp. 13.121.680.880.- (tiga belas miliar seratus dua puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).

BAB III

HASIL PELAKSANAAN

Dalam Periode sampai dengan bulan Juli 2024 dimana rutin dilaksanakan dengan hasil capaian pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut :

A. Bidang Kesekretariatan.

1. Sub Bagian Program Data dan Evaluasi.

Capaian pelaksanaan tugas antara lain adalah :

1. Laporan Bulanan Bulan Juli 2024.
2. Laporan Triwulan II Tahun 2024.
3. Laporan Semester I Tahun 2024.
4. Laporan e-monev Bulan Juni Tahun 2024.
5. Laporan SPM Triwulan II Tahun 2024.
6. Mengikuti Workshop Konsultasi Publik Rancangan Kebijakan Rencana Aksi (Renaksi) Satu Data Provisni NTT
7. Menghadiri Undangan Desiminasi Keterbukaan Informasi Publik bagi Badan Publik Lingkup Pemerintah Provisni NTT
8. Menghadiri rapat Tindak lanjut AKIP
9. Mengikuti Pegelaran Budaya Bhayangkara dalam Rangka Hari Bhayangkara ke-78 tahun 2024
10. Melaksanakan Pengimputan Akhir Rencana Kerja (RENJA) tahun 2025 pada SIPD-RI.
11. Meghadiri undangan FGD Pemetaan Masalah Prioritas RDB Provinsi NTT bersama Pemerintah.
12. Melaksanakan Penyampaian dan Pembahasan skema Rancangan APBD Ta. 2025 pada KUA PPAS TA 2025.
13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Sub Bagian Keuangan.

1. Mengajukan SPP Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), Tambah Uang (TU) dan Gaji PNS (LS).
2. Menyusun SPJ Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), Tambah Uang (TU) dan Gaji PNS (LS).
3. Membuat laporan SPJ Fungsional dan laporan Pertanggungjawaban atas belanja SKPD.

4. Membuat Laporan Keuangan SKPD.
5. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh atasan.

3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.

- Kepegawaian

No.	Uraian Program / Kegiatan	Jumlah
1	Membuat laporan bulanan	1 lap
2	Membagi beras bagi PNS	101 ASN
3	Membuat rekapan kehadiran anggota piket proses honor piket	45 keg
4	Menyelesaikan SK Tim Focal Point PUG Satpop PP	1 berkas
5	Menyelesaikan SOP Revisi yang sudah di revisi	1 berkas
6	Menginput dan mengajukan usulan kenaikan pangkat periode Agustus 2024	9 berkas
7	Membuat rekapan kehadiran tenaga kontrak dan proses pembayaran honor	29 berkas
8	Menyelesaikan Instrumen SKM	1 lembar
9	Menerima TIM dari Kementerian Hukum dan HAM	1 keg
10	Mengikuti rapat komisi I DPRD Prov. NTT dan Paripurna	3 kali
11	Menyelesaikan surat panggilan	2 surat
12	Mengikuti pemeriksaan dan menyelesaikan administrasi BAP terhadap Pak Rahman	2 dok
13	Mengikuti rapat internal para pejabat dengan anggota	3 keg
14	Menyelesaikan surat tugas	3 surat
15	Membuat surat kenaikan berkala	8 surat
16	Menerima surat masuk	49 surat
17	Menerima surat keluar bulan Juli tahun 2024	70 surat
18	Menerima undangan yang masuk Juli tahun 2024	14 undangan
19	Menyalurkan surat masuk pada atasan	30 surat
20	Menyalurkan surat masuk ke bidang sesuai disposisi	30 surat
21	Membuat berkala	

- Umum

No.	U r a i a n	Jumlah
1.	Jumlah Surat Masuk bulan Juli 2024	49 surat
2.	Jumlah Surat Keluar bulan Juli 2024	70 surat
3.	Jumlah undangan yang masuk bulan Juli 2024	14 surat

- Perlengkapan

Uraian Program/Kegiatan	Jumlah/ Keterangan
Mengatur Cleaning Service untuk membersihkan ruang kantor	Setiap Hari

**B. Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
Bulan Juli 2024.**

KEGIATAN PENANGANAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA
DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI

No	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa	Ket
			Rp	%		
1	Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum lintas daerah Kabupaten/Kota dan 1 (satu) daerah Provinsi	175.000.000.-	21.300.000	12	153.700.000.-	-

1. Sub Kegiatan : Sosialisasi Penegakan Perda dan Pergub

No	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa	Ket
			Rp	%		
1	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sosialisasi Penegakan Perda dan Pergub	5.000.000.-	-	-	5.000.000.-	-
	Jumlah				5.000.000.-	-

2. Sub Kegiatan : Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan perda dan pergub “operasi DBHCHT (rokok ilegal)”

No	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa	Ket
			Rp	%		
1	Belanja Bahan Cetak	1,360.000.-	360.000	25	1,020.000.-	-
2	Belanja Makan minum rapat	16.960.000.-	3.040.000	18	13.920.000.-	
3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (uang harian transport lokal)	51.680.000.-	2.920.000	25	38.760.000.-	
	Jumlah				53.700.000.-	-

3. Sub Kegiatan : Penyediaan Layanan Dasar Dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada

No	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa	Ket
			Rp	%		
1	Belanja Operasi	75.000.000.-	-	-	75.000.000.-	-
2	Belanja pakai habis	15.300.000.-	-	-	15.300.000.-	
3	Belanja Jasa Kantor	28.128.000.-	-	-	28.128.000.-	
	Jumlah				15.000.000.-	-

4. Sub Kegiatan : Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur sesuai SOP

No	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa	Ket
			Rp	%		
1	Belanja Operasi	15.000.000.-	-	-	15.000.000.-	-
2	Belanja/alat bahan untuk kantor kegiatan ATK	40.000.-	-	-	40.000.-	
3	Belanja perjalanan dlam kota 22 orang x 4 kali	14.96.000.-	-	-	14.96.000.-	

5. Sub Kegiatan : Pengembangan Kapasitas dan Karir PPNS

No	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa	Ket
			Rp	%		
1	Belanja Operasi	10.000.000.-	-	-	10.000.000.-	-
2	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor bahan cetak	400.000.-	-	-	400.000.-	
3	Belanja makan minum peserta rapat	3.400.000.-	-	-	3.400.000.-	
3	Belanja perjalanan dinas dalam kota (transportasi peserta rapat teknis PPNS)	6.000.000.-	-	-	6.000.000.-	

C. Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Bulan Juli 2024

No	Jenis Pengamanan	Jumlah Pengamanan		Masalah	Pemecahan Masalah	Instansi Terkait	Keterangan
		Lokasi Kegiatan	Bulan				
1	2	3	4	6	7	8	9
01.	Melaksanakan pengamanan aksu ubjuk rasa/demostrasi dari Aliansi FMN (Forum Mahasiswa Nasional) terkait tanah milik warga Kab. Lembata (jumlah pendemo 60 orang)	Kantor Gubernur dan DPRD Prov. NTT	x kegiatan 01 Juli 2024	-	-	Polda dan unsur terkait	42 orang al. Plt Kasat, Kabid, Kasi Ops, HK dan anggota Pol PP
02.	Mengikuti rapat dalam rangka memeriahkan HUT Kemerdekaan Indonesia ke 79 Tahun 2024 tingkat Provinsi NTT	Rung Rapat Assisten gedung sasando lantai II	1 x kegiatan 04 Juli 2024	-	-	Unsur terkait	Kasi HK dan Ibu Yo
03.	Melakukan Olahraga bersama/senam dengan OPD lingkup Pemprov. NTT	Halaman depan Kantor Gebernur NTT	1 x kegiatan 05 Juli 2024	-	-	OPD lingkup Pemprov. NTT	Seluruh ASN Satpol PP
04.	Melakukan pengamanan kegiatan RUPS Perusahaan Daerah (PD) Flobamor	Kantor Gubernur Sasando	1 x kegiatan 05 Juli 2024	-	-	Unsur terkait	Kasi HK dan anggota
05.	Melakukan pengamanan dalam rangka upacara penyerahan SK P3K oleh Sekda bagi 1.450.000 Guru SMA/SMK dan SLB tingkat Prov. NTT	Kantor Gubernur Sasando	1 x kegiatan 08 Juli 2024	-	-	BKD Prov. NTT	30 orang al. Plt. Kasat, Kabid, Kasi Ops, HK dan anggota
06.	Melakukan pengamanan aksi unjuk rasa/demonstrasi dari mahasiswa aliansi FMN Forum mahasiswa Nasional dan masyarakat terkait Formasi Akpol (jumlah pendemo 30 orang)	Kantor DPRD Prov. NTT	1 x kegiatan 12 Juli 2024	-	-	Polda dan DPRD Prov. NTT	25 orang al. Plt. Kasat, Kabid, Kasi Ops, HK dan anggota
07.	Melaksanakan apel gelar pasukan dalam rangka operasi turangga	Polda NTT	1 x kegiatan 15 Juli 2024	-	-	Polda NTT dan unsure terkait	12 orang al. Plt. Kasat, Kabid, Kasi HK dan anggota
08.	Melakukan pengamanan dan mengikuti apel kesadaran ASN lingkup Pemprov. NTT	Depan Kantor Gubernur NTT	1 x kegiatan 17 Juli 2024	-	-	BKD Prov. NTT	Seluruh ASN Satpol PP
09.	Mengikuto pemeriksaan gula darah 2 jam sesaat makan	Dinas Kesehatan (UPTD Lab. Kes)	1 x kegiatan 22 Juli 2024	-	-	Dinas Kesehatan (UPTD Lab. Kes)	Seluruh pejabat structural dan anggota

10.	Mengikuti rapat dalam rangka memeriahkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke 79 tahun 2024 Tk. Prov. NTT	Rung Rapat Assisten gedung sasando lantai II	1 x kegiatan 23 Juli 2024	-	-	Unsur terkait	Plh. Kabit Trantibum
11.	Melakukan pengamanan dalam rangka rapat paripurna	Kantor Gubernur NTT	1 x kegiatan 24 Juli 2024	-	-	DPRD Prov. NTT	20 orang al. Plt. KasatKabid SDA, Kasi Ops, HK dan anggota
12.	Mengikuti dan menyaksikan pembongkaran aset milik Pemprov. NTT (Gedung Lokabinkra)	Lokabinkra Jl. Timor Raya KM. 8 Kel. Oesapa Kota Kupang	1 x kegiatan 24 Juli 2024	-	-	BPAD dan Disperindak Prov. NTT	7 orang al. Kasat, Kabid, Kasi dan anggota
13.	Mengikuti rapat dalam rangka operasi DBHCHT (dana bagi hasil cukai tembak)	Aula Satpol PP	1 x kegiatan 25 Juli 2024	-	-	BPAD dan Disperindak Prov. NTT	Seluruh pejabat structural dan anggota
14.	Mengikuti rapat persiapan dan pembagian tugas dalam rangka memeriahkan HUT Kemerdekaan Indonesia ke 79 Tahun 2024 Tk. Prov. NTT	Rung Rapat Assisten gedung sasando lantai II	1 x kegiatan 25 Juli 2024	-	-	Unsur terkait	Kasi Ops dan Dony Doh
15.	Melakukan pengamanan dalam rangka kegiatan puncak acara hari anak Nasional Tahun 2024	Halaman depan Kantor Gubernur NTT	1 x kegiatan 30 Juli 2024	-	-	Unsur terkait	16 orang al. Plt. Kasat, Plh Kabid Tibum, Kasi Ops, HK dan anggota
16.	Melakukan penjagaan dan pengamanan aset milik Pemprov. NTT	Kantor Gubernur sasando, Rujab Gubernur, Rujab Wagub, Rujab Sekda, dan Kantor Satpol PP	1 x kegiatan tanggal 31 x 24 Jam	-	-	5 Pos Piket	Julmala personil. 62 anggota al. 15 danru, 30 anggota piket, 4 anggota patwal dan 13 anggota pengawas/pengontrol

D. Bidang Sumber Daya Aparatur (SDA)

Dalam Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran SKPD (DPPA) Satpol PP Tahun Anggaran 2024 urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sub kegiatan khusus bidang SDA dengan alokasi dana untuk belanja Rp. 131.000.000.- Kegiatan Kapasitas SDM Satpol PP dan Satlinmas termaksud dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

No	Uraian Program/Kegiatan	Pagu Anggaran Rp.	Realisasi Keuangan Rp	Realisasi Fisik %	Sisa
1	2	3	4	5	6
1	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas SDM dan Pelatihan Kesamaptaan	56.000.000	53.399.800 (95.35 %)	100	2.600.200
2	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	75.000.000	-	-	-
	Total Pengeluaran s/d Juli 2024	131.000.000	53.399.800	40.76	77.600.200

E. Bidang Linmas

Program/Kegiatan

Dalam Tahun Anggaran 2024 Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 12.000.000.- dengan rincian :

No	Uraian Program/Kegiatan	Pagu Anggaran Rp.	Realisasi Keuangan Rp	Realisasi Fisik %	Sisa
1	2	3	4	5	6
1	Penyusunan dan Pemuktahiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kabakaran	5.000.000	-	-	-
2	Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	2.000.000	-	-	-
3	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Trantibum	5.000.000			
	Total Pengeluaran s/d Juli 2024	12.000.000	-	-	-

Pemasalahan :

Permasalahan yang dihadapi pada Bidang Linmas adalah :

- Belum efektifnya pelaksanaan program kegiatan Bidang Linmas karena alokasi anggaran yang sangat minim dan tidak menjawab program/kegiatan Tahun Anggaran 2024.
- Belum efektifnya permasalahan bersama tentang pelaksanaan program/kegiatan di kabupaten/kota se Provinsi NTT berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang peyelenggaraan program kegiatan.

Upaya Pemecahan :

- Meningkatkan pemahaman bersama tentang tugas fungsi dan kewenangan Satuan Polisi Pamomg Praja Prov. NTT dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
- Meningkatkan pemahaman dalam penyeragaman bersama tentang program/kegiatan berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang program dan kegiatan.

Berikut data personil pemadam kebakaran dan Linmas pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur :

Data Pemadam Kebakaran Di Provinsi NTT

No.	Nama kabupaten/Kota	JumlahPersonil	Keterangan
1.	Kota Kupang	2.410	Dalam struktur Organisasi Sat. PolPP Kota Kupang tidak terakomodir Bidang Pemadam Kebakaran karena telah ada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Kupang
2.	Kabupaten Kupang	2.152	
3.	Kabupaten TTS	2.758	
4.	Kabupaten TTU	1.548	
5.	Kabupaten Belu	1.550	
6.	Kabupaten Malaka	1.340	
7.	Kabupaten Alor	894	
8.	Kabupaten Rote Ndao	630	
9.	Kabupaten Sabu Raijua	276	
10.	Kabupaten Lembata	1.569	
11.	Kabupaten Flores Timur	1.070	
12.	Kabupaten Sikka	1.010	
13.	Kabupaten Ende	1.966	
14.	Kabupaten Ngada	1.018	
15.	Kabupaten Nagekeo	1.386	
16.	Kabupaten Manggarai	1.940	
17.	Kabupaten Manggarai Timur	1.186	
18.	Kabupaten Manggarai Barat	1.616	
19.	Kabupaten Sumba Timur	516	
20.	Kabupaten Sumba Tengah	810	
21.	Kabupaten Sumba Barat	1.816	
22.	Kabupaten Sumba Barat Daya	864	
TOTAL		31.325	

Data Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Provinsi NTT

No.	Nama kabupaten/Kota	Jumlah			Jumlah	Ket
		Kec	Kel	Desa		
1.	Kota Kupang	6	51	-	51	
2.	Kabupaten Kupang	24	160	171	2.890	
3.	Kabupaten TTS	32	12	266	6.950	
4.	Kabupaten TTU	24	147	33	1.764	
5.	Kabupaten Belu	12	12	69	1.399	
6.	Kabupaten Malaka	12	127	127	1.337	
7.	Kabupaten Alor	18	175	-	1.283	
8.	Kabupaten Rote Ndao	11	7	113	1.725	
9.	Kabupaten Sabu Raijua	5	5	62	2.083	
10.	Kabupaten Lembata	9	7	125	1.872	
11.	Kabupaten Flores Timur	19	-	251	1.569	
12.	Kabupaten Sikka	21	13	151	2.537	
13.	Kabupaten Ende	21	23	255	1.073	
14.	Kabupaten Nagekeo	7	16	97	684	
15.	Kabupaten Ngada	12	206	206	1.236	
16.	Kabupaten Manggarai	11	26	162	5.678	
17.	Kabupaten Manggarai Timur	9	17	159	4.680	
18.	Kabupaten Manggarai Barat	12	5	169	1.386	
19.	Kabupaten Sumba Barat	12	11	131	2.445	
20.	Kabupaten Sumba Barat Daya	5	11	74	1.480	
21.	Kabupaten Sumba Tengah	6	6	65	1.300	
22.	Kabupaten Sumba Timur	22	17	180	2.056	
TOTAL		310	1.081	2.866	47.478	

BAB IV

PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT

A. Permasalahan

Permasalahan yang ditemui dalam pencapaian target kinerja bulan Juli antara lain :

1. Pelaksanaan capaian kinerja yang terlambat.
2. Ganti Uang (GU) yang terlambat.

B. Tindak Lanjut.

Melakukan konsultasi dan rapat bersama pimpinan serta melakukan pendekatan dengan Badan Keuangan Daerah terkait pencairan anggaran untuk membiayai kegiatan.

BAB V PENUTUP

Laporan kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban hasil pelaksanaan program dan kegiatan bulan Juli 2024, semoga apa yang telah disampaikan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur kedepan dalam rangka menciptakan ketenteraman dan ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat.

Akhir kata diucapkan terimakasih kepada semua pihak dalam lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sudah membantu dalam penyusunan laporan ini. Saran dan pendapat masih sangat dibutuhkan bagi kesempurnaan dari laporan ini.

Demikian laporan bulan Juli Tahun 2024 disajikan atas perhatian diucapkan terima kasih.

Kupang, 14 Agustus 2024

Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Nusa Tenggara Timur,


Ir. YOHANES OKTOVIANUS, MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19661029 199403 1 007

LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN APBD PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BULAN JULI 2024

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	SUMBER DANA	LOKASI KEGIATAN	SASARAN	KONDISI 7/8 BULAN SEBELUMNYA					REALISASI BULAN INI	KONDISI 7/8 BULAN INI			SSA ANGGARAN (Rp)	KST				
						TARGET		REALISASI				Rp	(%) FISIK	(%) KEU			TARGET		REALISASI	
						(%) FISIK	(%) KEU	(%) FISIK	(%) KEU	(%) FISIK							(%) KEU	(%) FISIK	(%) KEU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
5.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETERTAMBAHAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	13.121.680.880				50,00	50,00	5.845.022.785	50,00	44,54	968.739.724	57,55	57,55	58,33	57,55	6.814.762.508	58,33	57,55	6.306.318.371	
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	12.266.580.880				50,00	50,00	5.591.783.604	50,00	45,59	912.969.724	58,47	58,47	58,33	58,47	6.504.753.328	58,33	58,47	5.761.827.552	
	PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	38.000.000				50,00	50,00	8.516.000	50,00	22,41	6.302.000	58,21	58,21	58,33	58,21	14.818.000	58,33	58,21	23.182.209	
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	38.000.000	DAU	Kota Kupang	SKPD	50,00	50,00	8.516.000	50,00	22,41	6.302.000	58,21	58,21	58,33	58,21	14.818.000	58,33	58,21	23.182.209	
	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	11.052.449.000				50,00	50,00	5.001.792.944	50,00	45,34	808.086.761	58,33	58,33	58,33	58,33	9.809.879.705	58,33	58,33	5.222.868.295	
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.032.449.000	DAU	Kota Kupang	SKPD	50,00	50,00	5.001.792.944	50,00	45,34	808.086.761	58,33	58,33	58,33	58,33	9.809.879.705	58,33	58,33	5.222.868.295	
	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	80.000.000	DAU		SKPD	50,00	50,00	39.836.983	50,00	49,80	8.372.900	65,15	65,15	58,33	60,26	48.209.883	58,33	60,26	31.790.337	
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	DAU	Kota Kupang	SKPD	50,00	50,00	722.780	50,00	14,46	436.500	70,00	70,00	58,33	23,19	1.159.280	58,33	23,19	1.840.720	
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.000.000	DAU	Kota Kupang	SKPD	50,00	50,00	14.565.900	50,00	58,26	838.500	58,34	58,34	58,33	61,62	15.404.400	58,33	61,62	8.395.800	
	- Penyediaan Bahan Bicara dan Peraturan Perundang-undangan	2.000.000	DAU	Kota Kupang	SKPD	50,00	50,00	1.250.000	50,00	62,50	500.000	58,30	58,30	58,33	87,50	1.750.000	58,33	87,50	250.000	
	- Penyediaan Bahan Material	20.000.000	DAU	Kota Kupang	SKPD	50,00	50,00	8.623.807	50,00	43,12	1.843.200	73,08	73,08	58,33	52,34	10.467.007	58,33	52,34	5.522.888	
	- Fasilitas Kunjungan Temu	5.000.000	DAU	Kota Kupang	SKPD	50,00	50,00	4.998.000	50,00	99,96	-	70,00	70,00	58,33	99,96	4.998.000	58,33	99,96	1.000	
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.000.000	DAU	Kota Kupang	SKPD	50,00	50,00	4.176.476,00	50,00	83,53	354.700	60,00	60,00	58,33	90,62	4.531.176,00	58,33	90,62	468.824	
	- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	18.000.000	DAU	Kota Kupang	SKPD	50,00	50,00	5.500.000	50,00	30,56	4.400.000	65,28	65,28	58,33	53,00	9.900.000	58,33	53,00	8.300.000	
	PENYEDIAAN JASA PERUKUJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	997.051.880	DAU		SKPD	50,00	50,00	476.858.771	50,00	47,83	79.332.880	57,61	57,61	58,33	55,74	536.152.651	58,33	55,74	449.889.229	
	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.400.000	DAU	Kota Kupang	SKPD	50,00	50,00	810.000	50,00	57,86	590.000	75,00	75,00	58,33	100,00	1.400.000	58,33	100,00	-	
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.000.000	DAU	Kota Kupang		50,00	50,00	2.164.800	50,00	21,65	893.400	49,00	49,00	58,33	32,58	3.024.200	58,33	32,58	6.841.300	
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	985.631.880	DAU	Kota Kupang	SKPD	50,00	50,00	473.884.971	50,00	48,08	77.849.480	57,67	57,67	58,33	55,98	551.734.451	58,33	55,98	433.887.429	
	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH	119.100.000	DAU		SKPD	50,00	50,00	64.777.926	50,00	50,00	10.875.183	79,31	79,31	58,33	63,52	79.658.109	58,33	63,52	49.486.882	
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	70.000.000	DAU	Kota Kupang	SKPD	50,00	50,00	48.328.426	50,00	69,04	10.055.183	69,22	69,22	58,33	83,41	54.383.609	58,33	83,41	11.518.381	
	- Pemeliharaan, Pejak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	19.100.000	DAU	Kota Kupang	SKPD	50,00	50,00	6.730.000	50,00	35,24	300.000	50,10	50,10	58,33	50,61	7.050.200	58,33	50,61	13.070.000	
	- Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	30.000.000	DAU	Kota Kupang		50,00	50,00	9.719.500	50,00	32,40	530.000	100,00	100,00	58,33	94,13	10.298.500	58,33	94,13	28.760.500	
	- Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	SUMBER DANA	LOKASI KEGIATAN	SASARAN	REKAPITULASI BULAN INI					REKAPITULASI BULAN INI					REKAPITULASI BULAN INI					REKAPITULASI BULAN INI																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
						TARGET		REALISASI		Rp	TARGET		REALISASI		Rp	TARGET		REALISASI																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
						(%) FISIK	(%) KEU	(%) FISIK	(%) KEU		(%) FISIK	(%) KEU	(%) FISIK	(%) KEU																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
																7	8	9	10	11		12	13	14	15	16	17	18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1	PROGRAM PENINGKATAN KETERTAMARAN DAN KETERTIBAN UMUM	848.100.000	DAU	Kab/Kota	-	50,00	50,00	233.239.181	50,00	29,86	56.770.000	23,20	23,20	310.009.181	50,33	36,55	58.096	478.686	258.669.181	50,33	35,91	2.500	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	SUMBER DANA	LOKASI KEGIATAN	SASARAN	KONDISI 4/4 BULAN SEBELUMNYA					REALISASI BULAN INI	KONDISI 4/4 BULAN INI				SISA ANGGARAN (Rp)	KET		
						TARGET		REALISASI				TARGET		REALISASI					
						(%) FISIK	(%) KEU	Rp	(%) FISIK	(%) KEU		(%) FISIK	(%) KEU	Rp	(%) FISIK			(%) KEU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	PROGRAM PENCEBAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN NON KEBAKARAN	7.000.000	DAU			50,00	50,00	-	50,00	-	-	100,00	100,00	-	58,33	-	-	7.000.000	
	PENYELENGGARAAN PEMETAAN RAWAN BENCANA KEBAKARAN	7.000.000	DAU			50,00	50,00	-	50,00	-	-	100,00	100,00	-	58,33	-	-	7.000.000	
	- Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	5.000.000	DAU	Kab/Kota		50,00	50,00		50,00	-	-	100,00	100,00		58,33	-	-	5.000.000	
	- Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	2.000.000	DAU	Kota Kupang		50,00	50,00		50,00	-	-	100,00	100,00		58,33	-	-	2.000.000	
	JUMLAH BELANJA	13.121.680.880				50,00	50,00	5.845.022.785	50,00	50,00	969.739.724	57,53	57,53	6.814.762.509	58,33	58,33	51,94	6.366.918.371	

Kupang, 06 Agustus 2024

Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Nusa Tenggara Timur

R. YOHANES GERTONANUS, MM
PENYAIR TAMBA MAJALAH
NIP. 19661109 199403 1 007

LAMPIRAN : DOKUMENTASI LAPORAN BULAN JULI 2024



Foto kegiatan Pengawasan dan Pengamanan Pj.Gubernur NTT saat Jalan Santai





Foto kegiatan Penjagaan dan Pengontrolan



Foto kegiatan Operasi DBHCHT (Rokok Ilegal) di Kota Kupang



Foto kegiatan Rapat bersama Staf Fungsional Satpol Prov.NTT



Foto kegiatan Pembahasan Anggaran di Badan Anggaran Setda Prov.NTT



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Jln. Polisi Militer No. -Telp. (0380)-828090**
Email : satpolpp_prov.ntt@yahoo.com
Website : www.satpol-pp.nttprov.go.id
KUPANG

06 September 2024

Yth. - Kepala Bappelitbangda Provinsi NTT
- Kepala Badan Keuangan Daerah Setda
Provinsi NTT

SURAT PENGANTAR

Nomor : 000.1.5/670/sat pol pp 1.1

JENIS SURAT	JUMLAH	KETERANGAN
2	3	4
Laporan Bulan Agustus Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024	1 (Satu) Buku	Dikirim untuk ditindak lanjuti

Demikian Laporan ini atas kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Plt, KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,



Ir. YOHANES OKTOVIANUS, MM

PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19661029 199403 1 007

Paraf Hirarki :	
Plh. Sekretaris	f
Kepala Subbag Program Data dan Evaluasi	p
Fungsional Ahli Muda	f

LAPORAN BULAN AGUSTUS 2024





LAPORAN BULAN AGUSTUS



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024

Jalan Polisi Militer Nomor 1, Telpon/Fax (0380) 828090
Email : satpolpp_prov.ntt@yahoo.com
Website : www.satpol-pp.nttprov.go.id

KUPANG

ISO
9001:2015

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur patut dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena hanya atas penyertaan dan kasih-Nya maka Laporan Bulan Agustus 2024 Tahun Anggaran 2024 Satuan Polisi Pamong Praja ini dapat diselesaikan dengan baik.

Tugas, fungsi dan wewenang Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah menjadi sangat penting yang mana terlaksananya berbagai kegiatan pengamanan dan penegakkan prodak hukum. Keadaan yang nyaman, aman dan tenteram diciptakan guna mendukung kinerja Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Untuk itu Laporan Bulan Agustus Tahun Anggaran Tahun 2024 ini merupakan bahan, data dan informasi yang disusun secara baik, transparan dan dapat di pertanggungjawabkan kepada publik ataupun kepada pemangku kepentingan yang membutuhkan informasi terkait penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum. dan perlindungan masyarakat dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Kupang, 06 September 2024

Plt. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



Ir. YOHANES OKTOVIANUS, MM

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19661029 199403 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Maksud dan Tujuan	3
D. SDM Satuan Polisi Pamong Praja	3
BAB II RENCANA KERJA TAHUNAN	12
A. Rencana Kerja Tahunan	12
B. Program dan Kegiatan Tahun 2024	16
C. Realisasi Anggaran	19
BAB III HASIL PELAKSANAAN	22
A. Sekretariat	22
B. Bidang Penegakan Perda dan Peraturan Gubernur	24
C. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	27
D. Bidang Sumber Daya Aparatur	30
E. Bidang Perlindungan Masyarakat	31
BAB IV PERMASALAHAN	34
A. Permasalahan	34
B. Tindak Lanjut	34
BAB V PENUTUP	35
- Laporan Keuangan	36
- Lampiran Foto/Dokumentasi	39

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu Perangkat Daerah yang di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Tugas Satuan Polisi Pamong Praja yakni membantu Kepala Daerah dalam memelihara Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan masyarakat, dan fungsinya sebagai berikut;

- a) Perumusan kebijakan di bidang Satuan Polisi Pamong Praja;
- b) Pelaksanaan kebijakan di bidang Satuan Polisi Pamong Praja;
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Satuan Polisi Pamong Praja;
- d) Pelaksanaan administrasi di bidang Satuan Polisi Pamong Praja;
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas dan fungsi yang telah dijabarkan diatas kemudian diuraikan dalam program dan kegiatan dimana sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 tentang Satuan Polisi pamong Praja melaksanakan urusan Pemerintahan Wajib berkaitan dengan Pelayanan Dasar dalam arti bahwa pelayanan yang diberikan oleh Satuan Polisi pamong Praja berkaitan dengan hak setiap warga masyarakat yang wajib diperoleh sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal.

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur berupaya agar mampu menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan bulan Agustus 2024 laporan kinerja ini menggambarkan kinerja yang telah dilaksanakan, sehingga sangat diharapkan dapat bermanfaat bagi semua komponen yang terlibat dalam proses menciptakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat.

B. Dasar hukum

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian Cuti bagi Pegawai Negeri Sipil.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pakian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Satuan Polisi Pamong Praja;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Satuan Polisi Pamong Praja;
12. Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur.
13. Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah P-DPA-SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2024 Nomor : DPPA/A.1/1.05.0.00.0.00.01.0000/001/2024.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud.

Sebagai bahan pertanggungjawaban terhadap hasil pelaksanaan program dan kegiatan bulan Agustus 2024.

2. Tujuan.

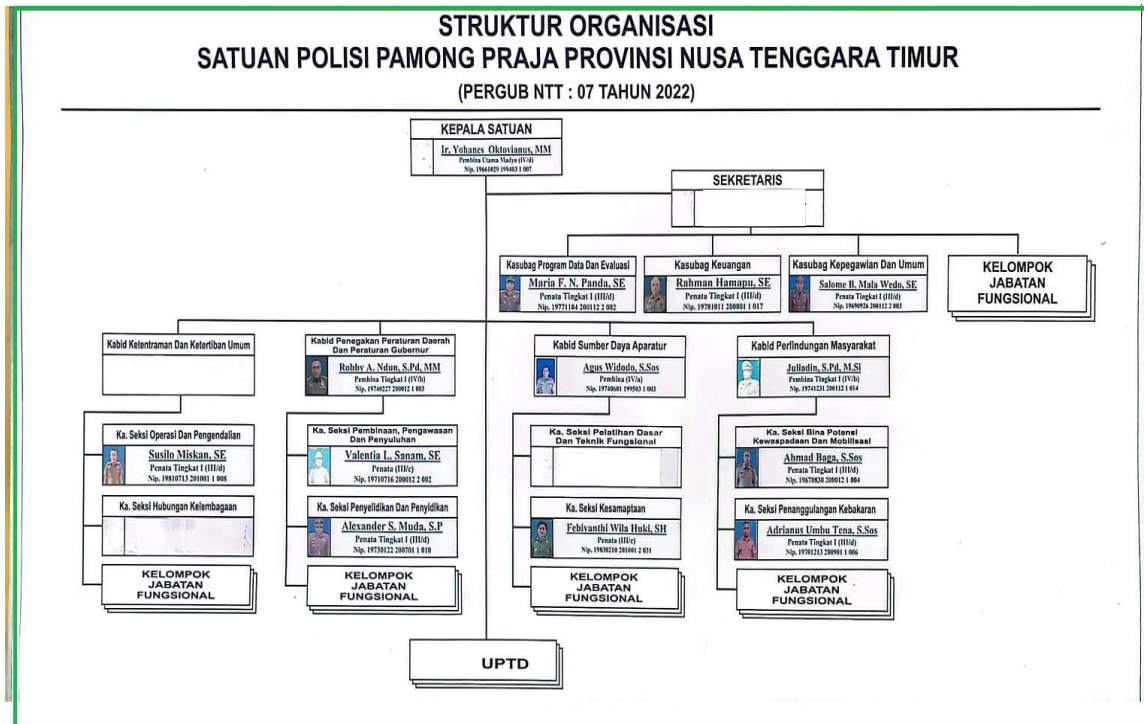
Untuk menghasilkan sebuah laporan kinerja bulanan yang menggambarkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT bulan Agustus Tahun Anggaran 2024.

D. Sumber Daya Manusia (SDM) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 139 orang dengan rincian sebagai berikut:

a. Berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah (Orang)
1	2	3
1.	Kepala Satuan	1
2.	Sekretaris	-
3.	Kepala Bidang	3
4.	Kepala Seksi	7
5.	Kepala Sub Bagian	3
6.	Jabatan Fungsional	62
7.	Jabatan Fungsional Umum	23
8.	Honorar	29
Jumlah		128



b. Berdasarkan Jenis Kelamin

Jabatan Pegawai	Jenis Kelamin	
	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)
1	2	3
Kepala Satuan	1	
Sekretaris	-	
Kepala Bidang	3	
Kepala Seksi	5	2
Kepala Sub Bagain	1	2
Jabatan Fungsional	56	6
Pelaksana	16	7
Tenaga Honorer	18	11
Total Jumlah	100	28
	128 Orang	

c. Jumlah ASN Berdasarkan Pangkat/Golongan.

Rincian Kepangkatan/Golongan					Jumlah
Kepangkatan PNS	A	B	C	D	
Golongan IV	1	2	-	1	4 orang
Golongan III	12	23	8	15	58 orang
Golongan II	-	-	4	33	38 orang
Golongan I	-	-	-	-	- orang
Jumlah	13	25	22	49	99 orang

d. Berdasarkan Jenjang Pendidikan.

No.	Jenjang Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1.	Pasca Sarjana (S2)	4	-	4
2.	Sarjana (S1)	36	13	49
3.	Diploma (D3)	1	-	-
4.	SMA/SMU	41	5	46
Jumlah		81	18	99

e. Berdasarkan Agama.

No.	Data Keagamaan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1.	Islam	4	-	4
2.	Kristen	73	25	98
3.	Katholik	21	5	26
4.	Hindu	-	-	-
5.	Budha	-	-	-
Jumlah		98	30	128

Berikut dapat di sampaikan data pemberian cuti dan tindak disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur selama bulan Agustus 2024 sesuai ketentuan yang berlaku

1. Cuti tahunan berdasarkan Kepangkatan/Golongan.

No.	Data Cuti Tahunan	Jumlah
1	2	3
1.	Golongan IV	-
2.	Golongan III	-
3.	Golongan II	-
Jumlah		-

2. Data Pegawai yang kena sanksi Kepegawaian :

No.	Data Pegawai Yang Kena Sanksi Kepegawaian	Jumlah
1	2	3
1.	Golongan IV	-
2.	Golongan III	-
3.	Golongan II	1
4.	Banpol	-
5.	Cleaning Service	-
Jumlah		1

Selain melaksanakan tugas Satuan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur juga juga melakukan penjagaan (piket) dalam rangka menjaga aset penting milik pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur adapun aset tersebut antara lain :

1. Pos Kantor Gubernur/Sasando.
2. Pos Rumah Jabatan Gubernur.
3. Rumah Jabatan Wakil Wakil Daerah.
4. Rumah Jabatan Sekretaris Daerah.
5. Posko Praja (Kantor Satpol PP).

Penjagaan pada tempat/lokasi jaga dibagi dalam 3 (tiga) sift, dimana masing-masing sift dibagi waktu selama 1 x 24 jam, mulai jam 08:00 pagi hingga jam 08:00 pagi berikutnya. Jadwal pelaksanaan piket diatur sesuai dengan surat keputusan Kepala satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur 2024 (terlampir).

E Sarana dan Prasarana

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam melaksanakan tugas yang diemban didukung dengan prasarana penunjang operasional kegiatan baik di kantor maupun dilapangan. Sarana Prasarana tersebut dicatat sebagai aset karena proses pengadaannya bersumber dari Dana Alokasi Umum yang dituangkan dalam dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur dari Tahun Anggaran 2003 sampai dengan tahun 2024 sebagai berikut :

Sarana Prasarana Pendukung

No	Jenis Nama Barang	Merk/Type/Bahan	Vol	Satuan	Keadaan Barang	Tahun Pengadaan
1.	Mobil Pic Up (DH 8059 AW	Besi/Toyota Pic Up	1	Unit	B	2003
2	Meja Biro 4 Laci	Arinda/Olympic	1	Buah	B	2008
3	Meja Biro 4 Laci	Arinda/Olympic	1	Buah	B	2008
4	Lap Top/Toshiba	Metal	1	Buah	B	2008
5	Air Condition	Besi /National/ 1Pk	2	Buah	B	2008
6	Air Condition	Besi/Akira	1	Buah	B	2008
7	Mobil Truck (DH 8047 AW)	Besi/Isuzu	1	Unit	B	2009
8	Mobil Minibus (DH 196 AW)	Besi/Toyota Rush	1	Unit	B	2009
9	Lemari 2 Pintu	Kayu Jati	6	Buah	B	2009
10	Lap Top Azer	Metal	1	Buah	B	2009
11	Printer HP/Laser Jet	Metal	1	Buah	B	2009
12	Wireless	Tens	1	Buah	B	2009
13	Megaphone Toa	Besi	1	Buah	B	2009
14	Facsimile	Panasonic	1	Buah	B	2009
15	Televisi	Digitec	1	Buah	B	2009
16	Kain Horrden	Kain	1	Buah	B	2009
17	Lambang Garuda		2	Buah	B	2009
18	Tiang Bendera	Besi	1	Buah	B	2009

19	Papan Nama SKPD	Besi	1	Buah	B	2009
20	Sepeda Motor (DH 2843 AW)	Besi/Honda/ GL 200 R	1	Unit	B	2010
21	Sepeda Motor (DH 2844 AW)	Besi/Honda/ GL 200 R	1	Unit	B	2010
22	Sepeda Motor (DH 2845 AW)	Besi/Honda/ GL 200 R	1	Unit	B	2010
23	Trasmister UHF	Motorola GR500	1			2010
24	MejaKerja	Kayu	10	Buah	B	2011
25	KursiKerja	Kayu	10	Buah	B	2011
26	Lemari 2 Pintu	Kayu Jati	5	Buah	B	2011
27	Komputer PC Simbada	Metal	2	Buah	B	2011
28	Lap Top Toshiba/L745	Metal	2	Buah	B	2011
29	Printer Canon	Metal	5	Buah	B	2011
30	Handy Talkie	Motorola GP2000	5	Buah	B	2011
31	Handy Cam	Sony	1	Buah	B	2011
32	Alat Kejut Listrik	Metal	13	Buah	B	2011
33	Sound System	Rhoad	1	Buah	B	2011
34	Komputer PC Simbada	Metal	2	Buah	B	2012
35	Televisi	Multimax	1	Buah	B	2012
36	Televisi	Sharp	1	Buah	B	2012
37	Scaner	Metal	1	Buah	B	2012
38	Kasur Busa	Bigland	8	Buah	B	2012
39	LayarProyektor		1	Buah	B	2012
40	MejaPimpinan 4 Laci	Kayu	1	Buah	B	2013
41	MejaKerja	Kayu	6	Buah	B	2013
42	Lemari 2 Pintu	Kayu Jati	2	Buah	B	2013
43	Komputer PC Simbada	Metal	2	Buah	B	2013
44	Lap Top ToshibaL840	Metal	4	Buah	B	2013

45	Kamera Digital	Canon	1	Buah	B	2013
46	LayarProyektor		1	Buah	B	2013
47	Mobil Double Cabin (DH 8249 AW)	Besi/Toyota Hilux	1	Unit	B	2014
48	Sepeda Motor (DH 3953)	Besi/Kawasaki KLX 15	1	Unit	B	2014
49	Sepeda Motor (DH 3954)	Besi/ Kawasaki KLX 15	1	Unit	B	2014
50	Sepeda	Paragon	6	Buah	B	2014
51	Kursi Sofa	Busa	1	Buah	B	2014
52	Lemari 2 Pintu	Kayu Jati	2	Buah	B	2014
53	Kulkas	Besi/ Polytron	1	Buah	B	2014
54	UPS/Matsunaga	Metal	10	Buah	B	2014
55	Lap Top Lenovo B490	Metal	1	Buah	B	2014
56	Printer Canon MX 397	Metal	1	Buah	B	2014
57	Air Condition/	Besi Polytron	5	Buah	B	2014
58	Wirelesgenggam	Toa-ZR1015	4	Buah	B	2014
59	Televisi	Polytron	5	Buah	B	2014
60	Handy Talkie	Motorola A 12	40	Buah	B	2014
61	Antena, Rig, Repeater	Motorola CDR500	1	Buah	B	2014
62	Mesin Absen Elektronik	Secure	1	Buah	B	2014
63	Mesin Absen Elektronik	Secure	1	Buah	B	2014
64	Mesin Ketik	Brother	1	Buah	B	2014
65	Handy Cam	Sony	1	Buah	B	2014
66	MejaRapat	Kayu Jati	5	Buah	B	2015
67	Meja Biro 4 Laci	Kayu	1	Buah	B	2015
68	Meja 1/2 Biro, 2 Laci	Kayu	15	Buah	B	2015
69	KursiRapat	Busa/ /Master Chair	20	Buah	B	2015
70	KursiKerja	Kayu	21	Buah	B	2015

71	Lemari 2 Pintu	Kayu Jati	1	Buah	B	2015
72	Tempat Tidur Lipat	Metal	7	Buah	B	2015
73	Lap Top Toshiba C55	Metal	5	Buah	B	2015
74	Lap Top Asus X453MA	Metal	1	Buah	B	2015
75	Printer Canon	Metal	5	Buah	B	2015
76	Tirai/Gorden	Kain	2	Buah	B	2015
77	Mic & Tiang Mic	Shure & NVK	1	Buah	B	2015
78	Kamera Digital	Canon	1	Buah	B	2015
79	Senter	S.W.A.T XML-T6	7	Buah	B	2015
80	Lemari Arsip	Katyu	1	Buah	B	2016
81	Komputer PC	LG	1	Buah	B	2016
82	Printer	Canon MP280	1	Buah	B	2016
83	Air Condition	Polytron	4	Buah	B	2016
84	Dispenser		6	Buah	B	2016
85	Taplak Meja dan Vas Bunga	Kain	1	Buah	B	2017
86	Mesin Potong Rumput	Besi	1	Buah	B	2017
87	Linggis kuku kambing	Besi	5	Buah	B	2017
88	Meja Rapat	Kayu	3	Buah	B	2017
89	Meja 1/2 Biro	Kayu	6	Buah	B	2017
90	Kursi Rapat	Besi	50	Buah	B	2017
91	Lemari 3 Pintu	Kayu	2	Buah	B	2017
92	Dispenser standing	Besi	2	Buah	B	2017
93	Kamera Digital	Besi	1	Buah	B	2017
94	Papan Nama SKPD	Besi	1	Buah	B	2017
95	Komputer (hp AIQ)	Hp	6	Unit	B	2020
96	Printer	(Epson L3110)	6	Unit	B	2020
97	Lemari	Kayu	5	Unit	B	2020
98	Meja Kerja	Kayu	7	Unit	B	2020

99	Meja Rapat	Kayu	2	Unit	B	2020
100	Kursi Kerja	Kayu	7	Unit	B	2020
101	Wirlaes		1	Unit	B	2020
102	Papan Sekretariat PPNS		1	Unit	B	2020
103	Papan Struktur Organisasi 1		1	Unit	B	2020
104	Papan Struktur Organisasi 1		1	Unit	B	2020
105	Papan Visi Misi		1	Unit	B	2020
106	Papan Informasi		1	Unit	B	2020
107	Mesin Potong Rumput		1	Unit	B	2020
108	Alat Pengukur suhu (Termogram)		2	Buah	B	2021 (BTT)
109	Genset	Yamaha/Bensin	2	Unit	B	2021
110	Mobil Truck (DH 8279 WA)	Besi/Hino	1	Unit	B	2021
111	Mobil Hilux Double Cabin (DH 19)	Besi/Toyota Hilux	1	Unit	B	2021

BAB II RENCANA KERJA TAHUNAN

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai urusannya dalam bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat memiliki langkah-langkah strategis dalam upaya mendukung program Kepala Daerah, Hal ini dijabarkan dalam rencana Program Kegiatan sebagai berikut :

A. Rencana Kinerja Tahunan.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar dalam Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.

Rencana Kerja Tahunan (RKT) disusun berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur yang Termuat dalam Rencana Strategis (Renstra) tahun 2024-2026 sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026 :

Indikator Kinerja Utama (KU) Tahun 2024
Satuan Polisi pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI	TARGET	FORMULAINDIKATOR
			2023	2024	
1	2	3	4	6	7
1	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1. Presentase meningkatnya pencapaian SPM Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	44,76%	100%	Jumlah kegiatan yang diselesaikan -----x 100 Target
		2. Presentase meningkatnya Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (jumlah Perda dan Perkada yang ditegakan)	3	3	Jumlah Penyelesaian Perda dan Perkada yang ditegakan -----x100 Jumlah Perda dan Perkada
		3. Presentase Pencegahan Daerah Rawan Kebakaran setiap Tahun	-	100 %	Data Potensi Daerah Rawan Kebakaran -----x100 Jumlah Wilayah

Dari tabel Rencana Kinerja Tahunan (RKT) diatas dapat diambil langkah strategis antara lain :

1. Membangun dan mengembangkan sinergitas dengan Instansi/ Unit/ Lembaga Hukum/ Masyarakat/ Stekholder terkait lainnya dalam melakukan pengendalian dalam rangka menciptakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
2. Membangun komunikasi yang secara berkala dalam melakukan diteksi dini dan cegah dini terhadap segala bentuk kegiatan yang berdampak pada adanya pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Dengan rumusan kebijakan yang telah ditetapkan antara lain :

1. Meningkatkan koordinasi antar Instansi/Unit Kerja/Lembaga Hukum yang tersebar dalam wilayah Nusa Tenggara Timur.
 2. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia.
 3. Pemenuhan sarana prasarana yang berstandar dalam mendukung pelaksanaan kegiatan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- Rencana Kerja

Tabel Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikator (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.2	Urusan Pemerintah an Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat		Prov/kab/Kota		12.863.647.600	APBD Prov. NTT			12.863.647.600
05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkatoran yang Berkualitas	Kota Kupang	100 %	12.863.647.600	APBD Prov. NTT		100 %	12.863.647.600
1.01	Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Tersedianya laporan capaian kinerja PD	Kota Kupang	49 dokumen	38.000.000	APBD Prov. NTT		49 dokumen	38.000.000
1.02	Administrasi keuangan pemerintah daerah	Terbayarnya gaji dan tunjangan	Kota Kupang	4 laporan	11.032.449.000	APBD Prov. NTT		4 laporan	11.032.449.000
1.06	Administrasi umum pemerintah daerah	Tersedianya kebutuhan operasional kantor	Kota Kupang	1 piket	80.000.000	APBD Prov. NTT		1 piket	80.000.000
1.07	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang	Kota Kupang	4 laporan	-			4 laporan	-
1.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Tersedianya kebutuhan jasa operasional kantor	Kota Kupang	4 laporan	968.025.600	APBD Prov. NTT		4 laporan	968.025.600
1.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Terpeliharanya barang milik daerah yang menjadi aset	Kota Kupang	4 laporan	113.600.000	APBD Prov. NTT		4 laporan	113.600.000
05.02	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Presentase meningkatnya pencapaian SPM trantibum	Kota Kupang	100 %	624.600.000	APBD Prov. NTT		Kota Kupang	624.600.000
1.01	Penanganan gangguan ketenteraman ddan ketertiban umum lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi	Terselenggaranya kegiatan penertiban, pengamanan, pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patrol turjawali dalam rangka trantibum	Kabupaten/kota	12 laporan	524.600.000	APBD Prov. NTT	Mengkoordinir layanan SPM	12 laporan	524.600.000
1.02	Penegakan peraturan daerah provinsi dan peraturan gubernur	Presentase meningkatnya pencapaian SPM trantibum (jumlah perda dan perkara yang ditegakan)	Kota Kupang	12 laporan	90.000.000	APBD Prov. NTT	Mengkoordinir layanan SPM	12 laporan	90.000.000
1.03	Pembinaan penyidik pegawai negeri sipil	Kegiatan pengembangan kapasitas PPNS	Kota Kupang	2 laporan	10.000.000	APBD Prov. NTT	Mengkoordinir layanan SPM	2 laporan	10.000.000

05.04	Program Pencegahan Penanggulangan Peyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Presentase pencegahan daerah berpotensi rawan kebakaran	Kota Kupang	100 %	7.000.000			100 %	7.000.000
1.01	Peyelenggaran pemetaan rawan bencana kebakaran	Peta daerah rawan kebakaran	Kota Kupang	4 laporan	7.000.000	APBD Prov. NTT	Mengkoordinir layanan SPM	4 laporan	7.000.000

Dalam implementasi rencana kerja, seluruh program dan kegiatan diarahkan untuk mewujudkan penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dengan mengoptimalkan seluruh bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam bentuk penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sehingga dapat menciptakan kondisi yang aman dan tentram.

B. Program Dan Kegiatan Tahun 2024.

Program dan Kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur seluruh pendanaanya bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan anggaran belanja dan Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun 2024 antara lain :

1. Belanja Daerah/Belanja Operasi.

1. Belanja Daerah/Operasi Rp. 13.121.680.880.- kegiatan ini terdiri dari

1.1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :

1.1.1 Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

1.1.1.1 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

1.1.2 Administrasi Keuangan Pemerintah Daerah.

1.1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

1.1.3 Administrasi Umum Perangkat Daerah Daerah.

1.1.3.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

1.1.3.2 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.

1.1.3.3 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.

1.1.3.4 Penyediaan Bahan Material.

1.1.3.5 Fasilitas Kunjungan tamu.

1.1.3.6 Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.1.3.7 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

- 1.1.4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - 1.1.4.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
 - 1.1.4.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik.
 - 1.1.4.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.1.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - 1.1.5.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
 - 1.1.5.2 Pemeliharaan Aset Tetap lainnya.
 - 1.1.5.3 Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya.

1.2. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- 1.2.1 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi :
 - 1.2.1.1 Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan.
 - 1.2.1.2 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
 - 1.2.1.3 Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi.
 - 1.2.1.4 Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
 - 1.2.1.5 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
 - 1.2.1.6 Pencegahan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini, Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan,

dan Pengawalan.

1.2.1.7 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja Melalui Pelatihan Teknis Termasuk dalam Pelaksanaan tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia.

1.2.1.8 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa.

1.2.2 Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur.

1.2.2.1 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.

1.2.2.2 Pengawasan atas kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.

1.2.2.3 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.

1.2.3 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi.

1.2.3.1 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS

1.3. Program Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran :

1.3.1 Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran.

1.3.1.1 Penyusunan dan Pemutahiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran.

1.3.1.2 Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran

C. Realisasi Anggaran

Dalam periode tahun 2024 tersedia pagu anggaran sesuai Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran sebesar Rp. 13.121.680.880.- (tiga belas miliar seratus dua puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) berikut kondisi atau keadaan kas sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024 yang telah

dipertanggungjawabkan secara fungsional oleh bendahara Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur pada badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DANKETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	13.121.680.880	7.556.181.299	57.59
01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	12.266.580.880	7.210.419.118	58.78
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Relaisasi Kinerja SKPD	38.000.000	14.818.000	38.99
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.032.449.000	6.429.195.615	58.28
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.032.449.000	6.429.195.615	58.28
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	80.000.000	50.716.563	63.40
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	1.159.280	23.19
	- Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	25.000.000	16.811.100	67.24
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.000.000	1.750.000	87.50
	- Penyediaan Bahan/Material	20.000.000	11.567.007	57.84
	- Fasilitas Kunjungan Tamu	5.000.000	4.998.000	99.96
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.000.000	4.531.176	90.62
	- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	18.000.000	9.900.000	55.00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	997.031.880	637.653.331	63.96
	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.400.000	1.400.000	100
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.000.000	3.646.400	36.46
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	985.631.880	632.606.931	64.18
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	119.100.000	78.035.609	65.52
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	70.000.000	59.433.609	84.91
	- Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	19.100.000	7.067.000	37.00
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.000.000	11.535.000	38.45

02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	848.100.000	345.762.181	40.77
	Penanganan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Provinsi	748.100.000	304.422.181	50.69
	- Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	2.500.000	-	-
	- Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	1.500.000	-	-
	- Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	150.000.000	37.710.000	25.14
	- Penyediaan Layanan Dasar Dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	75.000.000	-	-
	- Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5.000.000	-	-
	- Pencegahan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan masyarakat Melalui deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	333.100.000	181.345.381	54.44
	- Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja Melalui Pelatihan Teknis Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	131.000.000	53.399.800	40.76
	- Penindakan atas Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	50.000.000	31.967.000	63.93
	Penegakan Peraturan daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	90.000.00	36.340.000	40.38
	- Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	5.000.000	-	-
	- Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	70.000.000	32.600.000	46.57
	- Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	15.000.000	3.740.000	24.93

	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	10.000.000	5.000.000	50.00
	- Pengembangan Kapasitas dan Karir PPNS	10.000.000	5.000.000	50.00
03	PROGRAM PENCEGAHAN PENANGGULANGAN PENYELEMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	7.000.000	-	-
	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	7.000.000	-	-
	- Penyusunan dan Pemuktahiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	5.000.000	-	-
	- Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	2.000.000	-	-
	Jumlah Realisasi sampai dengan Agustus	13.121.680.880	7.556.181.299	57.59

Kondisi atau keadaan kas per 31 Agustus 2024

Pada tabel diatas dapat disampaikan bahwa capaian progres fisik dan keuangan pada Bulan Agustus 2024 sebesar Rp. 7.556.181.299.- (tujuh miliar lima ratus lima puluh enam juta seratus delapan puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah) atau 57.59 % dari Total pagu sebesar Rp. 13.121.680.880.- (tiga belas miliar seratus dua puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).

BAB III

HASIL PELAKSANAAN

Dalam Periode sampai dengan bulan Agustus 2024 dimana rutin dilaksanakan dengan hasil capaian pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut :

A. Bidang Kesekretariatan.

1. Sub Bagian Program Data dan Evaluasi.

Capaian pelaksanaan tugas antara lain adalah :

1. Laporan Bulanan Bulan Agustus 2024.
2. Laporan e-monev Bulan Agustus Tahun 2024.
3. Menghadiri Undangan Rapat Komisi I DPRD Provinsi NTT.
4. Menghadiri Asistensi oleh Itjen Kemendagri terkait Materi Capaian Kinerja Capaian Kinerja Pj. Gubernur Provinsi NTT Triwulan IV.
5. Menghadiri undangan Workshop Penyusunan Program dan Indikator OPD Provinsi (Cross Cutting Penanggulangan Bencana).
6. Menghadiri Kegiatan Perubahan Renstra PENYELARASAN Indikator Program Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Sub Bagian Keuangan.

1. Mengajukan SPP Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), Tambah Uang (TU) dan Gaji PNS (LS).
2. Menyusun SPJ Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), Tambah Uang (TU) dan Gaji PNS (LS).
3. Membuat laporan SPJ Fungsional dan laporan Pertanggungjawaban atas belanja SKPD.
4. Membuat Laporan Keuangan SKPD.
5. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh atasan.

3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.

- Kepegawaian

No.	Uraian Program / Kegiatan	Jumlah
1	Membuat laporan bulanan	1 lap
2	Membagi beras bagi ASN	101 ASN
3	Membuat rekapan kehadiran anggota piket proses honor piket	45 keg
4	Membuat konfersi jabatan pelaksanaan	1 berkas
5	Menyelesaikan surat koordinasi	1 berkas
6	Mengikuti rapat koordinasi dengan instansi terkait	2 keg
7	Menyelesaikan administrasi pembinaan disiplin PNS	2 berkas
8	Mengikuti rapat internal bersama Kasat	6 kali
9	Pengambilan data SPM disesa Linamnutu dan Kelapalima	2 keg
10	Mengikuti rapat paripurna DPRD Provinsi NTT	3 keg
11	Menyelesaikan surat tugas	3 surat
12	Membuat surat kenaikan berkala dan perubahan gaji	6 surat
13	Menerima surat masuk bulan agustus Tahun 2024	46 surat
14	Menerima surat keluar bulan Agustus Tahun 2024	41 surat
15	Menerima undangan yang masuk Agustus 2024	26 undangan
16	Menyalurkan surat masuk pada atasan	30 surat
17	Menyalurkan surat masuk ke bidang sesuai disposisi	30 surat
18	Membuat berkala	11 orang

- Umum

No.	U r a i a n	Jumlah
1.	Jumlah Surat Masuk bulan Agustus 2024	46 surat
2.	Jumlah Surat Keluar bulan Agustus 2024	41 surat
3.	Jumlah undangan yang masuk bulan Agustus 2024	26 surat

- Perlengkapan

Uraian Program/Kegiatan	Jumlah/ Keterangan
Mengatur Cleaning Service untuk membersihkan ruang kantor	Setiap Hari

**B. Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
Bulan Agustus 2024.**

KEGIATAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DAN PERATURAN GUBERNUR
MELALUI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENINDAKAN

No	Tanggal	Kegiatan	Tempat	Jumlah yang dibina/diawasi	Jumlah yang Ditindak (orang)	Ket
1	23 Agustus 2024	Melakukan penanganan atas aksi unjuk rasa dari kelompok mahasiswa dan mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus yang menuntut perberlakuan Putusan Nakhkama Konstitusi Nomor 60 dan 70 tentang ambang batas Calon Kepala Daerah, massa kurang lebih 100 orang	Kantor DPRD Provinsi NTT dan Kantor KPU Provinsi NTT	100	0	1. Penjabat Ketua Cabang GMNI Kupang : Yohannes Klau. 2. Ketua GMKI Cabang Kupang : Frits Tae 3. Ketua HMI Cabang Kupang : Muhamad Ali Paokuma
2	23 Agustus 2024	Melakukan pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Perda dan Perkada serta melakukan pembinaan kepada anggota Turjawali di 5 Pos Piket	Posko Praja, Pos RJ Gubernur, Pos RJ Wagub, Pos RJ Sekda, Pos sasando	15	0	-

KEGIATAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DAN PERATURAN GUBERNUR
PENINDAKAN ATAS GANGGUAN TRANTIBUM BERDASARKAN PERDA/PERKADA MEMALUI PENERTIBAN DAN PENANGANAN AKSI UNJUK RASA DAN KERUSUHAN MASA

No	Tanggal	Kegiatan	Tempat	Jumlah yang dibina/diawasi	Jumlah yang Ditindak (orang)	Ket
1						
2						

KEGIATAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DAN PERATURAN GUNERNUR
PENGADUAN MASYARAKAT

No	Tanggal Terima	Nomor surat/tanggal surat masuk/Hal	Isi Laporan Pengaduan	Tindak Lanjut	Keterangan
1					

DATA PELANGARAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN GUBERNUR

No	No Surat/ Tanggal Surat Masuk/ Hal	Pelanggara Perda/Pergub	Perda yang Dilanggar	Tindak Lanjut	Keterangan
1					

1. Sub Kegiatan : Sosialisasi Penegakan Perda dan Pergub

No	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa	Ket
			Rp	%		
1	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sosialisasi Penegakan Perda dan Pergub	5.000.000.-	-	-	5.000.000.-	-
	Jumlah				5.000.000.-	-

2. Sub Kegiatan : Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan perda ddan pergub “operaso DBHCHT (rokok ilegal)

No	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa	Ket
			Rp	%		
1	Belanja Bahan Cetak	1,360.000.-	680.000.-	50	680.000.-	-
2	Belanja Makan minum rapat	16.960.000.-	6.080.000.-	36	10.880.000.-	
3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (uang harian transport lokal)	51.680.000.-	25.840.000.-	50	25.840.000.-	
	Jumlah				37.400.000.-	-

3. Sub Kegiatan : Penyediaan Layanan Dasar Dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada

No	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa	Ket
			Rp	%		
1	Belanja Operasi	75.000.000.-	-	-	75.000.000.-	-
2	Belanja pakai habis	15.300.000.-	-	-	15.300.000.-	
3	Belanja Jasa Kantor	28.128.000.-	-	-	28.128.000.-	
	Jumlah				15.000.000.-	-

4. Sub Kegiatan : Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur sesuai SOP

No	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa	Ket
			Rp	%		
1	Belanja Operasi	15.000.000.-	-	-	15.000.000.-	-
2	Belanja/alat bahan untuk kantor kegiatan ATK	40.000.-	-	50	40.000.-	
3	Belanja perjalanan dlam kota 22 orang x 4 kali	14.960.000.-	7.480.000.-	50	7.520.000.-	

5. Sub Kegiatan : Pengembangan Kapasitas dan Karir PPNS

No	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa	Ket
			Rp	%		
1	Belanja Operasi	10.000.000.-	5.000.000.0	50	5.000.000.-	-
2	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor bahan cetak	400.000.-	200.000.-	50	200.000.-	
3	Belanja makan minum peserta rapat	3.400.000.-	1.800.000.-	50	1.800.000.-	
3	Belanja perjalanan dinas dalam kota (transportasi peserta rapat teknis PPNS)	6.000.000.-	3.000.000.-	50	3.000.000.-	

C. Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Bulan Agustus 2024

No	Jenis Pengamanan	Jumlah Pengamanan		Masalah	Pemecahan Masalah	Instansi Terkait	Keterangan
		Lokasi Kegiatan	Bulan				
1	2	3	4	6	7	8	9
01.	Melakukan pengamanan dalam rangka Rapat Paripurna	Kantor DPRD Prov. NTT	1 x kegiatan 01 Agustus 2024	-	-	DPRD Prov. NTT	20 orang al. Plt Kasat, Kabid, Kasi Ops, HK dan anggota Pol PP
02.	Melakukan pengamanan jamuan makan malam Pj. Gubermur NTT bersama Kepala Staf Angkatan Laut	Aula Rumah Jabatan Gubernur NTT	1 x kegiatan 08 Agustus 2024	-	-	Unsur terkait	19 orang al. Plt Kasat, Plh Kabid Tibum, Kasi Ops, Kasi HK dan anggota
03.	Melakukan pengamanan dalam rangka dalam rangka kegiatan penganugerahan tanda kehormatan satya lencana karya satya 10, 20, 30 tahun bagi ASN lingkup Pemprov. NTT	Aula Eltari Kupang	1 x kegiatan 08 Agustus 2024	-	-	OPD lingkup Pemprov. NTT	20 orang al. Plt Kasat, Plh Kabid Tibum, Kasi Ops dan anggota
04.	Melakukan pengamanan aksi unjuk rasa/ demonstrasi dari mahasiswa terkait penolakan Rektor IAKN Kupang dari luar NTT (jumlah pendemo 30 orang)	Kantor DPRD Prov. NTT	1 x kegiatan 12 Agustus 2024	-	-	DPRD Prov. NTT	35 orang al. Plt Kasat, Plh Kabid Tibum, Kasi Ops dan anggota
05.	Mengikuti/menghadiri rapat pemantapan persiapan peringatan HUT RI ke 79 Tahun 2024 tingkat Provinsi NTT	Ruang Rapat Assisten Gedung Sasando lantai 2	1 x kegiatan 09 Agustus 2024	-	-	Unsur terkait	Kasi HK
06.	Melakukan pengamanan dalam rangka rapat paripurna	Kantor DPRD Prov. NTT	1 x kegiatan 13 Agustus 2024	-	-	DPRD Prov. NTT	35 orang al. Plt Kasat, Plh Kabid Tibum, Kasi Ops dan anggota
07.	Melakukan pengamanan dalam rangka rapat paripurna	Kantor DPRD Prov. NTT	1 x kegiatan 14 Agustus 2024	-	-	OPD Lingkup Pemprov. NTT dan Unsur terkait	20 orang al. Plt Kasat, Plh Kabid Tibum, Kasi Ops dan anggota
08.	Mengikuti gladi resik dalam upacara memperingati HUT ke 79 Kemerdekaan RI Tingkat Provinsi NTT Tahun 2024	Alun-alun Rumah Jabatan Gubernur NTT	1 x kegiatan 15 Agustus 2024	-	-	BKD Prov. NTT	29 orang al. Plt Kasat, Plh Kabid Tibum, Kasi Ops dan anggota

09.	Melakukan pengamanan dan mengikuti upacara detik-detik Proklamasi memperingati HUT ke 79 Kemerdekaan RI Tingkat Provinsi NTT Tahun 2024	Alun-alun Rumah Jabatan Gubernur NTT	2 x kegiatan 17 Agustus 2024	-	-	OPD Lingkup Pemprov. NTT dan Unsur terkait	69 orang al. Plt Kasat, Plh Kabid Tibum, Kasi Ops dan anggota
10.	Memperingati upacara renungan suci dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan RI Tingkat Provinsi NTT Tahun 2024	TMP Dharmalika Pasing Panjang Kupang	1 x kegiatan 17 Agustus 2024	-	-	OPD Lingkup Pemprov. NTT dan Unsur terkait	14 orang al. Plt Kasat, Plh Kabid Tibum, Kasi Ops dan anggota
11.	Melakukan pengamanan dan mengikuti upacara penurunan bendera memperingati HUT Kemerdekaan RI Tingkat Provinsi NTT Tahun 2024	Alun-alun Rumah Jabatan Gubernur NTT	2 x kegiatan 17 Agustus 2024	-	-	OPD Lingkup Pemprov. NTT dan Unsur terkait	69 orang al. Plt Kasat, Plh Kabid Tibum, Kasi Ops dan anggota
12.	Mengikuti rapat bersama Kasat Pol PP	Aula Satpol PP	1 x kegiatan 19 Agustus 2024	-	-	Seluruh Pejabat Strural dan Anggota	Semua Anggota Satpol PP
13.	Melakukan pengamanan pelepasan kontingen NTT menuju PON XXI/2024 di Aceh Sumatera Utara	Aula El Tari Kupang	1 x kegiatan 20 Agustus 2024	-	-	Unsur Terkait	20 orang al. Plt Kasat, Plh Kabid Tibum, Kasi Ops dan anggota
14.	Melakukan pengamanan dalam rangka Rapat Paripurna	Kantor DPRD Prov. NTT	1 x kegiatan 21 Agustus 2024	-	-	DPRD Provinsi NTT	20 orang al. Plt Kasat, Plh Kabid Tibum, Kasi Ops dan anggota
15.	Melakukan pengamanan dalam rangka rapat paripurna	Kantor DPRD Prov. NTT	1 x kegiatan 22 Agustus 2024	-	-	DPRD Provinsi NTT	20 orang al. Plt Kasat, Plh Kabid Tibum, Kasi Ops dan anggota
16.	Melakukan pengamanan aksi unjuk rasa/ demonstrasi dari mahasiswa (Jumlah pendemo : 35 orang)	Kantor DPRD dan KPU Prov. NTT	1 x kegiatan 23 Agustus 2024			Polda NTT	35 orang al. Plt Kasat, Plh Kabid Tibum, Kasi Ops dan anggota
17.	Mengikuti gladi apel gelar pasukan operasi mantap praja turangga 2024 NTT dalam rangka pelaksanaan pilkada serempak Tahun 2024	Lapangan Polda NTT	1 x kegiatan 24 Agustus 2024			TNI, Polda dan unsure terkait	23 orang al. Plt Kasat, Plh Kabid Tibum, Kasi Ops dan anggota
18.	Melakukan pengamanan pelantikan Pj. Walikota Kupang	Aula El Tari Kupang	1 x kegiatan 24 Agustus 2024			Biro Tata Pem Stda Provinsi NTT	35 orang al. Plt Kasat, Plh Kabid Tibum, Kasi Ops dan anggota
19.	Mengikuti pelaksanaan apel gelar pasukan operasi mantap praja turangga 2024 NTT dalam rangka pengamanan Pilkada serentak Tahun 2024	Lapangan Polda NTT	1 x kegiatan 08 Agustus 2024			TNI, Polda dan unsure terkait	23 orang al. Plt Kasat, Plh Kabid Tibum, Kasi Ops dan anggota

20	Melakukan pengamanan dalam rangka rapat paripurna	Kantor DPRD dan KPU Prov. NTT	2 x kegiatan 26 Agustus 2024			DPRD Prov. NTT	20 orang al. Plt Kasat, Plh Kabid Tibum, Kasi Ops dan anggota
21	Mengikuti Pembinaan rohani bersama ASN lingkup Pemprov NTT dari 4 Tokoh Agama	Aula El Tari Kupang	1 x kegiatan 30 Agustus 2024			BKD Setda Provinsi NTT	seluruh ASN Satpol PP
22	Melakukan pengamanan Kupang Exotic Run 2024 dalam rangka lomba lari 5K, 10K dan Festifal Jass	Jln Raya El Tari dan Kantor Gubernur NTT	1 x kegiatan 31 Agustus 2024			Dispora dan Unsur Terkait	30 orang al. Plt Kasat, Plh Kabid Tibum, Kasi Ops dan anggota
23	Melakukan penjagaan dan pengamanan aset milik Pemprov. NTT	Kantor Gubernur sasando, Rujab Gubernur, Rujab Wagub, Rujab Sekda, dan Kantor Satpol PP	1 x kegiatan tanggal 31 x 24 Jam	-	-	5 Pos Piket	Jumlah personil. 62 anggota al. 15 danru, 30 anggota piket, 4 anggota patwal dan 13 anggota pengawas/pengontrol

D. Bidang Sumber Daya Aparatur (SDA)

Dalam Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran SKPD (DPPA) Satpol PP Tahun Anggaran 2024 urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sub kegiatan khusus bidang SDA dengan alokasi dana untuk belanja Rp. 131.000.000.- Kegiatan Kapasitas SDM Satpol PP dan Satlinmas termaksud dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

No	Uraian Program/Kegiatan	Pagu Anggaran Rp.	Realisasi Keuangan Rp	Realisasi Fisik %	Sisa
1	2	3	4	5	6
1	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas SDM dan Pelatihan Kesamaptaan	56.000.000	53.399.800 (95.35 %)	100	2.600.200
2	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	75.000.000	-	-	-
	Total Pengeluaran s/d Agustus 2024	131.000.000	53.399.800	40.76	77.600.200

E. Bidang Linmas

Program/Kegiatan

Dalam Tahun Anggaran 2024 Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Provisini Nusa Tenggara Timur mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 12.000.000.- dengan rincian :

No	Uraian Program/Kegiatan	Pagu Anggaran Rp.	Realisasi Keuangan Rp	Realisasi Fisik %	Sisa
1	2	3	4	5	6
1	Penyusunan dan Pemuktahiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kabakaran	5.000.000	-	-	-
2	Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	2.000.000	-	-	-
3	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Trantibum	5.000.000			
	Total Pengeluaran s/d Agustus 2024	12.000.000	-	-	-

Pemasalahan :

Permasalahan yang dihadapi pada Bidang Linmas adalah :

- Belum efektifnya pelaksanaan program kegiatan Bidang Linmas karena alokasi anggaran yang sangat minim dan tidak menjawab program/kegiatan Tahun Anggaran 2024.
- Belum efektifnya permasalahan bersama tentang pelaksanaan program/kegiatan di kabupaten/kota se Provinsi NTT berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang peyelenggaraan program kegiatan.

Upaya Pemecahan :

- Meningkatkan pemahaman bersama tentang tugas fungsi dan kewenangan Satuan Polisi Pamomg Praja Prov. NTT dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
- Meningkatkan pemahaman dalam penyeragaman bersama tentang program/kegiatan berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang program dan kegiatan.

Berikut data personil pemadam kebakaran dan Linmas pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur :

Data Pemadam Kebakaran Di Provinsi NTT

No.	Nama kabupaten/Kota	JumlahPersonil	Keterangan
1.	Kota Kupang	2.410	Dalam struktur Organisasi Sat. PolPP Kota Kupang tidak terakomodir Bidang Pemadam Kebakaran karena telah ada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Kupang
2.	Kabupaten Kupang	2.152	
3.	Kabupaten TTS	2.758	
4.	Kabupaten TTU	1.548	
5.	Kabupaten Belu	1.550	
6.	Kabupaten Malaka	1.340	
7.	Kabupaten Alor	894	
8.	Kabupaten Rote Ndao	630	
9.	Kabupaten Sabu Raijua	276	
10.	Kabupaten Lembata	1.569	
11.	Kabupaten Flores Timur	1.070	
12.	Kabupaten Sikka	1.010	
13.	Kabupaten Ende	1.966	
14.	Kabupaten Ngada	1.018	
15.	Kabupaten Nagekeo	1.386	
16.	Kabupaten Manggarai	1.940	
17.	Kabupaten Manggarai Timur	1.186	
18.	Kabupaten Manggarai Barat	1.616	
19.	Kabupaten Sumba Timur	516	
20.	Kabupaten Sumba Tengah	810	
21.	Kabupaten Sumba Barat	1.816	
22.	Kabupaten Sumba Barat Daya	864	
TOTAL		31.325	

Data Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Provinsi NTT

No.	Nama kabupaten/Kota	Jumlah			Jumlah	Ket
		Kec	Kel	Desa		
1.	Kota Kupang	6	51	-	51	
2.	Kabupaten Kupang	24	160	171	2.890	
3.	Kabupaten TTS	32	12	266	6.950	
4.	Kabupaten TTU	24	147	33	1.764	
5.	Kabupaten Belu	12	12	69	1.399	
6.	Kabupaten Malaka	12	127	127	1.337	
7.	Kabupaten Alor	18	175	-	1.283	
8.	Kabupaten Rote Ndao	11	7	113	1.725	
9.	Kabupaten Sabu Raijua	5	5	62	2.083	
10.	Kabupaten Lembata	9	7	125	1.872	
11.	Kabupaten Flores Timur	19	-	251	1.569	
12.	Kabupaten Sikka	21	13	151	2.537	
13.	Kabupaten Ende	21	23	255	1.073	
14.	Kabupaten Nagekeo	7	16	97	684	
15.	Kabupaten Ngada	12	206	206	1.236	
16.	Kabupaten Manggarai	11	26	162	5.678	
17.	Kabupaten Manggarai Timur	9	17	159	4.680	
18.	Kabupaten Manggarai Barat	12	5	169	1.386	
19.	Kabupaten Sumba Barat	12	11	131	2.445	
20.	Kabupaten Sumba Barat Daya	5	11	74	1.480	
21.	Kabupaten Sumba Tengah	6	6	65	1.300	
22.	Kabupaten Sumba Timur	22	17	180	2.056	
TOTAL		310	1.081	2.866	47.478	

BAB IV

PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT

A. Permasalahan

Permasalahan yang ditemui dalam pencapaian target kinerja bulan Agustus antara lain :

1. Pelaksanaan capaian kinerja yang terlambat.
2. Ganti Uang (GU) yang terlambat.

B. Tindak Lanjut.

Melakukan konsultasi dan rapat bersama pimpinan serta melakukan pendekatan dengan Badan Keuangan Daerah terkait pencairan anggaran untuk membiayai kegiatan.

BAB V PENUTUP

Laporan kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban hasil pelaksanaan program dan kegiatan bulan Agustus 2024, semoga apa yang telah disampaikan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur kedepan dalam rangka menciptakan ketenteraman dan ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat.

Akhir kata diucapkan terimakasih kepada semua pihak dalam lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sudah membantu dalam penyusunan laporan ini. Saran dan pendapat masih sangat dibutuhkan bagi kesempurnaan dari laporan ini.

Demikian laporan bulan Agustus Tahun 2024 disajikan atas perhatian diucapkan terima kasih.

Kupang, 06 September 2024

Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Nusa Tenggara Timur,



Ir. YOHANES OKTOVIANUS, MM

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19661029 199403 1 007

LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN APBD PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BULAN AGUSTUS 2024

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	SUMBER DANA	LOKASI KEGIATAN	SASARAN	KONDISI s/d BULAN SEBELUMNYA				REALISASI BULAN INI	KONDISI s/d BULAN INI				SISA ANGGARAN (Rp)	KET				
						TARGET		REALISASI			TARGET (%) FISIK	TARGET (%) KEU	REALISASI (%) FISIK	REALISASI (%) KEU						
						(%) FISIK	(%) KEU	Rp	(%) FISIK								(%) KEU	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
5.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	13.121.680.880				50,00	50,00	6.814.402.509	50,00	51,93	741.778.790	57,55	57,55	58,33	57,59	7.556.181.299	58,33	57,59	5.565.499.582	
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	12.266.580.880				50,00	50,00	6.504.393.328	50,00	53,03	706.025.790	58,47	58,47	58,33	58,78	7.210.419.118	58,33	58,78	5.056.165.762	
	PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	38.000.000				50,00	50,00	14.818.000	50,00	38,99	-	58,21	58,21	58,33	38,99	14.818.000	58,33	38,99	23.182.000	
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	38.000.000	DAU	Kota Kupang	SKPD	50,00	50,00	14.818.000	50,00	38,99	-	58,21	58,21	58,33	38,99	14.818.000	58,33	38,99	23.182.000	
	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	11.032.449.000				50,00	50,00	5.809.879.705	50,00	52,66	619.315.910	58,33	58,33	58,33	58,28	6.429.195.615	58,33	58,28	4.609.253.385	
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.032.449.000	DAU	Kota Kupang	SKPD	50,00	50,00	5.809.879.705	50,00	52,66	619.315.910	58,33	58,33	58,33	58,28	6.429.195.615	58,33	58,28	4.609.253.385	
	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	80.000.000	DAU	Kota Kupang	SKPD	50,00	50,00	47.849.863	50,00	59,81	2.866.700	65,15	65,15	58,38	62,40	50.718.563	58,38	62,40	28.288.427	
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	DAU	Kota Kupang	SKPD	50,00	50,00	1.159.280	50,00	23,19	-	70,00	70,00	58,33	23,19	1.159.280	58,33	23,19	3.840.750	
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.000.000	DAU	Kota Kupang	SKPD	50,00	50,00	15.404.400	50,00	61,62	1.406.700	58,34	58,34	58,33	67,24	16.811.100	58,33	67,24	8.188.000	
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.000.000	DAU	Kota Kupang	SKPD	50,00	50,00	1.390.000	50,00	69,50	360.000	58,30	58,30	58,33	87,50	1.790.000	58,33	87,50	250.000	
	- Penyediaan Bahan Material	20.000.000	DAU	Kota Kupang	SKPD	50,00	50,00	10.467.007	50,00	52,34	1.100.000	73,08	73,08	58,33	57,34	11.567.007	58,33	57,34	8.432.000	
	- Fasilitas Kunjungan Tamu	5.000.000	DAU	Kota Kupang	SKPD	50,00	50,00	4.998.000	50,00	99,96	-	70,00	70,00	58,33	99,96	4.998.000	58,33	99,96	3.000	
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.000.000	DAU	Kota Kupang	SKPD	50,00	50,00	4.531.176,00	50,00	90,62	-	60,00	60,00	58,33	90,62	4.531.176,00	58,33	90,62	688.824	
	- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	18.000.000	DAU	Kota Kupang	SKPD	50,00	50,00	9.900.000	50,00	55,00	-	65,28	65,28	58,33	105,00	9.900.000	58,33	105,00	8.100.000	
	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	997.031.880	DAU		SKPD	50,00	50,00	556.192.651	50,00	55,78	81.460.690	57,61	57,61	58,33	63,36	637.653.331	58,33	63,36	108.176.549	
	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.400.000	DAU	Kota Kupang	SKPD	50,00	50,00	1.400.000	50,00	100,00	-	75,00	75,00	58,33	100,00	1.400.000	58,33	100,00	-	
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.000.000	DAU	Kota Kupang	SKPD	50,00	50,00	3.058.200	50,00	30,58	568.200	49,00	49,00	58,33	58,46	3.446.400	58,33	58,46	6.353.400	
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	985.631.880	DAU	Kota Kupang	SKPD	50,00	50,00	551.734.451	50,00	55,96	80.872.480	57,67	57,67	58,33	64,38	632.908.931	58,33	64,38	103.024.549	
	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	119.100.000	DAU		SKPD	50,00	50,00	75.653.109	50,00	50,00	2.342.500	73,31	73,31	58,33	63,52	78.035.609	58,33	63,52	42.394.582	
	- Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	70.000.000	DAU	Kota Kupang	SKPD	50,00	50,00	58.383.609	50,00	83,41	1.050.000	68,22	68,22	58,33	84,51	58.433.829	58,33	84,51	10.288.582	
	- Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	19.100.000	DAU	Kota Kupang	SKPD	50,00	50,00	7.030.000	50,00	36,81	37.000	50,10	50,10	58,33	57,50	7.087.000	58,33	57,50	12.033.400	
	- Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.000.000	DAU	Kota Kupang	SKPD	50,00	50,00	10.239.500	50,00	34,13	1.295.500	100,00	100,00	58,33	58,45	11.539.000	58,33	58,45	18.460.500	

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	SUMBER DANA	LOKASI KEGIATAN	SASARAN	KONDISI 3/4 BULAN SEBELUMNYA						REALISASI BULAN INI	KONDISI 3/4 BULAN INI						SISA ANGGARAN (Rp)	KET					
						TARGET			REALISASI				Rp	10	11	TARGET		REALISASI			Rp	16	17	18	
						7	8	9	12	13	14					15	16								
																		(%) FISIK							(%) KEU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
	PROGRAM PENINGKATAN KETERTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	848.100.000	DAU	Kab/Kota	-	50,00	50,00	310.009.181	50,00	36,55	35.753.000	23,20	23,20	345.762.181	58,33	40,77	502.337.819								
	KETERTIBAN UMUM LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH	748.100.000	DAU	Kab/Kota	-	50,00	50,00	268.669.181	50,00	35,91	35.753.000	16,28	16,28	304.422.181	58,33	40,69	448.677.819								
	- Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	2.500.000	DAU	Kab/Kota		50,00	50,00		50,00	-	-	100,00	100,00		58,33	-	2.500.000								
	- Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketertaman Masyarakat	1.500.000	DAU	Kab/Kota		50,00	50,00		50,00	-	-	100,00	100,00		58,33	-	1.500.000								
	- Koordinasi Penyelenggaraan Ketertaman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	150.000.000	DAU	Kab/Kota		50,00	50,00	36.810.000	50,00	24,54	900.000	78,52	78,52	37.710.000	58,33	25,14	112.290.000								
	- Penyedia Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	75.000.000	DAU	Kab/Kota		50,00	50,00		50,00	-	-	100,00	100,00		58,33	-	75.000.000								
	- Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertaman dan Ketertiban Umum	5.000.000	DAU	Kab/Kota		50,00	50,00		50,00	-	-	100,00	100,00		58,33	-	5.000.000								
	- Pencegahan Gangguan Ketertaman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja Melalui Pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	333.100.000	DAU	Kab/Kota		50,00	50,00	151.395.381	50,00	45,45	29.950.000	54,59	54,59	181.345.381	58,33	54,44	151.754.619								
	- Pemertanian atas gangguan ketertaman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat - Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan	131.000.000	DAU			50,00	50,00	53.399.800	50,00	40,76	-	42,75	42,75	53.399.800	58,33	40,76	77.600.200								
	PENEGAKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DAN PERATURAN GUBERNUR	90.000.000	DAU	Kab/Kota		50,00	50,00	27.064.000	50,00	54,13	4.903.000	100,00	100,00	31.967.000	58,33	63,93	18.033.000								
	- Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	5.000.000				50,00	50,00		50,00	-	-	100,00	100,00		58,33	-	5.000.000								
	- Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	70.000.000				50,00	50,00	32.600.000	50,00	46,57	-	100,00	100,00	32.600.000	58,33	46,57	37.400.000								
	- Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	15.000.000	DAU	Kab/Kota		50,00	50,00	3.740.000	50,00	24,93	-	100,00	100,00	3.740.000	58,33	24,93	11.260.000								
	PEMBINAAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) PROVINSI	10.000.000				50,00	50,00	5.000.000	50,00	50,00	-	100,00	100,00	5.000.000	58,33	50,00	5.000.000								
	- Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	10.000.000				50,00	50,00	5.000.000	50,00	50,00	-	100,00	100,00	5.000.000	58,33	50,00	5.000.000								

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	SUMBER DANA	LOKASI KEGIATAN	SASARAN	KONDISI 1/12 BULAN SEBELUMNYA						REALISASI BULAN INI	KONDISI 1/12 BULAN INI						SISA ANGGARAN (Rp)	KET
						TARGET			REALISASI				TARGET			REALISASI				
						(% FISIK	(% KEU	Rp	(% FISIK	(% KEU	Rp		(% FISIK	(% KEU	Rp	(% FISIK	(% KEU	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN NON	7.000.000	DAU			50,00	50,00	-	50,00	-	-	100,00	100,00	-	-	66,67	-	7.000.000		
	PENYELENGGARAAN PEMETAAN RAWAN BENCANA KEBAKARAN	7.000.000	DAU			50,00	50,00	-	50,00	-	-	100,00	100,00	-	-	66,67	-	7.000.000		
	Penyusunan dan Pemuktahiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	5.000.000	DAU	Kab/Kota		50,00	50,00		50,00	-	-	100,00	100,00			66,67	-	5.000.000		
	Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	2.000.000	DAU	Kota Kupang		50,00	50,00		50,00	-	-	100,00	100,00			66,67	-	2.000.000		
	JUMLAH BELANJA	13.121.660.880				50,00	50,00	6.814.402.509	50,00	51,93	741.778.790	65,80	65,80	7.556.181.299	66,67	57,59	5.565.498.581			

Kupang, 06 September 2024



LAMPIRAN : DOKUMENTASI LAPORAN BULAN AGUSTUS 2024



Foto kegiatan pengamanan jamuan makan malam bersama Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana (TNI) Muhammad Ali di Provinsi NTT



Foto kegiatan rapat bersama Komisi I DPRD Provinsi NTT



Foto kegiatan Rapat Paripurna



Foto kegiatan Tabur Bunga memperingati HUT RI ke-79 tingkat Provinsi NTT di TMP Dharma Loka



Foto kegiatan mengikuti upacara memperingati HUT ke-79 Kemerdekaan RI tingkat Provinsi NTT Tahun 2024



Foto kegiatan pengamanan upacara memperingati HUT ke-79 Kemerdekaan RI tingkat Provinsi NTT Tahun 2024



Foto kegiatan hadiri Simulasi Pengamanan Pilkada



Foto kegiatan pengamanan demo di depan Kantor DPRD Provinsi NTT



Foto kegiatan Apel Gelar Pasukan Mantap Praja Turangga Provinsi NTT Tahun 2024



Foto kegiatan Exotic Run



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jln. Polisi Militer No. -Telp. (0380)-828090

Email : satpolpp_prov.ntt@Yahoo.com

Website : www.satpol-pp.nttprov.go.id

K U P A N G

11 Oktober 2024

Yth. - Kepala Bappelitbangda Provinsi NTT
- Kepala Badan Keuangan Daerah Setda
Provinsi NTT

SURAT PENGANTAR

Nomor : 000.1.5/751/sat pol pp 1.1

JENIS SURAT	JUMLAH	KETERANGAN
2	3	4
Laporan Bulan September Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024	1 (Satu) Buku	Dikirim untuk ditindak lanjuti

Demikian Laporan ini atas kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Plt. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

Drs. PETRUS SERAN TAHUK

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19701231 199101 1 005

Paraf Hirarki :	
Plh. Sekretaris	h
Kepala Subbag Program Data dan Evaluasi	p
Fungsional Ahli Muda	t



LAPORAN BULAN SEPTEMBER



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024

Jalan Polisi Militer Nomor 1, Telpon/Fax (0380) 828090
Email : satpolpp_prov.ntt@yahoo.com
Website : www.satpol-pp.nttprov.go.id

KUPANG



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur patut dipanjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena hanya atas penyertaan dan kasih-Nya maka Laporan Bulan September 2024 Tahun Anggaran 2024 Satuan Polisi Pamong Praja ini dapat diselesaikan dengan baik.

Tugas, fungsi dan wewenang Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah menjadi sangat penting yang mana terlaksananya berbagai kegiatan pengamanan dan penegakkan prodak hukum. Keadaan yang nyaman, aman dan tenteram diciptakan guna mendukung kinerja Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Untuk itu Laporan Bulan September Tahun Anggaran Tahun 2024 ini merupakan bahan, data dan informasi yang disusun secara baik, transparan dan dapat di pertanggungjawabkan kepada publik ataupun kepada pemangku kepentingan yang membutuhkan informasi terkait penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Kupang, 11 Oktober 2024

Plt. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR


Drs. PETRUS SERAN TAHUK
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19701231 199101 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Maksud dan Tujuan	3
D. SDM Satuan Polisi Pamong Praja	3
BAB II RENCANA KERJA TAHUNAN	12
A. Rencana Kerja Tahunan	12
B. Program dan Kegiatan Tahun 2024	16
C. Realisasi Anggaran	18
BAB III HASIL PELAKSANAAN	22
A. Sekretariat	22
B. Bidang Penegakan Perda dan Peraturan Gubernur	24
C. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	27
D. Bidang Sumber Daya Aparatur	30
E. Bidang Perlindungan Masyarakat	31
BAB IV PERMASALAHAN	34
A. Permasalahan	34
B. Tindak Lanjut	34
BAB V PENUTUP	35
- Laporan Keuangan	36
- Lampiran Foto/Dokumentasi	39

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu Perangkat Daerah yang di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Tugas Satuan Polisi Pamong Praja yakni membantu Kepala Daerah dalam memelihara Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan masyarakat, dan fungsinya sebagai berikut;

- a) Perumusan kebijakan di bidang Satuan Polisi Pamong Praja;
- b) Pelaksanaan kebijakan di bidang Satuan Polisi Pamong Praja;
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Satuan Polisi Pamong Praja;
- d) Pelaksanaan administrasi di bidang Satuan Polisi Pamong Praja;
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas dan fungsi yang telah dijabarkan diatas kemudian diuraikan dalam program dan kegiatan dimana sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 tentang Satuan Polisi pamong Praja melaksanakan urusan Pemerintahan Wajib berkaitan dengan Pelayanan Dasar dalam arti bahwa pelayanan yang diberikan oleh Satuan Polisi pamong Praja berkaitan dengan hak setiap warga masyarakat yang wajib diperoleh sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal.

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur berupaya agar mampu menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan bulan September 2024 laporan kinerja ini menggambarkan kinerja yang telah dilaksanakan, sehingga sangat diharapkan dapat bermanfaat bagi semua komponen yang terlibat dalam proses menciptakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat.

B. Dasar hukum

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian Cuti bagi Pegawai Negeri Sipil.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pakian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Satuan Polisi Pamong Praja;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Satuan Polisi Pamong Praja;
12. Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur.
13. Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (P-DPA-SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2024 Nomor : DPPA/A.1/1.05.0.00.0.00.01.0000/001/2024.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud.

Sebagai bahan pertanggungjawaban terhadap hasil pelaksanaan program dan kegiatan bulan September 2024.

2. Tujuan.

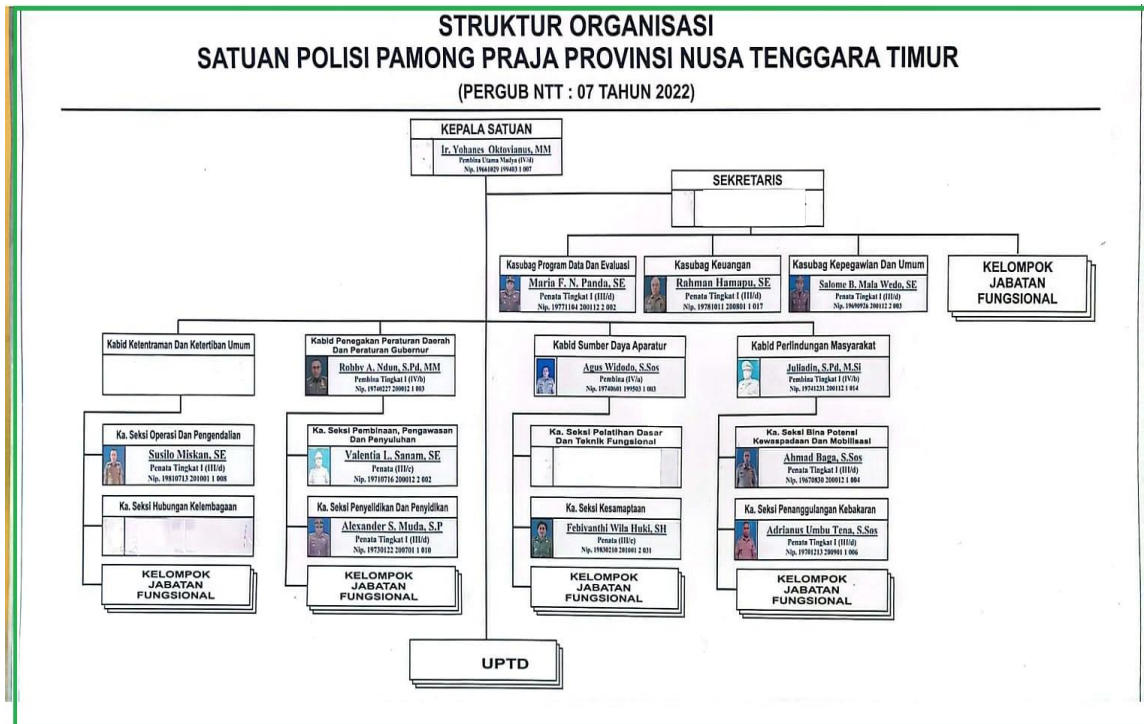
Untuk menghasilkan sebuah laporan kinerja bulanan yang menggambarkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT bulan September Tahun Anggaran 2024.

D. Sumber Daya Manusia (SDM) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 138 orang dengan rincian sebagai berikut:

a. Berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah (Orang)
1	2	3
1.	Kepala Satuan	1
2.	Sekretaris	-
3.	Kepala Bidang	3
4.	Kepala Seksi	7
5.	Kepala Sub Bagian	3
6.	Jabatan Fungsional	62
7.	Jabatan Fungsional Umum	23
8.	Honorar	29
Jumlah		128



b. Berdasarkan Jenis Kelamin

Jabatan Pegawai	Jenis Kelamin	
	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)
1	2	3
Kepala Satuan	1	
Sekretaris	-	
Kepala Bidang	3	
Kepala Seksi	5	2
Kepala Sub Bagain	1	2
Jabatan Fungsional	56	6
Pelaksana	16	7
Tenaga Honorer	18	11
Total Jumlah	100	28
	128 Orang	

c. Jumlah ASN Berdasarkan Pangkat/Golongan.

Rincian Kepangkatan/Golongan					Jumlah
Kepangkatan PNS	A	B	C	D	
Golongan IV	1	2	-	1	4 orang
Golongan III	12	23	8	15	58 orang
Golongan II	-	-	4	33	37 orang
Golongan I	-	-	-	-	- orang
Jumlah	13	25	22	49	99 orang

d. Berdasarkan Jenjang Pendidikan.

No.	Jenjang Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1.	Pasca Sarjana (S2)	4	-	4
2.	Sarjana (S1)	36	13	49
3.	Diploma (D3)	1	-	-
4.	SMA/SMU	41	5	46
Jumlah		81	18	99

e. Berdasarkan Agama.

No.	Data Keagamaan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1.	Islam	4	-	4
2.	Kristen	73	25	98
3.	Katholik	21	5	26
4.	Hindu	-	-	-
5.	Budha	-	-	-
Jumlah		98	30	128

Berikut dapat di sampaikan data pemberian cuti dan tindak disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur selama bulan September 2024 sesuai ketentuan yang berlaku

1. Cuti tahunan berdasarkan Kepangkatan/Golongan.

No.	Data Cuti Tahunan	Jumlah
1	2	3
1.	Golongan IV	-
2.	Golongan III	1
3.	Golongan II	-
Jumlah		1

2. Data Pegawai yang kena sanksi Kepegawaian :

No.	Data Pegawai Yang Kena Sanksi Kepegawaian	Jumlah
1	2	3
1.	Golongan IV	-
2.	Golongan III	-
3.	Golongan II	-
4.	Banpol	-
5.	Cleaning Service	-
Jumlah		-

Selain melaksanakan tugas Satuan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur juga juga melakukan penjagaan (piket) dalam rangka menjaga aset penting milik pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur adapun aset tersebut antara lain :

1. Pos Kantor Gubernur/Sasando.
2. Pos Rumah Jabatan Gubernur.
3. Rumah Jabatan Wakil Wakil Daerah.
4. Rumah Jabatan Sekretaris Daerah.
5. Posko Praja (Kantor Satpol PP).

Penjagaan pada tempat/lokasi jaga dibagi dalam 3 (tiga) sift, dimana masing-masing sift dibagi waktu selama 1 x 24 jam, mulai jam 08:00 pagi hingga jam 08:00 pagi berikutnya. Jadwal pelaksanaan piket diatur sesuai dengan surat keputusan Kepala satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur 2024 (terlampir).

E Sarana dan Prasarana

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam melaksanakan tugas yang diemban didukung dengan prasarana penunjang operasional kegiatan baik di kantor maupun dilapangan. Sarana Prasarana tersebut dicatat sebagai aset karena proses pengadaannya bersumber dari Dana Alokasi Umum yang dituangkan dalam dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur dari Tahun Anggaran 2003 sampai dengan tahun 2024 sebagai berikut :

Sarana Prasarana Pendukung

No	Jenis Nama Barang	Merk/Type/Bahan	Vol	Satuan	Keadaan Barang	Tahun Pengadaan
1.	Mobil Pic Up (DH 8059 AW)	Besi/Toyota Pic Up	1	Unit	B	2003
2	Meja Biro 4 Laci	Arinda/Olympic	1	Buah	B	2008
3	Meja Biro 4 Laci	Arinda/Olympic	1	Buah	B	2008
4	Lap Top/Toshiba	Metal	1	Buah	B	2008
5	Air Condition	Besi /National/ 1Pk	2	Buah	B	2008
6	Air Condition	Besi/Akira	1	Buah	B	2008
7	Mobil Truck (DH 8047 AW)	Besi/Isuzu	1	Unit	B	2009
8	Mobil Minibus (DH 196 AW)	Besi/Toyota Rush	1	Unit	B	2009
9	Lemari 2 Pintu	Kayu Jati	6	Buah	B	2009
10	Lap Top Azer	Metal	1	Buah	B	2009
11	Printer HP/Laser Jet	Metal	1	Buah	B	2009
12	Wireless	Tens	1	Buah	B	2009
13	Megaphone Toa	Besi	1	Buah	B	2009
14	Facsimile	Panasonic	1	Buah	B	2009
15	Televisi	Digitec	1	Buah	B	2009
16	Kain Horrden	Kain	1	Buah	B	2009
17	Lambang Garuda		2	Buah	B	2009
18	Tiang Bendera	Besi	1	Buah	B	2009

19	Papan Nama SKPD	Besi	1	Buah	B	2009
20	Sepeda Motor (DH 2843 AW)	Besi/Honda/ GL 200 R	1	Unit	B	2010
21	Sepeda Motor (DH 2844 AW)	Besi/Honda/ GL 200 R	1	Unit	B	2010
22	Sepeda Motor (DH 2845 AW)	Besi/Honda/ GL 200 R	1	Unit	B	2010
23	Trasmister UHF	Motorola GR500	1			2010
24	MejaKerja	Kayu	10	Buah	B	2011
25	KursiKerja	Kayu	10	Buah	B	2011
26	Lemari 2 Pintu	Kayu Jati	5	Buah	B	2011
27	Komputer PC Simbada	Metal	2	Buah	B	2011
28	Lap Top Toshiba/L745	Metal	2	Buah	B	2011
29	Printer Canon	Metal	5	Buah	B	2011
30	Handy Talkie	Motorola GP2000	5	Buah	B	2011
31	Handy Cam	Sony	1	Buah	B	2011
32	Alat Kejut Listrik	Metal	13	Buah	B	2011
33	Sound System	Rhoad	1	Buah	B	2011
34	Komputer PC Simbada	Metal	2	Buah	B	2012
35	Televisi	Multimax	1	Buah	B	2012
36	Televisi	Sharp	1	Buah	B	2012
37	Scaner	Metal	1	Buah	B	2012
38	Kasur Busa	Bigland	8	Buah	B	2012
39	LayarProyektor		1	Buah	B	2012
40	MejaPimpinan 4 Laci	Kayu	1	Buah	B	2013
41	MejaKerja	Kayu	6	Buah	B	2013
42	Lemari 2 Pintu	Kayu Jati	2	Buah	B	2013
43	Komputer PC Simbada	Metal	2	Buah	B	2013
44	Lap Top ToshibaL840	Metal	4	Buah	B	2013

45	Kamera Digital	Canon	1	Buah	B	2013
46	LayarProyektor		1	Buah	B	2013
47	Mobil Double Cabin (DH 8249 AW)	Besi/Toyota Hilux	1	Unit	B	2014
48	Sepeda Motor (DH 3953)	Besi/Kawasaki KLX 15	1	Unit	B	2014
49	Sepeda Motor (DH 3954)	Besi/ Kawasaki KLX 15	1	Unit	B	2014
50	Sepeda	Paragon	6	Buah	B	2014
51	Kursi Sofa	Busa	1	Buah	B	2014
52	Lemari 2 Pintu	Kayu Jati	2	Buah	B	2014
53	Kulkas	Besi/ Polytron	1	Buah	B	2014
54	UPS/Matsunaga	Metal	10	Buah	B	2014
55	Lap Top Lenovo B490	Metal	1	Buah	B	2014
56	Printer Canon MX 397	Metal	1	Buah	B	2014
57	Air Condition/	Besi Polytron	5	Buah	B	2014
58	Wirelesgenggam	Toa-ZR1015	4	Buah	B	2014
59	Televisi	Polytron	5	Buah	B	2014
60	Handy Talkie	Motorola A 12	40	Buah	B	2014
61	Antena, Rig, Repeater	Motorola CDR500	1	Buah	B	2014
62	Mesin Absen Elektronik	Secure	1	Buah	B	2014
63	Mesin Absen Elektronik	Secure	1	Buah	B	2014
64	Mesin Ketik	Brother	1	Buah	B	2014
65	Handy Cam	Sony	1	Buah	B	2014
66	MejaRapat	Kayu Jati	5	Buah	B	2015
67	Meja Biro 4 Laci	Kayu	1	Buah	B	2015
68	Meja 1/2 Biro, 2 Laci	Kayu	15	Buah	B	2015
69	KursiRapat	Busa/ /Master Chair	20	Buah	B	2015
70	KursiKerja	Kayu	21	Buah	B	2015

71	Lemari 2 Pintu	Kayu Jati	1	Buah	B	2015
72	Tempat Tidur Lipat	Metal	7	Buah	B	2015
73	Lap Top Toshiba C55	Metal	5	Buah	B	2015
74	Lap Top Asus X453MA	Metal	1	Buah	B	2015
75	Printer Canon	Metal	5	Buah	B	2015
76	Tirai/Gorden	Kain	2	Buah	B	2015
77	Mic & Tiang Mic	Shure & NVK	1	Buah	B	2015
78	Kamera Digital	Canon	1	Buah	B	2015
79	Senter	S.W.A.T XML-T6	7	Buah	B	2015
80	Lemari Arsip	Katyu	1	Buah	B	2016
81	Komputer PC	LG	1	Buah	B	2016
82	Printer	Canon MP280	1	Buah	B	2016
83	Air Condition	Polytron	4	Buah	B	2016
84	Dispenser		6	Buah	B	2016
85	Taplak Meja dan Vas Bunga	Kain	1	Buah	B	2017
86	Mesin Potong Rumput	Besi	1	Buah	B	2017
87	Linggis kuku kambing	Besi	5	Buah	B	2017
88	Meja Rapat	Kayu	3	Buah	B	2017
89	Meja 1/2 Biro	Kayu	6	Buah	B	2017
90	Kursi Rapat	Besi	50	Buah	B	2017
91	Lemari 3 Pintu	Kayu	2	Buah	B	2017
92	Dispenser standing	Besi	2	Buah	B	2017
93	Kamera Digital	Besi	1	Buah	B	2017
94	Papan Nama SKPD	Besi	1	Buah	B	2017
95	Komputer (hp AIQ)	Hp	6	Unit	B	2020
96	Printer	(Epson L3110)	6	Unit	B	2020
97	Lemari	Kayu	5	Unit	B	2020
98	Meja Kerja	Kayu	7	Unit	B	2020

99	Meja Rapat	Kayu	2	Unit	B	2020
100	Kursi Kerja	Kayu	7	Unit	B	2020
101	Wirlaes		1	Unit	B	2020
102	Papan Sekretariat PPNS		1	Unit	B	2020
103	Papan Struktur Organisasi 1		1	Unit	B	2020
104	Papan Struktur Organisasi 1		1	Unit	B	2020
105	Papan Visi Misi		1	Unit	B	2020
106	Papan Informasi		1	Unit	B	2020
107	Mesin Potong Rumput		1	Unit	B	2020
108	Alat Pengukur suhu (Termogram)		2	Buah	B	2021 (BTT)
109	Genset	Yamaha/Bensin	2	Unit	B	2021
110	Mobil Truck (DH 8279 WA)	Besi/Hino	1	Unit	B	2021
111	Mobil Hilux Double Cabin (DH 19)	Besi/Toyota Hilux	1	Unit	B	2021

BAB II

RENCANA KERJA TAHUNAN

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai urusannya dalam bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat memiliki langkah-langkah strategis dalam upaya mendukung program Kepala Daerah, Hal ini dijabarkan dalam rencana Program Kegiatan sebagai berikut :

A. Rencana Kinerja Tahunan.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar dalam Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.

Rencana Kerja Tahunan (RKT) disusun berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur yang Termuat dalam Rencana Strategis (Renstra) tahun 2024-2026 sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026 :

Indikator Kinerja Utama (KU) Tahun 2024
Satuan Polisi pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI	TARGET	FORMULAINDIKATOR
			2023	2024	
1	2	3	4	6	7
1	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1. Presentase meningkatnya pencapaian SPM Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	44,76%	100%	Jumlah kegiatan yang diselesaikan -----x 100 Target
		2. Presentase meningkatnya Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (jumlah Perda dan Perkada yang ditegakan)	3	3	Jumlah Penyelesaian Perda dan Perkada yang ditegakan -----x100 Jumlah Perda dan Perkada
		3. Presentase Pencegahan Daerah Rawan Kebakaran setiap Tahun	-	100 %	Data Potensi Daerah Rawan Kebakaran -----x100 Jumlah Wilayah

Dari tabel Rencana Kinerja Tahunan (RKT) diatas dapat diambil langkah strategis antara lain :

1. Membangun dan mengembangkan sinergitas dengan Instansi/ Unit/ Lembaga Hukum/ Masyarakat/ Stekholder terkait lainnya dalam melakukan pengendalian dalam rangka menciptakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
2. Membangun komunikasi yang secara berkala dalam melakukan diteksi dini dan cegah dini terhadap segala bentuk kegiatan yang berdampak pada adanya pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Dengan rumusan kebijakan yang telah ditetapkan antara lain :

1. Meningkatkan koordinasi antar Instansi/Unit Kerja/Lembaga Hukum yang tersebar dalam wilayah Nusa Tenggara Timur.
 2. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia.
 3. Pemenuhan sarana prasarana yang berstandar dalam mendukung pelaksanaan kegiatan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- Rencana Kerja

Tabel Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikator (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.2	Urusan Pemerintah an Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat		Prov/kab/Kota		12.863.647.600	APBD Prov. NTT			12.863.647.600
05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkatoran yang Berkualitas	Kota Kupang	100 %	12.863.647.600	APBD Prov. NTT		100 %	12.863.647.600
1.01	Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Tersedianya laporan capaian kinerja PD	Kota Kupang	49 dokumen	38.000.000	APBD Prov. NTT		49 dokumen	38.000.000
1.02	Administrasi keuangan pemerintah daerah	Terbayarnya gaji dan tunjangan	Kota Kupang	4 laporan	11.032.449.000	APBD Prov. NTT		4 laporan	11.032.449.000
1.06	Administrasi umum pemerintah daerah	Tersedianya kebutuhan operasional kantor	Kota Kupang	1 piket	80.000.000	APBD Prov. NTT		1 piket	80.000.000
1.07	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang	Kota Kupang	4 laporan	-			4 laporan	-
1.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Tersedianya kebutuhan jasa operasional kantor	Kota Kupang	4 laporan	968.025.600	APBD Prov. NTT		4 laporan	968.025.600
1.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Terpeliharanya barang milik daerah yang menjadi aset	Kota Kupang	4 laporan	113.600.000	APBD Prov. NTT		4 laporan	113.600.000
05.02	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Presentase meningkatnya pencapaian SPM trantibum	Kota Kupang	100 %	624.600.000	APBD Prov. NTT		Kota Kupang	624.600.000
1.01	Penanganan gangguan ketenteraman ddan ketertiban umum lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi	Terselenggaranya kegiatan penertiban, pengamanan, pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patrol turjawali dalam rangka trantibum	Kabupaten/kota	12 laporan	524.600.000	APBD Prov. NTT	Mengkoordinir layanan SPM	12 laporan	524.600.000
1.02	Penegakan peraturan daerah provinsi dan peraturan gubernur	Presentase meningkatnya pencapaian SPM trantibum (jumlah perda dan perkara yang ditegakan)	Kota Kupang	12 laporan	90.000.000	APBD Prov. NTT	Mengkoordinir layanan SPM	12 laporan	90.000.000
1.03	Pembinaan penyidik pegawai negeri sipil	Kegiatan pengembangan kapasitas PPNS	Kota Kupang	2 laporan	10.000.000	APBD Prov. NTT	Mengkoordinir layanan SPM	2 laporan	10.000.000

05.04	Program Pencegahan Penanggulangan Peyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Presentase pencegahan daerah berpotensi rawan kebakaran	Kota Kupang	100 %	7.000.000			100 %	7.000.000
1.01	Peyelenggaran pemetaan rawan bencana kebakaran	Peta daerah rawan kebakaran	Kota Kupang	4 laporan	7.000.000	APBD Prov. NTT	Mengkoordinir layanan SPM	4 laporan	7.000.000

Dalam implementasi rencana kerja, seluruh program dan kegiatan diarahkan untuk mewujudkan penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dengan mengoptimalkan seluruh bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam bentuk penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sehingga dapat menciptakan kondisi yang aman dan tentram.

B. Program Dan Kegiatan Tahun 2024.

Program dan Kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur seluruh pendanaanya bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan anggaran belanja dan Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun 2024 antara lain :

1. Belanja Daerah/Belanja Operasi.

1. Belanja Daerah/Operasi Rp. 13.121.680.880.- kegiatan ini terdiri dari

1.1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :

1.1.1 Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

1.1.1.1 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

1.1.2 Administrasi Keuangan Pemerintah Daerah.

1.1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

1.1.3 Administrasi Umum Perangkat Daerah Daerah.

1.1.3.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

1.1.3.2 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.

1.1.3.3 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.

1.1.3.4 Penyediaan Bahan Material.

1.1.3.5 Fasilitas Kunjungan tamu.

1.1.3.6 Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.1.3.7 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

- 1.1.4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - 1.1.4.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
 - 1.1.4.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik.
 - 1.1.4.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.1.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - 1.1.5.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
 - 1.1.5.2 Pemeliharaan Aset Tetap lainnya.
 - 1.1.5.3 Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya.

1.2. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- 1.2.1 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi :
 - 1.2.1.1 Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan.
 - 1.2.1.2 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
 - 1.2.1.3 Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi.
 - 1.2.1.4 Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
 - 1.2.1.5 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
 - 1.2.1.6 Pencegahan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini, Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan,

dan Pengawalan.

1.2.1.7 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja Melalui Pelatihan Teknis Termasuk dalam Pelaksanaan tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia.

1.2.1.8 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa.

1.2.2 Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur.

1.2.2.1 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.

1.2.2.2 Pengawasan atas kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.

1.2.2.3 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.

1.2.3 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi.

1.2.3.1 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS

1.3. Program Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran :

1.3.1 Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran.

1.3.1.1 Penyusunan dan Pemutahiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran.

1.3.1.2 Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran

C. Realisasi Anggaran

Dalam periode tahun 2024 tersedia pagu anggaran sesuai Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran sebesar Rp. 13.121.680.880.- (tiga belas miliar seratus dua puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) berikut kondisi atau keadaan kas sampai dengan tanggal 30 September 2024 yang telah dipertanggung

jawabkan secara fungsional oleh bendahara Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur pada badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DANKETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	13.121.680.880	8.339.168.321	63.55
01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	12.266.580.880	7.931.508.140	64.66
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Relaisasi Kinerja SKPD	38.000.000	24.928.000	65.60
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.032.449.000	7.051.548.961	63.92
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.032.449.000	7.051.548.961	63.92
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	80.000.000	55.445.663	69.31
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	1.159.280	23.19
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.000.000	17.690.200	70.76
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.000.000	1.750.000	87.50
	- Penyediaan Bahan/Material	20.000.000	12.317.007	61.59
	- Fasilitas Kunjungan Tamu	5.000.000	4.998.000	99.96
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.000.000	4.531.176	90.62
	- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	18.000.000	13.000.000	72.00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	997.031.880	716.658.171	71.88
	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.400.000	1.400.000	100
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.000.000	3.646.400	36.46
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	985.631.880	711.611.771	72.20
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	119.100.000	82.927.345	69.63
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	70.000.000	63.379.845	90.54
	- Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	19.100.000	7.467.000	39.09
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.000.000	12.080.500	40.27

02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	848.100.000	407.660.181	48.07
	Penanganan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Provinsi	748.100.000	346.280.181	46.29
	- Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	2.500.000	-	-
	- Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	1.500.000	-	-
	- Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	150.000.000	37.710.000	25.14
	- Penyediaan Layanan Dasar Dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	75.000.000	-	-
	- Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5.000.000	-	-
	- Pencegahan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan masyarakat Melalui deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	333.100.000	221.203.381	63.41
	- Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja Melalui Pelatihan Teknis Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	131.000.000	53.399.800	40.76
	- Penindakan atas Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	50.000.000	43.967.000	87.93
	Penegakan Peraturan daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	90.000.00	56.380.000	62.64
	- Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	5.000.000	-	-
	- Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	70.000.000	48.900.000	69.86
	- Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	15.000.000	7.480.000	49.87

	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	10.000.000	5.000.000	50.00
	- Pengembangan Kapasitas dan Karir PPNS	10.000.000	5.000.000	50.00
03	PROGRAM PENCEGAHAN PENANGGULANGAN PENYELEMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	7.000.000	-	-
	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	7.000.000	-	-
	- Penyusunan dan Pemuktahiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	5.000.000	-	-
	- Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	2.000.000	-	-
	Jumlah Realisasi sampai dengan Agustus	13.121.680.880	8.339.168.321	63.55

Kondisi atau keadaan kas per 30 September 2024

Pada tabel diatas dapat disampaikan bahwa capaian progres fisik dan keuangan pada Bulan September 2024 sebesar Rp. 8.339.168.321.- (delapan miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta seratus enam puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah) atau 63.55 % dari Total pagu sebesar Rp. 13.121.680.880.- (tiga belas miliar seratus dua puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).

BAB III

HASIL PELAKSANAAN

Dalam Periode sampai dengan bulan September 2024 dimana rutin dilaksanakan dengan hasil capaian pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut :

A. Bidang Kesekretariatan.

1. Sub Bagian Program Data dan Evaluasi.

Capaian pelaksanaan tugas antara lain adalah :

1. Laporan Bulanan Bulan September 2024.
2. Laporan Triwulan III Tahun 2024.
3. Laporan e-monev Bulan September Tahun 2024.
4. Laporan pengisian Self Assesment Quisioner (SAQ)
5. Laporan permohonan informasi dadn kegiatan pada Dokumen RUED Provinsi NTT
6. Laporan hasil reuiu pengujian atas kelengkapan dokumen pendukung
7. Pemberitahuan penilaian keterbukaan informasi publik lingkup Pemprov. NTT dari Komimfo Provinsi NTT
8. Laporan hasil reuiu perubahan RKA-SKPD Satpol PP Provinsi. NTT
9. Menghadiri Undangan Rapat SPM di Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi NTT
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Sub Bagian Keuangan.

1. Mengajukan SPP Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), Tambah Uang (TU) dan Gaji PNS (LS).
2. Menyusun SPJ Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), Tambah Uang (TU) dan Gaji PNS (LS).
3. Membuat laporan SPJ Fungsional dan laporan Pertanggungjawaban atas belanja SKPD.
4. Membuat Laporan Keuangan SKPD.
5. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh atasan.

3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.

- Kepegawaian

No.	Uraian Program / Kegiatan	Jumlah
1	Membuat laporan bulan September 2024	1 lap
2	Membuat pembagian jatah beras bulan September bagi ASN	99 ASN
3	Membuat rekapan kehadiran anggota piket proses honor piket	45 lap
4	Menerima surat masuk bulan September 2024	30 surat
5	Memberi honor surat keluar bulan September 2024	39 surat
6	Menerima surat undangan bulan bulan September 2024	17 undangan
7	Mendistribusikan surat yang telah disposisi ke bidang	30 surat
8	Membuat usulan perubahan kenaikan gaji berkala dan perubahan	4 ASN
9	Memproses usulan cuti ASN	3 ASN
10	Melakukan penilaian kinerja ASN bulan Agustus 2024	8 ASN
11	Mengikuti rapat koordinasi SPM dengan Kabupaten/ Kota Kupang	1 keg
12	Mengikuti rapat pembukaan anggaran di Badan Keuangan	1 keg
13	Mengikuti rapat internal bersama seluruh anggota	3 keg
14	Menyiapkan administrasi serah terima jabatan Kasat	2 dok
15	Menyiapkan dan mengatur acara serah terima jabatan	2 keg
16	Membuat SK Tim SPBE Satpol PP	1 berkas
17	Mengikuti rapat persiapan dan operasi DBH-CHT	2 keg
18	Mengikuti rapat paripurna DPRD Provinsi NTT	1 keg
19	Memproses surat tugas	1 surat
20	Membuat surat pengaktifan kembali satu ASN atas nama I Gede Gatot Subrata	1 surat
21	Membuat rekapan kehadiran anggota piket	1 keg
22	Membuat rekapan kehadiran tenaga honor	1 rek
23	Membuat SK kelas jabatan	2 SK
24	Membuat SK kondisi kerja	2 SK
25	Membuat SK beban kerja	2 SK
26	Membuat SK prestasi kerja	2 SK
27	Membuat Form D (per jabatan)	2 berkas

28	Membuat rekomendasi jumlah kelas jabatan	2 berkas
29	Membuat data konfersi jabatan sesuai aturan terbaru	49 jabatan
30	Mengisi dan merubah peta jabatan sesuai SOPTK terbaru Satpol PP	89 jabatan
31	Mengapload dalam system informasi TPP dan SK bersama lampiran	16

- Umum

No.	U r a i a n	Jumlah
1.	Jumlah Surat Masuk bulan September 2024	30 surat
2.	Jumlah Surat Keluar bulan September 2024	39 surat
3.	Jumlah undangan yang masuk bulan September 2024	17 surat

- Perlengkapan

Uraian Program/Kegiatan	Jumlah/ Keterangan
Mengatur Cleaning Service untuk membersihkan ruang kantor	Setiap Hari

**B. Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
Bulan September 2024.**

**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
PENANGANAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) PROVINSI**

Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi		Sisa	Ket
		Rp	%		
PENANGANAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI	175.000.000	61.380.000	35	113.620.000	

SOSIALISASI PENEGAKAN PERDA DAN PERGUB

Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi		Sisa	Ket
		Rp	%		
Belanja Operasi	5.000.000	-	-	5.000.000	
Belanja makanan dan minuman rapat sosialisasi Penegakan Perda dan Pergub	5.000.000	-	-	5.000.000	
J u m l a h		-		-	

PENGAWASAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PELAKSANAAN PERDA DAN PERGUB “OPERASI DBH-CHT (ROKOK ILEGAL)”

Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi		Sisa	Ket
		Rp	%		
Belanja Operasi	70.000.000	48.900.000	70	21.100.000	
Belanja bahan cetak	1.360.000	1.020.000	75	340.000	
Belanja makan minum rapat	16.960.000	9.120.000	54	7.840.000	
Belanja perjalanan dalam kota (uang harian transportasi lokal)	51.680.000	38.760.000	75	12.920.000	
J u m l a h		48.900.000	70	21.100.000	

PENYEDIAAN LAYANAN DASAR DALAM RANGKA DAMPAK PENEGAKAN PERDA DAN PERGUB

Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi		Sisa	Ket
		Rp	%		
Belanja Operasi	75.000.000	-	-	75.000.000	
Belanja Habis Pakai	31.572.000	-	-	31.572.000	
Belanja Jasa Kantor	15.300.000	-	-	15.300.000	
Belanja perjalanan dinas dalam negeri	28.128.000	-	-	28.128.000	
J u m l a h		-	-	75.000.000	

PENANGANAN ATAS PELANGGARAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN GUBERNUR SESUAI SOP

Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi		Sisa	Ket
		Rp	%		
Belanja Operasi	15.000.000	7.480.000	50	7.520.000	
Belanja alat/bahan untuk kantor kegiatanh ATK	40.000	-	-	40.000	
Belanja perjalanan dinas dalam kota 22 orang x4 kali	14.960.000	7.480.000	50	7.480.000	
J u m l a h		7.480.000	-	7.520.000	

PENGEMBANGAN KAPASITAS DAN KARIER PPNS

Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi		Sisa	Ket
		Rp	%		
Belanja Operasi	10.000.000	5.000.000	50	5.000.000	
Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor – bahan cetak	400.000	200.000	50	200.000	
Belanja makan minum peserta rapat	3.600.000	1.800.000	50	1.800.000	
Belanja perjalanan dinas dalam kota (Transpotasi peserta rapat teknis PPNS)	6.000.000	3.000.000	50	3.000.000	
J u m l a h		-	-	5.000.000	

C. Ketenteraman dan KetertibanUmum.

Bulan September 2024

No	Jenis Pengamanan	Jumlah Pengamanan		Masalah	Pemecahan Masalah	Instansi Terkait	Keterangan
		Lokasi Kegiatan	Bulan				
1	2	3	4	6	7	8	9
01.	Melakukan pengamanan gladi dalam rangka pelaksanaan Peresmian Pengambilan Sumpah Janji Anggota DPRD Prov. NTT	Kantor DPRD Prov. NTT	1 x kegiatan 02 September 2024	-	-	DPRD Prov. NTT	15 orang al. Plt Kasat, Kabid, Kasi Ops, dan anggota Pol PP
02.	Melakukan pengamanan dalam rangka pelaksanaan Peresmian Pengambilan Sumpah Janji Anggota DPRD Prov. NTT	Kantor DPRD Prov. NTT	1 x kegiatan 03 September 2024	-	-	DPRD Prov. NTT	40 orang al. Plt Kasat, Kabid, Kasi Ops, dan anggota Pol PP
03.	Mengikuti Ibadah Syukur bersama Pastor	Aula Satpol PP	1 x kegiatan 06 September 2024	-	-	-	Semua Anggota Satpol PP
04.	Melakukan Pengamanan Gladi Pelantikan Penjabat Bupati Sumba Barat Daya	Aula El Tari Kupang	1 x kegiatan 07 September 2024	-	-	Biro Tata Pem Setda Prov. NTT	15 orang al. Plt Kasat, Kabid, Kasi Ops, dan anggota Pol PP
05.	Melakukan Pengamanan Pelantikan Bupati Sumba Barat Daya	Aula El Tari Kupang	1 x kegiatan 08 September 2024	-	-	Biro Tata Pem Setda Prov. NTT	30 orang al. Plt Kasat, Kabid, Kasi Ops, dan anggota Pol PP
06.	Melakukan Pengamanan Syukuran Pelantikan Penjabat Bupati Sumba Barat Daya	Aula El Tari Kupang	1 x kegiatan 08 September 2024	-	-	Keluarga	30 orang al. Plt Kasat, Kabid, Kasi Ops, dan anggota Pol PP
07.	Melakukan pengamanan dan mengikuti Apel bersama ASN lingkup Pemprov. NTT	Kantor Gubernur Prov. NTT	1 x kegiatan 09 September 2024	-	-	Semua OPD lingkup Pemprov. NTT	25 orang al. Plt Kasat, Kabid, Kasi Ops, dan anggota Pol PP
08.	Mengikuti nonton bareng bersama dalam rangka Mensosialisasikan Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024	Bioskop Lipo Plaza Kupang	1 x kegiatan 10 September 2024	-	-	OPD lingkup Pemprov. NTT dan Unsur Terkait	2 orang al. (Ince dan Ita)
09.	Mengikuti Apel memperingati Hari Perhubungan Nasional Tk. Provinsi NTT sekaligus disatukan dengan Aple Kesadaran Lingkup Pemprov. NTT	Terminal Tipe A Bimoku	1 x kegiatan 17 September 2024	-	-	OPD lingkup Pemprov. NTT dan Unsur Terkait	8 orang al. Plt Kasat, Kabid, Kasi Ops, dan anggota Pol PP
10.	Mengikuti Upacara Penerimaan SATGASPUR Yonif 74/Garuda Nusantara dalam rangka Tugas Operasi Pamtas RI-RDTL Periode September 2024 s/d September 2025	Lantamal Kupang	1 x kegiatan 17 September 2024	-	-	Lantamal dan usur terkait	6 orang al. Plt Kasat, Kabid, Kasi Ops, dan anggota Pol PP

11.	Rapat bersama Plt. Kasat	Aula satpol PP	2 x kegiatan 18 September 2024	-	-	-	Semua Anggota Pol PP
12.	Mengikuti upacara penerimaan SATGASPUR Yonif 74/Garuda Nusantara dalam rangka Tugas Operasi Pamantas RI-RDTL Periode September 2024-September 2025	Lantamal Kupang	1 x kegiatan 17 September 2024	-	-	Lantamal dan usur terkait	6 orang al. Plt Kasat, Kabid, Kasi Ops, dan anggota Pol PP
13.	Mengikuti rapat persiapan memperingati Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2024 Tingkat Provinsi. NTT	Ruang Rapat As. Sekda Prov. NTT	1 x kegiatan 19 September 2024	-	-	Unsur terkait	Kasi Ops. Dan Plh Kasi HK (Idel)
14.	Melakukan Pengamanan sekaligus operasi DBH-CHT (Rokok Ilegal)	Kabupaten Kupang (Tarus-Noebaki)	1 x kegiatan 24 September 2024	-	-	Bea Cukai	20 orang al. Plt Kasat, Kabid, Kasi Ops, dan anggota Pol PP
15.	Melakukan pengamanan pelantikan Pj. Sementara Bupati Malaka, Sumba Timur, Sumba Barat, Ngada dan manggarai Barat	Aula El tari Kupang	1 x kegiatan 24 September 2024	-	-	Biro Tata Pem. Setda. Prov. NTT	30 orang al. Plt Kasat, Kabid, Kasi Ops, dan anggota Pol PP
16	Melakukan pengamanan aksi unjuk rasa/ demonstrasi dari mahasiswa dan masyarakat Bessipae (jumlah pendemo : 100 orang)	Kantor Gubernur dan kantor DPRD Prov. NTT	1 x kegiatan 24 September 2024	-	-	TNI dan Polri	30 orang al. Plt Kasat, Kabid, Kasi Ops, dan anggota Pol PP
17	Mengikuti kegiatan Latihan Posko tatap muka II Korem 161 Wirasakti	Korem 161 Wirasakti	1 x kegiatan 26 September 2024	-	-	Korem 161 Wirasakti	5 orang al. Plh. Kabid, Kasi Ops, dan anggota
18	Mengikuti Pembinaan Rohani secara Virtual dari 4 tokoh agama	Aula Satpol PP	1 x kegiatan 27 September 2024	-	-	BKD Prov. NTT	Semua Anggota SATpol PP
19	Melakukan pengamanan rapat PARIPURNA	Kantor DPRD Prov. NTT	1 x kegiatan 27 September 2024	-	-	DPRD Prov. NTT	20 orang al. Plt Kasat, Plh Kabid Tibum, Kasi Ops dan anggota
20	Mengikuti kegiatan deklarasi netralisasi ASN/TNI/POLRI pada Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2024 di Prov. NTT	Hotel Aston	1 x kegiatan 30 September 2024	-	-	TNI, Polri dan Unsur terkait	5 orang al. Plt Kasat, Plh Kabid Tibum, Kasi Ops dan anggota
21	Mengikuti dan Menghadiri undangan apel gelar pasukan pengamanan dalam rangka kunker Presiden RI dan Rombongan ke Wilayah NTT	Korem 161 Wirasakti	1 x kegiatan 30 September 2024	-	-	Korem 161 Wirasakti	4 orang al. Plt Kabid, Kasi Ops, Moses dan Rudy

22	Melakukan penjagaan dan pengamanan aset milik Pemprov. NTT	Kantor Gubernur sasando, Rujab Gubernur, Rujab Wagub, Rujab Sekda, dan Kantor Satpol PP	1 x kegiatan tanggal 31 x 24 Jam	-	-	5 Pos Piket	Jumlah personil. 62 anggota al. 15 danru, 30 anggota piket, 4 anggota patwal dan 13 anggota pengawas/pengontrol
----	--	---	----------------------------------	---	---	-------------	---

D. Bidang Sumber Daya Aparatur (SDA)

Dalam Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran SKPD (DPPA) Satpol PP Tahun Anggaran 2024 urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sub kegiatan khusus bidang SDA dengan alokasi dana untuk belanja Rp. 131.000.000.- Kegiatan Kapasitas SDM Satpol PP dan Satlinmas termaksud dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

No	Uraian Program/Kegiatan	Pagu Anggaran Rp.	Realisasi Keuangan Rp	Realisasi Fisik %	Sisa
1	2	3	4	5	6
1	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas SDM dan Pelatihan Kesamaptaan	56.000.000	53.399.800 (95.35 %)	100	2.600.200
2	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	75.000.000	-	-	-
	Total Pengeluaran s/d September 2024	131.000.000	53.399.800	40.76	77.600.200

E. Bidang Linmas

Program/Kegiatan

Dalam Tahun Anggaran 2024 Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 12.000.000.- dengan rincian :

No	Uraian Program/Kegiatan	Pagu Anggaran Rp.	Realisasi Keuangan Rp	Realisasi Fisik %	Sisa
1	2	3	4	5	6
1	Penyusunan dan Pemuktahiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kabakaran	5.000.000	-	-	-
2	Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	2.000.000	-	-	-
3	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Trantibum	5.000.000			
	Total Pengeluaran s/d September 2024	12.000.000	-	-	-

Pemasalahan :

Permasalahan yang dihadapi pada Bidang Linmas adalah :

- Belum efektifnya pelaksanaan program kegiatan Bidang Linmas karena alokasi anggaran yang sangat minim dan tidak menjawab program/kegiatan Tahun Anggaran 2024.
- Belum efektifnya permasalahan bersama tentang pelaksanaan program/kegiatan di kabupaten/kota se Provinsi NTT berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang peyelenggaraan program kegiatan.

Upaya Pemecahan :

- Meningkatkan pemahaman bersama tentang tugas fungsi dan kewenangan Satuan Polisi Pamomg Praja Prov. NTT dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
- Meningkatkan pemahaman dalam penyeragaman bersama tentang program/kegiatan berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang program dan kegiatan.

Berikut data personil pemadam kebakaran dan Linmas pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur :

Data Pemadam Kebakaran Di Provinsi NTT

No.	Nama kabupaten/Kota	JumlahPersonil	Keterangan
1.	Kota Kupang	2.410	Dalam struktur Organisasi Sat. PolPP Kota Kupang tidak terakomodir Bidang Pemadam Kebakaran karena telah ada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Kupang
2.	Kabupaten Kupang	2.152	
3.	Kabupaten TTS	2.758	
4.	Kabupaten TTU	1.548	
5.	Kabupaten Belu	1.550	
6.	Kabupaten Malaka	1.340	
7.	Kabupaten Alor	894	
8.	Kabupaten Rote Ndao	630	
9.	Kabupaten Sabu Raijua	276	
10.	Kabupaten Lembata	1.569	
11.	Kabupaten Flores Timur	1.070	
12.	Kabupaten Sikka	1.010	
13.	Kabupaten Ende	1.966	
14.	Kabupaten Ngada	1.018	
15.	Kabupaten Nagekeo	1.386	
16.	Kabupaten Manggarai	1.940	
17.	Kabupaten Manggarai Timur	1.186	
18.	Kabupaten Manggarai Barat	1.616	
19.	Kabupaten Sumba Timur	516	
20.	Kabupaten Sumba Tengah	810	
21.	Kabupaten Sumba Barat	1.816	
22.	Kabupaten Sumba Barat Daya	864	
TOTAL		31.325	

Data Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Provinsi NTT

No.	Nama kabupaten/Kota	Jumlah			Jumlah	Ket
		Kec	Kel	Desa		
1.	Kota Kupang	6	51	-	51	
2.	Kabupaten Kupang	24	160	171	2.890	
3.	Kabupaten TTS	32	12	266	6.950	
4.	Kabupaten TTU	24	147	33	1.764	
5.	Kabupaten Belu	12	12	69	1.399	
6.	Kabupaten Malaka	12	127	127	1.337	
7.	Kabupaten Alor	18	175	-	1.283	
8.	Kabupaten Rote Ndao	11	7	113	1.725	
9.	Kabupaten Sabu Raijua	5	5	62	2.083	
10.	Kabupaten Lembata	9	7	125	1.872	
11.	Kabupaten Flores Timur	19	-	251	1.569	
12.	Kabupaten Sikka	21	13	151	2.537	
13.	Kabupaten Ende	21	23	255	1.073	
14.	Kabupaten Nagekeo	7	16	97	684	
15.	Kabupaten Ngada	12	206	206	1.236	
16.	Kabupaten Manggarai	11	26	162	5.678	
17.	Kabupaten Manggarai Timur	9	17	159	4.680	
18.	Kabupaten Manggarai Barat	12	5	169	1.386	
19.	Kabupaten Sumba Barat	12	11	131	2.445	
20.	Kabupaten Sumba Barat Daya	5	11	74	1.480	
21.	Kabupaten Sumba Tengah	6	6	65	1.300	
22.	Kabupaten Sumba Timur	22	17	180	2.056	
TOTAL		310	1.081	2.866	47.478	

BAB IV

PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT

A. Permasalahan

Permasalahan yang ditemui dalam pencapaian target kinerja bulan September antara lain :

1. Pelaksanaan capaian kinerja yang terlambat.
2. Ganti Uang (GU) yang terlambat.

B. Tindak Lanjut.

Melakukan konsultasi dan rapat bersama pimpinan serta melakukan pendekatan dengan Badan Keuangan Daerah terkait pencairan anggaran untuk membiayai kegiatan.

BAB V PENUTUP

Laporan kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban hasil pelaksanaan program dan kegiatan bulan September 2024, semoga apa yang telah disampaikan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur kedepan dalam rangka menciptakan ketenteraman dan ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat.

Akhir kata diucapkan terimakasih kepada semua pihak dalam lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sudah membantu dalam penyusunan laporan ini. Saran dan pendapat masih sangat dibutuhkan bagi kesempurnaan dari laporan ini.

Demikian laporan bulan September Tahun 2024 disajikan atas perhatian diucapkan terima kasih.

Kupang, 11 Oktober 2024

Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Nusa Tenggara Timur, /


Drs. PETRUS SERAN TAHUK
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19701231 199101 1 005

LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN APBD PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BULAN SEPTEMBER 2024

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	SUMBER DANA	LOKASI KEGIATAN	SASARAN	KONDISI s/d BULAN SEBELUMNYA					REALISASI BULAN INI	KONDISI s/d BULAN INI					SISA ANGGARAN (Rp)	KET	
						TARGET		REALISASI				TARGET		REALISASI					
						(%) FISIK	(%) KEU	Rp	(%) FISIK	(%) KEU		(%) FISIK	(%) KEU	Rp	(%) FISIK	(%) KEU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERUNDUNGAN MASYARAKAT	13.121.680.880				50,00	50,00	7.556.181.299	57,59	57,59	782.987.022	73,83	73,83	8.339.168.321	63,55	63,55	4.782.512.559		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	12.266.580.880				50,00	50,00	7.210.419.118	58,78	58,78	721.089.022	75,13	75,13	7.931.508.140	64,66	64,66	4.335.072.740		
	PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	38.000.000				50,00	50,00	14.818.000	38,99	38,99	10.110.000	71,14	71,14	24.928.000	65,60	65,60	13.072.000		
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	38.000.000	DAU	Kota Kupang	SKPD	50,00	50,00	14.818.000	38,99	38,99	10.110.000	71,14	71,14	24.928.000	65,60	65,60	13.072.000		
	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	11.032.449.000				50,00	50,00	6.429.195.615	58,28	58,28	622.353.346	75,00	75,00	7.051.548.961	63,92	63,92	3.980.900.099		
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.032.449.000	DAU	Kota Kupang	SKPD	50,00	50,00	6.429.195.615	58,28	58,28	622.353.346	75,00	75,00	7.051.548.961	63,92	63,92	3.980.900.099		
	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	80.000.000	DAU		SKPD	50,00	50,00	50.716.563	63,40	63,40	4.729.100	83,33	83,33	55.445.663	69,31	69,31	24.554.337		
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	DAU	Kota Kupang	SKPD	50,00	50,00	1.159.280	23,19	23,19	-	90,00	90,00	1.159.280	23,19	23,19	3.840.720		
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.000.000	DAU	Kota Kupang	SKPD	50,00	50,00	16.811.100	67,24	67,24	879.100	75,00	75,00	17.690.200	70,76	70,76	7.309.800		
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.000.000	DAU	Kota Kupang	SKPD	50,00	50,00	1.750.000	87,50	87,50	-	75,30	75,30	1.750.000	87,50	87,50	250.000		
	- Penyediaan Bahan Material	20.000.000	DAU	Kota Kupang	SKPD	50,00	50,00	11.567.007	57,84	57,84	750.000	92,66	92,66	12.317.007	61,59	61,59	7.482.993		
	- Fasilitas Kunjungan Tamu	5.000.000	DAU	Kota Kupang	SKPD	50,00	50,00	4.998.000	99,96	99,96	-	90,00	90,00	4.998.000	99,96	99,96	2.000		
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.000.000	DAU	Kota Kupang	SKPD	50,00	50,00	4.531.176,00	90,62	90,62	-	80,00	80,00	4.531.176,00	90,62	90,62	468.824		
	- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	18.000.000	DAU	Kota Kupang	SKPD	50,00	50,00	9.900.000	55,00	55,00	3.100.000	82,64	82,64	13.000.000	72,22	72,22	5.000.000		
	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	997.031.880	DAU		SKPD	50,00	50,00	637.653.331	63,96	63,96	79.004.840	74,39	74,39	716.658.171	71,88	71,88	288.378.708		
	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.400.000	DAU	Kota Kupang	SKPD	50,00	50,00	1.400.000	100,00	100,00	-	75,00	75,00	1.400.000	100,00	100,00	-		
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.000.000	DAU	Kota Kupang		50,00	50,00	3.646.400	36,46	36,46	-	63,00	63,00	3.646.400	36,46	36,46	6.353.600		
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	985.631.880	DAU	Kota Kupang	SKPD	50,00	50,00	632.606.931	64,18	64,18	79.004.840	74,51	74,51	711.611.771	72,30	72,30	274.025.128		
	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	119.100.000	DAU		SKPD	50,00	50,00	78.035.609	50,00	50,00	4.891.736	89,34	89,34	82.927.345	68,83	68,83	36.172.655		
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	70.000.000	DAU	Kota Kupang	SKPD	50,00	50,00	59.433.609	84,91	84,91	3.946.236	85,07	85,07	63.178.845	90,54	90,54	6.820.155		
	- Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	19.100.000	DAU	Kota Kupang	SKPD	50,00	50,00	7.067.000	37,00	37,00	400.000	88,22	88,22	7.467.000	38,26	38,26	11.633.000		
	- Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.000.000	DAU	Kota Kupang		50,00	50,00	11.535.000	38,45	38,45	545.500	100,00	100,00	12.080.500	40,17	40,17	17.915.500		

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	SUMBER DANA	LOKASI KEGIATAN	SASARAN	KONDISI s/d BULAN SEBELUMNYA					REALISASI BULAN INI	KONDISI s/d BULAN INI					SISA ANGGARAN (Rp)	KET	
						TARGET		REALISASI				TARGET		REALISASI					
						(%) FISIK	(%) KEU	Rp	(%) FISIK	(%) KEU		(%) FISIK	(%) KEU	Rp	(%) FISIK	(%) KEU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	848.100.000	DAU	Kab/Kota	-	50,00	50,00	345.762.181	40,77	40,77	61.898.000	27,00	27,00	407.660.181	48,07	48,07	440.438.819		
	PENANGANAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI	748.100.000	DAU	Kab/Kota	-	50,00	50,00	304.422.181	40,69	40,69	41.858.000	20,59	20,59	346.280.181	46,29	46,29	401.819.819		
	- Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	2.500.000	DAU	Kab/Kota		50,00	50,00		-	-	-	100,00	100,00		-	-	2.500.000		
	- Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	1.500.000	DAU	Kab/Kota		50,00	50,00		-	-	-	100,00	100,00		-	-	1.500.000		
	- Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	150.000.000	DAU	Kab/Kota		50,00	50,00	37.710.000	25,14	25,14	-	100,00	100,00	37.710.000	25,14	25,14	112.290.000		
	- Penyedia Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	75.000.000	DAU	Kab/Kota		50,00	50,00		-	-	-	100,00	100,00		-	-	75.000.000		
	- Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Keteriban Umum	5.000.000	DAU	Kab/Kota		50,00	50,00		-	-	-	100,00	100,00		-	-	5.000.000		
	- Pencegahan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	333.100.000	DAU	Kab/Kota		50,00	50,00	181.345.381	54,44	54,44	29.858.000	72,76	72,76	211.203.381	63,41	63,41	121.896.619		
	- Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja Melalui Pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernaung Hak Asasi Manusia	131.000.000	DAU			50,00	50,00	53.399.800	40,76	40,76	-	100,00	100,00	53.399.800	40,76	40,76	77.600.200		
	- Penindakan atas Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	50.000.000	DAU	Kab/Kota		50,00	50,00	31.967.000	63,93	63,93	12.000.000	100,00	100,00	43.967.000	87,93	87,93	6.033.000		
	PENEGAKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DAN PERATURAN GUBERNUR	90.000.000	DAU			50,00	50,00	36.340.000	40,38	40,38	20.040.000	100,00	100,00	36.380.000	62,64	62,64	23.620.000		
	- Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	5.000.000				50,00	50,00		-	-	-	100,00	100		-	-	5.000.000		
	- Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	70.000.000				50,00	50,00	32.600.000	46,57	46,57	16.300.000	100,00	100,00	48.300.000	69,00	69,00	21.700.000		
	- Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	15.000.000	DAU	Kab/Kota		50,00	50,00	3.740.000	24,93	24,93	3.740.000	100,00	100,00	7.480.000	49,87	49,87	7.520.000		
	PEMBINAAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) PROVINSI	10.000.000				50,00	50,00	5.000.000	50,00	50,00	-	100,00	100,00	5.000.000	50,00	50,00	5.000.000		
	- Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	10.000.000				50,00	50,00	5.000.000	50,00	50,00	-	100,00	100,00	5.000.000	50,00	50,00	5.000.000		

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	SUMBER DANA	LOKASI KEGIATAN	SASAR AN	KONDISI s/d BULAN SEBELUMNYA					REALISASI BULAN INI	KONDISI s/d BULAN INI					SISA ANGGARAN (Rp)	KET	
						TARGET		REALISASI				TARGET		REALISASI					
						(%) FISIK	(%) KEU	Rp	(%) FISIK	(%) KEU		(%) FISIK	(%) KEU	Rp	(%) FISIK	(%) KEU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN NON KEBAKARAN	7.000.000	DAU			50,00	50,00	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-	-	7.000.000	
	PENYELENGGARAAN PEMETAAN RAWAN BENCANA KEBAKARAN	7.000.000	DAU			50,00	50,00	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-	-	7.000.000	
	- Penyusunan dan Pemuktahiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	5.000.000	DAU	Kab/Kota		50,00	50,00			-	-	100,00	100,00			-	-	5.000.000	
	- Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	2.000.000	DAU	Kota Kupang		50,00	50,00			-	-	100,00	100,00			-	-	2.000.000	
	JUMLAH BELANJA	13.121.680.880				50,00	50,00	7.556.181.299	57,59	57,59	782.987.022	73,83	73,83	8.339.188.321	63,55	63,55		4.782.512.538	

ISO
19017015

Kupang, 08 Oktober 2024
 Pkt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
 Provinsi Nusa Tenggara Timur,
DR. PETRUS BERANTAHUK
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19701231 199101 1 005

LAMPIRAN : DOKUMENTASI LAPORAN BULAN SEPTEMBER 2024



Foto kegiatan Pengamanan Pelantikan Penjabat Bupati Sumba Barat Daya



Foto kegiatan Pengamanan Pengukuhan Perpanjangan Jabatan Penjabat Bupati Sikka dan Pengukuhan Pjs. Bupati Malaka, Manggarai Barat, Ngada, Sumba Barat dan Sumba Timur



Foto kegiatan Serah Terima Jabatan Plt. Kasat Satpol PP Provinsi NTT



Foto kegiatan Penyerahan Dokumen SPBE



Foto kegiatan Pembahasan Anggaran Tahun 2025



Foto kegiatan Pengamanan Demo oleh Warga Besipae di depan Kantor Gubernur NTT dan Kantor DPRD Provinsi NTT



Foto kegiatan Pengamanan Rapat Paripurna di Kantor DPRD Provinsi NTT



Foto kegiatan Koordinasi Trantibum (Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal)



Foto kegiatan Plt. Kasat PolPP Provinsi NTT mewakili Pj. Gubernur NTT mengikuti Kegiatan Turnamen Mancing Piala Kapolda



Foto kegiatan Plt. Kasat PolPP Provinsi NTT mewakili Pj. Gubernur NTT mengikuti Kegiatan Latihan Posko I di Aula Sudirman Makoren



Foto kegiatan Pengawalan Pj. Gubernur NTT oleh anggota Satpol PP Provinsi NTT



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jln. Polisi Militer No. -Telp. (0380)-828090**

Email : satpolpp_prov.ntt@yahoo.com

Website : www.satpol-pp.nttprov.go.id

K U P A N G

08 November 2024

Yth. - Kepala Bappelitbangda Provinsi NTT
- Kepala Badan Keuangan Daerah Setda
Provinsi NTT

SURAT PENGANTAR

Nomor : 000.1.5/914/sat pol pp 1.1

JENIS SURAT	JUMLAH	KETERANGAN
2	3	4
Laporan Bulan Oktober Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024	1 (Satu) Buku	Dikirim untuk ditindak lanjuti

Demikian Laporan ini atas kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Plt. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

Drs. PETRUS SERAN TAHUK

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19701231 199101 1 005

Paraf Hirarki :	
Plh. Sekretaris	
Kepala Subbag Program Data dan Evaluasi	
Fungsional Ahli Muda	

LAPORAN BULAN OKTOBER 2024





LAPORAN BULAN OKTOBER



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024

Jalan Polisi Militer Nomor 1, Telpon/Fax (0380) 828090

Email : satpolpp_prov.ntt@yahoo.com

Website : www.satpol-pp.nttprov.go.id

KUPANG



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur patut dipanjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena hanya atas penyertaan dan kasih-Nya maka Laporan Bulan Oktober 2024 Tahun Anggaran 2024 Satuan Polisi Pamong Praja ini dapat diselesaikan dengan baik.

Tugas, fungsi dan wewenang Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah menjadi sangat penting yang mana terlaksananya berbagai kegiatan pengamanan dan penegakkan prodak hukum. Keadaan yang nyaman, aman dan tenteram diciptakan guna mendukung kinerja Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Untuk itu Laporan Bulan Oktober Tahun Anggaran Tahun 2024 ini merupakan bahan, data dan informasi yang disusun secara baik, transparan dan dapat di pertanggungjawabkan kepada publik ataupun kepada pemangku kepentingan yang membutuhkan informasi terkait penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Kupang, 08 November 2024

Plt. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Drs. PETRUS SERAN TAHUK
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19701231 199101 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Maksud dan Tujuan	3
D. SDM Satuan Polisi Pamong Praja	3
BAB II RENCANA KERJA TAHUNAN	12
A. Rencana Kerja Tahunan	12
B. Program dan Kegiatan Tahun 2024	16
C. Realisasi Anggaran	18
BAB III HASIL PELAKSANAAN	22
A. Sekretariat	22
B. Bidang Penegakan Perda dan Peraturan Gubernur	25
C. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	27
D. Bidang Sumber Daya Aparatur	29
E. Bidang Perlindungan Masyarakat	30
BAB IV PERMASALAHAN	33
A. Permasalahan	33
B. Tindak Lanjut	33
BAB V PENUTUP	34
- Laporan Keuangan	35
- Lampiran Foto/Dokumentasi	38

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu Perangkat Daerah yang di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Tugas Satuan Polisi Pamong Praja yakni membantu Kepala Daerah dalam memelihara Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan masyarakat, dan fungsinya sebagai berikut;

- a) Perumusan kebijakan di bidang Satuan Polisi Pamong Praja;
- b) Pelaksanaan kebijakan di bidang Satuan Polisi Pamong Praja;
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Satuan Polisi Pamong Praja;
- d) Pelaksanaan administrasi di bidang Satuan Polisi Pamong Praja;
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas dan fungsi yang telah dijabarkan diatas kemudian diuraikan dalam program dan kegiatan dimana sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 tentang Satuan Polisi pamong Praja melaksanakan urusan Pemerintahan Wajib berkaitan dengan Pelayanan Dasar dalam arti bahwa pelayanan yang diberikan oleh Satuan Polisi pamong Praja berkaitan dengan hak setiap warga masyarakat yang wajib diperoleh sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal.

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur berupaya agar mampu menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan bulan September 2024 laporan kinerja ini menggambarkan kinerja yang telah dilaksanakan, sehingga sangat diharapkan dapat bermanfaat bagi semua komponen yang terlibat dalam proses menciptakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat.

B. Dasar hukum

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian Cuti bagi Pegawai Negeri Sipil.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pakian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Satuan Polisi Pamong Praja;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Satuan Polisi Pamong Praja;
12. Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur.
13. Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (P-DPA-SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2024 Nomor : DPPA/A.1/1.05.0.00.0.00.01.0000/001/2024.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud.

Sebagai bahan pertanggungjawaban terhadap hasil pelaksanaan program dan kegiatan bulan September 2024.

2. Tujuan.

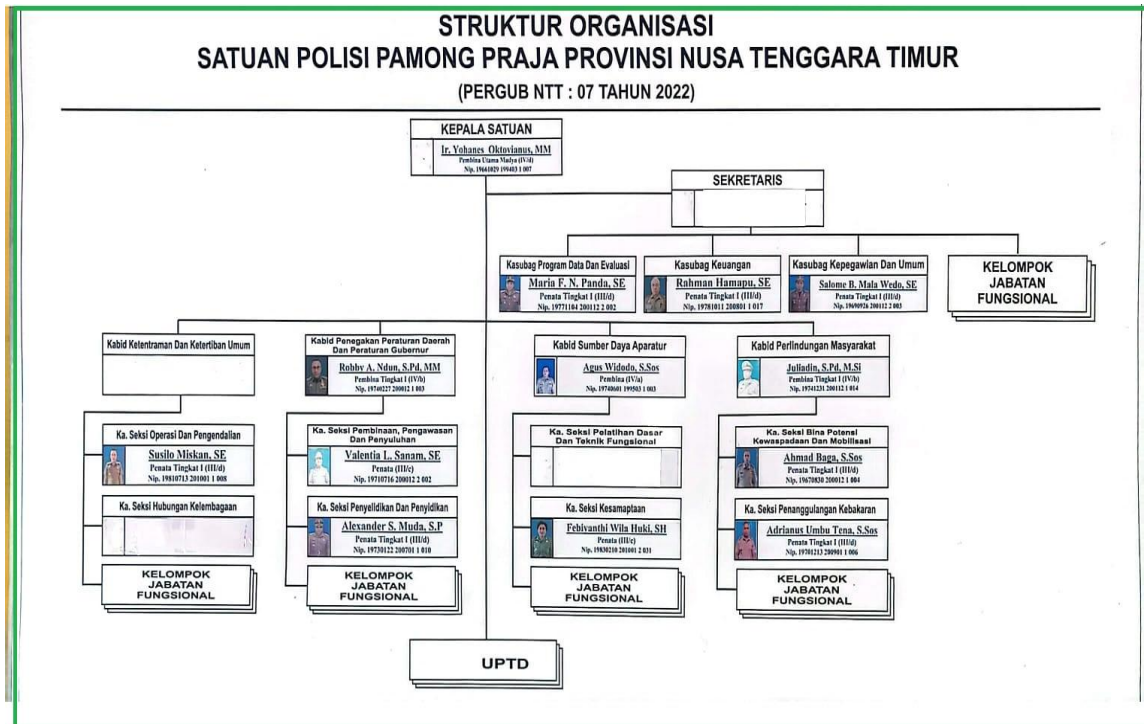
Untuk menghasilkan sebuah laporan kinerja bulanan yang menggambarkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT bulan September Tahun Anggaran 2024.

D. Sumber Daya Manusia (SDM) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 138 orang dengan rincian sebagai berikut:

a. Berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah (Orang)
1	2	3
1.	Kepala Satuan	1
2.	Sekretaris	-
3.	Kepala Bidang	3
4.	Kepala Seksi	7
5.	Kepala Sub Bagian	3
6.	Jabatan Fungsional	62
7.	Jabatan Fungsional Umum	23
8.	Honorar	29
Jumlah		128



b. Berdasarkan Jenis Kelamin

Jabatan Pegawai	Jenis Kelamin	
	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)
1	2	3
Kepala Satuan	1	
Sekretaris	-	
Kepala Bidang	3	
Kepala Seksi	5	2
Kepala Sub Bagain	1	2
Jabatan Fungsional	56	6
Pelaksana	16	7
Tenaga Honorer	18	11
Total Jumlah	100	28
	128 Orang	

c. Jumlah ASN Berdasarkan Pangkat/Golongan.

Rincian Kepangkatan/Golongan					Jumlah
Kepangkatan PNS	A	B	C	D	
Golongan IV	1	2	-	1	4 orang
Golongan III	12	23	8	15	58 orang
Golongan II	-	-	4	33	37 orang
Golongan I	-	-	-	-	- orang
Jumlah	13	25	22	49	99 orang

d. Berdasarkan Jenjang Pendidikan.

No.	Jenjang Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1.	Pasca Sarjana (S2)	4	-	4
2.	Sarjana (S1)	36	13	49
3.	Diploma (D3)	1	-	-
4.	SMA/SMU	41	5	46
Jumlah		81	18	99

e. Berdasarkan Agama.

No.	Data Keagamaan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1.	Islam	4	-	4
2.	Kristen	73	25	98
3.	Katholik	21	5	26
4.	Hindu	-	-	-
5.	Budha	-	-	-
Jumlah		98	30	128

Berikut dapat di sampaikan data pemberian cuti dan tindak disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur selama bulan September 2024 sesuai ketentuan yang berlaku

1. Cuti tahunan berdasarkan Kepangkatan/Golongan.

No.	Data Cuti Tahunan	Jumlah
1	2	3
1.	Golongan IV	-
2.	Golongan III	1
3.	Golongan II	-
Jumlah		1

2. Data Pegawai yang kena sanksi Kepegawaian :

No.	Data Pegawai Yang Kena Sanksi Kepegawaian	Jumlah
1	2	3
1.	Golongan IV	-
2.	Golongan III	-
3.	Golongan II	-
4.	Banpol	-
5.	Cleaning Service	-
Jumlah		-

Selain melaksanakan tugas Satuan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur juga juga melakukan penjagaan (piket) dalam rangka menjaga aset penting milik pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur adapun aset tersebut antara lain :

1. Pos Kantor Gubernur/Sasando.
2. Pos Rumah Jabatan Gubernur.
3. Rumah Jabatan Wakil Wakil Daerah.
4. Rumah Jabatan Sekretaris Daerah.
5. Posko Praja (Kantor Satpol PP).

Penjagaan pada tempat/lokasi jaga dibagi dalam 3 (tiga) sift, dimana masing-masing sift dibagi waktu selama 1 x 24 jam, mulai jam 08:00 pagi hingga jam 08:00 pagi berikutnya. Jadwal pelaksanaan piket diatur sesuai dengan surat keputusan Kepala satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur 2024 (terlampir).

E Sarana dan Prasarana

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam melaksanakan tugas yang diemban didukung dengan prasarana penunjang operasional kegiatan baik di kantor maupun dilapangan. Sarana Prasarana tersebut dicatat sebagai aset karena proses pengadaannya bersumber dari Dana Alokasi Umum yang dituangkan dalam dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur dari Tahun Anggaran 2003 sampai dengan tahun 2024 sebagai berikut :

Sarana Prasarana Pendukung

No	Jenis Nama Barang	Merk/Type/Bahan	Vol	Satuan	Keadaan Barang	Tahun Pengadaan
1.	Mobil Pic Up (DH 8059 AW	Besi/Toyota Pic Up	1	Unit	B	2003
2	Meja Biro 4 Laci	Arinda/Olympic	1	Buah	B	2008
3	Meja Biro 4 Laci	Arinda/Olympic	1	Buah	B	2008
4	Lap Top/Toshiba	Metal	1	Buah	B	2008
5	Air Condition	Besi /National/ 1Pk	2	Buah	B	2008
6	Air Condition	Besi/Akira	1	Buah	B	2008
7	Mobil Truck (DH 8047 AW)	Besi/Isuzu	1	Unit	B	2009
8	Mobil Minibus (DH 196 AW)	Besi/Toyota Rush	1	Unit	B	2009
9	Lemari 2 Pintu	Kayu Jati	6	Buah	B	2009
10	Lap Top Azer	Metal	1	Buah	B	2009
11	Printer HP/Laser Jet	Metal	1	Buah	B	2009
12	Wireless	Tens	1	Buah	B	2009
13	Megaphone Toa	Besi	1	Buah	B	2009
14	Facsimile	Panasonic	1	Buah	B	2009
15	Televisi	Digitec	1	Buah	B	2009
16	Kain Horrden	Kain	1	Buah	B	2009
17	Lambang Garuda		2	Buah	B	2009
18	Tiang Bendera	Besi	1	Buah	B	2009

19	Papan Nama SKPD	Besi	1	Buah	B	2009
20	Sepeda Motor (DH 2843 AW)	Besi/Honda/ GL 200 R	1	Unit	B	2010
21	Sepeda Motor (DH 2844 AW)	Besi/Honda/ GL 200 R	1	Unit	B	2010
22	Sepeda Motor (DH 2845 AW)	Besi/Honda/ GL 200 R	1	Unit	B	2010
23	Trasmister UHF	Motorola GR500	1			2010
24	MejaKerja	Kayu	10	Buah	B	2011
25	KursiKerja	Kayu	10	Buah	B	2011
26	Lemari 2 Pintu	Kayu Jati	5	Buah	B	2011
27	Komputer PC Simbada	Metal	2	Buah	B	2011
28	Lap Top Toshiba/L745	Metal	2	Buah	B	2011
29	Printer Canon	Metal	5	Buah	B	2011
30	Handy Talkie	Motorola GP2000	5	Buah	B	2011
31	Handy Cam	Sony	1	Buah	B	2011
32	Alat Kejut Listrik	Metal	13	Buah	B	2011
33	Sound System	Rhoad	1	Buah	B	2011
34	Komputer PC Simbada	Metal	2	Buah	B	2012
35	Televisi	Multimax	1	Buah	B	2012
36	Televisi	Sharp	1	Buah	B	2012
37	Scaner	Metal	1	Buah	B	2012
38	Kasur Busa	Bigland	8	Buah	B	2012
39	LayarProyektor		1	Buah	B	2012
40	MejaPimpinan 4 Laci	Kayu	1	Buah	B	2013
41	MejaKerja	Kayu	6	Buah	B	2013
42	Lemari 2 Pintu	Kayu Jati	2	Buah	B	2013
43	Komputer PC Simbada	Metal	2	Buah	B	2013
44	Lap Top ToshibaL840	Metal	4	Buah	B	2013

45	Kamera Digital	Canon	1	Buah	B	2013
46	LayarProyektor		1	Buah	B	2013
47	Mobil Double Cabin (DH 8249 AW)	Besi/Toyota Hilux	1	Unit	B	2014
48	Sepeda Motor (DH 3953)	Besi/Kawasaki KLX 15	1	Unit	B	2014
49	Sepeda Motor (DH 3954)	Besi/ Kawasaki KLX 15	1	Unit	B	2014
50	Sepeda	Paragon	6	Buah	B	2014
51	Kursi Sofa	Busa	1	Buah	B	2014
52	Lemari 2 Pintu	Kayu Jati	2	Buah	B	2014
53	Kulkas	Besi/ Polytron	1	Buah	B	2014
54	UPS/Matsunaga	Metal	10	Buah	B	2014
55	Lap Top Lenovo B490	Metal	1	Buah	B	2014
56	Printer Canon MX 397	Metal	1	Buah	B	2014
57	Air Condition/	Besi Polytron	5	Buah	B	2014
58	Wirelessgenggam	Toa-ZR1015	4	Buah	B	2014
59	Televisi	Polytron	5	Buah	B	2014
60	Handy Talkie	Motorola A 12	40	Buah	B	2014
61	Antena, Rig, Repeater	Motorola CDR500	1	Buah	B	2014
62	Mesin Absen Elektronik	Secure	1	Buah	B	2014
63	Mesin Absen Elektronik	Secure	1	Buah	B	2014
64	Mesin Ketik	Brother	1	Buah	B	2014
65	Handy Cam	Sony	1	Buah	B	2014
66	MejaRapat	Kayu Jati	5	Buah	B	2015
67	Meja Biro 4 Laci	Kayu	1	Buah	B	2015
68	Meja 1/2 Biro, 2 Laci	Kayu	15	Buah	B	2015
69	KursiRapat	Busa/ /Master Chair	20	Buah	B	2015
70	KursiKerja	Kayu	21	Buah	B	2015

71	Lemari 2 Pintu	Kayu Jati	1	Buah	B	2015
72	Tempat Tidur Lipat	Metal	7	Buah	B	2015
73	Lap Top Toshiba C55	Metal	5	Buah	B	2015
74	Lap Top Asus X453MA	Metal	1	Buah	B	2015
75	Printer Canon	Metal	5	Buah	B	2015
76	Tirai/Gorden	Kain	2	Buah	B	2015
77	Mic & Tiang Mic	Shure & NVK	1	Buah	B	2015
78	Kamera Digital	Canon	1	Buah	B	2015
79	Senter	S.W.A.T XML-T6	7	Buah	B	2015
80	Lemari Arsip	Katyu	1	Buah	B	2016
81	Komputer PC	LG	1	Buah	B	2016
82	Printer	Canon MP280	1	Buah	B	2016
83	Air Condition	Polytron	4	Buah	B	2016
84	Dispenser		6	Buah	B	2016
85	Taplak Meja dan Vas Bunga	Kain	1	Buah	B	2017
86	Mesin Potong Rumput	Besi	1	Buah	B	2017
87	Linggis kuku kambing	Besi	5	Buah	B	2017
88	Meja Rapat	Kayu	3	Buah	B	2017
89	Meja 1/2 Biro	Kayu	6	Buah	B	2017
90	Kursi Rapat	Besi	50	Buah	B	2017
91	Lemari 3 Pintu	Kayu	2	Buah	B	2017
92	Dispenser standing	Besi	2	Buah	B	2017
93	Kamera Digital	Besi	1	Buah	B	2017
94	Papan Nama SKPD	Besi	1	Buah	B	2017
95	Komputer (hp AIQ)	Hp	6	Unit	B	2020
96	Printer	(Epson L3110)	6	Unit	B	2020
97	Lemari	Kayu	5	Unit	B	2020
98	Meja Kerja	Kayu	7	Unit	B	2020

99	Meja Rapat	Kayu	2	Unit	B	2020
100	Kursi Kerja	Kayu	7	Unit	B	2020
101	Wirlaes		1	Unit	B	2020
102	Papan Sekretariat PPNS		1	Unit	B	2020
103	Papan Struktur Organisasi 1		1	Unit	B	2020
104	Papan Struktur Organisasi 1		1	Unit	B	2020
105	Papan Visi Misi		1	Unit	B	2020
106	Papan Informasi		1	Unit	B	2020
107	Mesin Potong Rumput		1	Unit	B	2020
108	Alat Pengukur suhu (Termogram)		2	Buah	B	2021 (BTT)
109	Genset	Yamaha/Bensin	2	Unit	B	2021
110	Mobil Truck (DH 8279 WA)	Besi/Hino	1	Unit	B	2021
111	Mobil Hilux Double Cabin (DH 19)	Besi/Toyota Hilux	1	Unit	B	2021

BAB II

RENCANA KERJA TAHUNAN

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai urusannya dalam bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat memiliki langkah-langkah strategis dalam upaya mendukung program Kepala Daerah, Hal ini dijabarkan dalam rencana Program Kegiatan sebagai berikut :

A. Rencana Kinerja Tahunan.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar dalam Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.

Rencana Kerja Tahunan (RKT) disusun berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur yang Termuat dalam Rencana Strategis (Renstra) tahun 2024-2026 sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026 :

Indikator Kinerja Utama (KU) Tahun 2024
Satuan Polisi pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI	TARGET	FORMULAINDIKATOR
			2023	2024	
1	2	3	4	6	7
1	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1. Presentase meningkatnya pencapaian SPM Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	44,76%	100%	Jumlah kegiatan yang diselesaikan -----x 100 Target
		2. Presentase meningkatnya Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (jumlah Perda dan Perkada yang ditegakan)	3	3	Jumlah Penyelesaian Perda dan Perkada yang ditegakan -----x100 Jumlah Perda dan Perkada
		3. Presentase Pencegahan Daerah Rawan Kebakaran setiap Tahun	-	100 %	Data Potensi Daerah Rawan Kebakaran -----x100 Jumlah Wilayah

Dari tabel Rencana Kinerja Tahunan (RKT) diatas dapat diambil langkah strategis antara lain :

1. Membangun dan mengembangkan sinergitas dengan Instansi/ Unit/ Lembaga Hukum/ Masyarakat/ Stekholder terkait lainnya dalam melakukan pengendalian dalam rangka menciptakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
2. Membangun komunikasi yang secara berkala dalam melakukan diteksi dini dan cegah dini terhadap segala bentuk kegiatan yang berdampak pada adanya pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Dengan rumusan kebijakan yang telah ditetapkan antara lain :

1. Meningkatkan koordinasi antar Instansi/Unit Kerja/Lembaga Hukum yang tersebar dalam wilayah Nusa Tenggara Timur.
 2. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia.
 3. Pemenuhan sarana prasarana yang berstandar dalam mendukung pelaksanaan kegiatan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- Rencana Kerja

Tabel Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikator (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.2	Urusan Pemerintah an Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat		Prov/kab/Kota		12.863.647.600	APBD Prov. NTT			12.863.647.600
05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkatoran yang Berkualitas	Kota Kupang	100 %	12.863.647.600	APBD Prov. NTT		100 %	12.863.647.600
1.01	Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Tersedianya laporan capaian kinerja PD	Kota Kupang	49 dokumen	38.000.000	APBD Prov. NTT		49 dokumen	38.000.000
1.02	Administrasi keuangan pemerintah daerah	Terbayarnya gaji dan tunjangan	Kota Kupang	4 laporan	11.032.449.000	APBD Prov. NTT		4 laporan	11.032.449.000
1.06	Administrasi umum pemerintah daerah	Tersedianya kebutuhan operasional kantor	Kota Kupang	1 piket	80.000.000	APBD Prov. NTT		1 piket	80.000.000
1.07	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang	Kota Kupang	4 laporan	-			4 laporan	-
1.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Tersedianya kebutuhan jasa operasional kantor	Kota Kupang	4 laporan	968.025.600	APBD Prov. NTT		4 laporan	968.025.600
1.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Terpeliharanya barang milik daerah yang menjadi aset	Kota Kupang	4 laporan	113.600.000	APBD Prov. NTT		4 laporan	113.600.000
05.02	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Presentase meningkatnya pencapaian SPM trantibum	Kota Kupang	100 %	624.600.000	APBD Prov. NTT		Kota Kupang	624.600.000
1.01	Penanganan gangguan ketenteraman ddan ketertiban umum lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi	Terselenggaranya kegiatan penertiban, pengamanan, pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patrol turjawali dalam rangka trantibum	Kabupaten/kota	12 laporan	524.600.000	APBD Prov. NTT	Mengkoordinir layanan SPM	12 laporan	524.600.000
1.02	Penegakan peraturan daerah provinsi dan peraturan gubernur	Presentase meningkatnya pencapaian SPM trantibum (jumlah perda dan perkara yang ditegakan)	Kota Kupang	12 laporan	90.000.000	APBD Prov. NTT	Mengkoordinir layanan SPM	12 laporan	90.000.000
1.03	Pembinaan penyidik pegawai negeri sipil	Kegiatan pengembangan kapasitas PPNS	Kota Kupang	2 laporan	10.000.000	APBD Prov. NTT	Mengkoordinir layanan SPM	2 laporan	10.000.000

05.04	Program Pencegahan Penanggulangan Peyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Presentase pencegahan daerah berpotensi rawan kebakaran	Kota Kupang	100 %	7.000.000			100 %	7.000.000
1.01	Peyelenggaran pemetaan rawan bencana kebakaran	Peta daerah rawan kebakaran	Kota Kupang	4 laporan	7.000.000	APBD Prov. NTT	Mengkoordinir layanan SPM	4 laporan	7.000.000

Dalam implementasi rencana kerja, seluruh program dan kegiatan diarahkan untuk mewujudkan penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dengan mengoptimalkan seluruh bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam bentuk penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sehingga dapat menciptakan kondisi yang aman dan tentram.

B. Program Dan Kegiatan Tahun 2024.

Program dan Kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur seluruh pendanaanya bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan anggaran belanja dan Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun 2024 antara lain :

1. Belanja Daerah/Belanja Operasi.

1. Belanja Daerah/Operasi Rp. 13.121.680.880.- kegiatan ini terdiri dari

1.1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :

1.1.1 Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

1.1.1.1 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

1.1.2 Administrasi Keuangan Pemerintah Daerah.

1.1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

1.1.3 Administrasi Umum Perangkat Daerah Daerah.

1.1.3.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

1.1.3.2 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.

1.1.3.3 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.

1.1.3.4 Penyediaan Bahan Material.

1.1.3.5 Fasilitas Kunjungan tamu.

1.1.3.6 Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.1.3.7 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

- 1.1.4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - 1.1.4.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
 - 1.1.4.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik.
 - 1.1.4.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.1.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - 1.1.5.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
 - 1.1.5.2 Pemeliharaan Aset Tetap lainnya.
 - 1.1.5.3 Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya.

1.2. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- 1.2.1 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi :
 - 1.2.1.1 Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan.
 - 1.2.1.2 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
 - 1.2.1.3 Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi.
 - 1.2.1.4 Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
 - 1.2.1.5 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
 - 1.2.1.6 Pencegahan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini, Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan,

dan Pengawalan.

1.2.1.7 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja Melalui Pelatihan Teknis Termasuk dalam Pelaksanaan tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia.

1.2.1.8 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa.

1.2.2 Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur.

1.2.2.1 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.

1.2.2.2 Pengawasan atas kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.

1.2.2.3 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.

1.2.3 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi.

1.2.3.1 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS

1.3. Program Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran :

1.3.1 Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran.

1.3.1.1 Penyusunan dan Pemutahiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran.

1.3.1.2 Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran

C. Realisasi Anggaran

Dalam periode tahun 2024 tersedia pagu anggaran sesuai Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran sebesar Rp. 13.121.680.880.- (tiga belas miliar seratus dua puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) berikut kondisi atau keadaan kas sampai dengan tanggal 30 September 2024 yang telah dipertanggung

jawabkan secara fungsional oleh bendahara Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur pada badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DANKETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	13.121.680.880	8.339.168.321	63.55
01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	12.266.580.880	7.931.508.140	64.66
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Relaisasi Kinerja SKPD	38.000.000	24.928.000	65.60
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.032.449.000	7.051.548.961	63.92
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.032.449.000	7.051.548.961	63.92
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	80.000.000	55.445.663	69.31
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	1.159.280	23.19
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.000.000	17.690.200	70.76
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.000.000	1.750.000	87.50
	- Penyediaan Bahan/Material	20.000.000	12.317.007	61.59
	- Fasilitas Kunjungan Tamu	5.000.000	4.998.000	99.96
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.000.000	4.531.176	90.62
	- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	18.000.000	13.000.000	72.00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	997.031.880	716.658.171	71.88
	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.400.000	1.400.000	100
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.000.000	3.646.400	36.46
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	985.631.880	711.611.771	72.20
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	119.100.000	82.927.345	69.63
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	70.000.000	63.379.845	90.54
	- Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	19.100.000	7.467.000	39.09
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.000.000	12.080.500	40.27

02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	848.100.000	407.660.181	48.07
	Penanganan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Provinsi	748.100.000	346.280.181	46.29
	- Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	2.500.000	-	-
	- Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	1.500.000	-	-
	- Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	150.000.000	37.710.000	25.14
	- Penyediaan Layanan Dasar Dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	75.000.000	-	-
	- Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5.000.000	-	-
	- Pencegahan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan masyarakat Melalui deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	333.100.000	221.203.381	63.41
	- Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja Melalui Pelatihan Teknis Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	131.000.000	53.399.800	40.76
	- Penindakan atas Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	50.000.000	43.967.000	87.93
	Penegakan Peraturan daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	90.000.00	56.380.000	62.64
	- Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	5.000.000	-	-
	- Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	70.000.000	48.900.000	69.86
	- Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	15.000.000	7.480.000	49.87

	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	10.000.000	5.000.000	50.00
	- Pengembangan Kapasitas dan Karir PPNS	10.000.000	5.000.000	50.00
03	PROGRAM PENCEGAHAN PENANGGULANGAN PENYELEMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	7.000.000	-	-
	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	7.000.000	-	-
	- Penyusunan dan Pemuktahiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	5.000.000	-	-
	- Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	2.000.000	-	-
	Jumlah Realisasi sampai dengan Agustus	13.121.680.880	8.339.168.321	63.55

Kondisi atau keadaan kas per 30 September 2024

Pada tabel diatas dapat disampaikan bahwa capaian progres fisik dan keuangan pada Bulan September 2024 sebesar Rp. 8.339.168.321.- (delapan miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta seratus enam puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah) atau 63.55 % dari Total pagu sebesar Rp. 13.121.680.880.- (tiga belas miliar seratus dua puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).

BAB III

HASIL PELAKSANAAN

Dalam Periode sampai dengan bulan September 2024 dimana rutin dilaksanakan dengan hasil capaian pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut :

A. Bidang Kesekretariatan.

1. Sub Bagian Program Data dan Evaluasi.

Capaian pelaksanaan tugas antara lain adalah :

1. Laporan Bulanan Bulan September 2024.
2. Laporan Triwulan III Tahun 2024.
3. Laporan e-monev Bulan September Tahun 2024.
4. Laporan pengisian Self Assesment Quisioner (SAQ)
5. Laporan permohonan informasi dadn kegiatan pada Dokumen RUED Provinsi NTT
6. Laporan hasil reuiu pengujian atas kelengkapan dokumen pendukung
7. Pemberitahuan penilaian keterbukaan informasi publik lingkup Pemprov. NTT dari Komimfo Provinsi NTT
8. Laporan hasil reuiu perubahan RKA-SKPD Satpol PP Provinsi. NTT
9. Menghadiri Undangan Rapat SPM di Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi NTT
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Sub Bagian Keuangan.

1. Mengajukan SPP Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), Tambah Uang (TU) dan Gaji PNS (LS).
2. Menyusun SPJ Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), Tambah Uang (TU) dan Gaji PNS (LS).
3. Membuat laporan SPJ Fungsional dan laporan Pertanggungjawaban atas belanja SKPD.
4. Membuat Laporan Keuangan SKPD.
5. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh atasan.

3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.

- Kepegawaian

No.	Uraian Program / Kegiatan	Jumlah
1	Membuat laporan bulan September 2024	1 lap
2	Membuat pembagian jatah beras bulan September bagi ASN	99 ASN
3	Membuat rekapan kehadiran anggota piket proses honor piket	45 lap
4	Menerima surat masuk bulan September 2024	30 surat
5	Memberi honor surat keluar bulan September 2024	39 surat
6	Menerima surat undangan bulan bulan September 2024	17 undangan
7	Mendistribusikan surat yang telah disposisi ke bidang	30 surat
8	Membuat usulan perubahan kenaikan gaji berkala dan perubahan	4 ASN
9	Memproses usulan cuti ASN	3 ASN
10	Melakukan penilaian kinerja ASN bulan Agustus 2024	8 ASN
11	Mengikuti rapat koordinasi SPM dengan Kabupaten/ Kota Kupang	1 keg
12	Mengikuti rapat pembukaan anggaran di Badan Keuangan	1 keg
13	Mengikuti rapat internal bersama seluruh anggota	3 keg
14	Menyiapkan administrasi serah terima jabatan Kasat	2 dok
15	Menyiapkan dan mengatur acara serah terima jabatan	2 keg
16	Membuat SK Tim SPBE Satpol PP	1 berkas
17	Mengikuti rapat persiapan dan operasi DBH-CHT	2 keg
18	Mengikuti rapat paripurna DPRD Provinsi NTT	1 keg
19	Memproses surat tugas	1 surat
20	Membuat surat pengaktifan kembali satu ASN atas nama I Gede Gatot Subrata	1 surat
21	Membuat rekapan kehadiran anggota piket	1 keg
22	Membuat rekapan kehadiran tenaga honor	1 rek
23	Membuat SK kelas jabatan	2 SK
24	Membuat SK kondisi kerja	2 SK
25	Membuat SK beban kerja	2 SK
26	Membuat SK prestasi kerja	2 SK
27	Membuat Form D (per jabatan)	2 berkas

28	Membuat rekomendasi jumlah kelas jabatan	2 berkas
29	Membuat data konfersi jabatan sesuai aturan terbaru	49 jabatan
30	Mengisi dan merubah peta jabatan sesuai SOPTK terbaru Satpol PP	89 jabatan
31	Mengapload dalam system informasi TPP dan SK bersama lampiran	16

- Umum

No.	U r a i a n	Jumlah
1.	Jumlah Surat Masuk bulan September 2024	30 surat
2.	Jumlah Surat Keluar bulan September 2024	39 surat
3.	Jumlah undangan yang masuk bulan September 2024	17 surat

- Perlengkapan

Uraian Program/Kegiatan	Jumlah/ Keterangan
Mengatur Cleaning Service untuk membersihkan ruang kantor	Setiap Hari

**B. Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
Bulan September 2024.**

**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
PENANGANAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) PROVINSI**

Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi		Sisa	Ket
		Rp	%		
PENANGANAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI	175.000.000	61.380.000	35	113.620.000	

SOSIALISASI PENEGAKAN PERDA DAN PERGUB

Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi		Sisa	Ket
		Rp	%		
Belanja Operasi	5.000.000	-	-	5.000.000	
Belanja makanan dan minuman rapat sosialisasi Penegakan Perda dan Pergub	5.000.000	-	-	5.000.000	
J u m l a h		-		-	

PENGAWASAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PELAKSANAAN PERDA DAN PERGUB “OPERASI DBH-CHT (ROKOK ILEGAL)”

Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi		Sisa	Ket
		Rp	%		
Belanja Operasi	70.000.000	48.900.000	70	21.100.000	
Belanja bahan cetak	1.360.000	1.020.000	75	340.000	
Belanja makan minum rapat	16.960.000	9.120.000	54	7.840.000	
Belanja perjalanan dalam kota (uang harian transportasi lokal)	51.680.000	38.760.000	75	12.920.000	
J u m l a h		48.900.000	70	21.100.000	

PENYEDIAAN LAYANAN DASAR DALAM RANGKA DAMPAK PENEGAKAN PERDA DAN PERGUB

Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi		Sisa	Ket
		Rp	%		
Belanja Operasi	75.000.000	-	-	75.000.000	
Belanja Habis Pakai	31.572.000	-	-	31.572.000	
Belanja Jasa Kantor	15.300.000	-	-	15.300.000	
Belanja perjalanan dinas dalam negeri	28.128.000	-	-	28.128.000	
J u m l a h		-	-	75.000.000	

PENANGANAN ATAS PELANGGARAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN GUBERNUR SESUAI SOP

Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi		Sisa	Ket
		Rp	%		
Belanja Operasi	15.000.000	7.480.000	50	7.520.000	
Belanja alat/bahan untuk kantor kegiatanh ATK	40.000	-	-	40.000	
Belanja perjalanan dinas dalam kota 22 orang x4 kali	14.960.000	7.480.000	50	7.480.000	
J u m l a h		7.480.000	-	7.520.000	

PENGEMBANGAN KAPASITAS DAN KARIER PPNS

Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi		Sisa	Ket
		Rp	%		
Belanja Operasi	10.000.000	5.000.000	50	5.000.000	
Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor – bahan cetak	400.000	200.000	50	200.000	
Belanja makan minum peserta rapat	3.600.000	1.800.000	50	1.800.000	
Belanja perjalanan dinas dalam kota (Transpotasi peserta rapat teknis PPNS)	6.000.000	3.000.000	50	3.000.000	
J u m l a h		-	-	5.000.000	

C. Ketenteraman dan KetertibanUmum.

Bulan September 2024

No	Jenis Pengamanan	Jumlah Pengamanan		Masalah	Pemecahan Masalah	Instansi Terkait	Keterangan
		Lokasi Kegiatan	Bulan				
1	2	3	4	6	7	8	9
01.	Melakukan pengamanan gladi dalam rangka pelaksanaan Peresmian Pengambilan Sumpah Janji Anggota DPRD Prov. NTT	Kantor DPRD Prov. NTT	1 x kegiatan 02 September 2024	-	-	DPRD Prov. NTT	15 orang al. Plt Kasat, Kabid, Kasi Ops, dan anggota Pol PP
02.	Melakukan pengamanan dalam rangka pelaksanaan Peresmian Pengambilan Sumpah Janji Anggota DPRD Prov. NTT	Kantor DPRD Prov. NTT	1 x kegiatan 03 September 2024	-	-	DPRD Prov. NTT	40 orang al. Plt Kasat, Kabid, Kasi Ops, dan anggota Pol PP
03.	Mengikuti Ibadah Syukur bersama Pastor	Aula Satpol PP	1 x kegiatan 06 September 2024	-	-	-	Semua Anggota Satpol PP
04.	Melakukan Pengamanan Gladi Pelantikan Penjabat Bupati Sumba Barat Daya	Aula El Tari Kupang	1 x kegiatan 07 September 2024	-	-	Biro Tata Pem Setda Prov. NTT	15 orang al. Plt Kasat, Kabid, Kasi Ops, dan anggota Pol PP
05.	Melakukan Pengamanan Pelantikan Bupati Sumba Barat Daya	Aula El Tari Kupang	1 x kegiatan 08 September 2024	-	-	Biro Tata Pem Setda Prov. NTT	30 orang al. Plt Kasat, Kabid, Kasi Ops, dan anggota Pol PP
06.	Melakukan Pengamanan Syukuran Pelantikan Penjabat Bupati Sumba Barat Daya	Aula El Tari Kupang	1 x kegiatan 08 September 2024	-	-	Keluarga	30 orang al. Plt Kasat, Kabid, Kasi Ops, dan anggota Pol PP
07.	Melakukan pengamanan dan mengikuti Apel bersama ASN lingkup Pemprov. NTT	Kantor Gubernur Prov. NTT	1 x kegiatan 09 September 2024	-	-	Semua OPD lingkup Pemprov. NTT	25 orang al. Plt Kasat, Kabid, Kasi Ops, dan anggota Pol PP
08.	Mengikuti nonton bareng bersama dalam rangka Mensosialisasikan Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024	Bioskop Lipo Plaza Kupang	1 x kegiatan 10 September 2024	-	-	OPD lingkup Pemprov. NTT dan Unsur Terkait	2 orang al. (Ince dan Ita)
09.	Mengikuti Apel memperingati Hari Perhubungan Nasional Tk. Provinsi NTT sekaligus disatukan dengan Aple Kesadaran Lingkup Pemprov. NTT	Terminal Tipe A Bimoku	1 x kegiatan 17 September 2024	-	-	OPD lingkup Pemprov. NTT dan Unsur Terkait	8 orang al. Plt Kasat, Kabid, Kasi Ops, dan anggota Pol PP
10.	Mengikuti Upacara Penerimaan SATGASPUR Yonif 74/Garuda Nusantara dalam rangka Tugas Operasi Pamtas RI-RDTL Periode September 2024 s/d September 2025	Lantamal Kupang	1 x kegiatan 17 September 2024	-	-	Lantamal dan usur terkait	6 orang al. Plt Kasat, Kabid, Kasi Ops, dan anggota Pol PP

11.	Rapat bersama Plt. Kasat	Aula satpol PP	2 x kegiatan 18 September 2024	-	-	-	Semua Anggota Pol PP
12.	Mengikuti upacara penerimaan SATGASPUR Yonif 74/Garuda Nusantara dalam rangka Tugas Operasi Pamantas RI-RDTL Periode September 2024-September 2025	Lantamal Kupang	1 x kegiatan 17 September 2024	-	-	Lantamal dan usur terkait	6 orang al. Plt Kasat, Kabid, Kasi Ops, dan anggota Pol PP
13.	Mengikuti rapat persiapan memperingati Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2024 Tingkat Provinsi. NTT	Ruang Rapat As. Sekda Prov. NTT	1 x kegiatan 19 September 2024	-	-	Unsur terkait	Kasi Ops. Dan Plh Kasi HK (Idel)
14.	Melakukan Pengamanan sekaligus operasi DBH-CHT (Rokok Ilegal)	Kabupaten Kupang (Tarus-Noebaki)	1 x kegiatan 24 September 2024	-	-	Bea Cukai	20 orang al. Plt Kasat, Kabid, Kasi Ops, dan anggota Pol PP
15.	Melakukan pengamanan pelantikan Pj. Sementara Bupati Malaka, Sumba Timur, Sumba Barat, Ngada dan manggarai Barat	Aula El tari Kupang	1 x kegiatan 24 September 2024	-	-	Biro Tata Pem. Setda. Prov. NTT	30 orang al. Plt Kasat, Kabid, Kasi Ops, dan anggota Pol PP
16	Melakukan pengamanan aksi unjuk rasa/ demonstrasi dari mahasiswa dan masyarakat Bessipae (jumlah pendemo : 100 orang)	Kantor Gubernur dan kantor DPRD Prov. NTT	1 x kegiatan 24 September 2024	-	-	TNI dan Polri	30 orang al. Plt Kasat, Kabid, Kasi Ops, dan anggota Pol PP
17	Mengikuti kegiatan Latihan Posko tatap muka II Korem 161 Wirasakti	Korem 161 Wirasakti	1 x kegiatan 26 September 2024	-	-	Korem 161 Wirasakti	5 orang al. Plh. Kabid, Kasi Ops, dan anggota
18	Mengikuti Pembinaan Rohani secara Virtual dari 4 tokoh agama	Aula Satpol PP	1 x kegiatan 27 September 2024	-	-	BKD Prov. NTT	Semua Anggota SATpol PP
19	Melakukan pengamanan rapat PARIPURNA	Kantor DPRD Prov. NTT	1 x kegiatan 27 September 2024	-	-	DPRD Prov. NTT	20 orang al. Plt Kasat, Plh Kabid Tibum, Kasi Ops dan anggota
20	Mengikuti kegiatan deklarasi netralisasi ASN/TNI/POLRI pada Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2024 di Prov. NTT	Hotel Aston	1 x kegiatan 30 September 2024	-	-	TNI, Polri dan Unsur terkait	5 orang al. Plt Kasat, Plh Kabid Tibum, Kasi Ops dan anggota
21	Mengikuti dan Menghadiri undangan apel gelar pasukan pengamanan dalam rangka kunker Presiden RI dan Rombongan ke Wilayah NTT	Korem 161 Wirasakti	1 x kegiatan 30 September 2024	-	-	Korem 161 Wirasakti	4 orang al. Plt Kabid, Kasi Ops, Moses dan Rudy

22	Melakukan penjagaan dan pengamanan aset milik Pemprov. NTT	Kantor Gubernur sasando, Rujab Gubernur, Rujab Wagub, Rujab Sekda, dan Kantor Satpol PP	1 x kegiatan tanggal 31 x 24 Jam	-	-	5 Pos Piket	Jumlah personil. 62 anggota al. 15 danru, 30 anggota piket, 4 anggota patwal dan 13 anggota pengawas/pengontrol
----	--	---	----------------------------------	---	---	-------------	---

D. Bidang Sumber Daya Aparatur (SDA)

Dalam Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran SKPD (DPPA) Satpol PP Tahun Anggaran 2024 urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sub kegiatan khusus bidang SDA dengan alokasi dana untuk belanja Rp. 131.000.000.- Kegiatan Kapasitas SDM Satpol PP dan Satlinmas termaksud dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

No	Uraian Program/Kegiatan	Pagu Anggaran Rp.	Realisasi Keuangan Rp	Realisasi Fisik %	Sisa
1	2	3	4	5	6
1	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas SDM dan Pelatihan Kesamaptaan	56.000.000	53.399.800 (95.35 %)	100	2.600.200
2	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	75.000.000	-	-	-
	Total Pengeluaran s/d September 2024	131.000.000	53.399.800	40.76	77.600.200

E. Bidang Linmas

Program/Kegiatan

Dalam Tahun Anggaran 2024 Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 12.000.000.- dengan rincian :

No	Uraian Program/Kegiatan	Pagu Anggaran Rp.	Realisasi Keuangan Rp	Realisasi Fisik %	Sisa
1	2	3	4	5	6
1	Penyusunan dan Pemuktahiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kabakaran	5.000.000	-	-	-
2	Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	2.000.000	-	-	-
3	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Trantibum	5.000.000			
	Total Pengeluaran s/d September 2024	12.000.000	-	-	-

Pemasalahan :

Permasalahan yang dihadapi pada Bidang Linmas adalah :

- Belum efektifnya pelaksanaan program kegiatan Bidang Linmas karena alokasi anggaran yang sangat minim dan tidak menjawab program/kegiatan Tahun Anggaran 2024.
- Belum efektifnya permasalahan bersama tentang pelaksanaan program/kegiatan di kabupaten/kota se Provinsi NTT berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang peyelenggaraan program kegiatan.

Upaya Pemecahan :

- Meningkatkan pemahaman bersama tentang tugas fungsi dan kewenangan Satuan Polisi Pamomg Praja Prov. NTT dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
- Meningkatkan pemahaman dalam penyeragaman bersama tentang program/kegiatan berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang program dan kegiatan.

Berikut data personil pemadam kebakaran dan Linmas pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur :

Data Pemadam Kebakaran Di Provinsi NTT

No.	Nama kabupaten/Kota	JumlahPersonil	Keterangan
1.	Kota Kupang	2.410	Dalam struktur Organisasi Sat. PolPP Kota Kupang tidak terakomodir Bidang Pemadam Kebakaran karena telah ada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Kupang
2.	Kabupaten Kupang	2.152	
3.	Kabupaten TTS	2.758	
4.	Kabupaten TTU	1.548	
5.	Kabupaten Belu	1.550	
6.	Kabupaten Malaka	1.340	
7.	Kabupaten Alor	894	
8.	Kabupaten Rote Ndao	630	
9.	Kabupaten Sabu Raijua	276	
10.	Kabupaten Lembata	1.569	
11.	Kabupaten Flores Timur	1.070	
12.	Kabupaten Sikka	1.010	
13.	Kabupaten Ende	1.966	
14.	Kabupaten Ngada	1.018	
15.	Kabupaten Nagekeo	1.386	
16.	Kabupaten Manggarai	1.940	
17.	Kabupaten Manggarai Timur	1.186	
18.	Kabupaten Manggarai Barat	1.616	
19.	Kabupaten Sumba Timur	516	
20.	Kabupaten Sumba Tengah	810	
21.	Kabupaten Sumba Barat	1.816	
22.	Kabupaten Sumba Barat Daya	864	
TOTAL		31.325	

Data Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Provinsi NTT

No.	Nama kabupaten/Kota	Jumlah			Jumlah	Ket
		Kec	Kel	Desa		
1.	Kota Kupang	6	51	-	51	
2.	Kabupaten Kupang	24	160	171	2.890	
3.	Kabupaten TTS	32	12	266	6.950	
4.	Kabupaten TTU	24	147	33	1.764	
5.	Kabupaten Belu	12	12	69	1.399	
6.	Kabupaten Malaka	12	127	127	1.337	
7.	Kabupaten Alor	18	175	-	1.283	
8.	Kabupaten Rote Ndao	11	7	113	1.725	
9.	Kabupaten Sabu Raijua	5	5	62	2.083	
10.	Kabupaten Lembata	9	7	125	1.872	
11.	Kabupaten Flores Timur	19	-	251	1.569	
12.	Kabupaten Sikka	21	13	151	2.537	
13.	Kabupaten Ende	21	23	255	1.073	
14.	Kabupaten Nagekeo	7	16	97	684	
15.	Kabupaten Ngada	12	206	206	1.236	
16.	Kabupaten Manggarai	11	26	162	5.678	
17.	Kabupaten Manggarai Timur	9	17	159	4.680	
18.	Kabupaten Manggarai Barat	12	5	169	1.386	
19.	Kabupaten Sumba Barat	12	11	131	2.445	
20.	Kabupaten Sumba Barat Daya	5	11	74	1.480	
21.	Kabupaten Sumba Tengah	6	6	65	1.300	
22.	Kabupaten Sumba Timur	22	17	180	2.056	
TOTAL		310	1.081	2.866	47.478	

BAB IV

PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT

A. Permasalahan

Permasalahan yang ditemui dalam pencapaian target kinerja bulan September antara lain :

1. Pelaksanaan capaian kinerja yang terlambat.
2. Ganti Uang (GU) yang terlambat.

B. Tindak Lanjut.

Melakukan konsultasi dan rapat bersama pimpinan serta melakukan pendekatan dengan Badan Keuangan Daerah terkait pencairan anggaran untuk membiayai kegiatan.

BAB V PENUTUP

Laporan kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban hasil pelaksanaan program dan kegiatan bulan Oktober 2024, semoga apa yang telah disampaikan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur kedepan dalam rangka menciptakan ketenteraman dan ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat.

Akhir kata diucapkan terimakasih kepada semua pihak dalam lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sudah membantu dalam penyusunan laporan ini. Saran dan pendapat masih sangat dibutuhkan bagi kesempurnaan dari laporan ini.

Demikian laporan bulan Oktober Tahun 2024 disajikan atas perhatian diucapkan terima kasih.

Kupang, 08 November 2024

Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Nusa Tenggara Timur, 

Drs. PETRUS SERAN TAHUK
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19701231 199101 1 005

LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN APBD PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BULAN OKTOBER 2024

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	SUMBER DANA	LOKASI KEGIATAN	SASARAN	KONDISI s/d BULAN SEBELUMNYA					REALISASI BULAN INI	KONDISI s/d BULAN INI					SISA ANGGARAN (Rp)	
						TARGET		REALISASI				TARGET		REALISASI				
						(%) FISIK	(%) KEU	Rp	(%) FISIK	(%) KEU		(%) FISIK	(%) KEU	Rp	(%) FISIK	(%) KEU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	11.632.976.930				50,00	50,00	8.336.560.321	71,66	71,66	897.575.634	83,28	83,28	9.234.135.955	79,38	79,38		2.398.840.975
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	10.785.945.930				50,00	50,00	7.931.508.140	73,54	73,54	822.911.634	85,45	85,45	8.754.419.774	81,17	81,17		2.051.526.156
	PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	38.000.000				50,00	50,00	24.928.000	65,60	65,60	-	71,14	71,14	24.928.000	65,60	65,60		13.072.000
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	38.000.000	DAU	Kota Kupang	SKPD	50,00	50,00	24.928.000	65,60	65,60	-	71,14	71,14	24.928.000	65,60	65,60		13.072.000
	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	9.505.179.050				50,00	50,00	7.051.548.961	74,19	74,19	740.676.154	87,05	87,05	7.792.225.115	81,98	81,98		1.712.953.935
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.505.179.050	DAU	Kota Kupang	SKPD	50,00	50,00	7.051.548.961	74,19	74,19	740.676.154	87,05	87,05	7.792.225.115	81,98	81,98		1.712.953.935
	ADMINISTRASI KEPENGAWAIAAN PERANGKAT DAERAH	12.000.000	DAU	Kota Kupang	SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.000.000
	- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	12.000.000		Kota Kupang		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.000.000
	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	124.635.000	DAU		SKPD	50,00	50,00	55.445.663	44,49	44,49	2.600.000	53,49	53,49	58.045.663	46,57	46,57		66.589.337
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	DAU	Kota Kupang	SKPD	50,00	50,00	1.159.280	23,19	23,19	-	90,00	90,00	1.159.280	23,19	23,19		3.840.720
	- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.177.000	DAU	Kota Kupang	SKPD	50,00	50,00	17.690.200	70,26	70,26	1.915.000	74,48	74,48	19.605.200	77,87	77,87		5.571.800
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.000.000	DAU	Kota Kupang	SKPD	50,00	50,00	1.750.000	87,50	87,50	-	75,30	75,30	1.750.000	87,50	87,50		250.000
	- Penyediaan Bahan Material	25.000.000	DAU	Kota Kupang	SKPD	50,00	50,00	12.317.007	49,27	49,27	685.000	74,13	74,13	13.002.007	52,01	52,01		11.987.993
	- Fasilitas Kunjungan Tamu	5.000.000	DAU	Kota Kupang	SKPD	50,00	50,00	4.998.000	99,96	99,96	-	90,00	90,00	4.998.000	99,96	99,96		2.000
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	44.458.000	DAU	Kota Kupang	SKPD	50,00	50,00	4.531.176,00	10,19	10,19	-	9,00	9,00	4.531.176,00	10,19	10,19		39.926.824
	- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	18.000.000	DAU	Kota Kupang	SKPD	50,00	50,00	13.000.000	72,22	72,22	-	82,64	82,64	13.000.000	72,22	72,22		5.000.000
	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	997.031.880	DAU		SKPD	50,00	50,00	716.658.171	71,88	71,88	78.714.480	74,39	74,39	795.372.651	79,77	79,77		201.659.229
	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.400.000	DAU	Kota Kupang	SKPD	50,00	50,00	1.400.000	100,00	100,00	-	75,00	75,00	1.400.000	100,00	100,00		-
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.000.000	DAU	Kota Kupang		50,00	50,00	3.646.400	36,46	36,46	865.000	63,00	63,00	4.511.400	45,11	45,11		5.488.600
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	985.631.880	DAU	Kota Kupang	SKPD	50,00	50,00	711.611.771	72,20	72,20	77.849.480	74,51	74,51	789.461.251	80,10	80,10		196.170.629
	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	109.100.000	DAU		SKPD	50,00	50,00	82.927.345	50,00	50,00	921.000	97,53	97,53	83.848.345	76,85	76,85		25.251.655
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	70.000.000	DAU	Kota Kupang	SKPD	50,00	50,00	63.379.845	90,54	90,54	621.000	85,07	85,07	64.000.845	91,43	91,43		5.999.155
	- Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	19.100.000	DAU	Kota Kupang	SKPD	50,00	50,00	7.467.000	39,09	39,09	300.000	88,22	88,22	7.767.000	40,66	40,66		11.333.000
	- Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.000.000	DAU	Kota Kupang		50,00	50,00	12.080.500	60,40	60,40	-	150,00	150,00	12.080.500	60,40	60,40		7.919.500

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	SUMBER DANA	LOKASI KEGIATAN	SASARAN	KONDISI s/d BULAN SEBELUMNYA					REALISASI BULAN INI	KONDISI s/d BULAN INI					SISA ANGGARAN (Rp)
						TARGET		REALISASI				TARGET		REALISASI			
						(%) FISIK	(%) KEU	Rp	(%) FISIK	(%) KEU		(%) FISIK	(%) KEU	Rp	(%) FISIK	(%) KEU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	840.031.000	DAU	Kab/Kota	-	50,00	50,00	405.052.181	48,22	48,22	67.664.000	27,26	27,26	472.716.181	56,27	56,27	367.314.819
	PENANGANAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI	704.965.000	DAU	Kab/Kota	-	50,00	50,00	343.672.181	48,75	48,75	60.924.000	21,85	21,85	404.596.181	57,39	57,39	300.368.819
	- Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	2.500.000	DAU	Kab/Kota		50,00	50,00		-	-	-	100,00	100,00		-	-	2.500.000
	- Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	1.500.000	DAU	Kab/Kota		50,00	50,00		-	-	-	100,00	100,00		-	-	1.500.000
	- Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	63.545.000	DAU	Kab/Kota		50,00	50,00	37.710.000	59,34	59,34	6.680.000	236,05	236,05	44.390.000	69,86	69,86	19.155.000
	- Penyedia Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	75.000.000	DAU	Kab/Kota		50,00	50,00		-	-	11.260.000	100,00	100,00	11.260.000	15,01	15,01	63.740.000
	- Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Keteriban Umum	5.000.000	DAU	Kab/Kota		50,00	50,00		-	-	5.000.000	100,00	100,00	5.000.000	100,00	100,00	
	- Pencegahan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	333.100.000	DAU	Kab/Kota		50,00	50,00	208.595.381	62,62	62,62	27.250.000	72,76	72,76	235.845.381	70,80	70,80	97.254.619
	- Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja Melalui Pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	131.000.000	DAU			50,00	50,00	53.399.800	40,76	40,76	-	100,00	100,00	53.399.800	40,76	40,76	77.600.200
	- Penindakan atas Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	93.320.000	DAU	Kab/Kota		50,00	50,00	43.967.000	47,11	47,11	10.734.000	53,58	53,58	54.701.000	58,62	58,62	38.619.000
	PENEGAKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DAN PERATURAN GUBERNUR	90.000.000	DAU			50,00	50,00	56.380.000	62,64	62,64	6.740.000	100,00	100,00	63.120.000	70,13	70,13	26.880.000
	- Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	5.000.000				50,00	50,00		-	-	3.000.000	100,00	100	3.000.000	60,00	60,00	2.000.000
	- Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	70.000.000				50,00	50,00	48.900.000	69,86	69,86	-	100,00	100,00	48.900.000	69,86	69,86	21.100.000
	- Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	15.000.000	DAU	Kab/Kota		50,00	50,00	7.480.000	49,87	49,87	3.740.000	100,00	100,00	11.220.000	74,80	74,80	3.780.000
	PEMBINAAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) PROVINSI	45.066.000				50,00	50,00	5.000.000	11,09	11,09	-	22,19	22,19	5.000.000	11,09	11,09	40.066.000
	- Pengembangan Kapsitas dan Karier PPNS	45.066.000				50,00	50,00	5.000.000	11,09	11,09	-	22,19	22,19	5.000.000	11,09	11,09	40.066.000

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	SUMBER DANA	LOKASI KEGIATAN	SASARAN	KONDISI s/d BULAN SEBELUMNYA					REALISASI BULAN INI	KONDISI s/d BULAN INI					SISA ANGGARAN (Rp)	
						TARGET		REALISASI				TARGET		REALISASI				
						(%) FISIK	(%) KEU	Rp	(%) FISIK	(%) KEU		(%) FISIK	(%) KEU	Rp	(%) FISIK	(%) KEU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN NON KEBAKARAN	7.000.000	DAU			50,00	50,00	-	-	-	7.000.000	100,00	100,00	7.000.000	100,00	100,00		-
	PENYELENGGARAAN PEMETAAN RAWAN BENCANA KEBAKARAN	7.000.000	DAU			50,00	50,00	-	-	-	7.000.000	100,00	100,00	7.000.000	100,00	100,00		-
	- Penyusunan dan Pemuktahiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	5.000.000	DAU	Kab/Kota		50,00	50,00			-	5.000.000	100,00	100,00	5.000.000	100,00	100,00		-
	- Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	2.000.000	DAU	Kota Kupang		50,00	50,00			-	2.000.000	100,00	100,00	2.000.000	100,00	100,00		-
JUMLAH BELANJA		11.632.976.990				50,00	50,00	8.336.560.321	71,66	71,66	897.575.634	83,28	83,28	9.234.135.955	79,38	79,38		2.398.840.975

ISO
13211:2015

Kupang, 12 November 2024
 Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
 Provinsi Nusa Tenggara Timur

 Dr. PETRUS SARAN TAHUK
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19701231-1991011 005

LAMPIRAN : DOKUMENTASI LAPORAN BULAN OKTOBER 2024



Foto kegiatan Pengaman Demo oleh Aliansi Perjuangan Rakyat
di depan Kantor DPRD Provinsi NTT



Foto kegiatan Apel Kesiapsiagaan Latihan Lapangan Gulbencal Gempa Bumi
dan Tsunami Korem 161/ws



**PENGAMANAN RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DALAM RANGKA PENGUCAPAN SUMPAH JANJI PIMPINAN DPRD PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
MASA JABATAN 2024 - 2029 KUPANG, TANGGAL 11 OKTOBER 2024**



Foto kegiatan Pengamanan Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTT dalam rangka Pengucapan Sumpah Janji Pimpinan DPRD Provinsi NTT



Foto kegiatan Apel Gelar Pasukan Operasi Zebra Turangga TA.2024



Foto kegiatan Evakuasi korba yang terkena gempa



Foto kegiatan Rakor PUG



Foto kegiatan Rapat TL hasil Rakornas Satpol PP dan Satlinmas Tahun 2024 di Jakarta



Foto kegiatan Pengontrolan di Pos-pos jaga



Foto kegiatan Musyawara Daerah Perkumpulan Gereja Masehi Advent ketujuh
METRO NTT



Foto kegiatan Penjagaan di Pos jaga